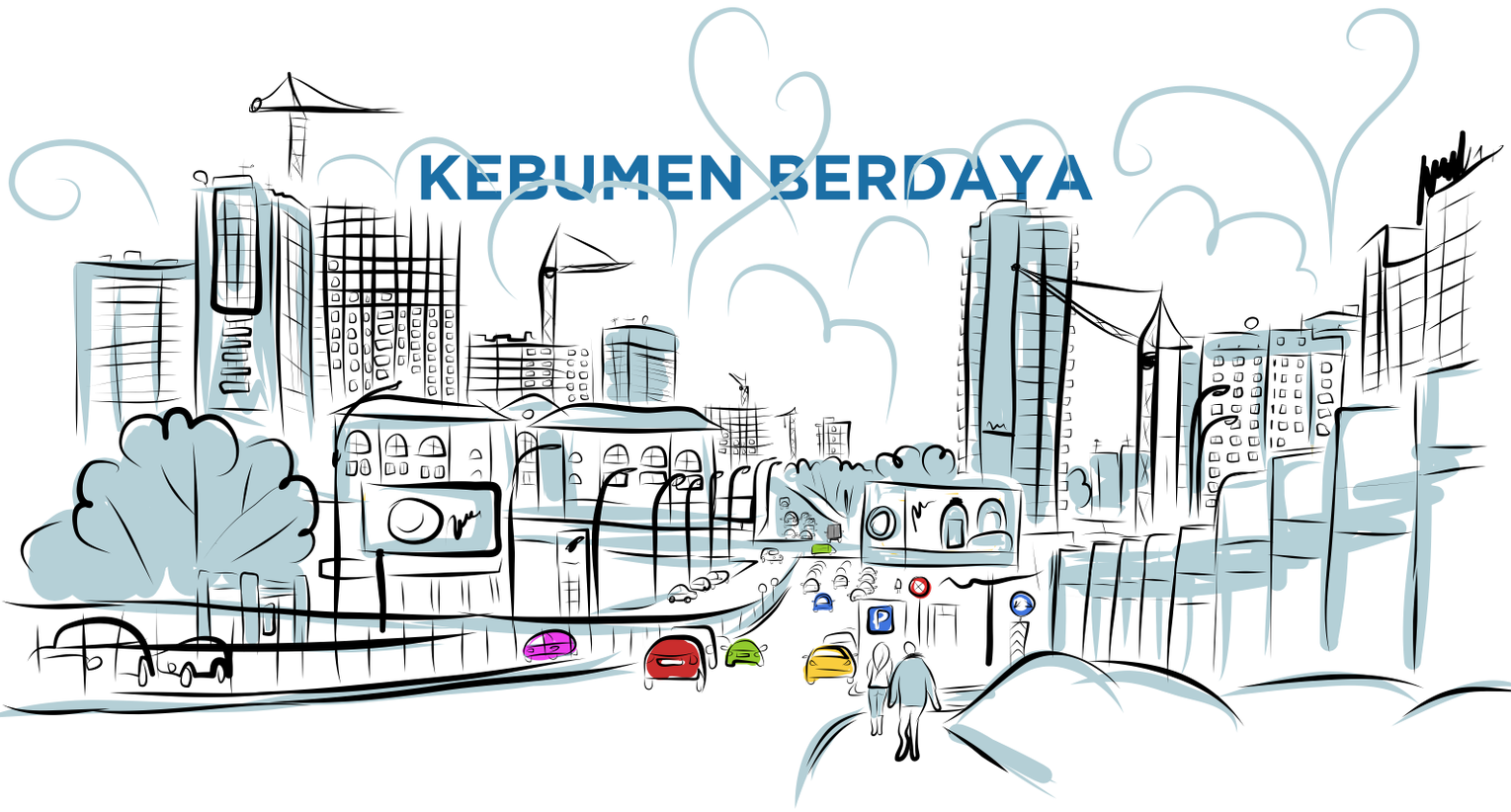
PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN KEBUMEN

2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daeerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program pasangan presiden dan wakil presiden terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan berpedoman padan RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
   a. Visi, Misi dan Program pasangan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta memperhatikan:
   a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
   b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
   c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a. penyusunan RKPD, renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I berisi Pendahuluan;
   b. BAB II berisi Gambaran Umum Daerah;
   c. BAB III berisi Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV berisi Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V berisi Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Penilaian hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati-Wakil Bupati berakhir.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
   a. bencana alam;
   b. goncangan politik;
   c. krisis ekonomi;
   d. konflik sosial;
   e. gangguan keamanan;
   f. pemekaran daerah; atau
   g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-151/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, yang disusun dalam periodisasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif serta penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 227

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	**1**
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	5
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	10
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	15
	1.5 Pengarusutamaan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen	I	16
	1.6 Sistematika Penulisan	I	19
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II**	**1**
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	69
	2.1.3 Aspek Daya Saing	II	97
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	131
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II	170
	2.2.1 Kinerja Keuangan 2020-2024	II	171
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2020-2024	II	207
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	214
	2.2.4 Proyeksi Belanja Tidak Terduga	II	239
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Derah	II	259
	2.3.1 Permasalahan Daerah	II	260
	2.3.2 Isu Strategis	II	286
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi RPJMD Kabupaten Kebumen	III	1
	3.1.2 Misi RPJMD Kabupaten Kebumen	III	3
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	5
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	35
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	36
	3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	83
	3.2.3 Program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2025-2029	III	106
	3.2.4 Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Arahan Nasional dan Provinsi	III	116
	3.2.5 Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen	III	131
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**IV**	**1**
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	88
	4.2.1 Indikator Kinerja Makro	IV	88
	4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	90

	4.2.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV	94
	4.2.4 Indikator Utama Pembangunan (IUP)	IV	125
BAB V	**PENUTUP**	**V**	**1**
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	V	2
	5.3 Pengarusutamaan Pembangunan	V	3
	5.4 Kaidah Pelaksanaan	V	4

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024	II	2
Tabel II.2	Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (MDPL)	II	4
Tabel II.3	Mata Air di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	II	8
Tabel II.4	Unsur Iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II	10
Tabel II.5	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kebumen	II	13
Tabel II.6	Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	15
Tabel II.7	Jumlah Produksi Pertanian Pangan Per Hektar Tahun 2024	II	18
Tabel II.8	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen	II	23
Tabel II.9	Jumlah Sebaran Mata Air dirinci Menurut Kecamatan	II	24
Tabel II.10	Distribusi Potensi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen Tahun 2023	II	27
Tabel II.11	Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	II	29
Tabel II.12	Distribusi Potensi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	II	30
Tabel II.13	Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	II	31
Tabel II.14	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen	II	33
Tabel II.15	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen	II	34
Tabel II.16	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen	II	35
Tabel II.17	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen	II	37
Tabel II.18	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih dan Air Aman Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	40
Tabel II.19	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	44
Tabel II.20	Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	44
Tabel II.21	Persentase Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Kebumen	II	48
Tabel II.22	Persentase Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Kebumen	II	49

Tabel II.23	Persentase Luas Bahaya Karhutla di Kabupaten Kebumen	II	49
Tabel II.24	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS) Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	51
Tabel II.25	Data *Early Warning System* (EWS) di Kabupaten Kebumen	II	52
Tabel II.26	Persentase Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Kebumen	II	55
Tabel II.27	Persentase Luas Bahaya Banjir Tanah Longsor di Kabupaten Kebumen	II	56
Tabel II.28	Persentase Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kebumen	II	57
Tabel II.29	Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kebumen	II	58
Tabel II.30	Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024	II	59
Tabel II.31	Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	61
Tabel II.32	Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	62
Tabel II.33	Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II	63
Tabel II.34	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	64
Tabel II.35	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II	65
Tabel II.36	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II	67
Tabel II.37	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	II	67
Tabel II.38	Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	II	68
Tabel II.39	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	70
Tabel II.40	Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	71
Tabel II.41	Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	72
Tabel II.42	PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	72

Tabel II.43	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	73
Tabel II.44	Indeks Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	74
Tabel II.45	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	75
Tabel II.46	Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	77
Tabel II.47	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	78
Tabel II.48	Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	78
Tabel II.49	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Menurut Kecamatan dan Puskesmas	II	79
Tabel II.50	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas	II	80
Tabel II.51	Jumlah Kasus HIV Menurut Kelompok Umur	II	80
Tabel II.52	Pelayanan Kesehatan Penderita DBD Menurut Kecamatan Dan Puskesmas	II	81
Tabel II.53	Perkembangan Kasus *Tuberculosis* Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	82
Tabel II.54	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	85
Tabel II.55	Angka Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	87
Tabel II.56	Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	88
Tabel II.57	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	91
Tabel II.58	Perkembangan Pembangunan Gender Kabupaten Kabumen Tahun 2020-2024	II	96
Tabel II.59	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	98
Tabel II.60	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kategori Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	99
Tabel II.61	Jumlah Tamu Wisatawan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	100

Tabel II.62	Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023	II	100
Tabel II.63	Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024	II	107
Tabel II.64	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 2020-2024 (%)	II	110
Tabel II.65	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	112
Tabel II.66	Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	112
Tabel II.67	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kebumen 2020-2024 (%)	II	113
Tabel II.68	Indeks Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	116
Tabel II.69	Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	117
Tabel II.70	Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024	II	120
Tabel II.71	BUMDESMA Kawasan Perdesaan	II	121
Tabel II.72	Pemeringkatan BUM Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	122
Tabel II.73	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024	II	124
Tabel II.74	Distribusi Persentase PDRB menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	126
Tabel II.75	Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Desember 2024	II	127
Tabel II.76	Kondisi Likuiditas Perbankan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	130
Tabel II.77	Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	133
Tabel II.78	Pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	135
Tabel II.79	Indeks Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	136
Tabel II.80	Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	137
Tabel II.81	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	137
Tabel II.82	Jumlah Kejadian Konflik SARA dan Partisipasi Warga dalam Pemilu Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	138

Tabel II.83	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	153
Tabel II.84	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	166
Tabel II.85	Skala Interval Otonomi Fiskal	II	172
Tabel II.86	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	173
Tabel II.87	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	175
Tabel II.88	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	184
Tabel II.89	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	192
Tabel II.90	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	196
Tabel II.91	Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	203
Tabel II.92	Analisis Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	204
Tabel II.93	Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	205
Tabel II.94	Analisis Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	206
Tabel II.95	Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	207
Tabel II.96	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten kebumen Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	208
Tabel II.97	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	210
Tabel II.98	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	211
Tabel II.99	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	212
Tabel II.100	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024 (dalam Juta)	II	213
Tabel II.101	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (Rupiah)	II	229
Tabel II.102	Proyeksi Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	II	231

Tabel II.103	Proyeksi Perhitungan Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	II	236
Tabel II.104	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (Rupiah)	II	241
Tabel II.105	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (Juta Rupiah)	II	246
Tabel II.106	Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II	247
Tabel II.107	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	II	250
Tabel II.108	Asumsi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	II	254
Tabel II.109	Asumsi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	II	256
Tabel II.110	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II	261
Tabel II.111	Keterkaitan Permasalahan Pokok dan Permasalahan Per Urusan	II	284
Tabel II.112	Pembagian PKW, PKL, PPK, PPL pada tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen	II	308
Tabel II.113	Indikasi Program Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	II	313
Tabel II.114	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen	II	318
Tabel II.115	Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi	II	321
Tabel III.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	III	9
Tabel III.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	III	14
Tabel III.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	III	19
Tabel III.4	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	III	37
Tabel III.5	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	III	84
Tabel III.6	Keterkaitan Program Unggulan KDH Kabupaten Kebumen dengan Program Prioritas RPJMD	III	107
Tabel III.7	Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional	III	118

Tabel III.8	Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	III	121
Tabel IV.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030	IV	2
Tabel IV.2	Keterkaitan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030	IV	58
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030	IV	89
Tabel IV.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030	IV	91
Tabel IV.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tahun 2025-2030	IV	95
Tabel IV.6	Pemetaan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen	IV	125
Tabel IV.7	Penetapan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen	IV	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	11
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	II	3
Gambar II.2	Peta Topografi Kabupaten Kebumen	II	5
Gambar II.3	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen	II	10
Gambar II.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen	II	11
Gambar II.5	Peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Kebumen	II	20
Gambar II.6	Peta Delineasi Geopark	II	22
Gambar II.7	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen	II	23
Gambar II.8	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen	II	26
Gambar II.9	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen	II	28
Gambar II.10	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen	II	31
Gambar II.11	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen	II	33
Gambar II.12	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen	II	34
Gambar II.13	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen	II	36
Gambar II.14	Persentase Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen	II	37
Gambar II.15	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	38
Gambar II.16	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	41
Gambar II.17	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	42
Gambar II.18	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	45
Gambar II.19	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kebumen	II	46
Gambar II.20	Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen	II	47
Gambar II.21	Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Kebumen	II	48
Gambar II.22	Peta Bahaya Karhutla Kabupaten Kebumen	II	50
Gambar II.23	Peta Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Kebumen	II	55
Gambar II.24	Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen	II	56

Gambar II.25	Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen	II	57
Gambar II.26	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	59
Gambar II.27	Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	II	65
Gambar II.28	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	70
Gambar II.29	Angka Kemiskinan (%) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	71
Gambar II.30	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	72
Gambar II.31	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	73
Gambar II.32	Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	74
Gambar II.33	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	75
Gambar II.34	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (%)	II	76
Gambar II.35	Indeks Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	76
Gambar II.36	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Tahun 2020-2024	II	83
Gambar II.37	Angka Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	84
Gambar II.38	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	85
Gambar II.39	Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	86
Gambar II.40	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024	II	89
Gambar II.41	Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024	II	93
Gambar II.42	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kebumen 2020-2023	II	94
Gambar II.43	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	95
Gambar II.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	97
Gambar II.45	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023	II	101

Gambar II.46	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	102
Gambar II.47	Volume Usaha Koperasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	102
Gambar II.48	Tingkat *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	103
Gambar II.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	104
Gambar II.50	Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2022-2024	II	105
Gambar II.51	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024	II	106
Gambar II.52	Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	106
Gambar II.53	Realisasi Investasi (Miliar Rp.) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	115
Gambar II.54	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Ha)	II	118
Gambar II.55	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024	II	118
Gambar II.56	Inflasi Tahunan Tahun 2020-2024	II	128
Gambar II.57	Laju Implisit PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	128
Gambar II.58	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	II	132
Gambar II.59	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024	II	133
Gambar II.60	Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024	II	139
Gambar II.61	Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Pilar Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II	140
Gambar II.62	Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2024	II	141
Gambar II.63	Grafik Skor Pilar Pasar Produk Tahun 2024	II	142
Gambar II.64	Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan Tahun 2024	II	142
Gambar II.65	Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar Tahun 2024	II	144
Gambar II.66	Grafik Skor Pilar Kesehatan Tahun 2024	II	145
Gambar II.67	Grafik Skor Pilar Keterampilan Tahun 2024	II	145
Gambar II.68	Grafik Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja Tahun 2024	II	147
Gambar II.69	Grafik Skor Pilar Infrastruktur Tahun 2024	II	148
Gambar II.70	Grafik Skor Pilar Adopsi TIK Tahun 2024	II	149
Gambar II.71	Grafik Skor Pilar Institusi Tahun 2024	II	150
Gambar II.72	Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis Tahun 2024	II	151

Gambar II.73	Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi Tahun 2024	II	152
Gambar II.74	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 (persen)	II	177
Gambar II.75	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024	II	179
Gambar II.76	Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	180
Gambar II.77	Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	181
Gambar II.78	Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	182
Gambar II.79	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024	II	186
Gambar II.80	Realisasi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	187
Gambar II.81	Proporsi Struktur Belanja Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	188
Gambar II.82	Realisasi Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	190
Gambar II.83	Permasalahan Daerah Kabupaten Kebumen	II	270
Gambar II.84	IPM Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024	II	271
Gambar II.85	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kebumen Dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023	II	273
Gambar II.86	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II	273
Gambar II.87	Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024	II	274
Gambar II.88	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Kabupaten Kebumen dan Sekitar Kebumen Tahun 2023	II	276
Gambar II.89	Isu Global	II	286
Gambar II.90	Isu Strategis Nasional	II	288
Gambar II.91	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	II	296
Gambar II.92	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen	II	306
Gambar II.93	Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kebumen	II	307
Gambar II.94	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	II	311

Gambar II.95	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen	II	316
Gambar II.96	Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kebumen	II	320
Gambar III.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah, dan Nasional Tahun 2025-2030	III	5
Gambar III.2	Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	III	6
Gambar III.3	Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	III	36
Gambar III.4	Pengembangan Kewilayahan di Jawa Tengah pada RPJMN 2025-2029	III	117

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kebumen yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan sejarah awal mula berdirinya tidak terlepas dari sejarah Mataram Islam. Berdasarkan penelusuran penelitian dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018, hari jadi Kebumen ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 1629. Hal ini didasarkan pada peristiwa bersejarah Mataram membawa pengaruh terhadap terbentuknya Nama Kebumen konon berasal dari kabumian yang berarti sebagai tempat tinggal Kyai Bumi setelah dijadikan daerah pelarian Pangeran Bumidirja atau Pangeran Mangkubumi dari Mataram pada 26 Juni 1677, saat berkuasanya Sunan Amangkurat I. Artinya berdirinya Kabupaten Kebumen berkaitan dengan peran Ki Bodronolo dalam membantu Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda di Batavia.

Nama Kebumen merupakan nama baru dari Kabupaten Panjer yang artinya tonggak yang menjelaskan tentang awal mula pembentukan Kebumen. Kebumen sendiri berasal dari sebuah tumbukan lempeng bumi yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Samudera Hindia pada 117-60 juta tahun yang lalu. Tumbukan lempeng ini membentuk daerah di Kabupaten Kebumen yang awalnya lautan menjadi daerah yang saat ini dinamakan Kebumen. Salah satu buktinya adalah adanya daerah Luk Ulo, sebuah sungai di Kabupaten Kebumen yang jalurnya dimulai dari kawasan Karangsambung dengan muara di Samudera Hindia. Potensi geologis ini menjadi salah satu daya tarik keunikan daerah, yaitu adanya fenomena Karangsambung sebagai bagian dari kawasan *Geopark* Kebumen yang diakui UNESCO karena nilai geologisnya yang luar biasa sebagai situs pendidikan dan penelitian. Potensi geologi berupa batuan karst dan sumber daya alam lainnya juga menjadi aset penting untuk pembangunan di daerah. Kabupaten Kebumen memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan wilayah yang terdiri dari dataran rendah dan pantai di bagian selatan serta pegunungan di bagian utara. Karakter ini menjadikan Kebumen memiliki keanekaragaman ekosistem dan keindahan alam yang khas.

Kabupaten Kebumen, memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan alamnya, termasuk potensi pertanian, pariwisata, dan sumber daya mineral. Pertanian menjadi salah satu sektor utama dengan komoditas unggulan seperti padi, kelapa, dan hortikultura, yang didukung oleh kondisi tanah yang subur. Selain itu, Kebumen sebagai bumi "tua" tentu memiliki kekayaan akan budaya dan cagar budaya, termasuk kesenian tradisional yang menjadi bagian penting dari jati diri Kebumen. Memahami hal itu, Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, seperti Pantai Menganti, Goa Jatijajar, dan Benteng *Van Der Wijck*, yang menawarkan keindahan alam dan warisan sejarah.

Dengan budaya lokal yang masih terjaga dengan baik menjadi ciri khas masyarakat Kebumen seperti tradisi seni Cepetan, Ingkung Suran, dan kerajinan batik khas Kebumen. Dengan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dengan keanekaragamannya, sangat tepat jika Kebumen disebut dengan "Kota Seribu Pesona" karena memiliki potensi keindahan wisata pantai, hutan, geologi, goa, dan potensi alam lainnya. Kemudian adanya semangat dan geliat Desa dalam membangun obyek wisata mandiri berbasis masyarakat memberikan secercah harapan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong adanya perilaku sadar wisata.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Kebumen dikenal ramah, religius, dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Kabupaten Kebumen dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki karakter agamis yang kuat, yang tercermin dari banyaknya pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberadaan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam tradisional, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter, moralitas, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Tradisi keagamaan yang kental, kegiatan keislaman yang aktif, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan menjadikan Kebumen sebagai daerah dengan identitas religius yang kuat, yang turut memperkuat harmoni sosial dan fondasi etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Keunikan Kabupaten Kebumen terletak pada perpaduan antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarahnya yang kaya. Selain itu, kuliner khas seperti lanting, sate ambal, dan nasi penggel menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kombinasi antara potensi alam, budaya,

dan keberagaman yang harmonis menjadikan Kebumen sebagai daerah yang tidak hanya layak untuk dikunjungi, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk investasi dan pengembangan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal pembangunan, yang memegang peranan krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Melalui perencanaan yang matang dan terarah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi dan program yang tepat sasaran. Perencanaan yang baik juga memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, koordinasi yang efektif antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi landasan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Dengan dilantiknya Hj. Lilis Nuryani sebagai Bupati dan H. Zaeni Miftah sebagai wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025, maka pembangunan Kabupaten Kebumen periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana ketentuan Pasal 70 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Kebumen harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Periodisasi RPJMD Kabupaten Kebumen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 ayat 10 (sepuluh) di mana kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional, dan kinerja pemerintahan kepala daerah mengikuti periode yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa target kinerja pemerintahan kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 adalah 2026-2030.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting karena dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen ini memuat strategi, kebijakan, dan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan adanya RPJMD yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu *Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-bawah dan bawah-atas, Holistik-tematik, Integratif, Spasial.* Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

RPJMD ini akan menjadi panduan strategis yang memuat visi, misi, dan program-program prioritas kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kebumen. Dengan perencanaan yang matang, RPJMD akan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat dan desa. RPJMD yang komprehensif dan partisipatif akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

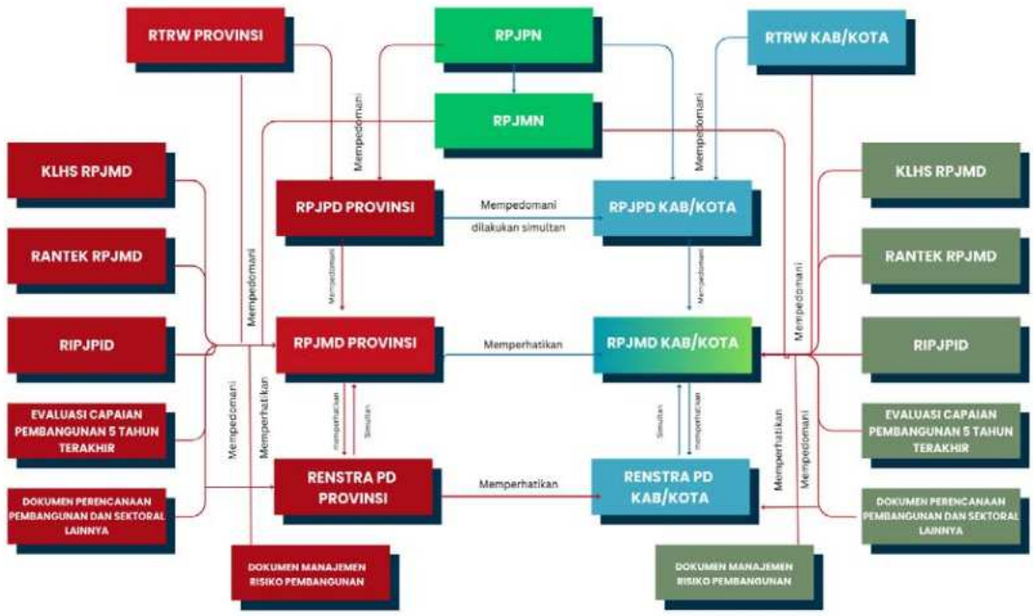
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 175);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 208);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan Kabupaten Kebumen membentuk sistem hierarkis yang saling terkait, dimulai dari RPJPD yang menetapkan visi jangka panjang 20 tahun, menjadi landasan bagi RPJMD yang memuat strategi 5 tahunan kepala daerah terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RTRW berperan sebagai dokumen pendukung yang memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesesuaian tata ruang, sehingga semua dokumen ini saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, 2025

Gambar I.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan gambar di atas, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 terletak pada keselarasan visi, misi, dan prioritas pembangunan. RPJMD Kabupaten Kebumen dirancang untuk mendukung dan mengimplementasikan program nasional di tingkat daerah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan lokal. Fokus utama RPJMN, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan transformasi ekonomi, diadaptasi ke dalam konteks lokal Kebumen, mengingat potensi dan tantangan di Kabupaten Kebumen. Melalui sinergi ini, RPJMD diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong akselerasi pembangunan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Kabupaten Kebumen.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kebumen dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan yang erat dan hierarkis. RPJMD Kabupaten Kebumen harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan penjabaran dari RPJMN. RPJMD Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan strategis di tingkat provinsi, yang kemudian menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD masing-masing. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Kebumen harus mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan program provinsi yang relevan dengan kondisi dan potensi daerah, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan provinsi secara keseluruhan.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. RPJPD, sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Sementara itu, RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang merinci strategi, kebijakan, dan program pembangunan untuk 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJPD. Dengan kata lain, RPJMD menjadi tahapan konkret dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan daerah selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Kebumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. RTRW berfungsi sebagai landasan spasial yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, sementara RPJMD menjabarkan program pembangunan dalam periode 5 tahun yang harus selaras dengan arahan tata ruang tersebut. RPJMD harus memastikan bahwa setiap program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, atau pengelolaan kawasan lindung, sesuai dengan

zonasi dan arahan pengembangan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Dengan demikian, sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terhindar dari konflik pemanfaatan ruang.

e. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. RPJMD merupakan dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah selama lima tahun, sementara Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang lebih spesifik dan operasional, yang menjabarkan bagaimana setiap perangkat daerah akan berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan RPJMD, memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029.

f. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kebumen

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Kebumen bersifat hierarkis dan saling melengkapi. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah selama lima tahun, sedangkan RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMD, sehingga setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen untuk mewujudkan visi dan misi yang telah digariskan dalam RPJMD secara bertahap setiap tahunnya.

g. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 dan KLHS

RPJMD Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. KLHS RPJMD berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS RPJMD mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan, serta memberikan rekomendasi mitigasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan demikian, KLHS RPJMD memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

h. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

RPJMD memiliki hubungan strategis dengan RIPJPID Kabupaten Kebumen. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berfungsi sebagai panduan operasional pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, termasuk di bidang IPTEK. RIPJPID, sebagai dokumen yang lebih spesifik dan berjangka panjang, memberikan arah dan kerangka strategis untuk mengintegrasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD memastikan implementasi RIPJPID terintegrasi ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, mendukung peningkatan inovasi, daya saing daerah, serta keberlanjutan pembangunan berbasis IPTEK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sinergi antara kedua dokumen ini memastikan bahwa IPTEK menjadi penggerak utama dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen yang berkelanjutan dan berdaya saing.

i. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

RPJMD Kabupaten Kebumen memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan sektoral, yang mencakup Renstra perangkat daerah serta rencana teknis lainnya yang lebih spesifik. Sebagai dokumen perencanaan makro, RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. Dokumen perencanaan sektoral

berperan untuk merinci dan menerjemahkan kebijakan strategis RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang lebih terukur dan operasional di masing-masing sektor. Hubungan ini bersifat sinergis, di mana dokumen sektoral memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di setiap sektor selaras dengan prioritas dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, integrasi antara RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral menjamin konsistensi dan efektivitas pembangunan Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

j. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJM Desa

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan strategis Desa untuk jangka waktu delapan tahun yang secara normatif harus disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kabupaten. Seiring dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, maka sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Kepala Desa di wilayah Kebumen wajib melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap RPJM Desa agar sejalan dengan visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah. Proses perubahan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang partisipatif dan berbasis kewenangan lokal Desa, guna memastikan sinergi antara perencanaan di tingkat desa dan kabupaten. Dengan demikian, terwujudnya keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kebumen dan RPJM Desa menjadi dasar penting dalam memperkuat integrasi pembangunan, efisiensi penganggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah desa di Kabupaten Kebumen.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan penjabaran visi-misi dan program unggulan kepala daerah terpilih ke dalam strategi dan program pembangunan yang terukur. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang terukur dan realistis.

2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan.
3. Menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi antar sektor pembangunan, memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menyediakan panduan yang jelas dan terarah untuk pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan menetapkan prioritas dan target yang ingin dicapai.
5. Memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
7. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

1.5 Pengarusutamaan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen, pengarusutamaan menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan arah kebijakan pembangunan berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pengarusutamaan tersebut mencakup seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak anak, pemenuhan hak penyandang disabilitas, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan budaya dan kearifan lokal, serta sinergi pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Beberapa poin pengarusutamaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Hak Anak

Pengarusutamaan gender dan hak anak dalam RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan, serta memenuhi hak-hak dasar anak. PUG menekankan pentingnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam setiap tahapan pembangunan. Sementara itu, integrasi hak anak mencakup perlindungan anak dari kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penciptaan lingkungan yang ramah anak. Keduanya harus tercermin dalam perencanaan melalui

data terpilah, analisis gender dan anak, serta indikator keberhasilan yang spesifik.

b. Pengarusutamaan inklusi Sosial/Hak Penyandang Disabilitas

Pengarusutamaan inklusi sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas, menjadi prinsip dasar dalam pembangunan yang berkeadilan. Dalam RPJMD, hal ini berarti memastikan bahwa setiap program daerah dirancang agar aksesibel secara fisik, sosial, dan kelembagaan bagi kelompok rentan, termasuk disabilitas. Pengarusutamaan hak disabilitas mencakup jaminan partisipasi aktif dalam perencanaan, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, dan penyediaan layanan dasar yang adaptif.

c. Pengarusutamaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

RPJMD harus menjamin bahwa seluruh agenda pembangunan tidak merusak lingkungan dan justru memperkuat daya dukung serta daya tampung ekosistem. Pengarusutamaan lingkungan hidup dilakukan melalui integrasi hasil dari KLHS RPJMD, pelestarian sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut bahwa kebutuhan saat ini dipenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

d. Pengarusutamaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

RPJMD harus memuat kebijakan dan strategi konkret yang fokus pada penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan terpadu. Pengarusutamaan ini mencakup penyediaan data kemiskinan yang akurat, perencanaan berbasis bukti, integrasi program lintas sektor, serta keberpihakan anggaran terhadap kelompok miskin dan rentan. Selain itu, perencanaan harus mencerminkan pendekatan multidimensional dalam mengatasi kemiskinan, tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan inklusi sosial.

e. Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal

Pembangunan yang berkelanjutan dan berakar kuat pada masyarakat harus mempertimbangkan budaya serta kearifan lokal. Dalam RPJMD, pengarusutamaan ini berarti menggali, menghargai, dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam perencanaan dan implementasi program. Sehingga Budaya tidak hanya menjadi

identitas, tetapi juga aset sosial dan ekonomi yang dapat mendorong kreativitas, kohesi sosial, dan pariwisata berbasis komunitas. Kearifan lokal juga menjadi fondasi dalam pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang partisipatif dan berkelanjutan.

f. Pengarusutamaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan desa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam RPJMD, pengarusutamaan pembangunan desa mencakup integrasi arah kebijakan RPJM Desa ke dalam RPJMD, sinergi program dan kegiatan lintas wilayah, serta penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa. Pendekatan ini penting untuk memastikan percepatan pembangunan dari pinggiran, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan mewujudkan kemandirian desa sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

g. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam RPJMD, pengarusutamaan transformasi digital mencakup integrasi pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap urusan pemerintahan, sinergi antar sistem digital lintas sektor dan wilayah, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Pendekatan ini penting untuk memastikan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi dan efisiensi berbasis digital.

h. Pengarusutamaan IPTEK

IPTEK memegang peran strategis dan fundamental dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Tanpa IPTEK, pembangunan akan berjalan lambat, tidak efisien, dan kurang inovatif. Dalam RPJMD, pengarusutamaan IPTEK menjadi penting sebagai upaya untuk menjadikan IPTEK bagian utama dan menyeluruh dalam setiap proses pembangunan di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertanian, lingkungan, pemerintahan, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam menciptakan solusi baru atas berbagai permasalahan daerah, meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menjadi salah satu dasar dalam membuat keputusan dan kebijakan yang berbasis pada bukti *(evidence-based policy)*.

1.6 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Kebumen secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi arahan transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, pedoman implementasi RPJMD 2025-2029 dijelaskan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Kebumen secara menyeluruh sebagai landasan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait, mulai dari kondisi geografi dan demografi, tingkat kesejahteraan masyarakat, potensi daya saing daerah, hingga capaian pelayanan umum. Kabupaten Kebumen sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal memiliki kekayaan alam dan budaya, dengan bentang alam yang meliputi pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir pantai selatan. Selain terkenal sebagai daerah penghasil batu gamping dan gula kelapa, Kebumen juga dikenal luas berkat destinasi wisata alamnya, seperti Pantai Menganti dan Goa Jatijajar, yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun nasional.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi mencakup letak serta kondisi geografis Kabupaten Kebumen, potensi-potensi sumber daya alam yang ada, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi ketahanan energi, air, dan pangan sebagai faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Kualitas lingkungan hidup serta tingkat resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim turut menjadi perhatian, mengingat letak geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki kerentanan terhadap berbagai risiko alam. Seluruh informasi ini menjadi landasan penting untuk memahami karakteristik wilayah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas.

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Kabupaten ini memiliki karakteristik yang unik, ditandai dengan perpaduan bentang alam berupa dataran rendah, hingga pesisir pantai, serta potensi sumber daya alam yang melimpah,

khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Luas wilayah Kabupaten Kebumen kurang lebih 1.334,09 km^2, terletak di antara 109°33’ sampai 109°50’ Bujur Timur dan antara 7°27’ sampai 7°50’ Lintang Selatan, serta memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km mulai dari Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Ayah. Jarak Kabupaten Kebumen ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) kurang lebih 170 km, sedangkan jarak ke Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo kurang lebih 60 km dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap kurang lebih 88 km relatif lebih dekat, sehingga menjadikan Kebumen memiliki posisi strategis dalam pengembangan investasi dan aktivitas ekonomi regional.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kebumen meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pembagian wilayah administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan, dengan total 1.953 Rukun Warga (RW) dan 7.288 Rukun Tetangga (RT).

Tabel II.1

Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (km^2)
1	Ayah	76,37
2	Buayan	68,42
3	Puring	61,97
4	Petanahan	44,84
5	Klirong	43,25
6	Buluspesantren	48,77
7	Ambal	62,41
8	Mirit	52,35
9	Bonorowo	20,91
10	Prembun	22,96
11	Padureso	28,95
12	Kutowinangun	33,73

No	Kecamatan	Luas (km²)
13	Alian	57,75
14	Poncowarno	27,37
15	Kebumen	42,04
16	Pejagoan	34,58
17	Sruweng	43,68
18	Adimulyo	43,43
19	Kuwarasan	33,84
20	Rowokele	53,80
21	Sempor	100,15
22	Gombong	19,48
23	Karanganyar	31,40
24	Karanggayam	109,29
25	Sadang	54,23
26	Karangsambung	65,15
Kabupaten Kebumen		**1.281,12**

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, 2024

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

2. Topografi

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kebumen cukup bervariasi mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 9-198 mdpl. Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten Kebumen ditunjukkan pada tabel di bawah.

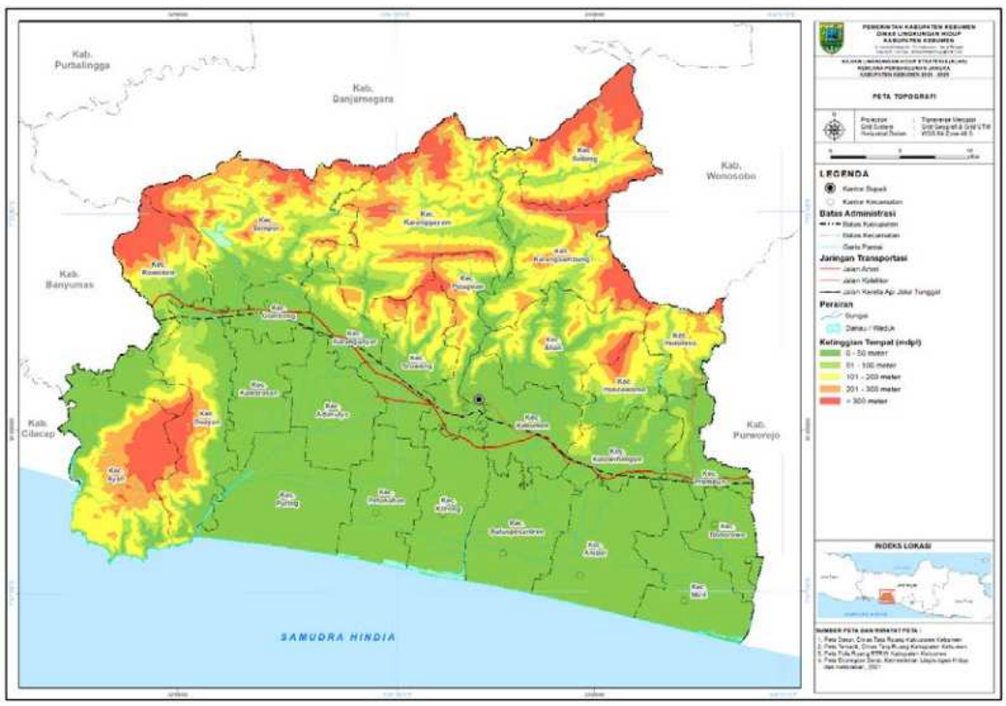
Tabel II.2
Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (MDPL)

No	`Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Ayah	Demangsari	9,00
2	Buayan	Buayan	14,00
3	Puring	Sitiadi	16,00
4	Petanahan	Petanahan	15,00
5	Klirong	Klirong	18,00
6	Buluspesantren	Setrojenar	17,00
7	Ambal	Ambalresmi	17,00
8	Mirit	Mirit	16,00
9	Bonorowo	Bonorowo	11,00
10	Prembun	Prembun	38,00
11	Padureso	Padureso	198,00
12	Kutowinangun	Kutowinangun	18,00
13	Alian	Krakal	37,00
14	Poncowarno	Poncowarno	21,00
15	Kebumen	Kebumen	27,00
16	Pejagoan	Pejagoan	28,00
17	Sruweng	Sruweng	16,00
18	Adimulyo	Adimulyo	11,00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	15,00
20	Rowokele	Rowokele	17,00
21	Sempor	Sempor	29,00
22	Gombong	Gombong	26,00
23	Karanganyar	Karanganyar	20,00
24	Karanggayam	Karanggayam	66,00
25	Sadang	Sadang	117,00
26	Karangsambung	Karangsambung	71,00
Kabupaten Kebumen			29,00

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Wilayah Kabupaten Kebumen dengan karakteristik wilayah berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2 persen seluas 66.953,16 hektare atau 52,26 persen;
2. Kemiringan 2-15 persen seluas 5.944,37 hektare atau 4,64 persen;
3. Kemiringan 15-40 persen seluas 21.919,37 hektare atau 17,11 persen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40 persen seluas 33.294,6 hektare atau 25,99 persen.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, 2024

Gambar II.2
Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Berdasarkan peta topografi Kabupaten Kebumen, kemiringan lereng wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 5 kelas, yaitu agak curam, curam, datar, landai, dan sangat curam. Pada wilayah utara Kabupaten Kebumen berada pada topografi sangat curam, sementara di bagian tengah dan selatan relatif datar dan landai karena merupakan wilayah pesisir.

3. Geologi

Secara geologi, wilayah Kabupaten Kebumen memiliki kondisi geologi yang sangat beragam. Kabupaten Kebumen tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (*Paleosen*) hingga termuda (*Pliosen*) terdiri dari:

1. Kompleks Melange Luk Ulo (KT1) yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra-Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
2. Formasi Karangsambung (Teok) yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping, dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;

3. Formasi Totogan (Tomt) yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping, dan basal (berumur Oligo Miosen);
4. Anggota Tuf Formasi Waturanda (Tmwt) yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan, dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
5. Formasi Waturanda (Tmw) yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal, dan massa dasar batu pasir tuf;
6. Formasi Penosogan (Tmp) yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batulempung, tuf, napal, dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
7. Diabas (Tmd) adalah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
8. Formasi Halang (Tmph) yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal, dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);
9. Formasi Peniron (Tpp) yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
10. Batuan Gunungapi Sumbing Muda (Qsm) yang terdiri atas batu pasir tufan, tuf pasiran, dan breksi andesit;
11. Endapan Pantai (Qac) yang berupa pasir lepas; dan
12. Alluvium (Qa) yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal.

Keragaman stratigrafi ini menunjukkan bahwa Kebumen memiliki catatan geologi yang sangat lengkap dan bernilai tinggi, mencerminkan perjalanan panjang sejarah pembentukan Pulau Jawa. Selain memberikan nilai edukasi dan penelitian, formasi batuan yang ada juga menyimpan potensi bahan galian seperti batu gamping, pasir, kerikil, serta potensi pengembangan geowisata. Kondisi geologi yang beragam ini turut memengaruhi jenis dan kualitas tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Kebumen. Jenis tanah yang dominan meliputi Regosol, Latosol, Grumosol, dan Aluvial.

1. Regosol

   Tanah Regosol banyak terdapat di wilayah pantai selatan, bertekstur kasar hingga berpasir, memiliki tingkat kesuburan yang rendah namun cocok untuk tanaman keras seperti kelapa dan tanaman pantai lainnya.

2. Latosol

   Tanah Latosol tersebar di wilayah perbukitan dan lereng pegunungan bagian utara hingga tengah, memiliki tingkat kesuburan sedang hingga tinggi, cocok untuk tanaman tahunan, palawija, dan hortikultura.

3. Grumosol

   Tanah Grumosol ditemukan di wilayah dataran dan perbukitan dengan tekstur lempung, memiliki sifat mengembang saat basah dan retak saat kemarau, cocok untuk padi gogo, kedelai, jagung, dan tanaman keras.

4. Aluvial

   Tanah Aluvial, yang merupakan tanah muda hasil endapan sungai, tersebar luas di dataran rendah dan sepanjang aliran sungai-sungai besar, memiliki tingkat kesuburan tinggi dan menjadi pusat kegiatan pertanian tanaman pangan utama, khususnya padi sawah.

Dengan kondisi jenis dan kualitas tanah yang beragam tersebut, Kabupaten Kebumen memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kawasan dataran rendah menjadi sentra produksi padi, sedangkan wilayah perbukitan dan lereng pegunungan cocok untuk pengembangan komoditas hortikultura dan perkebunan rakyat seperti kelapa, kopi, dan kakao. Potensi ini didukung oleh ketersediaan air dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kebumen, memperkuat posisi sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Keberagaman geologi dan kualitas tanah inilah yang mempertegas bahwa Kabupaten Kebumen memiliki modal kuat, tidak hanya dalam aspek potensi sumber daya alam tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan, pengembangan pertambangan rakyat, serta peluang besar di sektor pariwisata berbasis geologi dan pendidikan.

4. Hidrologi

Secara hidrologis, sumber daya air di Kabupaten Kebumen berasal dari mata air, sungai, danau/waduk/bendungan, rawa, dan air tanah. DAS Luk Ulo Hulu merupakan salah satu DAS yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Kebumen dialiri oleh banyak sungai, yaitu Sungai Luk Ulo, Kali Cicingguling, Kali Ijo, Kali Karanganyar, Kali Kedungbener, Kali Jatinegara, Kali Wawar, Kali Sidomukti, Kali Kretek, Kali Kenteng, Kali Cacaban, Kali Gebang, Kali Kemit, Kali Rama, Kali Cungka, Kali Buntuk, dan Kali Kedungsomad. Berikut ini merupakan data debit air di masing-masing mata air.

Tabel II.3
Mata Air di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
	Mata air yang mengalir di Kabupaten Kebumen	-	-
1	Jumlah Mata Air	3	-
	1. Buayan	1	6
	2. Pejagoan	1	0
	3. Sruweng	1	0
	4. Ayah	1	5
	5. Rowokele	1	5
	6. Kutowinangun	1	0
	7. Poncowarno	1	0
2	Debit Air (liter/detik)	-	-
	1. Buayan	100	100
	2. Pejagoan	50	0
	3. Sruweng	2	0
	4. Ayah	20	40
	5. Rowokele	10	150
	6. Kutowinangun	2	0
	7. Poncowarno	2	0

Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

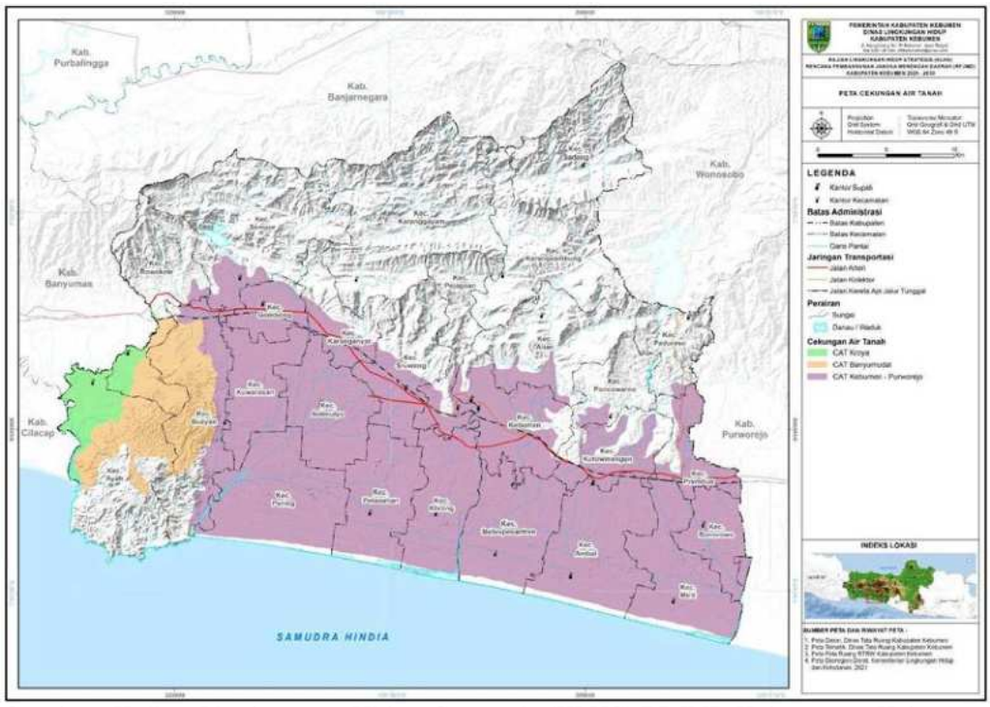
Di Kabupaten Kebumen juga terdapat dua waduk besar, yaitu Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor dan Waduk Wadaslintang dengan kapasitas penyimpanan air 324.087 m^3 yang digunakan sebagai sumber air untuk wilayah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pembagian wilayah sungai, sungai di wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 4 Sub Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu:

1) Sub SWS Telomoyo: 55.613,552 hektare, terdiri atas:
   a) Sub SWS Jladri 1 Pecaron = 5.593,690 hektare;
   b) Sub SWS Jatinegara = 18.589,897 hektare - Sub SWS Kemit = 19.636,080 hektare;
   c) Sub SWS Karanganyar = 11.789,885 hektare, dengan volume tampung air = 1.786.863.425 m^3;
2) Sub SWS Luk Ulo = 67.553,245 hektare, dengan volume tampung air = 2.170.485.700 m^3;
3) Sub SWS Medono (Wawar): 64.984 hektare, dengan volume tampung air = 2.087.935.920 m^3;
4) Sub SWS Ijo: 4.579,583 hektare, dengan volume tampung air = 147.142.002 m^3.

Dengan demikian total aliran sungai di Kabupaten Kebumen adalah ± 6.192.427.107 m^3. SWS ini termasuk dalam wilayah pengelolaan BPSDA Probolo (Progo, Bogowonto, Luk Ulo).

Sungai Luk Ulo merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kebumen yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 596 km^2 dengan panjang sungai utama 62 kilometer dan beberapa anak sungai, yaitu Sungai Jeblog, Gebog, Mondo, Lokidang, dan Loning. Sungai Luk Ulo melintas sepanjang Kabupaten Kebumen yang berhulu di Kabupaten Banjarnegara dan bermuara di pantai selatan Desa Tanggulangin Klirong. Pada musim hujan debit Sungai Luk Ulo meningkat tajam sedangkan pada musim kemarau sangat kecil. Karakteristik Sungai Luk Ulo pada bagian hulu berkelok-kelok membentuk *meander* sehingga banyak mengandung endapan pasir. Daerah tangkapan Sungai Luk Ulo seluas 606 km^2 dengan panjang sungai 62 kilometer yang terbagi menjadi 31 kilometer *upstream* di daerah Karangsambung sampai daerah Kebagoran menuju arah muara di selatan Kebumen.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030, 2025

Gambar II.3
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

5. Klimatologi

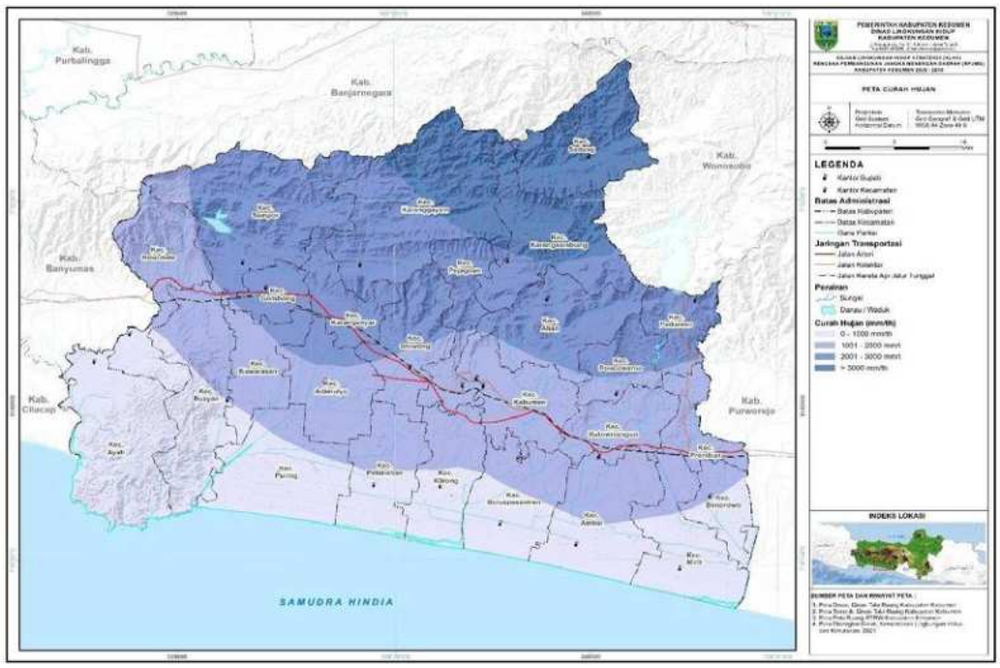
Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Kabupaten Kebumen memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan tinggi, bahkan selama bulan terkering. Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2024 berkisar antara 25,26°C sampai dengan 28,28°C. Untuk kelembaban udara berkisar antara 77 persen sampai dengan 89 persen. Sedangkan jumlah curah hujan tertinggi selama tahun 2024 sebesar 742 milimeter pada bulan Januari. Keadaan unsur iklim di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.4
Unsur Iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Bulan	Suhu Rata-Rata (C)	Kelembaban Rata-Rata (Persen)	Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	27,30	86	3,31	742	22
Februari	26,70	89	4,02	322	17
Maret	27,39	86	3,45	322	22
April	27,54	88	4,52	334	18
Mei	28,28	87	4,10	27	1
Juni	27,11	85	2,93	27	7

Bulan	Suhu Rata-Rata (C)	Kelembaban Rata-Rata (Persen)	Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Juli	26,18	89	3,65	55	4
Agustus	25,26	83	3,95	3	2
September	26,23	77	4,15	30	4
Oktober	27,83	81	3,98	174	10
November	26,51	84	3,74	703	29
Desember	26,85	89	2,85	559	27

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030, 2025

Gambar II.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen

6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri atas badan air dengan luas kurang lebih 1.415 hektare, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 3.820 hektare, kawasan konservasi berupa taman pulau kecil dengan luas kurang lebih 0,5 hektare, kawasan lindung geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dengan luas kurang lebih 5 hektare,

kawasan cagar budaya, serta kawasan ekosistem *mangrove* dengan luas kurang lebih 63 hektare.

Capaian kesesuaian pemanfaatan tanah di atas izin lokasi tahun 2024 sebesar 97,75 persen menunjukkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, namun masih terdapat sisa ±2,25 persen izin yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan. Ketidaksesuaian ini terutama dipicu oleh transisi implementasi RTRW 2024-2044, sinkronisasi RDTR/KKPR yang belum merata, serta kualitas basis data spasial dan kepatuhan perizinan lingkungan yang belum optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan audit spasial seluruh izin 2024, penguatan validasi KKPR terintegrasi OSS-RBA-geoportal pada level bidang, pengaitan ketat dengan PBG/SLF, serta penegakan sanksi dan pemulihan bagi kasus mayor. Target penanganan ditetapkan bertahap, ≤2,0 persen pada 2025, dan ≤1,0 persen pada 2026, disertai publikasi *dashboard* transparansi dan review RDTR tematik agar kebutuhan investasi tetap sejalan dengan perlindungan LP2B, kawasan lindung, dan keselamatan ruang.

Sementara itu, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi yang meliputi kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 13.077 hektare dan kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 665 hektare; kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 23.788 hektare; kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 44.113 hektare (di mana yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 hektare); kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 241 hektare; kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan dan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 94 hektare; kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu gardu induk dengan luas kurang lebih 5 hektare; kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.310 hektare; kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 172 hektare; kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman

perkotaan dengan luas kurang lebih 12.798 hektare, kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 27.605 hektare, serta kawasan pertahanan dan keamanan termasuk daerah latihan TNI AD dengan luas kurang lebih 2.238 hektare.

Tabel II.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kebumen

No	Penggunaan Lahan	Luas (hektare)
A.	Kawasan lindung terdiri atas:	
	1. Badan Air	1.415
	2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung	3.820
	3. Kawasan Konservasi berupa Taman Pulau Kecil	0,5
	4. Kawasan lindung geologi berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.	5
	5. Kawasan Cagar Budaya	
	6. Kawasan Ekosistem Mangrove	63
B.	Kawasan budi daya terdiri atas:	
	1. Kawasan hutan produksi, meliputi:	
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	13.077
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap	665
	2. Kawasan Perkebunan Rakyat	23.788
	3. Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan	44.113 hektare (di mana yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 hektare)
	4. Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya	241
	5. Kawasan pertambangan dan mineral meliputi:	
	a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	94
	b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yaitu Gardu Induk	5
	6. Kawasan Peruntukan Industri	3.310
	7. Kawasan Pariwisata	172
	8. Kawasan permukiman meliputi:	
	a. Kawasan Permukiman Perkotaan	12.798
	b. Kawasan Permukiman Perdesaan	27.605

No	Penggunaan Lahan	Luas (hektare)
	9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan termasuk daerah latihan TNI AD	2.238

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, 2024

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen mendasari RTRW Tahun 2011-2031 untuk kinerja tahun 2020 hingga 2023 dan RTRW Tahun 2024-2044 untuk kinerja Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan ketaatan terhadap RTRW sesuai dengan peruntukannya, yaitu dari 75 persen pada tahun 2020 menjadi 91,35 persen pada tahun 2024. Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 menunjukkan adanya penurunan luasan seluruh kawasan budidaya dari 221.434 hektare menjadi 128.106 hektare. Hal ini menyebabkan rasio luas kawasan produktif terhadap luas seluruh kawasan budidaya berubah dari 85,01 persen menjadi 64,13 persen. Sedangkan luas kawasan industri telah ditentukan pada RTRW Tahun 2024-2044 yaitu sebesar 3.310 hektare atau mencakup 2,58 persen dari luas seluruh kawasan budidaya. Untuk rasio luas kawasan perkotaan terhadap luas seluruh kawasan budidaya juga berubah dari 4,35 persen menjadi 9,99 persen dikarenakan semakin berkembangnya permukiman perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus tumbuh. Untuk itu pengoptimalan peruntukan lahan dapat dioptimalkan dengan tetap melakukan pengendalian agar sesuai dengan peruntukan pada RTRW yang berlaku.

Tabel II.6
Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	RTRW 2011-2031				RTRW 2024-2044
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketaatan terhadap RTRW (Persen)	75	75	91,15	91,25	91,35
2	Luas seluruh kawasan budidaya (penjumlahan dari nomor 3 s.d. 13 dalam hektare), terdiri dari:	221.434	221.434	221.434	221.434	128.106
3	Luas kawasan peruntukan hutan produksi	14.245	14.245	14.245	14.245	13.742
4	Luas kawasan hutan rakyat	30.926	30.926	30.926	30.926	0
5	Luas kawasan perkebunan rakyat	0	0	0	0	23.788
6	Luas kawasan peruntukan pertanian	143.073	143.073	143.073	143.073	44.113
7	Luas kawasan peruntukan perikanan	0	0	0	0	241
8	Luas kawasan peruntukan pertambangan	0	0	0	0	99
9	Luas kawasan peruntukan pariwisata	0	0	0	0	172
10	Luas kawasan peruntukan industri	0	0	0	0	3.310
11	Luas kawasan peruntukan permukiman kota	9.632	9.632	9.632	9.632	12.798
12	Luas kawasan peruntukan permukiman desa	23.558	23.558	23.558	23.558	27.605
13	Luas kawasan pertahanan dan keamanan	0	0	0	0	2.238
14	Rasio luas kawasan produktif (nomor 3 s.d. 9) per luas seluruh kawasan budidaya	85,01 persen	85,01 persen	85,01 persen	85,01 persen	64,13 persen
15	Rasio luas kawasan industri (nomor 10) per luas seluruh kawasan budidaya	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	2,58 persen
16	Rasio luas kawasan perkotaan (nomor 11) per luas seluruh kawasan budidaya	4,35 persen	4,35 persen	4,35 persen	4,35 persen	9,99 persen

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan tabel II.6, pada periode 2020 hingga 2023 tingkat ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 75,00 persen pada tahun 2020-2021 menjadi 91,15 persen di tahun 2022 dan sedikit naik menjadi 91,25 persen di tahun 2023. Luas kawasan budidaya selama periode tersebut relatif konstan pada angka 221.434 hektare, dengan rasio kawasan produktif terhadap seluruh kawasan budidaya tetap berada di kisaran 85,01 persen. Luas peruntukan untuk sektor-sektor utama seperti hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan permukiman juga tidak mengalami perubahan berarti pada periode ini. Peningkatan ketaatan terutama disebabkan oleh semakin ketatnya pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan peran RTRW sebagai acuan perizinan, serta upaya sinkronisasi dengan rencana detail tata ruang (RDTR). Kondisi ini menjadi fondasi kuat untuk transisi menuju penerapan RTRW 2024-2044 yang mulai berlaku pada tahun 2024.

2. Potensi Pertanian

Kabupaten Kebumen yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian sangat menjanjikan. Dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, Kebumen memiliki tanah yang subur dan sistem irigasi yang cukup baik, salah satunya didukung oleh keberadaan Waduk Wadaslintang. Kondisi ini membuat sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Komoditas utama yang dihasilkan dari lahan-lahan pertanian di Kebumen adalah padi. Tidak heran, Kebumen sering disebut sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Selain itu, jagung dan kedelai juga menjadi tanaman andalan, terutama di lahan kering sebagai alternatif di musim kemarau. Komoditas lain yang tidak kalah penting adalah aneka buah-buahan seperti durian, manggis, dan rambutan yang tumbuh subur di wilayah Kebumen. Budidaya kelengkeng juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agrowisata yang menawarkan pengalaman menarik bagi para pengunjung tentang proses budidaya, mulai dari cara menanam, merawat, hingga proses panen.

Di sektor perkebunan, Kebumen memiliki potensi yang cukup beragam. Kelapa tumbuh melimpah di sepanjang pesisir selatan, sementara di daerah pegunungan bagian utara, seperti Sadang dan Karanggayam, tanaman cengkeh dan kopi mulai dikembangkan sebagai komoditas unggulan baru. Bukan hanya itu, Kebumen juga mulai mengembangkan pertanian hortikultura dengan berbagai sayuran segar seperti cabai, tomat, terong, dan buncis.

Selain hasil pertanian, potensi lain yang tak kalah menjanjikan adalah sektor peternakan dan perikanan. Budi daya sapi, kambing, dan ayam cukup berkembang, sementara perikanan darat seperti budi daya ikan lele dan nila semakin diminati. Di pesisir selatan, masyarakat menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan laut yang melimpah, terutama di sekitar Pantai Ayah dan sekitarnya.

Kabupaten Kebumen juga mulai melirik pengembangan agrowisata. Beberapa kebun buah dan kawasan edukasi pertanian mulai dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Dengan sentuhan modernisasi, pengelolaan pertanian organik serta pemasaran digital, masa depan pertanian di Kebumen terbuka lebar untuk terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Tabel II.7
Jumlah Produksi Pertanian Pangan Per Hektare Tahun 2024

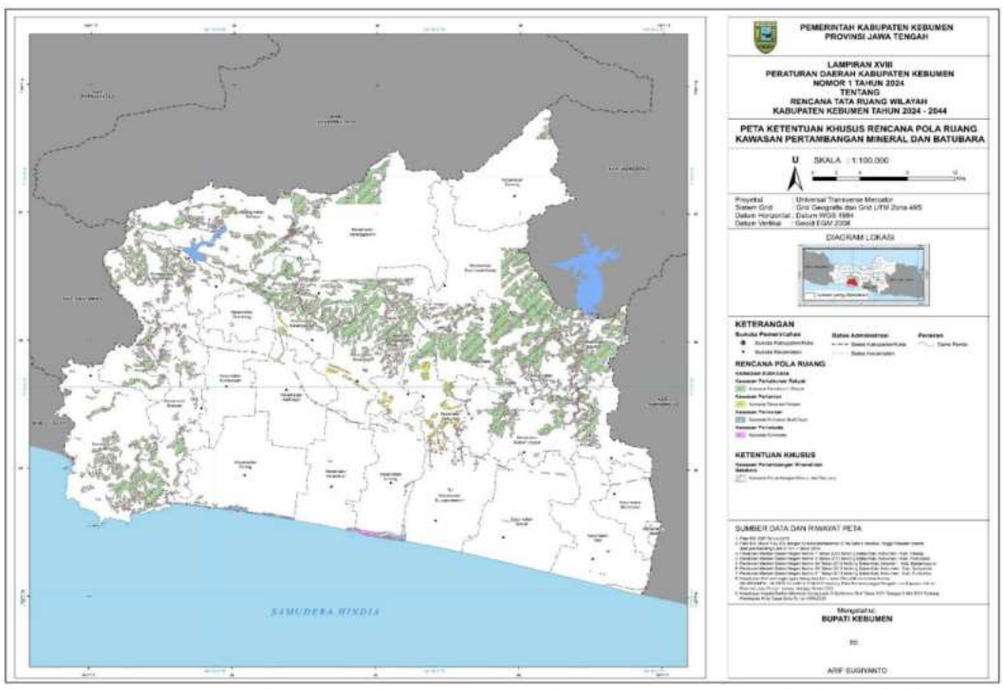
No	Kecamatan	PADI SAWAH			PADI LADANG			PADI			JAGUNG			UBI KAYU		
		Luas Panen sawah (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen bukan sawah (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen bukan sawah (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Ayah	1.613,54	54,46	8.787,16	0,00	0,00	0,00	1.613,54	54,46	8.787,16	1,00	50,64	5,06	0,00	0,00	0,00
2	Buayan	2.232,83	42,40	9.467,55	0,00	0,00	0,00	2.232,83	42,40	9.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Puring	4.248,98	50,34	21.389,08	1.239,00	52,68	6.526,70	5.487,98	50,87	27.915,78	1.027,00	71,79	7.373,26	0,00	0,00	0,00
4	Petanahan	3.838,26	60,09	23.062,44	460,00	51,68	2.377,43	4.298,26	59,19	25.439,87	383,00	47,47	1.818,14	5,00	296,09	148,05
5	Klirong	2.693,14	67,62	18.211,41	500,00	52,68	2.633,86	3.193,14	65,28	20.845,27	395,00	64,20	2.535,85	9,00	266,48	239,83
6	Buluspesantren	3.812,83	58,98	22.488,23	625,00	50,69	3.168,08	4.437,83	57,81	25.656,31	280,00	66,19	1.853,27	14,00	296,09	414,53
7	Ambal	5.209,87	56,17	29.262,29	782,58	51,68	4.044,63	5.992,45	55,58	33.306,92	1.026,00	76,22	7.820,66	64,00	305,96	1.958,16
8	Mirit	3.679,84	59,99	22.073,59	120,00	52,68	632,13	3.799,84	59,75	22.705,71	43,00	64,92	279,17	0,00	0,00	0,00
9	Bonorowo	2.571,88	69,93	17.985,79	0,00	0,00	0,00	2.571,88	69,93	17.985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Prembun	1.867,79	55,97	10.453,29	0,00	0,00	0,00	1.867,79	55,97	10.453,29	5,00	74,78	37,39	3,00	305,96	91,79
11	Padureso	491,88	51,34	2.525,51	0,00	0,00	0,00	491,88	51,34	2.525,51	6,00	61,49	36,89	7,00	296,09	207,26
12	Kutowinangun	2.572,85	56,67	14.580,19	0,00	0,00	0,00	2.572,85	56,67	14.580,19	29,50	0,00	0,00	24,00	266,48	639,56
13	Alian	2.235,09	44,81	10.016,12	0,00	0,00	0,00	2.235,09	44,81	10.016,12	14,00	40,69	56,97	0,00	0,00	0,00
14	Poncowarno	1.348,52	62,80	8.468,51	0,00	0,00	0,00	1.348,52	62,80	8.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kebumen	4.243,27	58,58	24.856,44	0,00	0,00	0,00	4.243,27	58,58	24.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pejagoan	1.334,83	56,47	7.537,58	0,00	0,00	0,00	1.334,83	56,47	7.537,58	13,00	60,58	78,76	90,00	296,09	2.664,83
17	Sruweng	2.587,52	51,75	13.389,38	0,00	0,00	0,00	2.587,52	51,75	13.389,38	2,00	60,58	12,12	69,00	305,96	2.111,14
18	Adimulyo	6.185,22	52,75	32.627,52	0,00	0,00	0,00	6.185,22	52,75	32.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kuwarasan	4.097,40	56,27	23.055,05	0,00	0,00	0,00	4.097,40	56,27	23.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Rowokele	1.781,74	65,31	11.636,63	0,00	0,00	0,00	1.781,74	65,31	11.636,63	17,00	58,77	99,92	10,00	315,83	315,83
21	Sempor	1.999,81	55,06	11.011,31	20,00	49,70	99,39	2.019,81	55,01	11.110,70	134,00	59,32	794,84	291,00	305,96	8.903,50
22	Gombong	1.857,33	58,58	10.879,96	0,00	0,00	0,00	1.857,33	58,58	10.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Karanganyar	1.500,10	63,50	9.525,92	0,00	0,00	0,00	1.500,10	63,50	9.525,92	0,00	0,00	0,00	4,00	296,09	118,44
24	Karanggayam	1.580,29	48,03	7.589,87	0,00	0,00	0,00	1.580,29	48,03	7.589,87	202,00	51,54	1.041,11	268,00	296,09	7.935,28
25	Sadang	1.460,98	67,82	9.908,72	0,00	0,00	0,00	1.460,98	67,82	9.908,72	138,00	51,99	717,49	0,00	0,00	0,00
26	Karangsambung	2.109,31	63,50	13.394,52	0,00	0,00	0,00	2.109,31	63,50	13.394,52	61,00	59,68	364,03	21,00	296,09	621,79
	Jumlah	**69.155,10**	57,00	**394.184,07**	3.746,58	52,00	19.482,22	72.901,68	56,74	413.666,29	3.776,50	66,00	24.924,90	879,00	300,00	26.370,00

No.	Kecamatan	UBI JALAR			KEDELAI			KACANG TANAH			KACANG HIJAU			TOTAL		
		Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Ayah	1,00	151,67	15,17	57,00	15,29	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,54	53,18	8.894,56
2	Buayan	0,00	0,00	0,00	4,00	12,43	4,97	0,00	0,00	0,00	536	11,32	606,89	2.772,83	36,35	10.079,41
3	Puring	11,00	153,67	169,03	0,00	0,00	0,00	305	30,49	930,01	702	11,42	801,94	7.532,98	49,37	37.190,02
4	Petanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216	11,32	244,57	4.902,26	56,40	27.650,62
5	Klirong	13,00	152,67	198,47	0,00	0,00	0,00	15	31,51	47,26	733	11,83	866,99	4.358,14	56,75	24.733,68
6	Buluspesantren	5,00	152,27	76,13	0,00	0,00	0,00	30	32,52	97,57	639	11,73	749,35	5.405,83	53,36	28.847,16
7	Ambal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167	31,51	526,19	0,00	0,00	0,00	7.249,45	60,16	43.611,93
8	Mirit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	31,51	119,73	99	12,13	120,10	3.979,84	58,36	23.224,71
9	Bonorowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,88	69,93	17.985,79
10	Prembun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32,52	3,25	263	11,73	308,42	2.139,79	50,91	10.894,14
11	Padureso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	54,86	2.769,67
12	Kutowinangun	3,00	152,67	45,80	0,00	0,00	0,00	5	31,51	15,75	164	12,13	198,95	2.798,35	55,32	15.480,26
13	Alian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12,13	6,07	2.254,09	44,71	10.079,15
14	Poncowarno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222	12,13	269,31	1.570,52	55,64	8.737,83
15	Kebumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234	11,73	274,41	4.477,27	56,13	25.130,85
16	Pejagoan	3,00	151,67	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	11,42	2,28	1.442,83	71,59	10.328,95
17	Sruweng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383	11,73	449,14	3.041,52	52,48	15.961,78
18	Adimulyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,22	52,75	32.627,52
19	Kuwarasan	0,00	0,00	0,00	74,00	19,12	141,46	0,00	0,00	0,00	1.780,00	11,42	2033,41	5.951,40	42,39	25.229,91
20	Rowokele	0,00	0,00	0,00	70,00	16,25	113,74	20,5	30,49	62,51	54	11,73	63,33	1.953,24	62,93	12.291,95
21	Sempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199	11,63	231,35	2.643,81	79,58	21.040,39
22	Gombong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,33	58,58	10.879,96
23	Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	12,03	40,90	1.538,10	62,97	9.685,26
24	Karanggayam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,29	80,80	16.566,25
25	Sadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,98	66,46	10.626,21
26	Karangsambung	2,00	152,67	30,53	10,00	18,16	18,16	12	31,31	37,57	1,2	11,52	1,38	2.216,51	65,27	14.467,99
	Jumlah	38,00	152,80	580,64	215,00	17,00	365,50	593,50	31,00	1.839,85	6.266,20	11,60	7.268,79	84.669,88	56,10	475.015,97

Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen (data diolah), 2024

3. Potensi Bahan Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen, mengindikasikan tingginya potensi ekonomi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kebumen. Beberapa potensi mineral dan batubara yang berada di Kabupaten Kebumen yakni Andesit Intrusi; Andesit Boulder; Basalt; Breksi; Diabas; Gabro; Batugamping; Kalsit; Dolomit; Zeolit; Bentonit; Kaolin; Lempung/Tanah Liat; Pasir dan Krakal (Sirtu); Pasir Besi; Tras; Mangan; Phospat; Marmer; Talk; Serpentin; Asbes; Emas; Bitumen Padat/Batubara muda; Batu Setengah Mulia; Pasir Kuarsa; Gas Rawa; Tanah Merah, Tanah Urug dan Cadas.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, 2024

Gambar II.5
Peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Kebumen

4. Potensi Geologi Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen tersusun dari batuan Pra-Tersier, batuan tertua di Pulau Jawa berumur lebih dari 119 juta tahun. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen terdapat batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (*Paleosen*) hingga termuda (*Pliosen*). Kompleks Melange Luk Ulo tersusun dari bongkah-bongkah batuan Pra-Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas). Formasi Karangsambung tersusun dari batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping, dan basal (berumur Eosen) serta terdapat pula

batu gamping terumbu yang berupa olistolit. Formasi Totogan tersusun dari breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping, dan basal (berumur Oligo-Miosen). Formasi Waturanda tersusun dari batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal, dan massa dasar batu pasir tuf, serta terdapat anggota tuf yang tersusun dari perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan, dan napal tufaan (berumur Miosen Awal). Formasi Penosogan tersusun dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal, dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah). Diabas ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah). Formasi Halang tersusun dari perselingan batu pasir, batu gamping, napal, dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen). Formasi Peniron tersusun dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf. Endapan Pantai berupa pasir lepas dan Alluvium yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal. Adanya batuan Pra-Tersier yang juga merupakan batuan tertua di Pulau Jawa memberikan potensi ilmiah geologi dan pariwisata. Selain itu, dengan riset eksplorasi yang mendalam, batuan Pra-Tersier kemungkinan memiliki potensi sumber daya logam dan mineral, bahan bangunan (seperti marmer dan granit), sumber daya energi hingga *geothermal*. Tantangan dalam mengeksplorasi potensi batuan pra-tersier adalah diperlukan teknologi yang canggih dan investasi yang sangat besar, dimana eksplorasi juga memerlukan waktu yang cukup lama serta tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga tidak memberikan keuntungan/profit ketika dieksploitasi. Selain aktivitas eksplorasi dan ekstraksi, batuan Pra-Tersier dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, erosi, pencemaran air dan gangguan habitat. Keberadaan batuan tertua di Jawa menjadi warisan geologi bernilai internasional, dan telah diakui oleh Persatuan Ahli Geologi Dunia (IUGS) dalam penilaiannya terhadap dossier/proposal *Geopark* Kebumen ke UNESCO *Global Geopark*.



Sumber: Dossier Geopark Kebumen, 2023

Gambar II.6
Peta Delineasi Geopark

5. Potensi Sumber Air

Wilayah Kabupaten Kebumen memiliki sumber air permukaan dan air tanah. Kabupaten Kebumen memiliki sumber air permukaan dan air tanah, serta terdapat tiga Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Banyumudal, CAT Kebumen Purworejo dan CAT Kroya. Selain itu, wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sungai Ijo, Luk Ulo, Telomoyo dan Wawar. Kondisi hidrologi dan geografi berupa CAT dan DAS memunculkan potensi terjadinya banjir di Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring, Kecamatan Ayah dan Kecamatan Bonorowo. Selain sungai, tanah dengan mata air melimpah berada di 16 kecamatan (Kecamatan Buayan, Pejagoan, Sruweng, Ayah, Rowokele, Kutowinangun, Prembun, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Alian, Padureso, Karangsambung, Sadang, Sempor, dan Poncowarno). Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata air. Potensi air baku terdapat di DAS Wawar, DAS Luk Ulo, DAS Telomoyo, DAS Ijo, dan Mata Air.

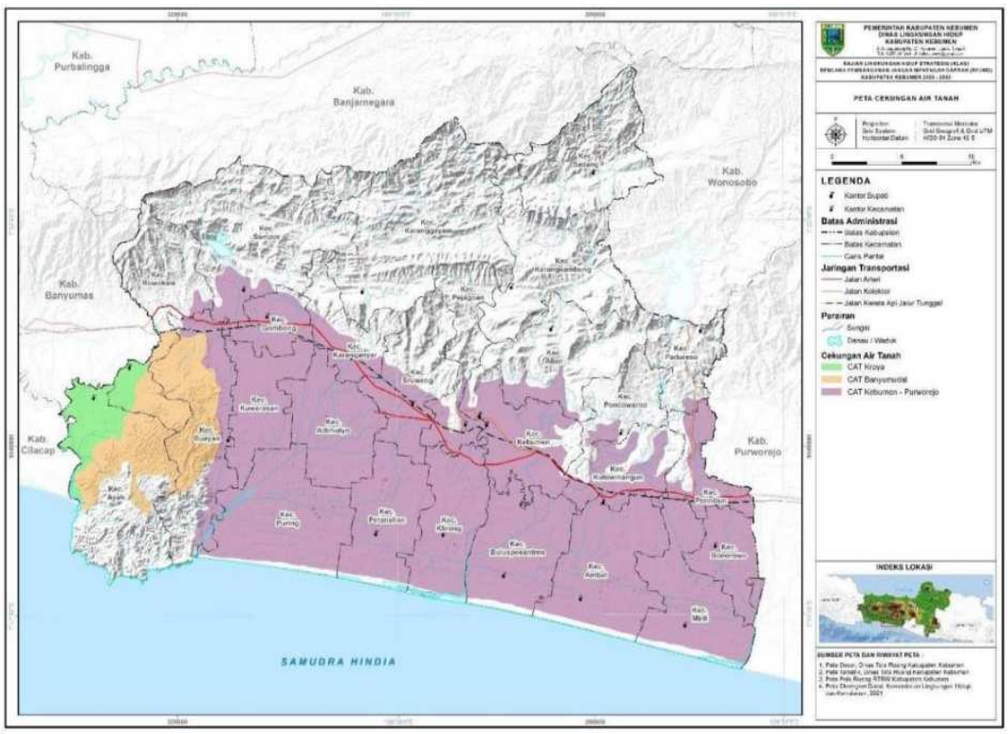
Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi, seperti pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Tanah berlangsung. Jika dilihat berdasarkan persebarannya maka potensi CAT tersebut berada di bagian tengah dan selatan Kabupaten Kebumen. Sementara itu, di bagian utara Kebumen merupakan wilayah non-

CAT. Sehingga di Kabupaten Kebumen terdapat dua waduk yang berada di wilayah utara yaitu Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang. Fungsi waduk tersebut yaitu untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kabupaten Kebumen terutama di wilayah utara. Berikut ditampilkan tabel dan peta persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen.

Tabel II.8
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Persentase (Persen)
CAT Kroya	2.404,64	3,44
CAT Banyumudal	6.961,48	9,97
CAT Kebumen-Purworejo	60.440,13	86,58
Total	**69.806,25**	**100**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.7
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki sumber mata air berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan diketahui bahwa jumlah mata air yang terdata sebanyak 277 buah dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Tabel II.9
Jumlah Sebaran Mata Air Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Ayah	18
2	Buayan	37
3	Puring	-
4	Petanahan	-
5	Klirong	-
6	Buluspesantren	-
7	Ambal	-
8	Mirit	-
9	Bonorowo	-
10	Prembun	5
11	Padureso	18
12	Kutowinangun	3
13	Alian	28
14	Poncowarno	12
15	Kebumen	1
16	Pejagoan	14
17	Sruweng	25
18	Adimulyo	-
19	Kuwarasan	-
20	Rowokele	27
21	Sempor	22
22	Gombong	-
23	Karanganyar	20
24	Karanggayam	23
25	Sadang	11
26	Karangsambung	13
TOTAL		**277**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

6. Potensi Kawasan Budidaya Kabupaten Kebumen

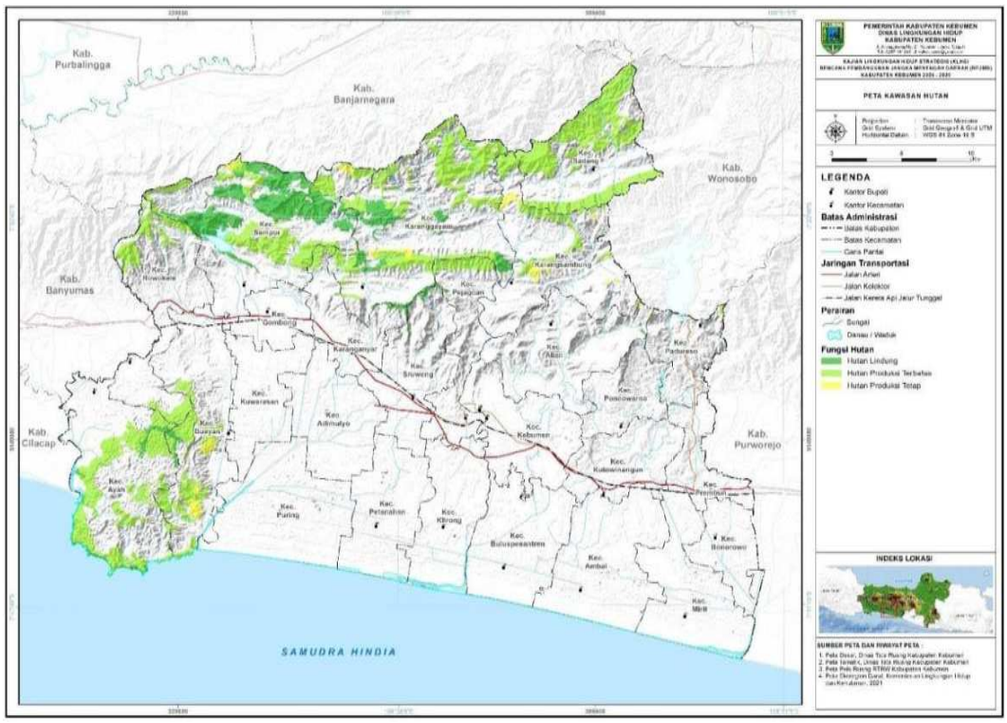
Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budi daya. Kawasan budi daya di Kabupaten Kebumen terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya nonpertanian dengan peruntukan meliputi:

(1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan hutan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertambangan dan energi; (6) kawasan peruntukan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman dan (9) kawasan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan analisis citra satelit sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, pada tahun 2019 terdapat luasan budi daya sebesar 120.695,42 hektare dengan luas lahan produktif 59.723,48 hektare (49,48 persen) dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Adimulyo, Puring, dan Bonorowo memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling besar karena topografi wilayahnya terletak di daerah datar yang banyak memiliki sawah atau ladang. Kecamatan Rowokele, Sadang, dan Padureso memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling kecil karena topografi wilayahnya berupa pegunungan dengan sedikit sawah atau ladang, tetapi memiliki banyak hutan yang dapat dijadikan sebagai kawasan lindung. Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budidaya berupa wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia.

7. Potensi Kawasan Hutan

Kabupaten Kebumen masih mempunyai sumber daya hutan yang tersebar di beberapa wilayah, terdiri dari hutan lindung 3.819,81 hektare, hutan produksi tetap 664,88 hektare, hutan produksi terbatas 13.077,29 hektare, dan area penggunaan lain mencapai 115.847,98 hektare. Lokasi hutan mayoritas berada di wilayah utara yaitu di Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Karangsambung. Sementara itu, di wilayah selatan terdapat kawasan hutan di Kecamatan Ayah.

Kabupaten Kebumen memiliki desa yang terdapat kawasan hutan sebanyak 93 desa di 12 kecamatan, yaitu 15 desa di Kecamatan Ayah, 11 desa di Kecamatan Buayan, 5 desa di Kecamatan Rowokele, 12 desa di Kecamatan Sempor, 3 desa di Kecamatan Karanganyar, 19 desa di Kecamatan Karanggayam, 10 desa di Kecamatan Karangsambung, 7 desa di Kecamatan Sadang, 1 desa di Kecamatan Alian, 5 desa di Kecamatan Sruweng, 2 desa di Kecamatan Pejagoan, dan 3 desa di Kecamatan Padureso.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.8
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung air di Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus. Perhitungan status daya dukung dan daya tampung air didasarkan selisih ketersediaan air permukaan dan kebutuhan terhadap air (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional). Perhitungan ketersediaan air diinventarisasi dari klasifikasi karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami dan kelas penutupan lahan, sedangkan kebutuhan air diinventarisasi dari kebutuhan air per kapita, kebutuhan air untuk lahan melalui KHL (Kebutuhan Air untuk Hidup Layak) bagi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air domestik untuk tiap grid (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009), serta penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan yang diperhitungkan meliputi kelas lahan persawahan, perkebunan, kebun campuran dan tegalan. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kebumen sebesar 256.063.179,02 m^3/tahun masih lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhannya.

Tahun 2023 ketersediaan air dipenuhi dari Waduk Wadaslintang dengan kapasitas sebesar 388,72 juta m^3, Waduk Sempor dengan kapasitas 38,04 juta m^3, dan Sungai Bogowonto untuk pengairan lahan seluas 4.200 hektare. Kebijakan pemerataan

air dari sumber air baku telah dilaksanakan melalui pembangunan embung dan perbaikan saluran irigasi tersier, serta pemeliharaan saluran dengan pelibatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Meskipun ada surplus kapasitas, namun jika ditinjau di masing-masing wilayah masih terdapat kecamatan yang defisit air seperti di Kecamatan Ambal, Buluspesantren, Kuwarasan, Puring, Mirit, dan Petanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi air di Kabupaten Kebumen masih belum merata ke semua wilayah.

Tabel II.10
Distribusi Potensi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen Tahun 2023

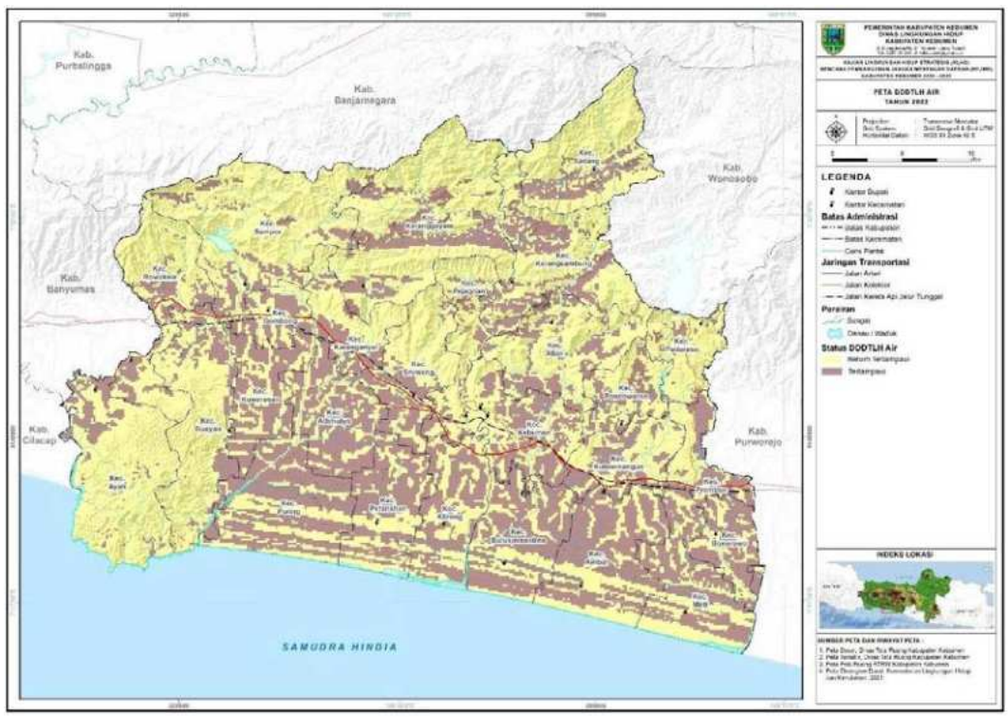
No	Kecamatan	Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan (m^3/tahun)	Selisih (m^3/tahun)	Status
1	Adimulyo	65.863.553,57	75.171.960,41	-.308.406,84	Terlampaui
2	Alian	81.157.431,23	66.157.826,04	14.999.605,19	Belum Terlampaui
3	Ambal	79.402.995,96	91.852.837,84	-2.449.841,88	Terlampaui
4	Ayah	93.884.744,31	44.137.442,48	49.747.301,83	Belum Terlampaui
5	Bonorowo	35.851.352,33	39.546.273,25	-3.694.920,91	Terlampaui
6	Buayan	86.877.208,17	49.934.523,07	36.942.685,11	Belum Terlampaui
7	Buluspesantren	65.620.146,73	76.556.401,52	-0.936.254,79	Terlampaui
8	Gombong	27.933.822,53	26.169.458,94	1.764.363,59	Belum Terlampaui
9	Karanganyar	41.167.499,51	32.240.189,87	8.927.309,64	Belum Terlampaui
10	Karanggayam	149.364.801,43	110.044.218,11	39.320.583,32	Belum Terlampaui
11	Karangsambung	88.989.464,94	74.886.754,94	14.102.710,00	Belum Terlampaui
12	Kebumen	60.410.919,79	55.869.112,70	4.541.807,09	Belum Terlampaui
13	Klirong	55.417.481,50	56.938.800,36	-1.521.318,86	Terlampaui
14	Kutowinangun	43.934.729,87	37.285.478,87	6.649.251,00	Belum Terlampaui
15	Kuwarasan	45.239.803,43	49.310.904,60	-4.071.101,18	Terlampaui
16	Mirit	59.908.490,70	64.380.173,51	-4.471.682,81	Terlampaui
17	Padureso	34.246.005,01	21.631.994,35	12.614.010,66	Belum Terlampaui
18	Pejagoan	41.580.745,71	30.062.832,75	11.517.912,96	Belum Terlampaui
19	Petanahan	53.143.785,41	60.042.893,13	-6.899.107,72	Terlampaui
20	Poncowarno	30.741.991,13	27.953.099,68	2.788.891,45	Belum Terlampaui
21	Prembun	26.975.980,44	25.343.215,48	1.632.764,96	Belum Terlampaui
22	Puring	71.735.494,75	86.374.355,64	-4.638.860,88	Terlampaui
23	Rowokele	62.212.938,37	42.369.302,49	19.843.635,89	Belum Terlampaui
24	Sadang	82.022.198,66	43.039.561,13	38.982.637,53	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan (m^3/tahun)	Selisih (m^3/tahun)	Status
25	Sempor	131.184.862,00	83.431.236,57	47.753.625,43	Belum Terlampaui
26	Sruweng	52.112.847,78	40.187.268,53	11.925.579,25	Belum Terlampaui
Total		1.666.981.295,29	1.410.918.116,27	256.063.179,02	Belum Terlampaui

Keterangan: Perhitungan status daya dukung dan daya tampung air didasarkan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- *Apabila selisih <0 maka dikategorikan "terlampaui" artinya kebutuhan terhadap air melebihi atau melampaui ketersediaan air permukaan yang ada; dan*
- *Apabila selisih >0 maka dikategorikan "belum terlampaui" artinya kebutuhan terhadap air masih di bawah ketersediaan air permukaan*

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.9
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen

Meskipun kondisi daya dukung air pada tahun eksisting sampai dengan tahun rencana masih surplus, tetapi Pemerintah Kabupaten Kebumen juga bisa melakukan peningkatan daya dukung air yaitu dengan menekan kebutuhan air untuk kegiatan pertanian melalui kegiatan *intermittent* atau perairan berselang. Mengingat kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Kebumen sangat tinggi maka diperlukan upaya untuk penghematan penggunaan air untuk pertanian. Penggunaan air untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Kebumen mencapai 88 persen sementara untuk kegiatan domestik hanya 12 persen. Skenario penghematan air untuk pertanian di Kebumen dihitung menggunakan 80 persen kebutuhan air untuk pertanian sehingga daya dukung air bisa meningkat. Jika dihitung dengan *business as usual* atau tanpa upaya intervensi maka daya dukung air di tahun 2029 mencapai 1,44. Sementara itu ketika

dilakukan penghematan air untuk pertanian maka daya dukung air tahun 2029 meningkat menjadi 1,69. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya upaya *intermittent* pada kegiatan pertanian bisa menaikkan daya dukung air. Berikut ditampilkan rincian perhitungan proyeksi daya dukung air di Kabupaten Kebumen.

Tabel II.11
Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2029

Rincian	2025	2026	2027	2028	2029
Business As Usual					
Ketersediaan (m3/tahun)	1.674.916.287,31	1.677.561.284,65	1.680.206.281,99	1.682.851.279,33	1.685.496.276,67
Kebutuhan (m3/tahun)	1.307.067.162,79	1.272.450.178,30	1.237.833.193,81	1.203.216.209,31	1.168.599.224,82
Selisih (m3/tahun)	367.849.124,52	405.111.106,35	442.373.088,18	479.635.070,02	516.897.051,85
DDA	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44
Intermitten Kegiatan Pertanian					
Ketersediaan (m3/tahun)	1.674.916.287,31	1.677.561.284,65	1.680.206.281,99	1.682.851.279,33	1.685.496.276,67
Kebutuhan (m3/tahun)	1.233.834.763,28	1.174.806.978,96	1.115.779.194,63	1.056.751.410,30	997.723.625,97
Selisih (m3/tahun)	441.081.524,03	502.754.305,69	564.427.087,36	626.099.869,03	687.772.650,70
DDA	1,36	1,43	1,51	1,59	1,69

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Daya dukung pangan di Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus. Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras. Surplus daya dukung pangan di Kabupaten Kebumen mencapai 140.751,40 ton/tahun. Jika dilihat di masing-masing wilayah kecamatan, Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus pangan, artinya ketersediaan pangan lebih besar jika dibandingkan kebutuhannya. Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan adalah melalui penyediaan lumbung pangan petani.

Tabel II.12
Distribusi Potensi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

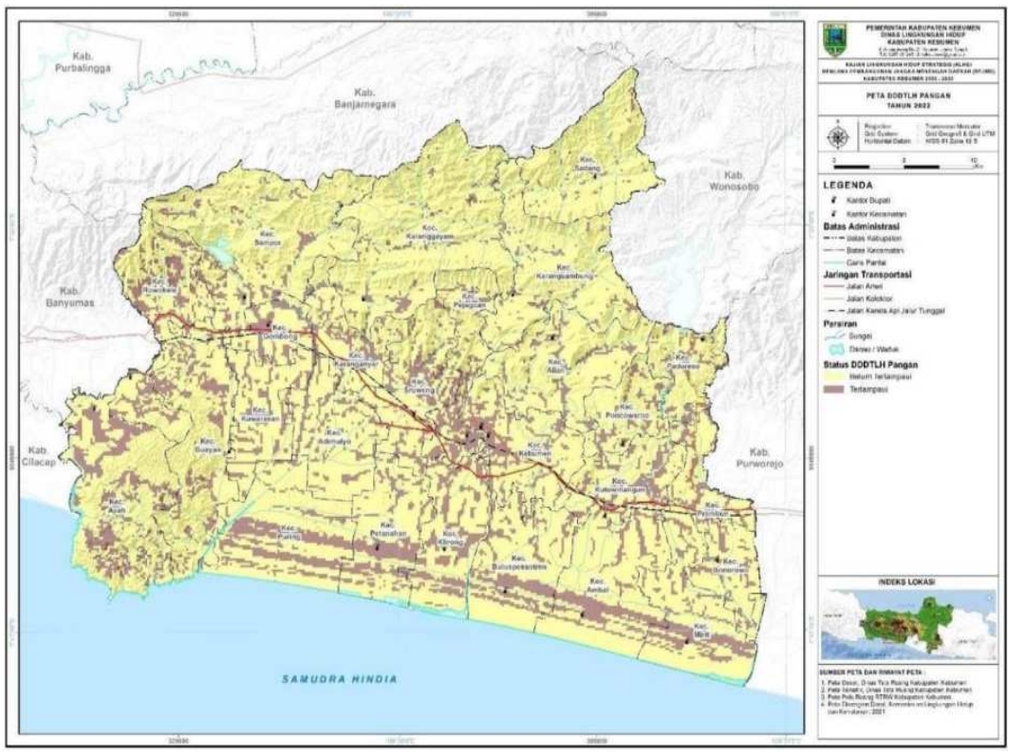
No	Kecamatan	Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan (m^3/tahun)	Selisih (m^3/tahun)	Status
1	Adimulyo	11.409,74	4.510,72	6.899,02	Belum Terlampaui
2	Alian	10.820,77	3.667,63	7.153,13	Belum Terlampaui
3	Ambal	13.665,24	5.577,49	8.087,75	Belum Terlampaui
4	Ayah	12.770,94	7.046,30	5.724,65	Belum Terlampaui
5	Bonorowo	6.135,37	2.561,78	3.573,60	Belum Terlampaui
6	Buayan	12.189,43	5.303,24	6.886,19	Belum Terlampaui
7	Buluspesantren	11.189,44	5.230,34	5.959,10	Belum Terlampaui
8	Gombong	4.555,79	2.569,14	1.986,65	Belum Terlampaui
9	Karanganyar	5.611,78	2.720,35	2.891,43	Belum Terlampaui
10	Karanggayam	19.368,31	4.435,53	14.932,77	Belum Terlampaui
11	Karangsambung	12.021,26	3.042,71	8.978,56	Belum Terlampaui
12	Kebumen	9.625,55	5.327,63	4.297,92	Belum Terlampaui
13	Klirong	9.239,42	5.182,24	4.057,19	Belum Terlampaui
14	Kutowinangun	6.864,68	3.645,89	3.218,78	Belum Terlampaui
15	Kuwarasan	7.756,75	3.605,25	4.151,49	Belum Terlampaui
16	Mirit	10.082,95	4.799,81	5.283,14	Belum Terlampaui
17	Padureso	4.210,87	1.713,25	2.497,62	Belum Terlampaui
18	Pejagoan	5.550,07	3.270,10	2.279,97	Belum Terlampaui
19	Petanahan	9.075,38	4.582,01	4.493,38	Belum Terlampaui
20	Poncowarno	4.242,78	1.990,76	2.252,02	Belum Terlampaui
21	Prembun	4.307,33	2.128,46	2.178,87	Belum Terlampaui
22	Puring	12.280,01	5.925,42	6.354,58	Belum Terlampaui
23	Rowokele	8.153,24	4.725,66	3.427,58	Belum Terlampaui
24	Sadang	10.438,54	1.813,19	8.625,35	Belum Terlampaui
25	Sempor	15.675,93	4.454,35	11.221,58	Belum Terlampaui
26	Sruweng	7.322,43	3.983,36	3.339,08	Belum Terlampaui
Total		**244.564,00**	**103.812,60**	**140.751,40**	**Belum Terlampaui**

Keterangan:

Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- *Apabila selisih <0 maka dikategorikan "terlampaui" artinya kebutuhan terhadap pangan melebihi atau melampaui ketersediaan pangan yang ada; dan*
- *Apabila selisih >0 maka dikategorikan "belum terlampaui" artinya kebutuhan terhadap pangan masih di bawah ketersediaan pangan.*

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.10
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kebumen diproyeksikan akan turun menjadi 1,77 di tahun 2029 dari 2,36 di tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan luas lahan pertanian di Kabupaten Kebumen, meskipun kondisinya masih surplus tetapi perlu upaya untuk meningkatkan daya dukung pangan, mengingat pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kebumen. Terdapat dua skenario daya dukung pangan, yaitu dengan meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produktivitas dan indeks penanaman. Berikut ditampilkan rincian perhitungan proyeksi daya dukung pangan.

Tabel II.13
Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2029

Rincian	2025	2026	2027	2028	2029
Business As Usual (Indeks Penanaman 1,5 dan Produktivitas 5,6 Ton/Ha)					
Ketersediaan (Ton/tahun)	224.250,09	218.812,13	212.374,16	205.936,19	199.498,22
Kebutuhan (Ton/tahun)	107.660,24	108.942,78	110.225,32	111.507,87	112.790,41
Selisih (Ton/tahun)	117.689,86	109.869,34	102.148,83	94.428,32	86.707,81
DDP	2,09	2,01	1,93	1,85	1,77
Skenario 1 (Produktivitas 6 Ton/Ha)					
Ketersediaan (Ton/tahun)	230.596,09	225.940,13	221.284,16	216.628,19	211.972,22
Kebutuhan (Ton/tahun)	107.660,24	108.942,78	110.225,32	111.507,87	112.790,41
Selisih (Ton/tahun)	122.935,86	116.997,35	111.058,84	105.120,32	99.181,81
DDP	2,14	2,07	2,01	1,94	1,88
Skenario 2 (Produktivitas 6 Ton/Ha + Indeks Penanaman 1,8)					

Rincian	2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan (Ton/tahun)	246.693,64	247.403,53	248.113,41	248.823,29	249.533,17
Kebutuhan (Ton/tahun)	107.660,24	108.942,78	110.225,32	111.507,87	112.790,41
Selisih (Ton/tahun)	139.033,41	138.460,75	137.888,09	137.315,42	136.742,76
DDP	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

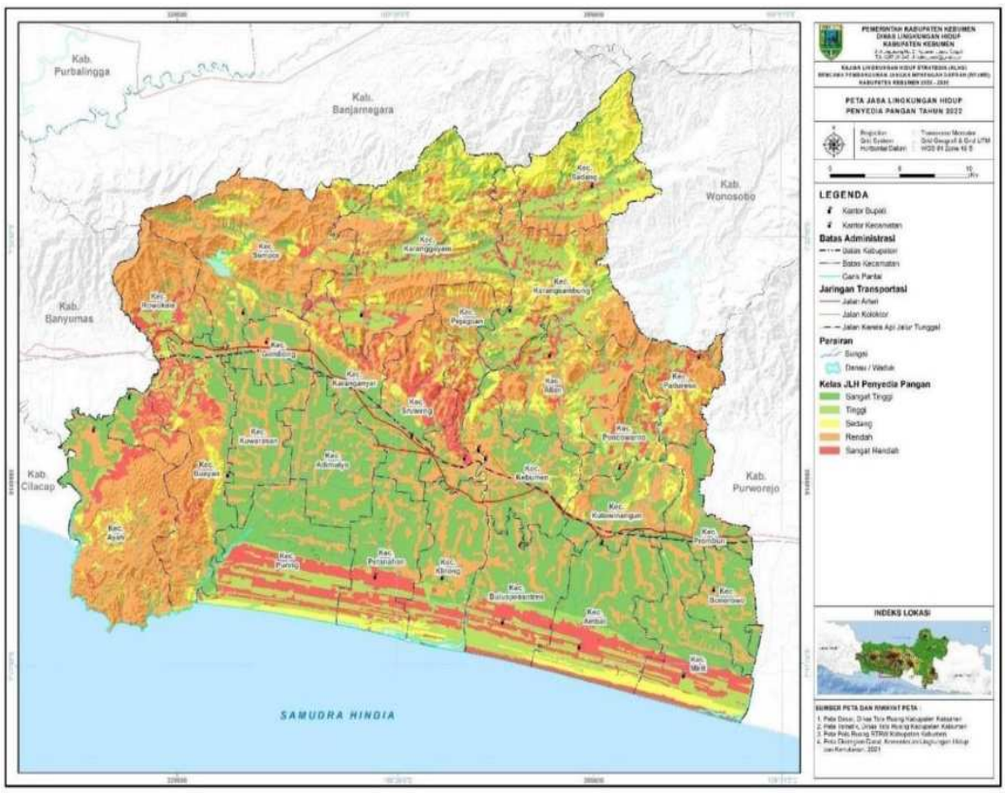
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan Hidup (JLH) Penyedia Pangan menunjukkan Kabupaten Kebumen masih mempunyai lahan yang potensial terhadap penyediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup selain air. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukkan bagi konsumsi manusia. JLH Penyedia Pangan merupakan hasil pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian, dan perkebunan, hasil peternakan serta perikanan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

JLH penyedia pangan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas sedang sebesar 30,58 persen atau seluas 40.728,23 hektare, dan terdapat 26,64 persen berada pada kelas sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen masih mempunyai lahan yang potensial terhadap penyediaan pangan. Sementara itu juga terdapat 24,65 persen yang berada pada kelas rendah, yang menunjukkan bahwa sekitar 32.285,74 hektare yang tidak potensial terhadap penyediaan pangan. Jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka kelas rendah berada pada wilayah yang sudah terbangun/permukiman, sementara untuk kelas tinggi berada pada penggunaan lahan sawah, dan perkebunan. Penggunaan lahan dan kondisi bentang alam merupakan faktor penentu kelas JLH.

Tabel II.14
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan
Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (Persen)
Sangat Rendah	7.686,32	5,77
Rendah	32.825,74	24,65
Sedang	40.728,23	30,58
Tinggi	17.785,25	13,36
Sangat Tinggi	34.143,20	26,64
Total	**133.168,75**	**100**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.11
Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sangat kecil. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih berkaitan dengan segala sumber air permukaan, air tanah, ataupun air hujan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penyediaan jasa air bersih bergantung pada beberapa faktor di antaranya curah hujan, lapisan tanah, dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan serta tutupan vegetasi. Ekosistem mampu menyediakan air, baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Jasa lingkungan sebagai penyedia air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau lapisan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang

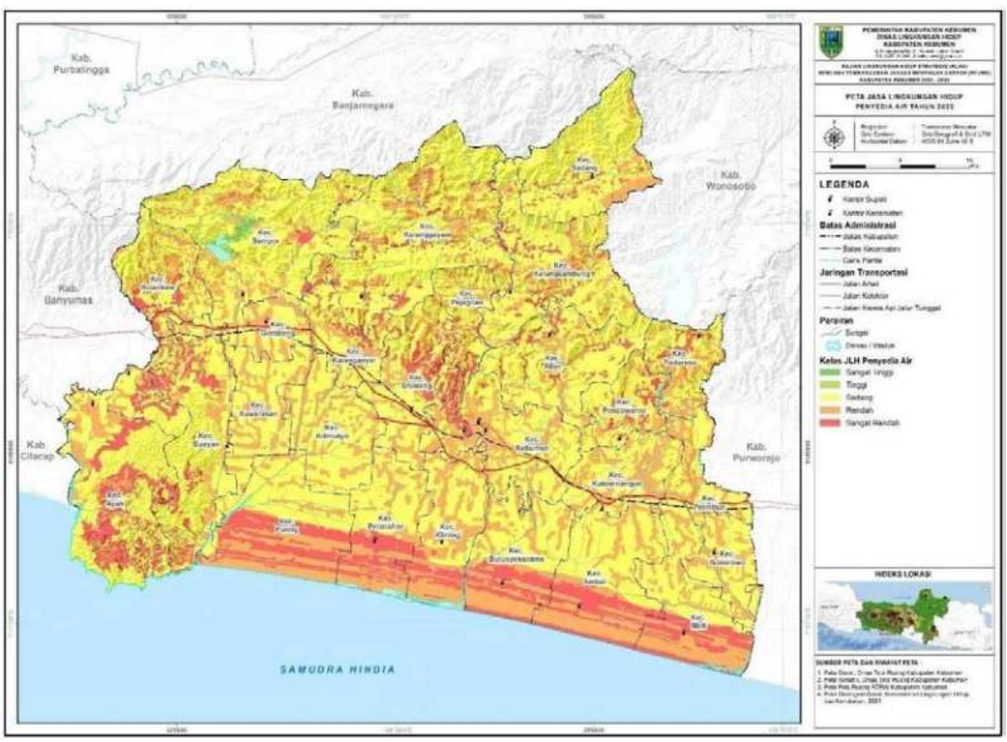
dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion (bentang alam). Wilayah yang memberikan jasa lingkungan tinggi bagi penyediaan air ada pada daerah tangkapan air yang memiliki daya serap tinggi untuk menampung air dan masih banyak terdapat lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi bagi penyediaan air.

Jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas rendah sebesar 58,45 persen atau 77.837,33 hektare dan kelas sedang sebesar 36,08 persen atau seluas 48.047,70 hektare. Sementara itu, jasa lingkungan penyedia air di yang berada pada kelas tinggi dan sangat tinggi persentasenya sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sangat kecil, mengingat jumlah ketersediaan air permukaan/sungai yang ada jumlahnya relatif kecil.

Tabel II.15
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (Persen)
Sangat Rendah	6.591,18	4,95
Rendah	77.837,33	58,45
Sedang	48.047,70	36,08
Tinggi	213,96	0,16
Sangat Tinggi	478,58	0,36
Total	**133.168,75**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.12
Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen

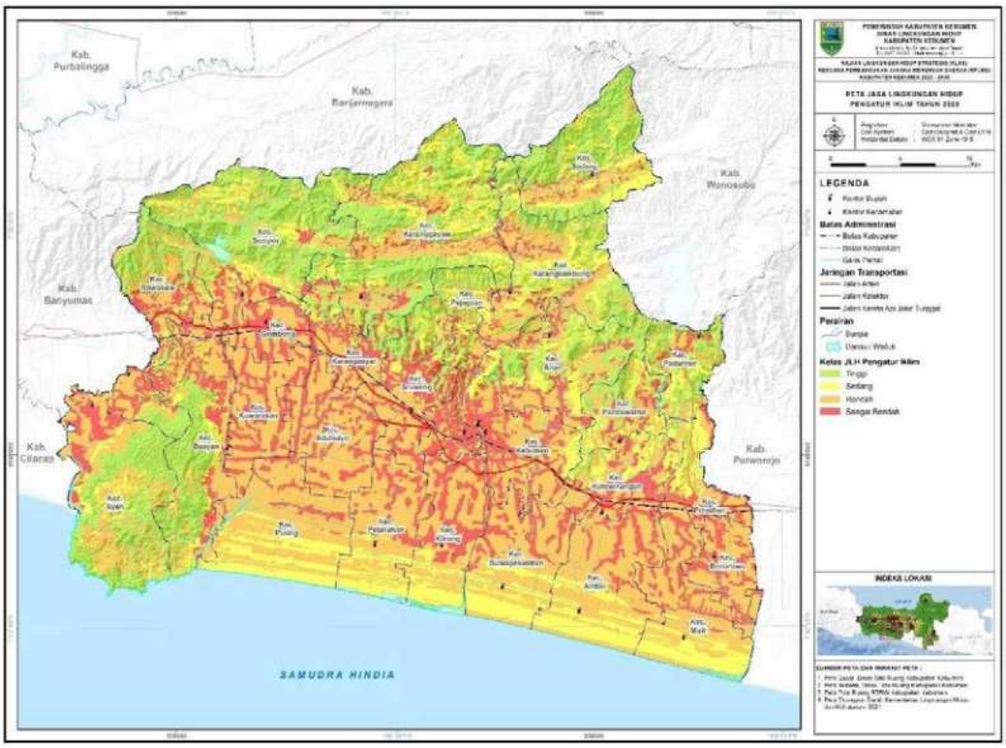
JLH Pengatur Iklim menunjukkan Kabupaten Kebumen berpotensi mempunyai peran penting dalam pengaturan iklim. Jasa lingkungan pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban, dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca serta penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa lingkungan pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuk lahan. Wilayah yang terdapat pada ketinggian yang tinggi dengan tutupan vegetasi yang rapat akan cenderung memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah yang terletak pada dataran rendah dengan tutupan vegetasi yang sedikit. Iklim menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kondisi keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah.

Kondisi pengatur iklim di Kabupaten Kebumen digambarkan melalui kondisi kelas jasa lingkungan pengatur iklim, di mana terdapat 58,10 persen atau seluas 77.372,48 hektare memiliki kelas JLH sedang dan 30,52 persen atau seluas 40.646,48 hektare memiliki jelas JLH rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah di Kabupaten Kebumen yang berpotensi mempunyai peran penting dalam pengaturan iklim.

Tabel II.16
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim
Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (Persen)
Sangat Rendah	14.786,82	11,1
Rendah	40.646,48	30,52
Sedang	77.372,48	58,1
Tinggi	362,96	0,27
Sangat Tinggi	-	-
Total	**133.168,75**	**100**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.13
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air, menunjukkan pengatur tata air Kabupaten Kebumen didominasi pertanian lahan kering. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir berkaitan dengan kemampuan ekosistem dalam pengaturan tata air yang meliputi penyimpanan air, pengendalian banjir serta pemeliharaan ketersediaan air. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiografi wilayah serta tutupan lahan. Semakin rapat tutupan lahan maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan. Kawasan bencana salah satunya bencana banjir dapat dipengaruhi oleh kondisi kemampuan lingkungan dalam memberikan jasa lingkungan berupa pengaturan tata aliran air dan banjir. Kondisi tata aliran air yang baik kemungkinan akan dapat mengurangi potensi kerawanan bencana banjir pada suatu wilayah.

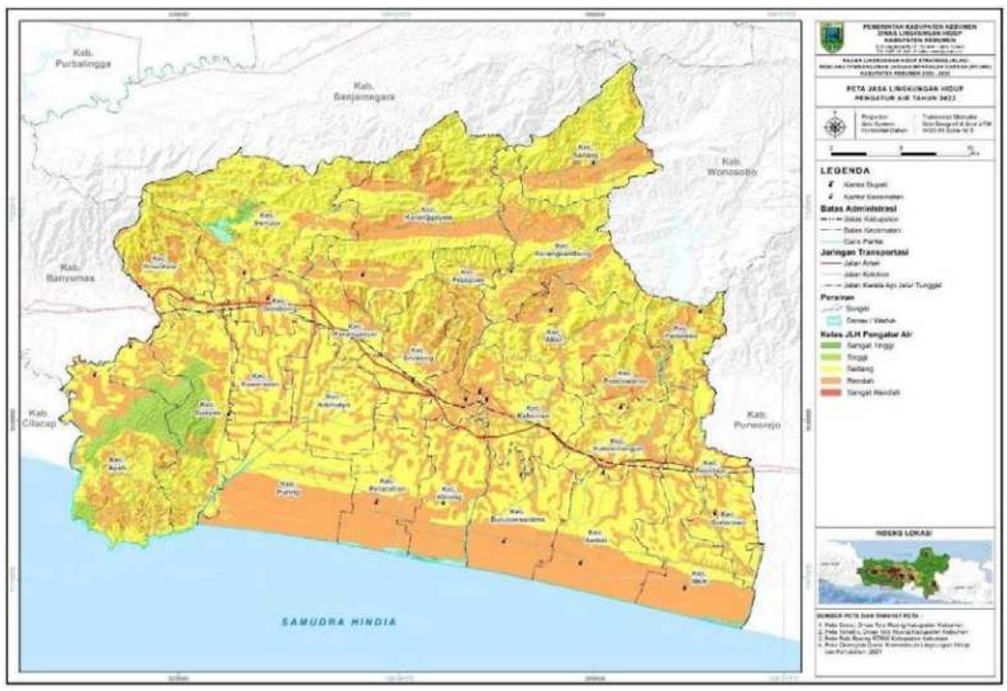
Kondisi jasa lingkungan pengatur tata air pada tahun 2022 didominasi oleh kelas sedang sebesar 61,71 persen atau setara dengan 82.176,25 hektare, sedangkan untuk JLH kelas tinggi dan

sangat tinggi hanya 0,52 persen atau 692,54 hektare pada kelas sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh pertanian lahan kering. Selain itu terdapat 37,77 persen dari total luas wilayah di Kabupaten Kebumen berada pada kelas rendah. Wilayah dengan kelas rendah dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan berupa permukiman/lahan terbangun dan sawah.

Tabel II.17
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air
Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (Persen)
Sangat Rendah	3,87	0
Rendah	50.296,08	37,77
Sedang	82.176,25	61,71
Tinggi	-	-
Sangat Tinggi	692,54	0,52
Total	**133.168,75**	**100**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Gambar II.14
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Penyediaan fasilitas air bersih, listrik, dan telekomunikasi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Capaian elektrifikasi di Kabupaten Kebumen menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 99,66 persen pada tahun 2020 menjadi 99,67 persen pada tahun 2021, lalu kembali menjadi 99,66 persen pada

tahun 2022 hingga akhirnya mencapai 100 persen pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024. Seluruh akses listrik rumah tangga tersebut bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur kelistrikan. Elektrifikasi yang telah menjangkau seluruh wilayah menjadi indikator penting terhadap meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan dan layanan sosial dasar secara lebih optimal.

Kondisi energi di Kabupaten Kebumen tercermin dari konsumsi listrik masyarakat, yang dapat diestimasi melalui rata-rata daya tersambung per pelanggan sebagai *proxy* tingkat akses energi. Pemanfaatan energi terbarukan telah berjalan, seperti pompa air tenaga surya di Kecamatan Padureso sebagai penerapan *Water-Energy-Food* (WEF) Nexus. Inovasi serupa juga terdapat di berbagai wilayah: demplot biogas di Desa Karangrejo (Kecamatan Petanahan) yang memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi dan pupuk; PLTS berbasis IoT di Desa Tlogopragoto untuk efisiensi penyiraman lahan cabai; *solar home system* untuk PJU di Desa Lumbu (Kecamatan Kutowinangun); pemasangan PJU tenaga surya di fasilitas pemerintah; serta pengembangan mobil listrik tenaga surya karya siswa SMA Muhammadiyah Gombong. Ke depan, Pemkab Kebumen akan memperluas pemanfaatan EBT, memutakhirkan data konsumsi energi, mendorong efisiensi, dan mengintegrasikan pengelolaan energi dalam perencanaan berbasis WEF Nexus.



Sumber: DPUPR dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.15
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Selain itu, keberadaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan turut memperkuat ketahanan energi daerah. Salah satu contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Merden, Kecamatan Padureso serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wadaslintang yang telah beroperasi dan memberi kontribusi terhadap pasokan listrik lokal. Pemanfaatan potensi energi air ini tidak hanya menjadi solusi terhadap tantangan geografis di daerah pedesaan tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, pencapaian elektrifikasi 100 persen yang didukung oleh sumber energi terbarukan menjadi landasan penting bagi Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-6 yaitu akses terhadap air bersih, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan. Namun demikian, terdapat tren penurunan akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di wilayah perkotaan, cakupan layanan menurun dari 22,11 persen pada tahun 2020 menjadi 18,74 persen pada tahun 2024, sementara di perdesaan menurun dari 11,62 persen menjadi 11,12 persen pada periode yang sama. Jaringan air minum perkotaan dikelola oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa dan SPAM Regional Keburejo oleh PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya penyerapan kapasitas produksi SPAM Keburejo yang masih di bawah kapasitas terpasang. Di sisi lain, sistem penyediaan air minum perdesaan yang dikelola oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAM) menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber air baku dan lemahnya tata kelola kelembagaan.

Secara keseluruhan, capaian akses rumah tangga terhadap pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 20,94 persen pada tahun 2020 menjadi 19,62 persen pada tahun 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh tidak sebandingnya pengembangan infrastruktur air minum dengan laju pertumbuhan rumah tangga. Selain itu, kualitas air minum perpipaan di perdesaan belum memenuhi standar air siap minum karena belum dilakukan uji kualitas. Kendati demikian, sejak tahun 2023, seluruh rumah tangga di Kabupaten Kebumen telah

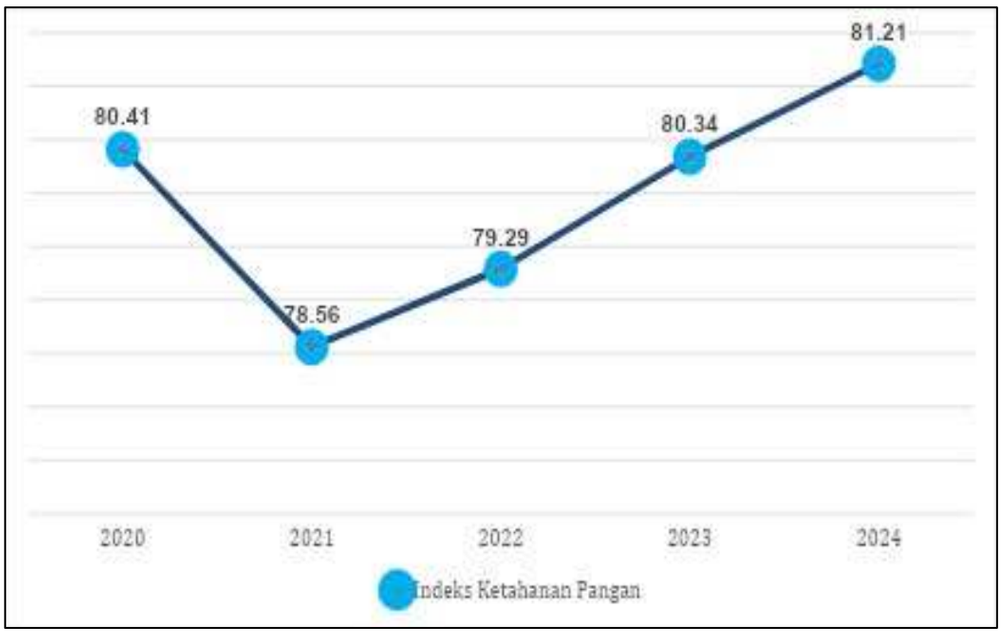
memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan yang telah memenuhi kriteria air minum terlindungi.

Sejak tahun 2024 cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih telah mencapai 100 persen. Hal ini mendasari data rumah tangga yang telah memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Tahun 2024 dalam RPJPD Kabupaten Kebumen 2025-2045 menggunakan IUP akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum menggunakan formulasi baru, sehingga angka di tahun 2024 cenderung menurun. Cakupan aksesibilitas terhadap air minum aman di Kebumen tahun 2024 sebesar 27,39 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian stakeholder terkait mengingat sangat penting air minum aman dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat.

Tabel II.18
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih dan Air Aman Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Persen)	22,11	23,91	17,96	18,42	16,27
2	Akses Rumah Tangga Pedesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Persen)	11,62	12,57	10,50	11,04	11,12
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Persen)	86,37	87,80	96,84	100	100
4	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (Persen)	86,37	87,80	96,84	100,00	100,00
5	Akses Air Minum Aman (Persen)	17,54	19,05	19,64	26,74	39,54

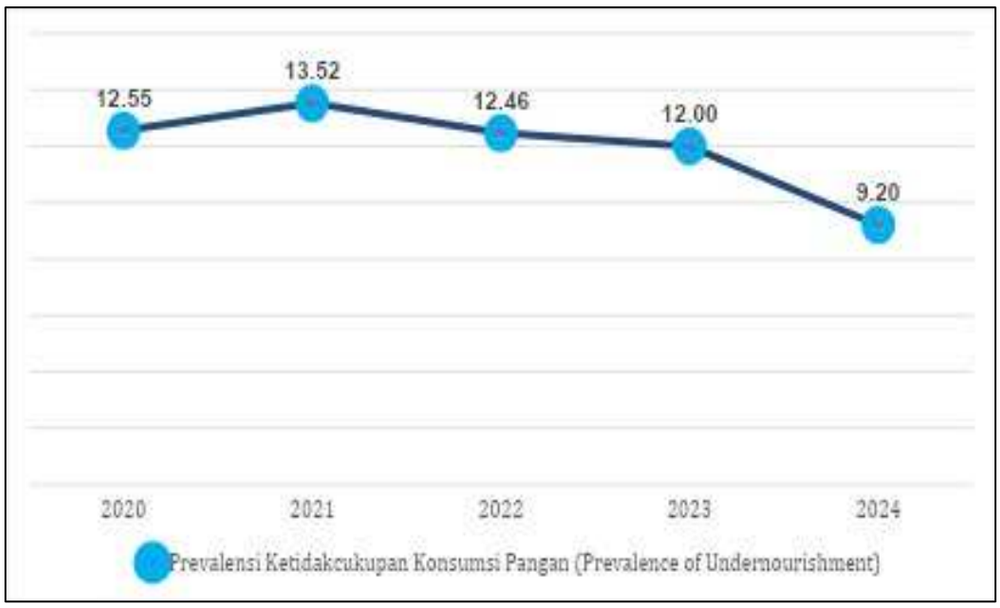
Sumber: DPUPR dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025



Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.16
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Indeks ini mencerminkan aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan. Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan IKP dalam periode 2020-2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2021. IKP tercatat sebesar 80,41 pada 2020, menurun menjadi 78,56 pada 2021. Capaian IKP mengalami peningkatan menjadi 79,29 pada 2022; 80,34 pada 2023; dan mencapai 81,21 pada 2024. Dengan skor di atas 80, Kabupaten Kebumen menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang sangat baik, menandakan bahwa daerah ini tidak hanya terbebas dari kerawanan pangan, tetapi juga memiliki sistem pangan yang stabil dan berkelanjutan.



Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.17
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai *PoU* mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. *PoU* Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 12,55 persen pada tahun 2020 menjadi 9,20 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan walaupun terus menurun, masih terdapat 9,20 persen dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas adalah kondisi lingkungan yang mampu mendukung kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem secara seimbang, ditandai dengan udara bersih, air layak konsumsi, tanah subur, serta keanekaragaman hayati yang terjaga. Komponen pembentuknya meliputi kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, tutupan lahan, dan tingkat pencemaran lingkungan.

Regulasi terkait saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kabupaten Kebumen mempunyai potensi keanekaragaman hayati terutama pada kawasan bentang alam karst Gombong. Hutan karst Gombong merupakan salah satu deretan hutan karst yang terletak lebih kurang 44 kilometer di sebelah barat daya perkotaan Kebumen dan sekitar 23 kilometer sebelah selatan perkotaan Gombong tepatnya pada posisi 109–110° Bujur Timur dan 7–8° Lintang Selatan. Hutan ini memiliki keunikan pada bentang alam serta kekayaan jenis tumbuhannya. Jumlah keanekaragaman hayati sebanyak 382 spesies flora yang terbagi ke dalam 102 famili dan 204 spesies fauna yang tercakup dalam 103 famili. Jenis fauna ini terbagi ke dalam 178 spesies fauna terestrial dengan 84 famili dan 26 spesies fauna akuatik dengan 19 famili. Keberadaan jenis flora dan fauna tersebut pada umumnya mudah dijumpai di desa-desa, kecuali beberapa spesies.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori sedang. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif dikarenakan perbedaan metodologi penghitungan. Namun secara umum, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen terus digalakkan sehingga IKLH pada tahun 2024 mencapai 69,86. Adapun kenaikan indeks ini dari tahun 2020-2024 dikarenakan meningkatnya komponen Indeks Kualitas Air (53,11), Indeks Kualitas Udara (91,42), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (58,73).

Tabel II.19
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kebumen 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,69	52,37	54,49	51,74	53,11
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,75	89,99	90,94	90,41	91,42
Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Indeks Kualitas Lahan (IKTL/IKL)	70,66	37,86	49,53	50,63	58,73
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	**73,92**	**64,43**	**68,17**	**67,16**	**69,86**

Keterangan:
Penyelenggaraan perhitungan IKLH sejak tahun 2023 mengalami beberapa perubahan, yaitu:

a. *Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA. Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index).*
b. *Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5).*
c. *Rumus perhitungan IKL/IKTL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.*

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Peningkatan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keseharian diupayakan oleh pemerintah melalui pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang bersih dan rapi. Salah satunya dengan meningkatkan capaian pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen. Kinerja pengelolaan sampah dilihat dari seberapa banyak sampah yang ditangani oleh pemerintah daerah dan pengurangan sampah dibagi dengan timbulan sampah dalam satu tahun, semula 37,38 persen (2020) menjadi 53,26 persen (2024). Nilai capaian ini masih belum optimal dibandingkan dengan target sampah yang harus terangkut 100 persen. Program yang dilakukan antara lain peningkatan unit penampungan sampah seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TD (Transfer Depo), TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R – *Reduce Reuse Recycle*), TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan Bank Sampah.

Tabel II.20
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)	37,38	37,16	21,34	52,45	53,27
Timbulan Sampah (ton/tahun)	148.846,66	167.590,85	169.013,40	176.363,85	178.127,49
Pendauran Ulang Sampah (ton/tahun)	19.758,18	26.214,03	32.789,78	75.952,82	78.079,50
Pengolahan Sampah (ton/tahun)	35.879,50	36.065,65	3.328,00	16.543,63	16.791,78
Pemrosesan Akhir Sampah (ton/tahun)	35.040,00	54.020,00	98.984,35	36.857,70	36.857,70

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Sanitasi aman merupakan kondisi di mana fasilitas dan layanan sanitasi mampu secara efektif memisahkan kotoran manusia dari kontak langsung dengan manusia dan lingkungan, sehingga mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas hidup masyarakat. Sanitasi aman tidak hanya sebatas tersedianya toilet atau jamban yang layak, tetapi juga mencakup pengelolaan tinja dan limbah domestik secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Kondisi akses sanitasi aman di Kabupaten Kebumen masih relatif rendah dengan capaian 3,67 persen di tahun 2024.

Sanitasi aman yang masih jauh dari harapan ini menjadi cerminan dari berbagai tantangan struktural dan sosial di Kebumen yang belum teratasi. Indikasinya bisa terlihat dari minimnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, serta kurang optimalnya sistem pengelolaan limbah domestik. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi, hingga kendala pendanaan dalam pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai. Selain itu, kurangnya edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta lemahnya penegakan regulasi bagi permukiman yang masih belum sesuai aturan tentu menjadi kendala tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat.



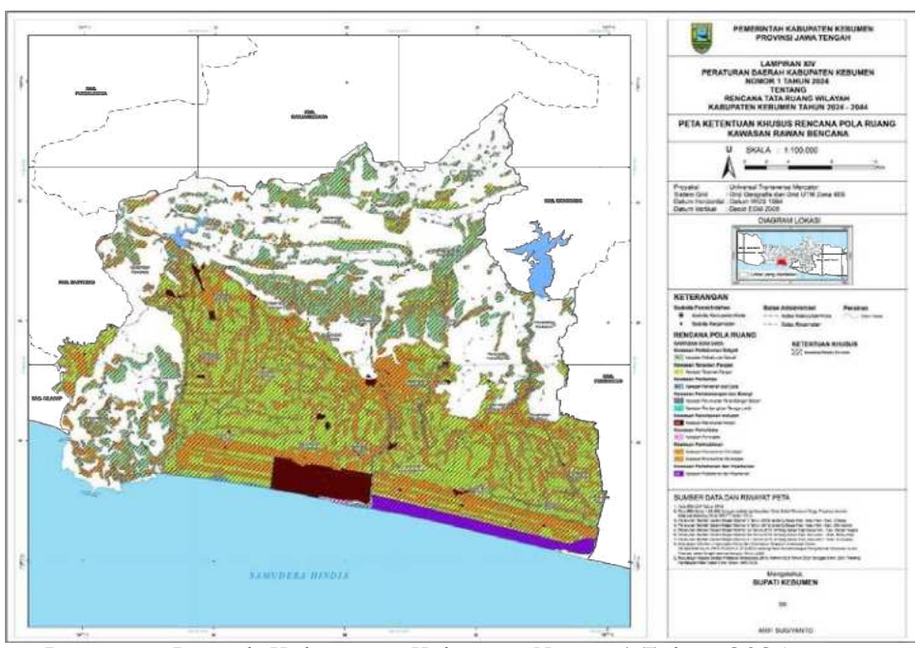
Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.18
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Daerah rawan bencana merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya ancaman bencana alam maupun non-alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hingga bencana akibat aktivitas manusia seperti kegagalan teknologi atau pencemaran lingkungan.

Perubahan iklim di Kabupaten Kebumen memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran lahan. Curah hujan yang semakin ekstrem dan tidak merata menyebabkan banjir di wilayah dataran rendah serta longsor di kawasan perbukitan. Di sisi lain, musim kemarau yang lebih panjang mengakibatkan kekeringan di sejumlah desa, mengganggu pasokan air bersih dan produktivitas pertanian. Kekeringan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah kering dan kurang terpantau. Sementara itu, meskipun gempa bumi bukan langsung disebabkan oleh perubahan iklim, namun kondisi lingkungan yang rusak dan struktur tanah yang labil akibat eksploitasi berlebihan dapat memperparah dampak gempa yang terjadi, mengingat Kebumen berada di kawasan rawan seismik. Semua kondisi ini menuntut upaya adaptasi dan mitigasi yang lebih kuat dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut peta kawasan rawan bencana Kabupaten Kebumen.

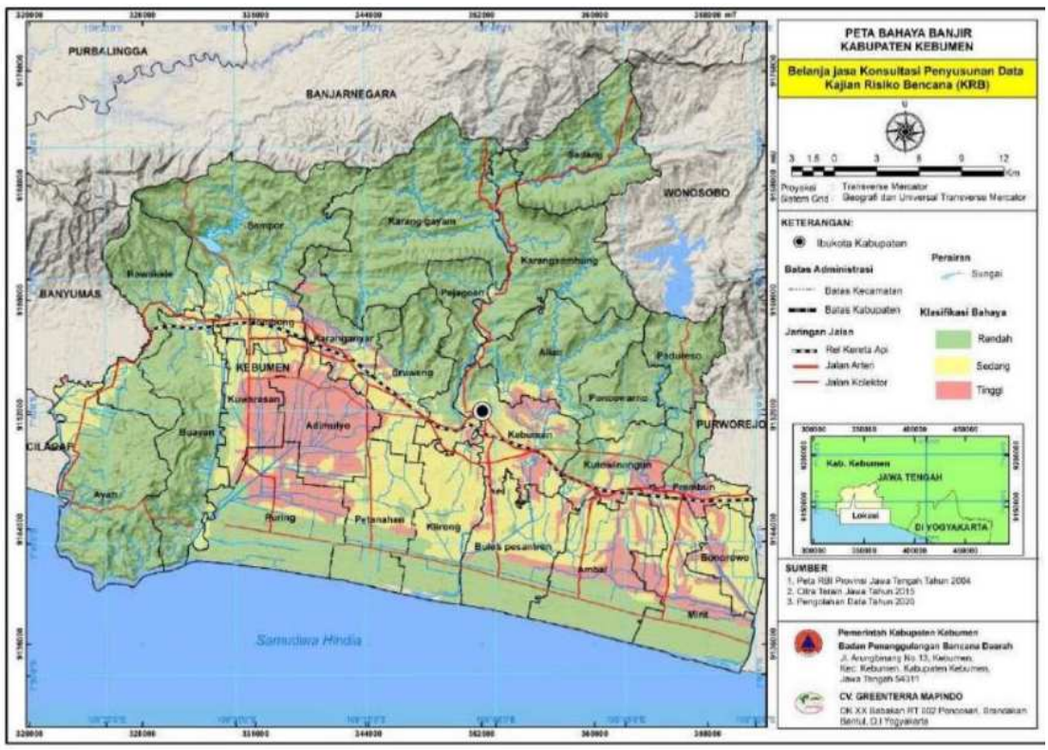


Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, 2024

Gambar II.19
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kebumen

1. Banjir

Bahaya banjir sering mengancam wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan. Berdasarkan topografi daerah, Kabupaten Kebumen bagian selatan cenderung landai hingga sangat landai. Sebagian besar banjir di Kabupaten Kebumen diakibatkan oleh adanya luapan air sungai. Air luapan tersebut menggenang di wilayah daratan, baik lahan persawahan maupun lahan pemukiman. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan sejarah kejadian bencana banjir, didapatkan peta ancaman bencana banjir sebagai berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar II.20
Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen

Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit, Bonorowo, dan Puring. Banjir dengan luas genangan dan durasi yang besar umumnya terjadi karena adanya tanggul sungai atau saluran irigasi yang jebol. Bencana banjir dengan klasifikasi tinggi sebesar 11,5 persen, klasifikasi sedang sebesar 21,7 persen dan klasifikasi rendah sebesar 66,8 persen. Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki potensi sekitar 18,66 persen rawan banjir bandang yang datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

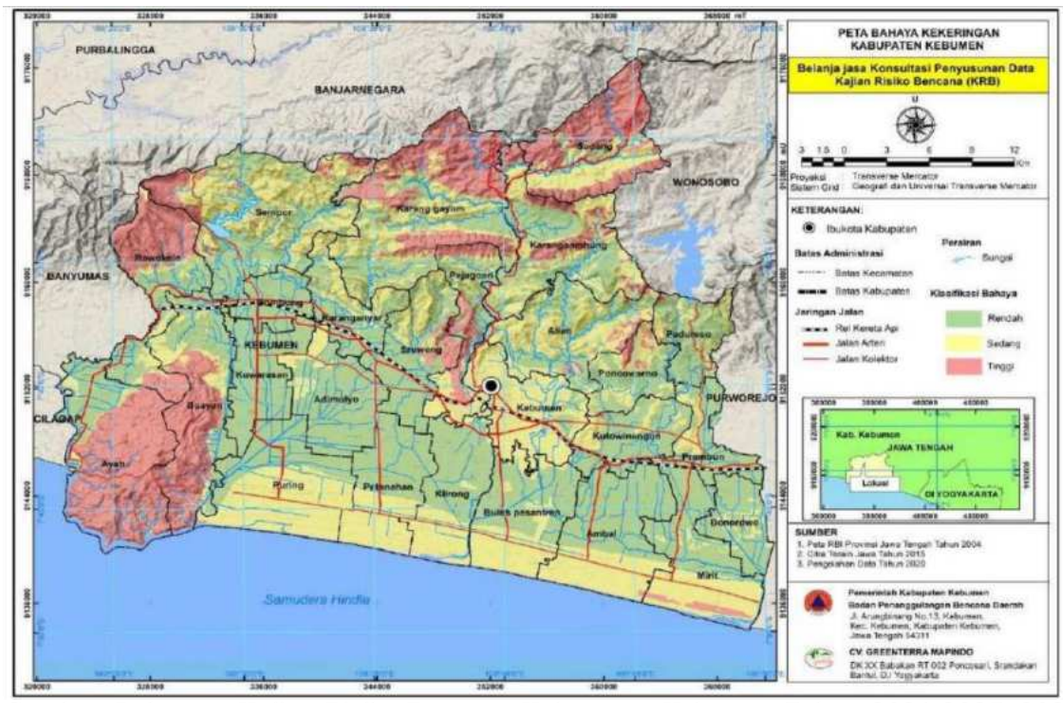
Tabel II.21
Persentase Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
14.701,55	11,5	27.788,77	21,7	85.621,18	66,8

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025, 2021

2. Kekeringan

Bahaya kekeringan di Kabupaten Kebumen bersifat periodik tahunan, umumnya terjadi pada kisaran waktu Bulan Juni hingga September. Berdasarkan data *droping* air BPBD, cakupan wilayah yang mengalami bahaya kekeringan cukup banyak yaitu 8 dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025, 2021

Gambar II.21
Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Kebumen

Peta kawasan bahaya kekeringan yang terdapat di dokumen RPJMD sudah sesuai dengan peta wilayah bahaya kekeringan di dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 yaitu terdapat 8 dari 26 kecamatan yang termasuk dalam cakupan wilayah yang mengalami bahaya kekeringan kategori tinggi yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, Rowokele, Sruweng, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Poncowarno.

Tabel II.22
Persentase Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
25.167,87	19,6	42.642,32	33,3	60.301,31	47,1

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kebumen didominasi oleh bahaya kekeringan dengan klasifikasi rendah, yaitu dengan luas mencapai 60.301,31 hektare atau 47,1 persen dari luas Kabupaten Kebumen. Bahaya kekeringan dengan klasifikasi tinggi luasnya 25.167,87 hektare atau 19,6 persen dari luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan bahaya kekeringan dengan klasifikasi sedang luasnya 42.642,32 hektare atau 33,3 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Sebagai catatan, semua wilayah kabupaten dimasukan kedalam 3 kategori yang ada, sehingga wilayah yang secara perhitungan tidak memiliki bahaya kekeringan masuk ke dalam kategori rendah.

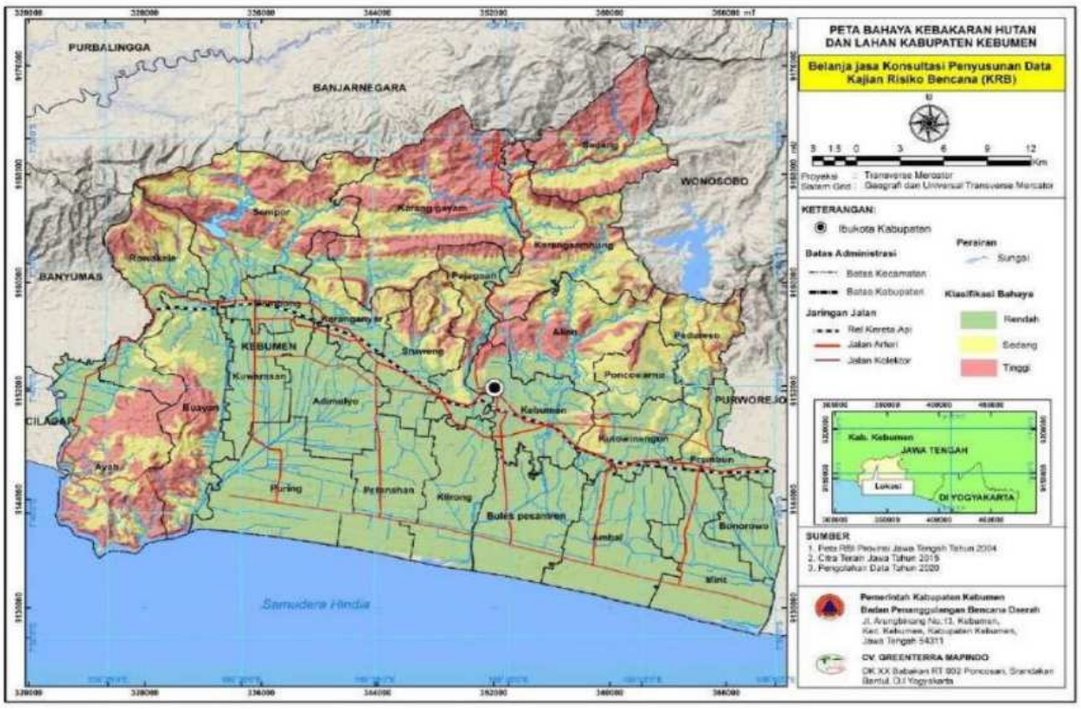
3. Kebakaran Lahan dan Hutan

Bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kebumen sering terjadi pada wilayah hutan dan lahan yang dikelola oleh Perhutani. Sebagian besar bahaya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah/semak-semak pada saat pembersihan lahan, sisa puntung rokok, bekas api unggun yang masih menyala di hutan ataupun lahan. Bahaya kebakaran hutan dan lahan sering sulit dipadamkan dengan cepat karena akses yang cukup sulit dan jauh.

Tabel II.23
Persentase Luas Bahaya Karhutla di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
27.833,56	21,7	28.241,02	22	72.036,92	56,2

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025, 2021

Gambar II.22
Peta Bahaya Karhutla Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase luas wilayah Kabupaten Kebumen didominasi oleh bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan klasifikasi rendah, yaitu dengan luas 72.036,92 hektare dan persentase sebesar 56,2 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan klasifikasi tinggi, luasnya mencapai 27.833,56 hektare atau 21,7 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen.

4. Gempa Bumi

Kabupaten Kebumen memiliki potensi bahaya gempa bumi tinggi dikarenakan letak Kabupaten Kebumen yang berdekatan dengan Zona Subduksi Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia di bagian selatan Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan wilayah Kabupaten Kebumen masuk dalam Zona Megathrust. Selain itu, beberapa sesar aktif di wilayah Karangsambung juga berpotensi memicu terjadinya gempa bumi. Berdasarkan catatan kejadian bencana, gempa bumi yang terjadi (dirasakan) di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan episentrum gempanya di luar wilayah Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen sebagai wilayah yang memiliki potensi risiko bencana gempa bumi dan tsunami telah dilengkapi dengan sarana *Early Warning System* (EWS) atau sistem peringatan dini gempa yang terpasang di beberapa titik strategis, khususnya di kawasan pesisir. Keberadaan alat deteksi dini ini menjadi potensi penting dalam meningkatkan

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, sekaligus mendukung upaya mitigasi risiko gempa bumi dan tsunami. Selain berfungsi memberikan peringatan lebih awal untuk evakuasi, EWS juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap keamanan wilayah, sehingga mendukung pengembangan wilayah, investasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

Tabel II.24
Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS)
Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Jenis	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	EWS Tsunami	17	23	23	24	24
2	EWS Longsor	4	15	21	24	23
3	EWS Banjir	3	3	3	3	3
4	Detektor Gempa BMKG	1	2	3	3	3

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel II.25
Data *Early Warning System* (EWS) di Kabupaten Kebumen

No	Desa	Koordinat	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Sumber Pengadaan	Kondisi	Tahun Pengadaan
EWS Longsor								
1	Blater	7°40'03.8"S 109°44'55.7"E	Poncowarno	1	Set	BPBD Prov. Jateng	Rusak	2018
2	Glontor	7°31'45.0"S 109°36'06.4"E		1	Set	BPBD Prov. Jateng	Rusak	2017
3	Seboro		Sadang	1	Unit	BPBD Prov. Jateng	Rusak	
4	Plumbon	7°35'05.5"S 109°44'08.1"E	Karangsambung	1	Set	ESDM Prov. Jateng	Rusak	
5	Wonokromo	7°37'19.5"S 109°44'09.8"E	Alian	1	Set	ESDM Prov. Jateng	Rusak	
6	Kalijering	7°37'36.2"S 109°48'36.6"E	Padureso	1	unit	APBD		2021
		7°37'41.9"S 109°48'42.5"E	Padureso	1	unit	APBD		2022
7	Penusupan	7°36'14.3"S 109°36'55.6"E	Sruweng	1	unit	APBD		2021
8	Kajoran	7°35'54.6"S 109°35'43.2"E	Karanggayam	1	unit	APBD		2021
9	Sampang	7°32'17.4"S 109°26'54.9"E	Sempor	1	unit	APBD	Rusak	2021
		7°31'38.1"S 109°26'36.1"E	Sempor	1	unit	APBD	Rusak	2022
10	Giyanti	7°33'25.7"S 109°27'09.7"E	Rowokele	1	unit	APBD		2021
11	Tlogosari	7°42'41.6"S 109°24'55.5"E	Ayah	1	unit	APBD		2022
12	Tlogowulung	7°38'18.0"S 109°44'16.2"E	Alian	1	unit	APBD		2022
13	Karangkembang	7°38'01.7"S 109°40'57.6"E	Alian	1	unit	APBD		2022
14	Kedunggong		Sadang	1	unit	BPBD Prov. Jateng		2021
15	Bumiagung	7°36'55.2"S 109°27'12.6"E	Rowokele	1	unit	PVMBG		2021
16	Kaliputih Sempor	7°34'06.1"S 109°29'37.6"E	Sempor	1	unit	PVMBG		2021
17	Kalirancang	7°36'59.9"S 109°42'06.6"E	Alian	1	unit	PVMBG		2021
18	Penimbun	-73359.61.109.3420.02	Karanggayam	1	unit	APBD		2023

No	Desa	Koordinat	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Sumber Pengadaan	Kondisi	Tahun Pengadaan
19	Glontor	7°31'26.68" S 109°36'15.59"E	Karanggayam	1	unit	APBD		2023
20	Tunjungseto	7° 34'3.17 S 109° 28''54.86" E	Sempor	1	unit	APBD		2023
21	Donorojo	S 7°31'12.0648" E 109°29'17.7864"	Sempor	1	unit	BPBD Prov. Jateng		2024
Total				23				
EWS Banjir								
1	Sidomukti	7°38'45.5"S 109°32'25.7"E	Adimulyo	1	unit	Swadaya Masyarakat		2013
2	Meles	7°38'55.0"S 109°33'27.1"E	Adimulyo	1	unit	DSP BNPB		2014
3	Sugihwaras	7°41'22.1"S 109°33'01.7"E	Adimulyo	1	unit	DSP BNPB		2014
Total				3				
	RPU GTZ	7°44'46.5"S 109°24'24.0"E	Argopeni					
1	Ayah	7°43'08.7"S 109°23'40.2"E	Ayah	1	unit	GTZ		2013
2	Karanggadung	7°45'52.1"S 109°35'09.4"E	Petanahan	1	unit	GTZ		2013
3	Surorejan	7°45'30.3"S 109°31'11.8"E	Puring	1	unit	GTZ		2013
4	Tambakmulyo	7°45'21.1"S 109°28'56.7"E	Puring	1	unit	BNPB		2013
5	Tegalretno	7°46'03.2"S 109°36'07.4"E	Petanahan	1	unit	BNPB		2013
6	Jogosimo	7°45'37.0"S 109°36'33.9"E	Klirong	1	unit	BNPB		2013
7	Setrojenar	7°46'36.6"S 109°39'47.1"E	Buluspesantren	1	unit	BNPB		2013
8	Kenoyojayan	7°47'23.7"S 109°42'58.1"E	Ambal	1	unit	BNPB		2013
9	Petangkuran	7°47'39.2"S 109°43'46.6"E	Ambal	1	unit	BNPB		2013
10	Lembupurwo	7°48'40.8"S 109°48'36.5"E	Mirit	1	unit	BNPB		2013
11	Karangrejo	7°45'49.8"S 109°34'22.8"E	Petanahan	1	unit	APBD		2019
12	Suwuk	7°45'20.5"S 109°28'15.8"E	Buayan	1	unit	APBD		2019

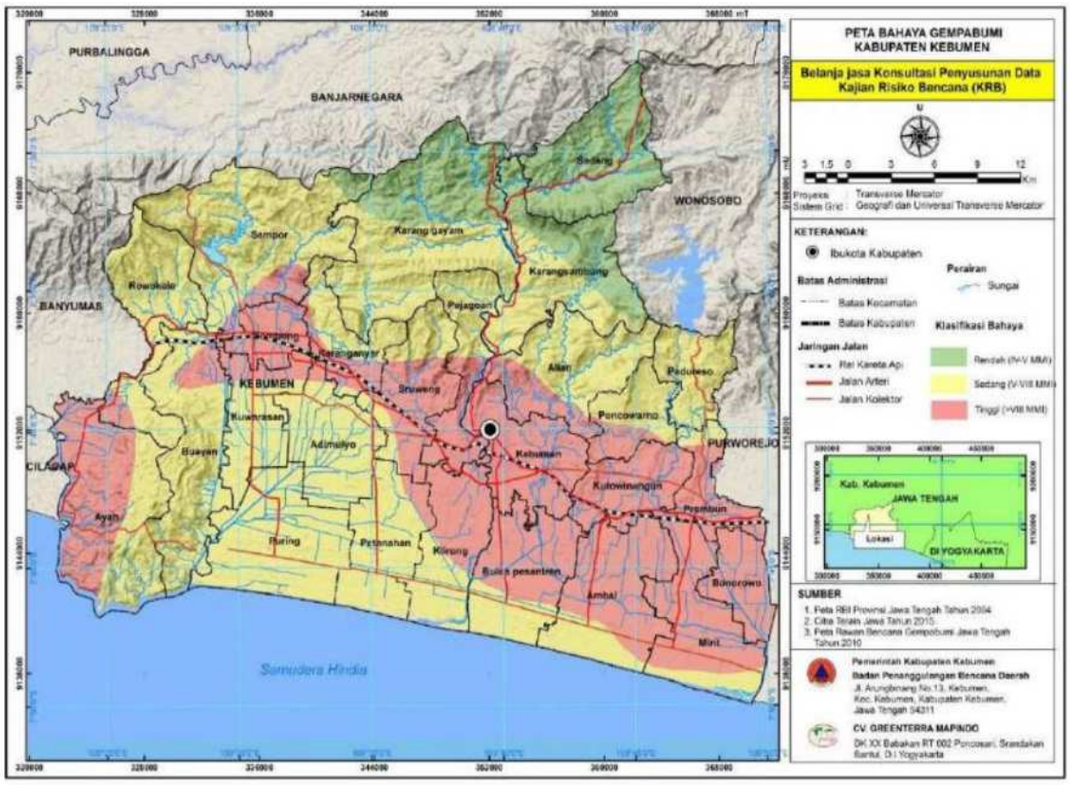
No	Desa	Koordinat	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Sumber Pengadaan	Kondisi	Tahun Pengadaan
13	Miritpetikusan	7°48'17.9"S 109°46'08.3"E	Mirit	1	unit	APBD		2019
14	Ayamputih	7°46'25.7"S 109°38'56.0"E	Buluspesantren	1	unit	APBD		2019
15	Wiromartan	7°49'12.6"S 109°49'27.1"E	Mirit	1	unit	APBD		2020
16	Tanggulangin	7°46'46.4"S 109°37'23.4"E	Klirong	1	unit	APBD		2020
17	Pasir	7°45'58.7"S 109°26'12.9"E	Ayah	1	unit	APBD		2020
18	Mirit	7°48'45.4"S 109°47'10.0"E	Mirit	1	unit	APBD		2021
19	Brecong	7°46'58.2"S 109°41'12.7"E	Buluspesantren	1	unit	APBD		2021
20	Sidoharjo	7°45'41.1"S 109°32'42.3"E	Puring	1	unit	APBD		2021
21	Waluyorejo	7°45'35.3"S 109°32'02.7"E	Puring	1	unit	APBD		2021
22	Jladri	7°44'47.5"S 109°28'22.6"E	Buayan	1	unit	APBD		2021
23	Lengkong	7°48'17.0"S 109°47'59.2"E	Mirit	1	unit	APBD		2021
24	Entak	S 7°47'18.3732" E 109°42'18.8064"	Ambal	1	unit	APBD		2023
Total				24				
EWS Tsunami								
1	Kebumen	-7.668104001325402, 109.66807262568236	Kebumen	1	Unit	BMKG		
2	Kebumen	-7.668104001325402, 109.66807262568236	Kebumen	1	Unit	BMKG	Rusak/Tidak Terpasang	
3	Karangbolong	-7.756405, 109.461233	Buayan	1	Unit	BMKG		
Total				3				

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2024

Tabel II.26
Persentase Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
45.510,34	35,52	69.975,47	54,62	12.625,21	9,85

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025, 2021



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2025, 2021

Gambar II.23
Peta Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Kebumen

Secara umum, hasil analisis bahaya menunjukkan wilayah Kabupaten Kebumen didominasi oleh bahaya gempa bumi dengan klasifikasi sedang yaitu dengan luas 69.975,47 hektare dan persentase sebesar 54,6 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Bahaya gempa bumi dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 45.510,34 hektare atau 35,52 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Sedangkan bahaya gempa bumi dengan klasifikasi rendah luasnya 12.625,21 hektare atau 9,85 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen.

5. Tanah Longsor

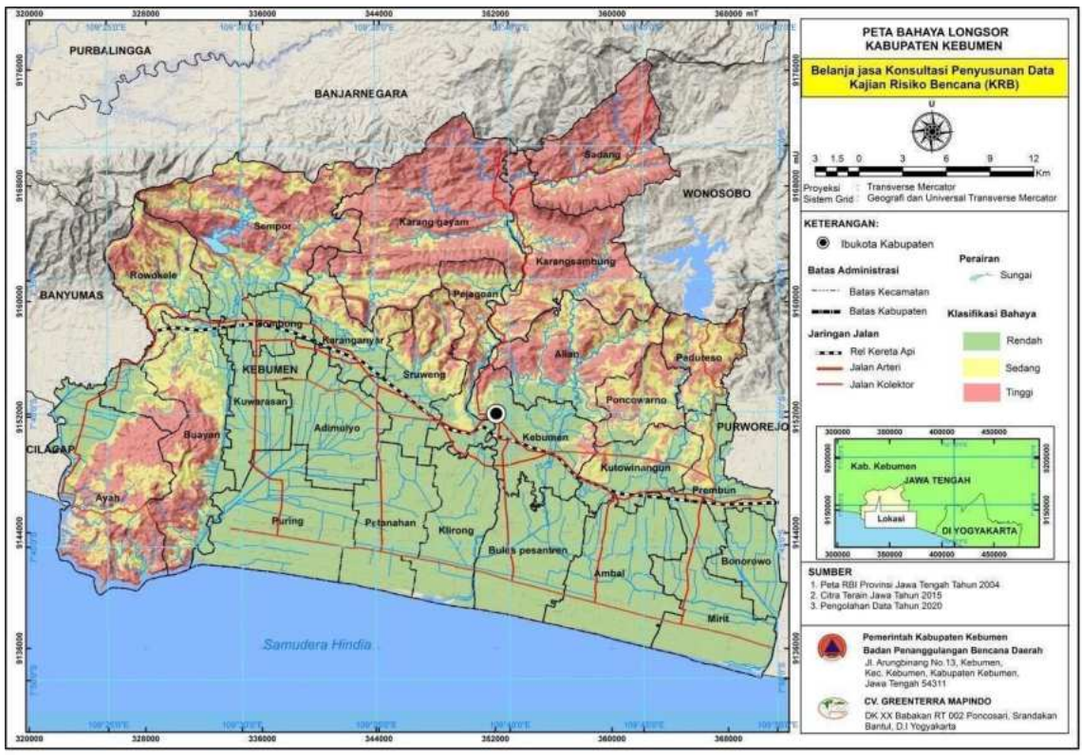
Topografi daerah Kabupaten Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal. Bahaya tanah longsor di Kabupaten Kebumen secara alamiah bersifat periodik terjadi tiap tahun pada periode musim hujan dan sering terjadi di wilayah bagian utara dan perbukitan selatan di Karangbolong. Tingginya frekuensi kejadian longsor, mengakibatkan bencana longsor dijadikan sebagai salah satu bencana prioritas di

Kabupaten Kebumen. Berdasarkan potensi bencana, semua wilayah kabupaten dimasukkan ke dalam 3 kategori yang ada sehingga wilayah yang secara perhitungan tidak memiliki bahaya longsor masuk ke dalam kategori rendah.

Tabel II.27
Persentase Luas Bahaya Banjir Tanah Longsor di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
38.589,87	30,1	24.663,87	19,3	64.857,75	50,6

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2025, 2021



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2025, 2021

Gambar II.24
Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, persentase luas wilayah Kebumen bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 38.589,87 hektare atau 30,1 persen, bahaya longsor dengan klasifikasi sedang luasnya 24.663,87 hektare atau 19,3 persen, dan bahaya longsor dengan klasifikasi rendah luasnya 64.857,75 hektare atau 50,6 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso, dan Karanggayam.

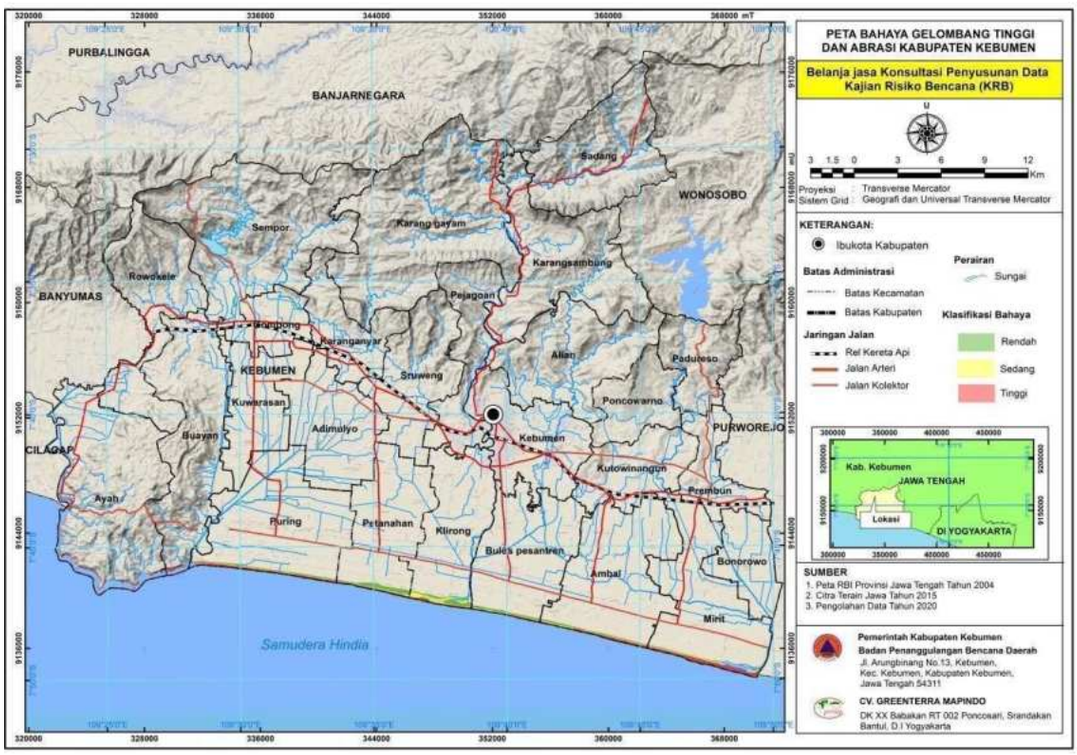
6. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi berdampak pada wilayah tidak terlalu luas, tetapi pada wilayah-wilayah yang masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan wisata pesisir, seringkali dampaknya menjadi lebih besar. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen mulai dari Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan, dan Ayah pernah terdampak bahaya gelombang ekstrem dan abrasi, terutama masyarakat nelayan dan pedagang di sekitar pantai.

Tabel II.28
Persentase Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
620,18	0,48	280,74	0,22	479,78	0,37

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2025, 2021



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025, 2021

Gambar II.25
Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi berorientasi pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Wilayah dengan bahaya gelombang ekstrem dan abrasi tinggi luasnya mencapai 620,18 hektare atau 0,48 persen. Wilayah dengan bahaya sedang luasnya 280,74 hektare atau 0,22 persen. Sedangkan wilayah dengan bahaya rendah

luasnya mencapai 479,79 hektare atau 0,37 persen dari total wilayah Kabupaten Kebumen.

Gelombang ekstrem dan abrasi pantai yang semakin sering terjadi di pesisir selatan Kabupaten Kebumen menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan permukiman, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Kondisi ini mendorong pentingnya pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai upaya adaptif berbasis komunitas. Destana berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana melalui edukasi, sistem peringatan dini, dan rencana evakuasi terpadu. Keberadaan Destana menjadi sangat relevan untuk membangun kesiapsiagaan terhadap dampak gelombang tinggi, banjir rob, dan abrasi, sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekologis di wilayah pesisir yang semakin rentan akibat perubahan iklim. Berikut merupakan jumlah desa tangguh bencana (Destana) di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir.

Tabel II.29
Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kebumen

No	Uraian Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Tangguh Bencana	70	460	460	460	460

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2025

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci Desa Tangguh Bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

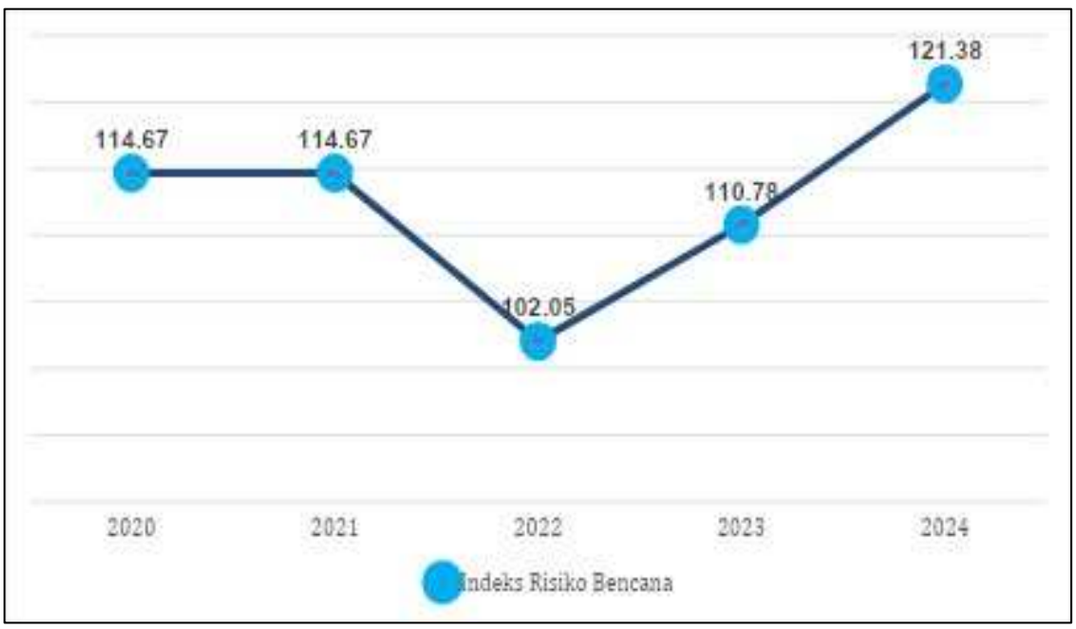
Bencana yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagai akibat kondisi topografi di wilayah Kabupaten Kebumen. Sejak tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026 menunjukkan tingkat risiko multibahaya Kabupaten Kebumen pada kategori tinggi untuk kelas bahaya, kategori sedang untuk kelas kerentanan, kategori tinggi untuk kelas kapasitas dan kategori sedang untuk kelas risiko. IRBI Kabupaten Kebumen tahun 2024 yaitu 121,38, meningkat (lebih buruk) dibandingkan tahun 2020 pada angka 114,67. Dari ketiga komponen pembentuk IRBI, untuk menurunkan risiko bencana dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencapai 0,87 pada tahun 2024. Namun, kondisi IKD tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2023 masing-masing sebesar 0,87 dan 0,90.

Tabel II.30
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,87	0,87	0,90	0,90	0,87

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025



Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2024

Gambar II.26
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK telah dituangkan dalam *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC) yang

diterbitkan pada tahun 2022 sebagai bagian dari kesepakatan global dalam Perjanjian Paris yang mencakup:

a. Target penurunan emisi GRK secara kondisional sebesar 43,20 persen pada tahun 2030 dengan dukungan internasional (pendanaan, transfer teknologi dan penguatan kapasitas). Sedangkan secara tidak kondisional sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri nasional;
b. Indonesia memfokuskan penurunan emisi pada 5 sektor utama, yaitu:
    1. Kehutanan dan penggunaan lahan dengan mengurangi deforestasi, meningkatkan rehabilitasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan;
    2. Energi dengan transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi, dan penghentian penggunaan batubara secara bertahap;
    3. Pertanian dengan penerapan teknologi rendah emisi dan praktik berkelanjutan;
    4. Pengolahan limbah dengan pengurangan emisi dari limbah rumah tangga maupun industri; serta
    5. Proses industri dan penggunaan produk dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.
c. Komitmen jangka panjang Indonesia adalah mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2026 atau dapat lebih cepat dengan pengurangan energi fosil secara bertahap, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro serta rehabilitasi ekosistem karbon biru (mangrove dan laut).

Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu sebagai salah satu kabupaten yang peduli dengan penurunan emisi GRK, Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen profil emisi GRK pada tahun 2023 sebagai dokumen inventarisasi GRK yang pertama, yang meliputi empat sektor yaitu sektor energi, sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*), sektor AFOLU/pertanian dan sektor limbah sebagai penghasil/penyerap emisi. Sejak tahun 2023 melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai dihitung penurunan emisi GRK kumulatif yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO2eq pada tahun 2023 menjadi 151.888,21 TonCO2eq pada tahun 2024.

2.1.1.7 Demografi

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.446.883 jiwa, tumbuh sebesar 0,89 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, namun demikian rata-rata masih di bawah 1 persen, kecuali pada tahun 2022.

Tabel II.31
Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.399.976	1.406.606	1.421.143	1.434.023	1.446.833
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,83	0,47	1,03	0,91	0,89

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI (data diolah), 2025

b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan *Sex Ratio*

Dari segi *sex ratio*, jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 734.040 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 712.793 jiwa, maka *sex ratio* penduduk mencapai 102,98 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Kebumen merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu mencapai 137.292 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Padureso yaitu sebanyak 17.592 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.32
Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin *(Sex Ratio)*
1	Ayah	68,627	103
2	Buayan	70,184	104
3	Puring	67,646	103
4	Petanahan	64,133	102
5	Klirong	67,837	103
6	Buluspesantren	62,523	104
7	Ambal	66,910	104
8	Mirit	56,981	103
9	Prembun	30,427	101
10	Kutowinangun	50,629	103
11	Alian	71,633	104
12	Kebumen	137,292	102
13	Pejagoan	58,121	104
14	Sruweng	64,953	102
15	Adimulyo	39,342	100
16	Kuwarasan	53,651	104
17	Rowokele	54,249	102
18	Sempor	73,595	103
19	Gombong	50,869	100
20	Karanganyar	38,690	102
21	Karanggayam	63,190	105
22	Sadang	24,199	106
23	Bonorowo	22,887	104
24	Padureso	17,592	103
25	Poncowarno	19,850	104
26	Karangsambung	50,823	104
Total 2024		**1.446.833**	**102,98**
Total 2023		**1.434.023**	**103,00**
Total 2022		**1.421.143**	**102,66**
Total 2021		**1.406.606**	**NA**
Total 2020		**1.399.976**	**102,74**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

Tabel II.33
Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Nama Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Ayah	34.796	50,70	33.831	49,30	68.627	4,74 persen
2	Buayan	35.835	51,06	34.349	48,94	70.184	4,85 persen
3	Puring	34.298	50,70	33.348	49,30	67.646	4,68 persen
4	Petanahan	32.436	50,58	31.697	49,42	64.133	4,43 persen
5	Klirong	34.396	50,70	33.441	49,30	67.837	4,69 persen
6	Buluspesantren	31.849	50,94	30.674	49,06	62.523	4,32 persen
7	Ambal	34.068	50,92	32.842	49,08	66.910	4,62 persen
8	Mirit	28.943	50,79	28.038	49,21	56.981	3,94 persen
9	Bonorowo	15.298	50,28	15.129	49,72	30.427	2,10
10	Prembun	25.687	50,74	24.942	49,26	50.629	3,50
11	Padureso	36.491	50,94	35.142	49,06	71.633	4,95
12	Kutowinangun	69.456	50,59	67.836	49,41	137.292	9,49
13	Alian	29.567	50,87	28.554	49,13	58.121	4,02
14	Poncowarno	32.787	50,48	32.166	49,52	64.953	4,49
15	Kebumen	19.660	49,97	19.682	50,03	39.342	2,72
16	Pejagoan	27.350	50,98	26.301	49,02	53.651	3,71
17	Sruweng	27.451	50,60	26.798	49,40	54.249	3,75
18	Adimulyo	37.397	50,81	36.198	49,19	73.595	5,09
19	Kuwarasan	25.377	49,89	25.492	50,11	50.869	3,52
20	Rowokele	19.537	50,50	19.153	49,50	38.690	2,67
21	Sempor	32.331	51,16	30.859	48,84	63.190	4,37
22	Gombong	12.446	51,43	11.753	48,57	24.199	1,67
23	Karanganyar	11.662	50,95	11.225	49,05	22.887	1,58
24	Karanggayam	8.909	50,64	8.683	49,36	17.592	1,22
25	Sadang	10.104	50,90	9.746	49,10	19.850	1,37
26	Karangsambung	25.909	50,98	24.914	49,02	50.823	3,51
Jumlah		**734.040**	**50,73**	**712.793**	**49,27**	**1.446.833**	**100,00**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI (data diolah), 2025

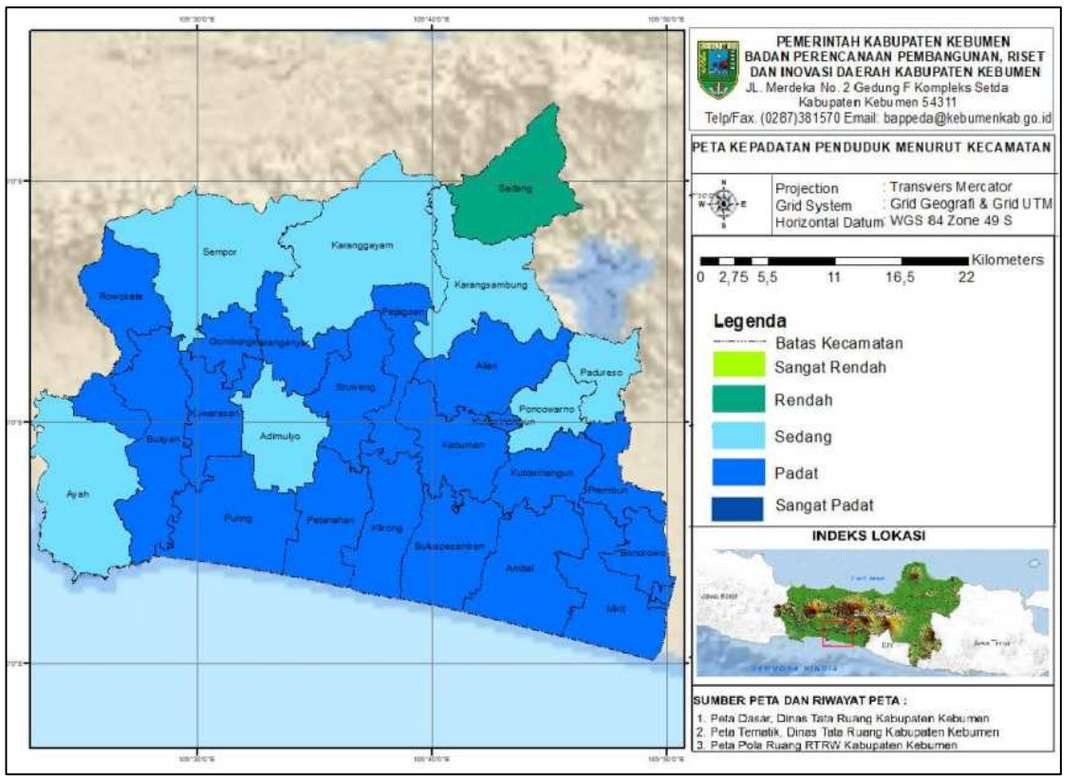
c. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 1.093 jiwa/km^2 pada tahun 2020 menjadi 1.129 jiwa/km^2 pada tahun 2024. Angka kepadatan ini berarti bahwa rata-rata terdapat 1.129 penduduk yang menghuni setiap 1 km^2 wilayah di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Kebumen merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 3.266 jiwa/km^2. Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sadang sebesar 608 jiwa/km^2.

Tabel II.34
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Ayah	76,37	68.627	899
2	Buayan	68,42	70.184	1.026
3	Puring	61,97	67.646	1.092
4	Petanahan	44,84	64.133	1.430
5	Klirong	43,25	67.837	1.568
6	Buluspesantren	48,77	62.523	1.282
7	Ambal	62,41	66.910	1.072
8	Mirit	52,35	56.981	1.088
9	Bonorowo	22,96	30.427	1.325
10	Prembun	33,73	50.629	1.501
11	Padureso	57,75	71.633	1.240
12	Kutowinangun	42,04	137.292	3.266
13	Alian	34,58	58.121	1.681
14	Poncowarno	43,68	64.953	1.487
15	Kebumen	43,43	39.342	906
16	Pejagoan	33,84	53.651	1.585
17	Sruweng	53,8	54.249	1.008
18	Adimulyo	100,15	73.595	735
19	Kuwarasan	19,48	50.869	2.611
20	Rowokele	31,4	38.690	1.232
21	Sempor	109,29	63.190	578
22	Gombong	54,23	24.199	446
23	Karanganyar	20,91	22.887	1.095
24	Karanggayam	28,95	17.592	608
25	Sadang	27,37	19.850	725
26	Karangsambung	65,15	50.823	780
Total 2024		**1281,12**	**1.446.833**	**1.129**
Total 2023			**1.434.023**	**1.119**
Total 2022			**1.421.143**	**1.109**
Total 2021			**1.406.606**	**1.098**
Total 2020			**1.399.976**	**1.093**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI (data diolah), 2025



Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.27
Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

d. Struktur Usia Penduduk

Keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada dampak perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Kebumen terbanyak pada usia 25-29 tahun dan paling sedikit pada usia 70-74 tahun. Angka ketergantungan dapat dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.35
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	48.463	45.482	93.945
2	5-9	55.319	51.577	106.896
3	10-14	57.324	52.905	110.229
4	15-19	53.033	49.762	102.795
5	20-24	56.782	53.434	110.216
6	25-29	59.216	53.842	113.058
7	30-34	56.271	51.328	107.599
8	35-39	55.054	50.091	105.145
9	40-44	53.200	49.955	103.155
10	45-49	47.353	46.525	93.878
11	50-54	42.907	44.141	87.048

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
12	55-59	41.373	45.381	86.754
13	60-64	36.093	39.284	75.377
14	65-69	28.108	30.504	58.612
15	70-74	20.366	20.638	41.004
16	75+	23.178	27.944	51.122
	Jumlah	**734.040**	**712.793**	**1.446.833**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI (data diolah), 2025

Proporsi penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2024 dengan kategori usia produktif (15—64 tahun) sebanyak 985.025 orang dan non produktif (0—14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebanyak 461.808 orang. Data tersebut menggambarkan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kebumen sebesar 46,88 persen, artinya setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 47 orang yang masuk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan tinggi (di atas 50 persen), maka beban ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Semakin tinggi beban ketergantungan maka dampaknya adalah akan mengurangi produktivitas.

e. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

Struktur tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar, dengan proporsi tertinggi berada pada kelompok tamat SD/sederajat sebesar 30,40 persen dari total penduduk. Selanjutnya, penduduk dengan pendidikan SLTA/sederajat dan SLTP/sederajat menempati urutan kedua dan ketiga terbanyak, masing-masing sebesar 20,61 persen dan 19,61 persen. Di sisi lain, masih terdapat 16,76 persen penduduk yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, serta 8,31 persen yang belum tamat SD/sederajat. Kondisi ini mencerminkan masih perlunya penguatan akses dan kualitas pendidikan dasar sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan tinggi tergolong rendah. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang diploma hingga strata III hanya mencakup 4,32 persen dari total jumlah penduduk, dengan rincian tertinggi pada lulusan Diploma IV/Strata I sebesar 3,04 persen. Rendahnya angka ini menunjukkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja terdidik dan berdaya saing tinggi. Perlunya pembangunan pendidikan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan angka partisipasi pendidikan

lanjutan, termasuk fasilitasi beasiswa, perluasan akses ke pendidikan tinggi, serta penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Tabel II.36
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Pendidikan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Persen
1	Tidak/Belum Sekolah	123.786	118.712	242.498	16.76
2	Belum Tamat SD/Sederajat	62.009	58.177	120.186	8,31
3	Tamat SD/Sederajat	208.676	231.197	439.873	30,40
4	SLTP/Sederajat	146.175	137.520	283.695	19,61
5	SLTA/Sederajat	166.081	132.093	298.174	20,61
6	Diploma I/II	1.292	1.678	2.970	0,21
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	5.574	7.969	13.543	0,94
8	Diploma IV/Strata I	19.331	24.685	44.016	3,04
9	Strata II	1.074	741	1.815	0,13
10	Strata III	42	21	63	0,004
Jumlah		**734.040**	**712.793**	**1.446.833**	**100,00**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semeseter II Tahun 2024, 2025

f. Proyeksi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2025 hingga tahun 2029 memperlihatkan bahwa kenaikan penduduk terjadi di sepanjang tahun dengan penjabaran sebagai berikut.

Tabel II.37
Proyeksi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Kelompok Usia	Penduduk Tahun 2020	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-4	101.069	112.365	112.590	112.678	112.617	112.400
5-9	98.436	102.177	105.010	107.681	110.077	112.133
10-14	104.958	99.121	98.869	99.126	99.897	101.126
15-19	106.148	104.958	103.936	102.595	101.155	99.923
20-24	111.865	108.407	107.849	107.738	107.825	107.731
25-29	108.222	116.596	116.869	116.319	115.228	114.015
30-34	105.747	111.761	113.487	115.502	117.560	119.284
35-39	94.901	107.535	109.205	110.392	111.311	112.317
40-44	89.804	95.606	97.835	100.511	103.390	106.093
45-49	86.478	90.010	90.872	91.769	92.804	94.140
50-54	83.879	85.735	86.243	86.878	87.625	88.443
55-59	76.029	81.862	82.438	82.825	83.114	83.412
60-64	63.238	72.490	73.970	75.312	76.486	77.465
65-69	48.767	58.018	59.873	61.730	63.544	65.256
70-74	31.856	41.940	43.761	45.452	47.065	48.677
75+	33.831	43.196	45.756	48.536	51.494	54.564
TOTAL	**1.345.228**	**1.431.777**	**1.448.563**	**1.465.044**	**1.481.192**	**1.496.979**

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Dari hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk terus meningkat dari 1.073 orang/km^2 menjadi 1.122 orang/km^2. Sementara itu jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat dari 974.960 jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.002.823 jiwa pada tahun 2029. Namun demikian secara proporsi terhadap total penduduk menunjukkan penurunan dari 68,09 persen pada tahun 2025 menjadi 66,99 persen pada tahun 2029. Penduduk usia non produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) terus meningkat baik dalam jumlah jiwa maupun proporsinya terhadap total penduduk. Penduduk usia non produktif meningkat dari 458.817 jiwa atau 31,91 persen pada tahun 2025 menjadi 494.156 jiwa atau 33,01 persen pada tahun 2029. Dengan meningkatnya proporsi penduduk usia non produktif dibandingkan penduduk usia produktif mengakibatkan terjadinya peningkatan angka ketergantungan dari 46,85 persen pada tahun 2025 menjadi 49,28 persen pada tahun 2029, menunjukkan semakin menjauh dari bonus demografi karena semakin mendekati batasan 50 persen. Dengan demikian beban yang ditanggung penduduk usia produktif semakin berat. Dikarenakan semakin meningkatnya usia harapan hidup, jumlah maupun proporsi penduduk usia lanjut semakin meningkat dari 143.154 jiwa atau 10 persen pada tahun 2025 menjadi 168.497 jiwa atau 11,26 persen pada tahun 2029 yang dapat meningkatkan masalah sosial utamanya bagi lansia yang kurang mampu serta munculnya penyakit degeneratif. Secara lengkap proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel II.38
Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Uraian	Penduduk Tahun 2020	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat kepadatan penduduk (orang/km^2)	1.008	1.073	1.086	1.098	1.110	1.122
Jumlah penduduk usia produktif (jiwa)	926.311	974.960	982.704	989.841	996.498	1.002.823
Persentase penduduk usia produktif terhadap total jumlah penduduk (Persen)	68,86	68,09	67,84	67,56	67,28	66,99
Jumlah penduduk usia non produktif (jiwa)	418.917	456.817	465.859	475.203	484.694	494.156
Persentase penduduk usia non produktif terhadap total jumlah penduduk (Persen)	31,14	31,91	32,16	32,44	32,72	33,01
Angka ketergantungan (Persen)	45,22	46,85	47,41	48,01	48,64	49,28
Jumlah penduduk usia lanjut (jiwa)	114.454	143.154	149.390	155.718	162.103	168.497
Persentase penduduk usia lanjut (Persen)	8,51	10,00	10,31	10,63	10,94	11,26

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor yang saling terkait, meliputi kesejahteraan ekonomi yang didukung oleh peluang kerja dan pertumbuhan usaha, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, serta pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai fondasi peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, perlindungan sosial yang adaptif, kehidupan beragama yang maslahat, kebudayaan yang maju, pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, serta terwujudnya masyarakat inklusif menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan di Kabupaten Kebumen.

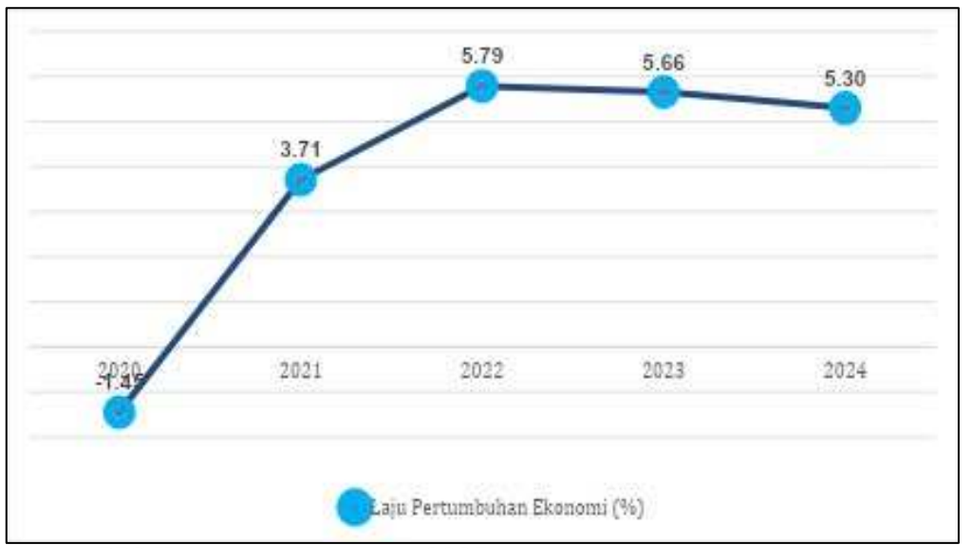
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang ditunjukkan melalui tingkat pendapatan, akses terhadap pekerjaan layak, serta distribusi hasil pembangunan yang adil. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah, digunakan beberapa indikator utama, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cerminan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dinamika perekonomian, tingkat kemiskinan untuk menggambarkan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka sebagai gambaran ketersediaan lapangan kerja, Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas hidup dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen meningkat. Tinjauan ekonomi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari Rp19.527,66 miliar (2020) menjadi Rp23.837,83 milyar (2024). Kenaikan PDRB ADHK 2010 murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen pada tahun 2024.

Pada tahun 2020, ekonomi Kabupaten Kebumen sempat mengalami kontraksi sebesar -1,45 persen. Namun, dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi meningkat

menjadi 3,71 persen pada 2021; 5,79 persen pada 2022; dan sedikit melambat menjadi 5,66 persen pada 2023. Adapun pada tahun setelahnya, perlambatan masih terjadi dengan capaian pertumbuhan ekonomi 5,30 persen pada 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.28
Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Berdasarkan rilis data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 yang mencapai 5,30 persen masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,95 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2024 ini tetap berada di posisi yang kompetitif di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.39
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kebumen	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,30
Provinsi Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	4,97	4,95
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2024

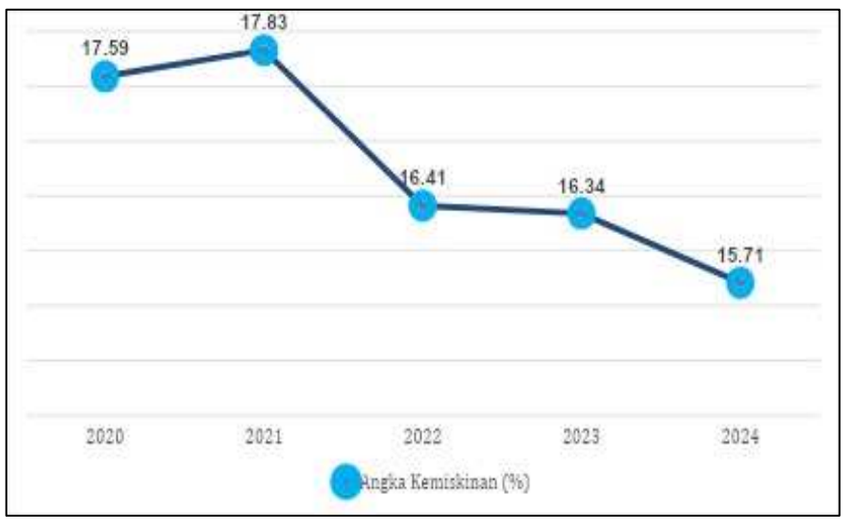
Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Selama periode lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin turun dari 17,59 persen (2020) menjadi 15,71 persen (2024). Setelah peningkatan pada 2020 dan 2021 yang mencapai 17,59 persen dan 17,83 persen sebagai dampak Pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan mulai mengalami tren penurunan

pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Penurunan kemiskinan juga didukung oleh berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel II.40
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Profil Kemiskinan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	Persen	17,59	17,83	16,41	16,34	15,71
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	211.090	212.900	196.160	195.450	187.950
Garis Kemiskinan	Rp.	380.557	390.599	416.004	451.678	471.824
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	2,62	3,24	3,41	2,89	2,35
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0,55	0,88	1,02	0,75	0,48

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.29
Angka Kemiskinan (Persen) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun begitu, capaian kemiskinan di tahun 2024 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain se-Provinsi Jawa Tengah. Angka kemiskinan sebesar 15,71 persen menjadikan Kabupaten Kebumen menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan indeks kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa rata-rata jarak pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan cukup jauh, sehingga menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang jauh dari kata sejahtera. Perlu adanya intervensi khusus dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dan

sinergis sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Tabel II.41
Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Angka Kemiskinan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kebumen	17,59	17,83	16,41	16,34	15,71
Provinsi Jawa Tengah	11,41*	11,79*	10,93*	10,77*	10,47*
Nasional	9,78*	10,14*	9,54*	9,36*	9,03*

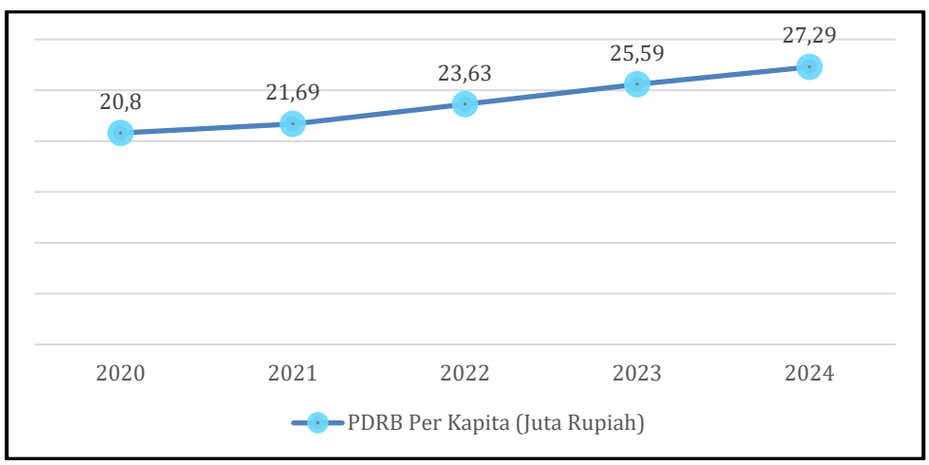
Sumber: BPS Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2024
**Data Bulan Maret*

PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 20,80 juta rupiah per kapita. Secara nominal, angka tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 27,29 juta rupiah per kapita pada tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita ini cukup tinggi yang salah satunya disebabkan karena ada pengaruh inflasi dalam pencatatannya.

Tabel II.42
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kebumen	20,80	21,69	23,63	25,59	27,29
Provinsi Jawa Tengah	36,97	38,57	41,93	45,17	47,97
Nasional	57,29	62,25	71,04	74,96	78,61

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.30
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen memiliki pola positif dalam lima tahun terakhir pelaksanaan pembangunan. TPT mengalami penurunan dari 6,07 persen pada

2020 menjadi 6,03 persen pada 2021. Selanjutnya, angka pengangguran kembali menurun dari 5,92 persen pada 2022 menjadi 5,11 persen pada 2023 dan mencapai 5,07 persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan penyerapan angkatan kerja yang lebih baik. Namun perlu dikaji kembali terkait kualitas dan produktivitas tenaga kerjanya agar mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di masa mendatang.

Tabel II.43
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kebumen	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07
Provinsi Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.31
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

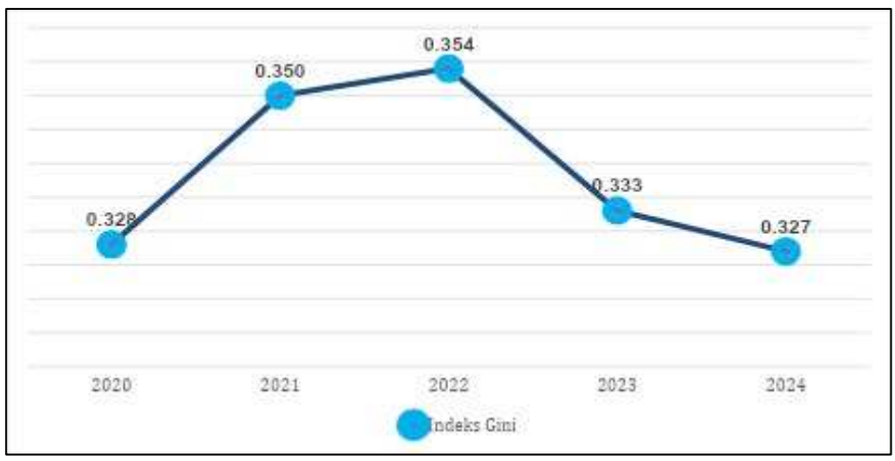
Distribusi pendapatan merupakan aspek penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita. Indeks Gini Kabupaten Kebumen didasarkan data SUSENAS mengenai pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen. Capaian Indeks Gini Kabupaten Kebumen lima tahun terakhir sempat meningkat menjadi 0,350 pada tahun 2021 dan 0,354 pada tahun 2022 walaupun kemudian menurun kembali menjadi 0,327 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan semakin meratanya pendapatan dan menurunnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat, karena semakin

menurunnya indeks gini menandakan semakin rendah ketimpangan pendapatan yang ada.

Tabel II.44
Indeks Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2020-2024

Indeks Gini	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kebumen	0,328	0,350	0,354	0,333	0,327
Provinsi Jawa Tengah	NA	0,372	0,374	0,369	0,367
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.32
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perbaikan dan tumbuh lebih baik. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur yang panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai 72,48. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,83 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,88. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Dengan demikian sejak tahun 2020, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.33
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Dalam empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Kebumen meningkat dari 69,81 pada tahun 2020 menjadi 72,48 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Kebumen rata-rata tumbuh sebesar 0,90 persen per tahun. IPM Kabupaten Kebumen tahun 2021 tercatat sebesar 70,56 atau tumbuh 1,03 persen. Namun demikian, setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Kebumen, IPM mulai mengalami pemulihan di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,83 persen dan di tahun 2024 tumbuh sebesar 0,83 persen. Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 meningkat meskipun terjadi perlambatan pada capaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tabel II.45
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

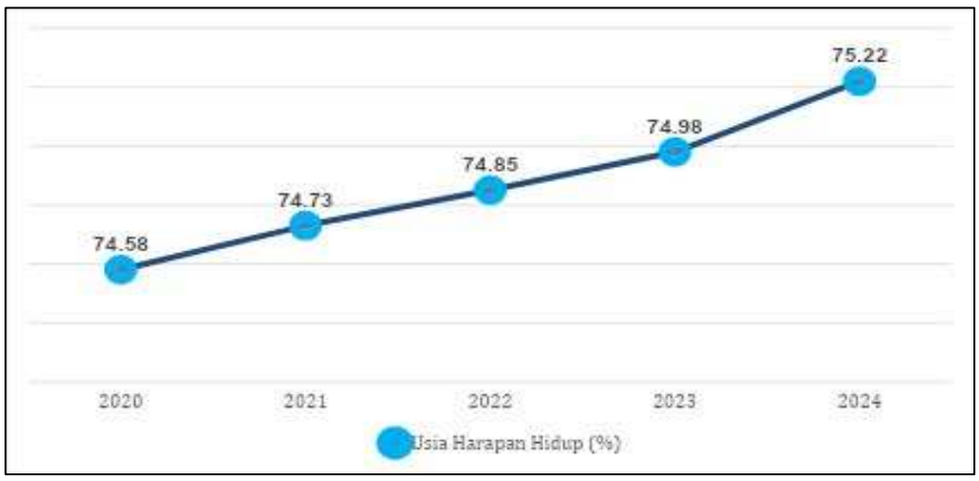
Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kebumen	69,81	70,56	71,29	71,88	72,48
Provinsi Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	73,88
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2020-2024

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH menunjukkan derajat kesehatan suatu negara dimana semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, maka semakin tinggi pula derajat kesehatannya. Capaian UHH mengalami peningkatan

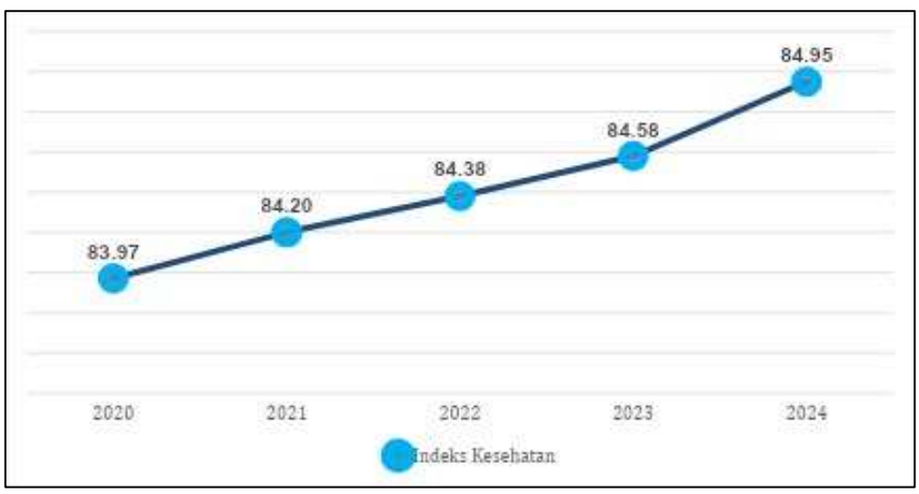
dari 74,58 pada tahun 2020 menjadi 75,22 pada tahun 2024. Kenaikan angka harapan hidup di Kabupaten Kebumen mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, mulai dari fasilitas medis yang lebih baik, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai hingga program imunisasi dan pencegahan penyakit yang semakin efektif.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.34
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (%)

Adapun indikator pengukur keberhasilan kesehatan dapat dilihat melalui indeks kesehatan yang merupakan indeks komposit IPM. Di Kabupaten Kebumen, terjadi peningkatan indeks kesehatan dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 indeks kesehatan sebesar 83,97 yang meningkat menjadi 84,95 pada tahun 2024. Hal tersebut juga mendukung meningkatnya IPM di Kabupaten Kebumen.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2024

Gambar II.35
Indeks Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dapat terlihat dari kondisi penurunan prevalensi stunting. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan semula 15,34 persen (2020) menjadi 9,17 persen (2024). Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan hasil yang beragam. Persentase gizi buruk Kabupaten Kebumen meningkat dari 0,02 persen (2020) menjadi 0,05 persen (2023) namun berhasil kembali ke angka 0,02 persen (2024). Intervensi yang diberikan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak dan akan berpengaruh selama kehidupannya.

Tabel II.46
Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (Persen)	15,34	12,13	10,23	9,87	9,17
Prevalensi Balita Gizi Buruk (Persen)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,02
Prevalensi Balita Gizi Kurang (Persen)	0,50	0,55	3,80	4,20	4,80

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Cakupan imunisasi bayi lengkap sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Situasi ini banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan layanan kesehatan rutin, termasuk kegiatan imunisasi. Pembatasan mobilitas, kekhawatiran masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan, serta fokus layanan pada penanganan pandemi menjadi faktor utama yang menurunkan cakupan imunisasi pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai 2024 berbagai upaya pemulihan layanan kesehatan berhasil dilakukan. Hal ini tercermin dari capaian cakupan imunisasi bayi lengkap yang kembali pulih bahkan mencapai 100%. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah pemulihan, peningkatan kembali partisipasi masyarakat, serta optimalnya peran tenaga kesehatan dalam memastikan seluruh bayi mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Tren positif ini menjadi landasan penting dalam menjaga kesehatan bayi dan mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Tabel II.47
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (Persen)	100,00	45,65	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Jumlah kasus kematian balita mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan anak-anak usia di bawah lima tahun. Berbagai faktor seperti keterbatasan akses pelayanan kesehatan, kondisi gizi yang kurang optimal, serta penyakit infeksi yang belum tertangani secara efektif dapat berkontribusi pada meningkatnya jumlah kasus tersebut.

Kasus kematian balita menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat intervensi kesehatan balita, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan program kesehatan guna menekan angka kematian balita dan memastikan tumbuh kembang anak yang optimal.

Tabel II.48
Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Kematian Balita (Kasus)	152	191	203	228	166

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan angka mortalitas. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka morbiditas di Kabupaten Kebumen saat pandemi COVID-19 tahun 2020 cukup tinggi, yakni sebesar 21,52 pada 2020, kemudian turun menjadi 14,24 pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 23,02. Pada tahun 2023 kembali terjadi sedikit penurunan menjadi 22,39, mengindikasikan terjadi perubahan gaya hidup, penurunan penyakit menular, masalah lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel II.49
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
Menurut Kecamatan dan Puskesmas

No	Kecamatan	Puskesmas	Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persen)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ayah	Ayah I	59.40	65.50	100.00	100.00	100.00
		Ayah II	100.00	89.80	100.00	100.00	100.00
2	Buayan	Buayan	93.90	100.00	93.60	100.00	100.00
3	Puring	Puring	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Petanahan	Petanahan	90.10	100.00	93.30	100.00	100.00
5	Klirong	Klirong I	47.60	89.10	100.00	100.00	100.00
		Klirong II	59.70	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Buluspesantren	Buluspesantren I	39.10	55.00	100.00	100.00	100.00
		Buluspesantren II	100.00	100.00	94.90	100.00	100.00
7	Ambal	Ambal I	90.50	100.00	100.00	100.00	100.00
		Ambal II	66.20	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Mirit	Mirit	70.60	68.50	100.00	100.00	100.00
9	Bonorowo	Bonorowo	93.40	91.70	100.00	100.00	100.00
10	Prembun	Prembun	61.00	78.00	92.40	100.00	100.00
11	Kutowinangun	Kutowinangun	98.40	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Alian	Alian	84.70	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Padureso	Padureso	100.00	85.30	100.00	100.00	100.00
14	Poncowarno	Poncowarno	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Kebumen	Kebumen I	99.50	97.00	100.00	100.00	100.00
		Kebumen II	91.40	100.00	100.00	100.00	100.00
		Kebumen III	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16	Pejagoan	Pejagoan	100.00	88.90	100.00	100.00	100.00
17	Sruweng	Sruweng	97.80	99.40	98.10	100.00	100.00
18	Adimulyo	Adimulyo	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Rowokele	Rowokele	100.00	98.00	100.00	100.00	100.00
21	Sempor	Sempor I	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Sempor II	100.00	75.90	100.00	100.00	100.00
22	Gombong	Gombong I	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Gombong II	92.70	61.70	100.00	100.00	100.00
23	Karanganyar	Karanganyar	99.70	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Karanggayam	Karanggayam I	90.00	81.30	100.00	100.00	100.00
		Karanggayam II	59.30	99.00	100.00	100.00	100.00
25	Karangsambung	Karangsambung	96.20	91.80	100.00	100.00	100.00
26	Sadang	Sadang	36.00	61.00	84.00	100.00	100.00
JUMLAH			86.21	90.77	98.75	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel II.50
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

No	Kecamatan	Puskesmas	Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan di Puskesmas (Persen)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ayah	Ayah I	66.50	76.90	100.00	100.00	100.00
		Ayah II	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Buayan	Buayan	67.30	85.80	94.20	100.00	100.00
3	Puring	Puring	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Petanahan	Petanahan	100.00	100.00	85.90	100.00	100.00
5	Klirong	Klirong I	49.40	96.20	99.50	100.00	100.00
		Klirong II	30.90	100.00	93.10	100.00	100.00
6	Buluspesantren	Buluspesantren I	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Buluspesantren II	56.00	71.90	95.90	100.00	100.00
7	Ambal	Ambal I	99.20	98.70	100.00	100.00	100.00
		Ambal II	31.40	99.40	100.00	100.00	100.00
8	Mirit	Mirit	32.60	87.20	96.60	100.00	100.00
9	Bonorowo	Bonorowo	99.00	82.90	84.00	100.00	100.00
10	Prembun	Prembun	21.60	67.70	87.20	100.00	100.00
11	Kutowinangun	Kutowinangun	85.90	74.00	100.00	100.00	100.00
12	Alian	Alian	66.80	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Padureso	Padureso	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Poncowarno	Poncowarno	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Kebumen	Kebumen I	95.20	95.70	99.90	100.00	100.00
		Kebumen II	82.50	83.50	100.00	100.00	100.00
		Kebumen III	27.30	41.40	98.90	100.00	100.00
16	Pejagoan	Pejagoan	84.40	95.00	100.00	100.00	100.00
17	Sruweng	Sruweng	96.30	99.30	95.90	100.00	100.00
18	Adimulyo	Adimulyo	92.70	100.00	100.00	100.00	100.00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	51.90	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Rowokele	Rowokele	62.10	49.80	98.80	100.00	100.00
21	Sempor	Sempor I	77.40	86.40	100.00	100.00	100.00
		Sempor II	100.00	93.90	98.00	100.00	100.00
22	Gombong	Gombong I	100.00	53.10	88.70	100.00	100.00
		Gombong II	71.10	54.10	98.70	100.00	100.00
23	Karanganyar	Karanganyar	86.40	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Karanggayam	Karanggayam I	65.40	89.70	100.00	100.00	100.00
		Karanggayam II	61.20	100.00	100.00	100.00	100.00
25	Karangsambung	Karangsambung	79.60	87.90	97.60	100.00	100.00
26	Sadang	Sadang	36.90	100.00	61.60	100.00	100.00
JUMLAH			73.63	87.73	96.41	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel II.51
Jumlah Kasus HIV Menurut Kelompok Umur

	Kelompok Umur	Kasus HIV				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	≤ 4 Tahun	2	1	1	1	1
2	5 - 14 Tahun	2	1	1	2	0
3	15 - 19 Tahun	7	7	6	7	1
4	20 - 24 Tahun	14	9	24	13	17
5	25 - 49 Tahun	86	74	102	95	107
6	≥ 50 Tahun	16	13	18	23	25
JUMLAH		127	105	152	141	151

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel II.52
Pelayanan Kesehatan Penderita DBD Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	2020			2021			2022			2023			2024		
			Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	CFR (Persen)	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	CFR (Persen)	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	CFR (Persen)	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	CFR (Persen)	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	CFR (Persen)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Ayah	Ayah I	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	1	10
		Ayah II	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Buayan	Buayan	11	0	0	0	0	0	10	0	0	7	0	0	9	0	0
3	Puring	Puring	1	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	8	0	0
4	Petanahan	Petanahan	7	1	14.3	2	2	100	2	0	0	1	0	0	7	0	0
5	Klirong	Klirong I	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0
		Klirong II	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
6	Buluspesantren	Buluspesantren I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		Buluspesantren II	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0
7	Ambal	Ambal I	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0
		Ambal II	5	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
8	Mirit	Mirit	4	0	0	1	0	0	20	0	0	15	0	0	10	0	0
9	Bonorowo	Bonorowo	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0
10	Prembun	Prembun	7	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	18	0	0
11	Kutowinangun	Kutowinangun	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
12	Alian	Alian	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
13	Padureso	Padureso	9	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14	Poncowarno	Poncowarno	3	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
15	Kebumen	Kebumen I	1	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0
		Kebumen II	5	0	0	0	0	0	18	0	0	11	0	0	21	0	0
		Kebumen III	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
16	Pejagoan	Pejagoan	2	0	0	2	0	0	17	0	0	4	0	0	7	0	0
17	Sruweng	Sruweng	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0
18	Adimulyo	Adimulyo	3	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0
19	Kuwarasan	Kuwarasan	18	1	5.6	0	0	0	5	0	0	6	0	0	16	1	6.3
20	Rowokele	Rowokele	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0
21	Sempor	Sempor I	11	1	9.1	2	0	0	7	0	0	2	0	0	20	0	0
		Sempor II	1	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0
22	Gombong	Gombong I	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0
		Gombong II	N/A	N/A	N/A	3	0	0	2	1	50	2	0	0	50	0	0
23	Karanganyar	Karanganyar	N/A	N/A	N/A	0	0	0	13	0	0	2	0	0	35	0	0
24	Karanggayam	Karanggayam I	N/A	N/A	N/A	0	0	0	11	1	0	5	0	0	4	0	0
		Karanggayam II	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	9.1	1	0	0	0	0	0
25	Karangsambung	Karangsambung	N/A	N/A	N/A	0	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0
26	Sadang	Sadang	N/A	N/A	N/A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			134	3	1	15	3	5.71428571	153	2	1.68857143	83	0	0	284	2	0.4657143

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Adapun kondisi kesehatan masyarakat, dilihat dari Tuberkulosis (TBC) saat ini yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita TBC. Hal tersebut mendorong pengendalian TBC nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Angka notifikasi kasus atau *Case Notification Rate* (CNR) di wilayah Kabupaten Kebumen meningkat, semula 140 per 100.000 penduduk (2020) naik menjadi 199 per 100.000 penduduk (2024). Upaya penanganan TBC hingga tahun 2024 terus dilakukan, ditunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC (*treatment coverage*) mencapai sebesar 94 persen (2024) serta angka keberhasilan pengobatan TBC (*treatment success rate*) mencapai sebesar 85 persen (2024).

Tabel II.53
Perkembangan Kasus *Tuberculosis* Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

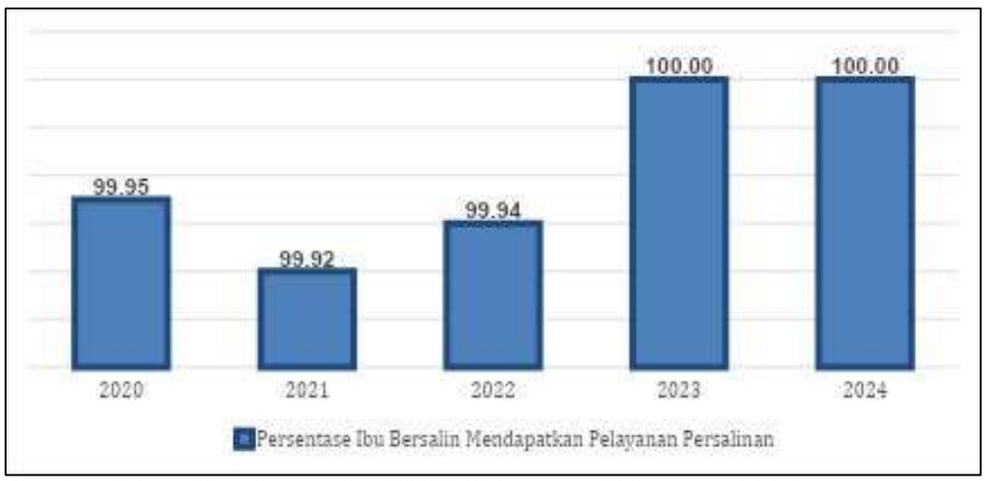
No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Notifikasi Kasus (*Case Notivication Rate*/CNR) Per 100.000	140	154	186	209	199
2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	96,00	94,00	95,00	93,00	94,00
3	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis *(treatment success rate)*	86,00	77,00	83,00	84,00	85,00

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Keberadaan tenaga kesehatan dalam proses persalinan sangat penting untuk memastikan penanganan cepat terhadap komplikasi seperti pendarahan atau infeksi, yang dapat mengurangi risiko kematian ibu. Berdasarkan data, persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan meningkat dari 99,95 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan. Namun, meskipun akses layanan kesehatan sudah optimal, angka kematian ibu memiliki pola yang fluktuatif. Angka kematian ibu meningkat dari 76,75 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 201,6 pada 2021, lalu menurun menjadi 165,3 pada 2022 dan 92,26 pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 108,96 pada 2024. Hal ini mengindikasikan

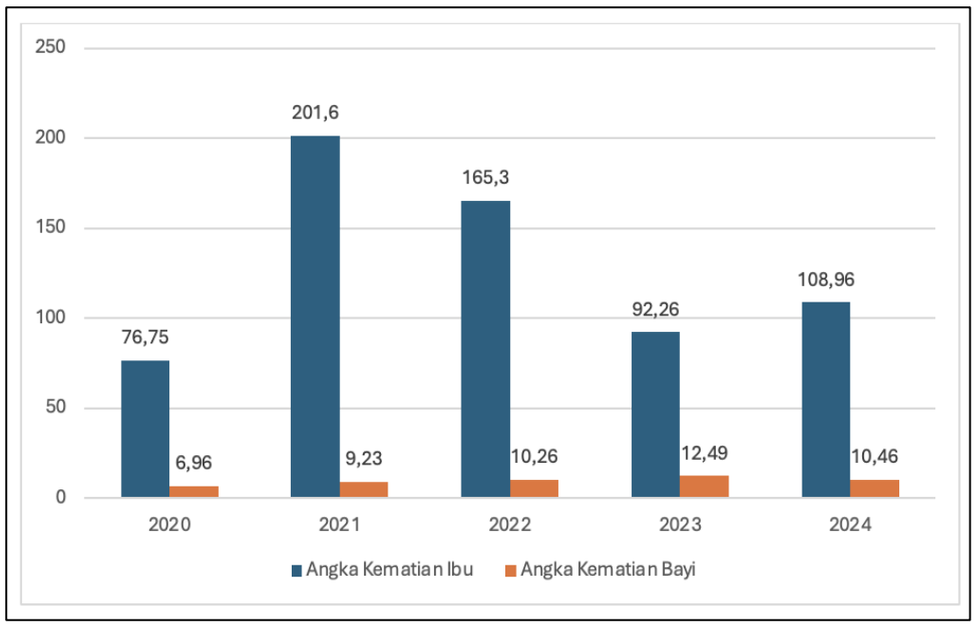
bahwa selain akses layanan kesehatan, faktor lain seperti kualitas pelayanan, kondisi kesehatan ibu sebelum melahirkan, serta penanganan komplikasi masih menjadi tantangan utama dalam menekan angka kematian ibu.

Sementara itu, angka kematian bayi menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari 6,96 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 9,23 per 1.000 pada 2021, 10,26 per 1.000 pada 2022, dan mencapai angka tertinggi 12,49 per 1.000 pada 2023 sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 10,46 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan pelayanan persalinan telah mencapai 100 persen, kualitas perawatan bayi baru lahir masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti deteksi dini komplikasi pada bayi, peningkatan layanan neonatal, serta edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, selain memperluas cakupan layanan, peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal harus menjadi prioritas guna menekan angka kematian ibu dan bayi secara efektif.



Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Gambar II.36
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.37
Angka Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Selain itu, sangat penting melihat kondisi kesehatan pada satuan keluarga yang memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Kinerja kesehatan keluarga ditunjukkan dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) untuk Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 0,15 meningkat menjadi 0,2 pada tahun 2023. Berdasarkan penilaian, jika IKS < 0,5 maka berarti IKS Kabupaten Kebumen masih masuk pada kategori keluarga tidak sehat.

Akses layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat dari 86,00 persen (2020) menjadi 99,07 persen (2024). Terkait pelayanan dan sarana prasarana kesehatan, jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen sebanyak 11 dan telah terakreditasi. Upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 jenis layanan seluruhnya tercapai 100 persen, meskipun masih terdapat kendala pada pelaksanaan posbindu di mana masyarakat yang sehat enggan datang pada kegiatan *screening* kesehatan usia produktif.

Capaian Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami naik turun. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan pandemi COVID-19. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, atau perubahan status kepesertaan dapat memengaruhi berkurangnya jumlah peserta aktif. Pada tahun 2022 sampaikan dengan 2024 program JKN tetap menjadi instrumen penting dalam menyediakan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, sehingga peningkatan kembali cakupan kepesertaan

aktif menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan yang merata.

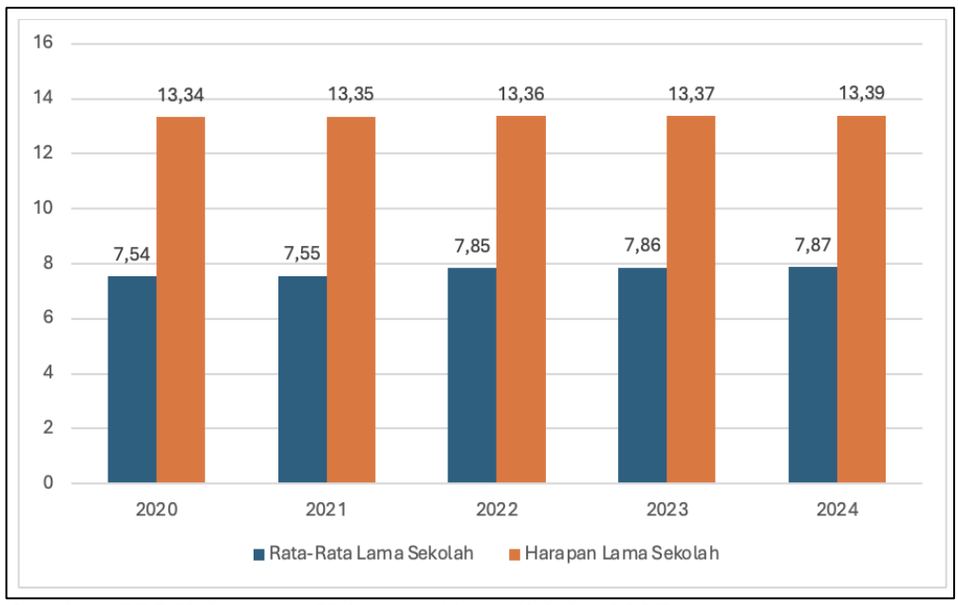
Tabel II.54
Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (Persen)	77,37	73,48	75,79	75,75	75,86

Sumber: BPJS, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pada dimensi pendidikan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, secara umum kedua indikator ini memiliki peningkatan di setiap tahunnya di mana angka harapan lama sekolah terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024 dengan peningkatan mencapai 0,15 persen. Meskipun demikian, kenaikan harapan lama sekolah sebelum tahun 2024 cukup rendah di setiap tahunnya, hanya berkisar 0,01 poin di mana pada tahun 2020 memiliki harapan lama sekolah selama 13,34 tahun dan menjadi 13,39 tahun pada tahun 2024.

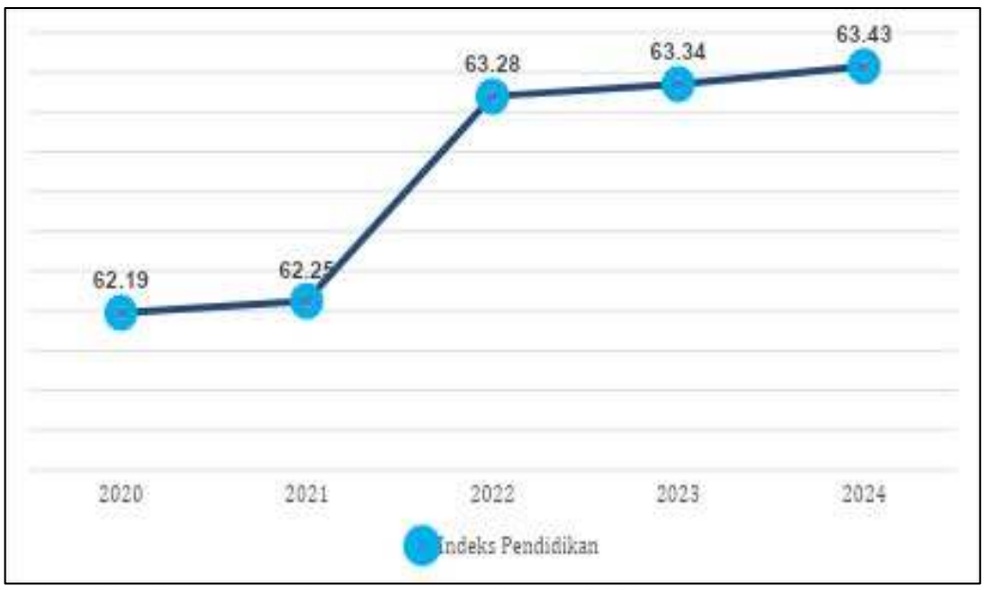


Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.38
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan semula pada tahun 2020 sebesar 7,54 persen meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,87 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata mengenyam pendidikan selama 7,87 tahun atau baru menduduki jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Meningkatnya indeks pembangunan manusia juga didukung oleh indikator pengukur pendidikan lainnya yaitu indeks pendidikan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 sebesar 63,43 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 62,19.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.39
Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada **kemampuan literasi dan numerasi** siswa, yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Berdasarkan data Rapor Pendidikan, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa SD dan SMP antara tahun 2022 hingga 2024. Kemampuan literasi membaca siswa SD meningkat dari 58,59 persen pada 2022 menjadi 84,28 persen pada 2024, sementara siswa SMP mengalami peningkatan dari 79,1 persen pada 2022 menjadi 87,29 persen pada 2024. Tren positif ini menunjukkan bahwa berbagai upaya Tingkat pemanfaatan perpustakaan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah mulai membuahkan hasil, terutama dalam aspek pemahaman teks dan kemampuan membaca yang lebih mendalam.

Di sisi lain, kemampuan numerasi siswa juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Numerasi siswa SD meningkat dari 42,83 persen pada 2022 menjadi 73,68 persen pada 2024, sementara numerasi siswa SMP mengalami kenaikan dari 57,69 persen pada 2022 menjadi 82,34 persen pada 2024. Meskipun peningkatan ini menggembirakan, numerasi siswa SD masih berada

di bawah standar kompetensi minimum 75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi lebih lanjut, seperti metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis pemecahan masalah, agar siswa dapat lebih memahami konsep-konsep matematika secara lebih baik. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam mutu pendidikan, tetapi juga menegaskan perlunya strategi yang lebih intensif untuk memastikan semua siswa mencapai kompetensi dasar yang diharapkan.

Tabel II.55
Angka Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Kebumen 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat SD/Sederajat					
Literasi Membaca (persen)	NA	NA	58,59	78,08	84,28
Numerasi (persen)	NA	NA	42,83	60,38	73,68
Tingkat SMP/Sederajat					
Literasi Membaca (persen)	NA	NA	79,10	84,12	87,29
Numerasi (persen)	NA	NA	57,69	61,72	82,34

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Pembangunan bidang perpustakaan di Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan meningkat pesat dari 59.073 orang pada tahun 2020 menjadi 307.633 orang pada tahun 2024. Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami fluktuasi namun relatif stabil, yaitu dari 38.561 buku (2020) menjadi 44.426 buku pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan menunjukkan peningkatan capaian dari 6,06 pada 2020 menjadi 29,42 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 nilai indikator tersebut turun drastis menjadi 0,12. Penurunan ekstrem ini bukan disebabkan oleh berkurangnya minat atau pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, tetapi lebih disebabkan oleh adanya perubahan metode penghitungan indikator yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mulai tahun 2023. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan bahwa layanan perpustakaan semakin diminati dan diakses oleh masyarakat, meskipun perlu penguatan dari sisi ketersediaan koleksi buku untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga menunjukkan pertumbuhan positif dari 12,39 di tahun 2020 menjadi puncaknya 18,85 pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 16,91. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akses dan pemanfaatan meningkat, tantangan dalam mempertahankan kualitas literasi masih perlu diperhatikan. Inovasi yang dilakukan, seperti pelibatan Bunda Literasi, penunjukan Duta Literasi, serta pelaksanaan pameran buku dan *community fair*, menjadi bagian penting dalam mendongkrak kesadaran literasi. Namun ke depan, upaya strategis juga perlu difokuskan pada peningkatan kualitas bahan bacaan, pelibatan komunitas, dan penyediaan fasilitas yang inklusif agar peningkatan literasi dapat berjalan berkelanjutan.

Tabel II.56
Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan (Persen)	6,06	25,35	29,42	0,12	0,27
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,39	12,85	18,69	18,85	16,91
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	59.073	270.777	278.174	290.399	307.633
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	38.561	45.844	47.344	43.940	44.426

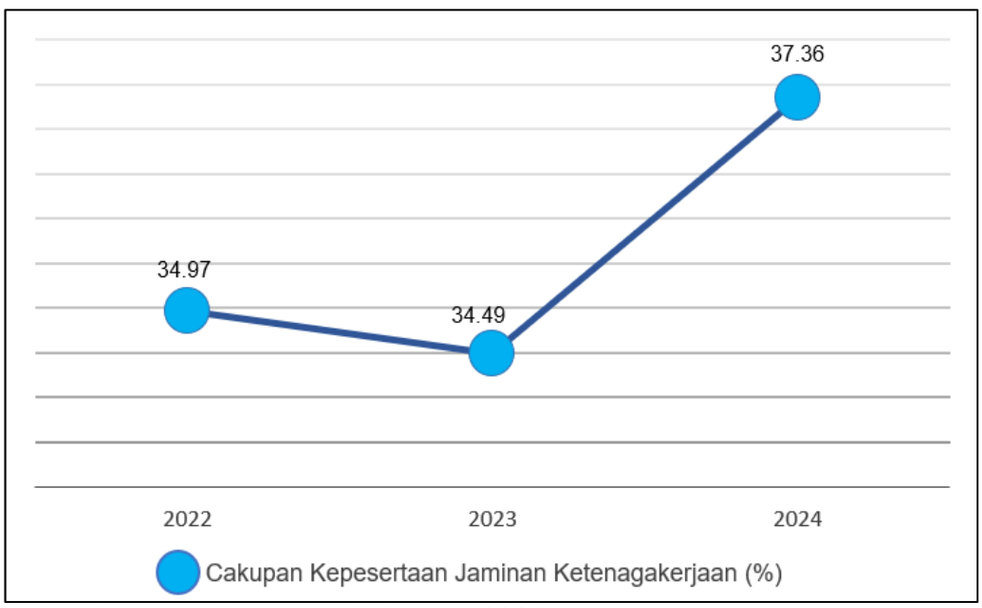
Sumber: Disarpus Kabupaten Kebumen, 2024

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan bagian integral dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Perlindungan sosial dirancang untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat rentan agar mampu menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, perlindungan sosial yang adaptif mencakup program-program yang responsif terhadap dinamika kondisi sosial, perubahan ekonomi, sehingga mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dasar masyarakat dan mendorong kemandirian jangka panjang. Implementasi perlindungan sosial yang adaptif menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, berdaya, dan terlindungi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan positif, dari 34,97 persen pada tahun 2022 menjadi 37,36 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan semakin banyaknya tenaga

kerja yang terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, baik pekerja formal maupun informal. Salah satu faktor yang turut mendorong peningkatan tersebut adalah adanya penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, terdapat kebutuhan tenaga kerja tambahan seperti petugas *ad hoc* di tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan, badan *ad hoc* lainnya, hingga tenaga pendukung teknis. Para tenaga kerja sementara ini juga didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan selama masa tugas mereka, sehingga meningkatkan jumlah kepesertaan secara signifikan, meskipun bersifat temporal. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan lembaga penyelenggara kegiatan publik terhadap pemberian perlindungan jaminan sosial semakin baik. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga pertumbuhan kepesertaan ini tetap berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada adanya event besar, tetapi melalui upaya penguatan regulasi, sosialisasi, serta kemudahan pendaftaran bagi pekerja di semua sektor.



Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.40
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persen)
Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024

Fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat Bekerja yang tercermin dari telah terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kabupaten Kebumen sejak Tahun 2023. Hingga Tahun 2024 telah terdapat 30 penyandang disabilitas yang memperoleh fasilitasi oleh ULD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten

Kebumen akan terus mendorong penyandang disabilitas dapat masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga rata-rata per kapita tiap bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Hal ini dapat terlihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang secara nominal terus mengalami peningkatan dari Rp883.889,00 pada tahun 2020 menjadi Rp1.060.534,00 pada tahun 2024. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di mana pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara umum pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun di atas 51 persen bahkan meningkat menjadi 53,30 persen pada tahun 2024 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih berada di kelompok menengah ke bawah yang baru mampu memenuhi kebutuhan dasar (primer) sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masih terbatas. Investasi yang mampu memproduksi barang primer yang dibutuhkan masyarakat lokal masih sangat dibutuhkan, walau investasi untuk memproduksi barang sekunder maupun tersier tetap juga harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan nilai tambah.

Tabel II.57
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp.)	883.889	920.590	988.371	1.049.508	1.060.534
	a. Pengeluaran untuk Makanan (Rp.)	453.597	476.516	504.646	538.343	565.260
	b. Pengeluaran untuk Non Makanan (Rp.)	430.292	444.075	483.725	511.167	495.274
2.	Proporsi Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan:					
	a. Proporsi Pengeluaran untuk Makanan (Persen)	51,32	51,76	51,05	51,29	53,30
	b. Proporsi Pengeluaran untuk Non Makanan (Persen)	48,68	48,24	48,95	48,71	46,70

Sumber: BPS dan Disnaker Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

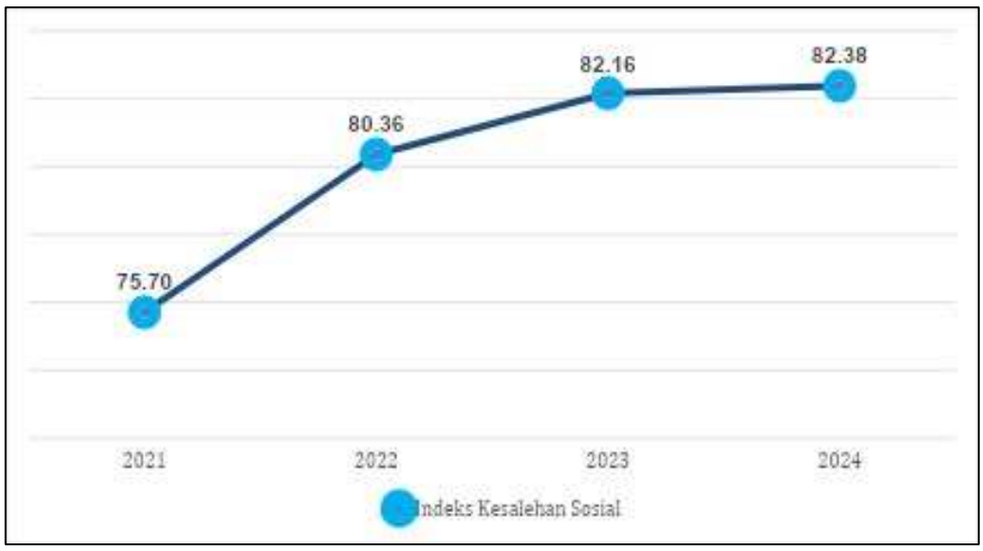
Kesejahteraan sosial budaya merupakan kondisi ideal di mana kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi tetapi juga mencakup kualitas kehidupan sosial dan budaya yang harmonis, berdaya, dan berkeadilan. Salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah adalah terwujudnya masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Beragama maslahat merupakan suatu kondisi di mana kehidupan beragama tidak hanya menjadi urusan personal tetapi memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial masyarakat, berkontribusi pada pembentukan etika, moral, dan karakter masyarakat, serta menjadi kekuatan spiritual yang mendukung pembangunan. Sedangkan berkebudayaan maju mencerminkan upaya melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya lokal sebagai identitas daerah, sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat untuk memperkuat daya saing dan karakter bangsa.

Pembangunan jangka menengah daerah menempatkan aspek sosial budaya sebagai salah satu titik vital dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menegaskan pentingnya mempertimbangkan norma, nilai, adat istiadat, serta dinamika sosial budaya lokal dalam setiap perumusan kebijakan dan program pembangunan. Arah pembangunan ini tidak hanya mendorong penguatan peran agama

sebagai landasan spiritual dan moral, tetapi juga menekankan pemajuan kebudayaan sebagai modal dasar untuk memperteguh jati diri, memperkuat karakter masyarakat, serta mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya yang berorientasi maslahat dan maju menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya makmur secara materi tetapi juga tangguh, berkarakter, dan bermartabat.

Salah satu indikator dalam melihat maslahatnya kehidupan beragama di suatu daerah adalah melalui Indeks Kesalehan Sosial, yaitu sebuah ukuran yang menggambarkan sejauh mana nilai-nilai sosial, moral, dan etika dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 82,38 pada tahun 2024, yang mencerminkan bahwa kehidupan beragama masyarakat semakin mencerminkan nilai-nilai harmoni sosial, inklusivitas, dan kepedulian terhadap sesama. Peningkatan indeks ini tidak hanya menggambarkan kehidupan masyarakat yang lebih damai, tetapi juga menunjukkan kualitas kehidupan sosial yang semakin baik, khususnya dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, menghormati hak-hak orang lain, serta berkontribusi aktif dalam membangun kebaikan bersama.

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap penguatan kehidupan beragama juga diwujudkan melalui hadirnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, yang di dalamnya memuat fasilitasi terhadap kegiatan pendidikan keagamaan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Melalui fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan ini, keberagamaan masyarakat diharapkan tidak hanya bersifat ritual tetapi juga berdampak nyata dalam kehidupan sosial, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi maslahat dan keberlanjutan.



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, 2024

Gambar II.41
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024

Pemajuan kebudayaan diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Pembangunan kebudayaan terus ditingkatkan dan diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. Kearifan lokal dan nilai budaya dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Indeks Pembangunan Kebudayaan pada analisis ini menggunakan data Provinsi Jawa Tengah di mana terjadi kenaikan indeks dari 59,12 (2020) menjadi 60,89 (2023).

Sebagai upaya melestarikan budaya, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11,50 persen Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) telah dilestarikan di Kabupaten Kebumen. Dukungan masyarakat dalam mengapresiasi warisan budaya dan sejarah ditunjukkan dengan jumlah kunjungan ke tempat sejarah sebesar 46.636 orang pada tahun 2024. Selain itu, upaya pemanfaatan kesenian juga terus dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir di tahun 2024 sebanyak 17,32 persen. Pengembangan kebudayaan juga terus dilakukan di lembaga pendidikan dengan adanya pada tahun 2024 sebesar 64,07 persen satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan.



Keterangan:

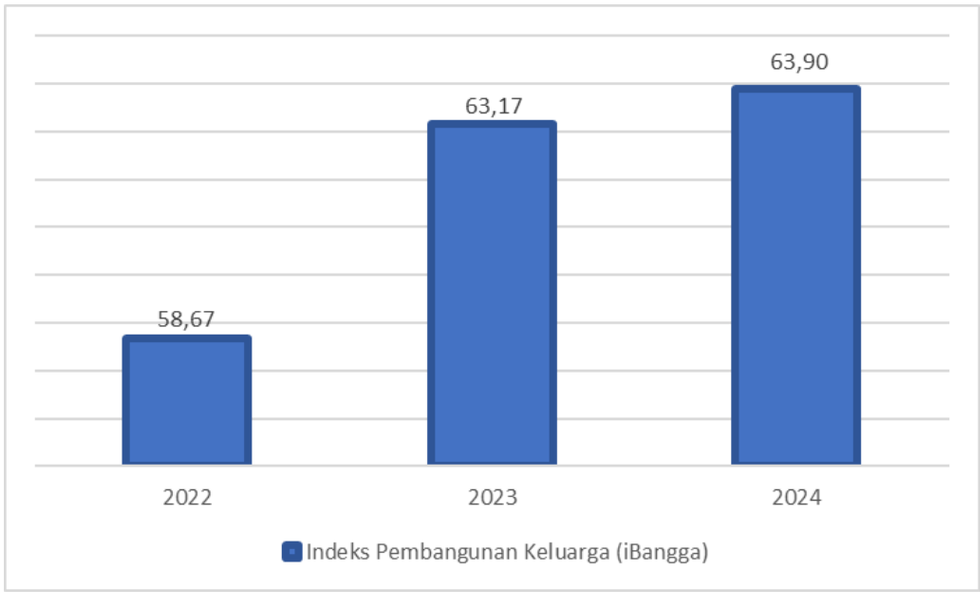
*) Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merujuk pada UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan data bersumber dari BPS dan Kementerian/Lembaga lainnya yang merujuk pada framework Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2018, serta data terakhir dirilis data tahun 2022. Data IPK yang tersedia hanya di tingkat Provinsi.

Sumber: OPD Urusan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (data diolah), 2025

Gambar II.42
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kebumen 2020-2023

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) digunakan sebagai alat ukur kualitas keluarga berdasarkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga di berbagai wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Kebumen, kinerja iBangga mengalami peningkatan dari 58,67 pada 2022 menjadi 63,17 pada 2023. iBangga dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 63,90. Namun pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kualitas keluarga masih perlu ditingkatkan. Meskipun mengalami perbaikan, angka ini masih berada di bawah nilai 70, yang berarti kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk dalam kategori cukup baik atau berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat mencapai kategori baik dengan nilai di atas 70.



Keterangan:
*) Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merujuk pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2021
Sumber: BKKBN, 2025

Gambar II.43
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2024

Perkembangan pembangunan gender di Kabupaten Kebumen selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang tercermin dari tiga indikator utama. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami kenaikan tipis namun stabil dari 93,05 pada tahun 2020 menjadi 93,41 pada tahun 2024, yang mencerminkan bahwa kesetaraan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi relatif terjaga. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 66,89 pada tahun 2020 menjadi 69,71 pada tahun 2024, yang menandakan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sektor ekonomi, dan parlemen. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0,416 menjadi 0,328 selama periode tersebut, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam mengurangi kesenjangan gender, khususnya dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, partisipasi ekonomi, dan representasi politik.

Tabel II.58
Perkembangan Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,05	93,06	93,26	93,37	93,41
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,89	66,86	66,87	67,78	69,71
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,416	0,359	0,349	0,344	0,328

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik**, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 57,67 kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 55,59 pada tahun 2021. Namun, tren ini berbalik dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 60,96, tahun 2023 sebesar 62,49, dan mencapai 66,46 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, meskipun masih berada di bawah tingkat partisipasi laki-laki yang mencapai 88,08 pada tahun 2024.

Meskipun peningkatan TPAK perempuan cukup konsisten, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti peran gender tradisional yang membatasi perempuan dalam urusan domestik, akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak dan kebijakan cuti melahirkan dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk lebih aktif di dunia kerja. Selain itu, kesenjangan upah dan norma sosial yang masih membatasi mobilitas serta pilihan pekerjaan bagi perempuan juga dapat berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, seperti penyediaan fasilitas pendukung bagi pekerja perempuan dan peningkatan akses pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.



Sumber: Disnaker dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Pemuda sebagai sumber daya manusia potensial juga harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam mengukur peran serta pemuda dalam pembangunan, maka dapat terlihat dari indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), di mana sampai saat ini baru dihitung hingga level provinsi. Merujuk kinerja IPP Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 71,37. Pada tingkat Kabupaten Kebumen dapat dilihat tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 50 persen pada tahun 2023. Pemuda yang dihitung adalah persentase pemuda berusia antara 16-30 tahun yang berwirausaha terhadap total populasi pemuda berusia antara 16-30 tahun di Kabupaten Kebumen.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menarik investasi dan tenaga kerja berkualitas. Beberapa faktor yang ditengarai akan menjadi penentu daya saing daerah seperti infrastruktur yang memadai, kebijakan pemerintah yang mendukung dunia usaha, kualitas sumber daya manusia, inovasi, stabilitas ekonomi, dan kemudahan berinvestasi.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Angka ketergantungan Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif, namun ada kecenderungan meningkat dari 45,41 pada tahun 2020 menjadi 46,88 pada tahun 2024. Jika dilihat dari usia menunjukkan penduduk usia di atas 64 tahun terus bertambah, salah satunya dikarenakan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kebumen. Sementara usia di bawah 15 tahun cenderung mengalami penurunan.

Semakin meningkatnya angka ketergantungan mengandung arti semakin meningkat pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Persentase ketergantungan Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencapai angka 46,88 persen yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia non produktif. Untuk itu peluang masih melimpahnya usia produktif saat ini harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas mereka salah satunya dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk usia di bawah 15 tahun harus dioptimalkan kualitas pendidikannya agar nantinya siap bekerja dengan produktivitas yang tinggi ketika telah memasuki usia kerja sehingga tenaga kerja Kabupaten Kebumen akan lebih berdaya saing.

Tabel II.59
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia <15 thn (orang)	317.928	317.595	297.631	306.173	311.070
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun (orang)	119.254	132.653	145.909	144.267	150.738
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (Usia <15 thn ditambah Usia > 64 tahun dalam orang)	437.182	450.248	443.540	450.440	461.808
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64 (orang)	962.794	966.721	977.603	976.392	985.025
Rasio Ketergantungan (Persen)	**45,41**	**46,57**	**45,37**	**46,1**	**46,88**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2024

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Secara umum, kontribusi sektor **industri pengolahan** dalam PDRB ADHB Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah mencapai 21,61 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 21,31 persen pada 2021. Selanjutnya, pada 2022, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan menjadi 21,78 persen dan terus bertumbuh hingga 22,24 persen pada 2023 dan 22,69 persen pada tahun 2024. Pergerakan angka ini mencerminkan peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen, yang terus mengalami pertumbuhan dan diiringi dengan kontribusi terhadap perekonomian yang terus meningkat.

Tabel II.60
Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kategori Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Kebumen 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen)	21,26	21,31	21,78	22,24	22,69
2	LPE PDRB Industri Pengolahan (Persen)	0,67	3,07	6,84	6,31	6,00
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen)	2,04	2,08	2,55	2,73	2,85
4	LPE PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen)	-6,84	5,90	28,31	16,16	10,35

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Struktur ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki pertumbuhan positif di tahun 2024 hingga mencapai 10,35 persen**.** Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen sebesar 1,09 triliun rupiah atau 2,85 persen dari total nilai PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2024. Laju pertumbuhan perekonomian sektor ini pun juga cenderung meningkat. Peningkatan ini seiring dengan gencarnya promosi desa wisata di wilayah Kabupaten Kebumen serta adanya pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19.

Jumlah tamu wisatawan menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ketika mobilitas masyarakat masih sangat terbatas, jumlah tamu wisatawan tercatat sebanyak 854.315 orang. Seiring pelonggaran pembatasan dan pemulihan aktivitas ekonomi, jumlah tamu wisatawan terus meningkat hingga mencapai 2.614.639 orang pada Tahun 2024.

Selain tamu wisatawan nusantara, tamu wisatawan mancanegara juga mulai menunjukkan tanda pemulihan. Tercatat sebanyak 23 tamu wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Kebumen pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 0 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang pengembangan pariwisata daerah agar semakin dikenal dan diminati oleh wisatawan, termasuk dari mancanegara.

Tabel II.61
Jumlah Tamu Wisatawan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	0	5	9	11	23
2	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	854.315	966.936	1.623.856	2.151.098	2.614.639

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

Kondisi jumlah produk tersertifikasi halal di wilayah Kebumen sebagai berikut: tahun 2021 sebanyak 26 produk, tahun 2022 sebanyak 20 produk, tahun 2023 sebanyak 15 produk, tahun 2024 Kabupaten Kebumen hanya memfasilitasi UMKM dan tahun 2025 angka sementara sampai Bulan Juli sebanyak 5 produk.

Tabel II.62
Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023

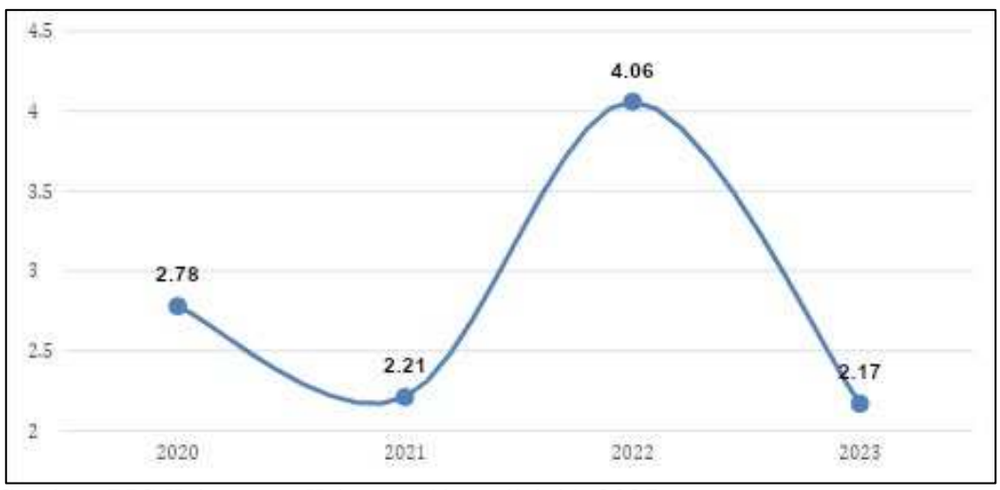
Jenis-Jenis Ternak	Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Kebumen			
	2020	2021	2022	2023
Ayam Kampung (kg)	3.004.470	301.062	250.367	920.389
Ayam Petelur (kg)	685.940	1.723.054	1.310.653	1.511.399
Itik (kg)	76.218.700	482.101	391.695	870.992
Sapi Perah (kg)	-	1.126	1.095	360
Kulit Sapi/Kerbau (lembar)	6.047.900	13.334	12.830	8.875
Kulit Kambing/Domba (lembar)	18.900.440	32.136	31.092	13.332

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Data produksi daging ternak menunjukkan fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Puncak produksi terjadi pada tahun 2021, diikuti penurunan pada tahun 2022 dan menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2022 dan 2023. Sapi merupakan kontributor terbesar dalam produksi daging ternak, kedua adalah kambing. Produksi daging ternak lain seperti domba, kerbau, kelinci, dan kuda hanya memberikan kontribusi yang kecil. Produksi daging unggas paling besar adalah ayam pedaging yang puncak produksinya pada tahun 2024, diikuti oleh ayam kampung. Produksi telur paling besar dihasilkan oleh ayam ras petelur kemudian yang kedua adalah ayam

kampung. Untuk susu hanya tersedia pada tahun 2021-2023. Populasi ternak ruminansia paling banyak adalah kambing, kemudian diikuti oleh sapi potong. Populasi paling banyak adalah pada tahun 2022. Populasi unggas paling banyak adalah ayam broiler/pedaging yang paling banyak pada tahun 2022.

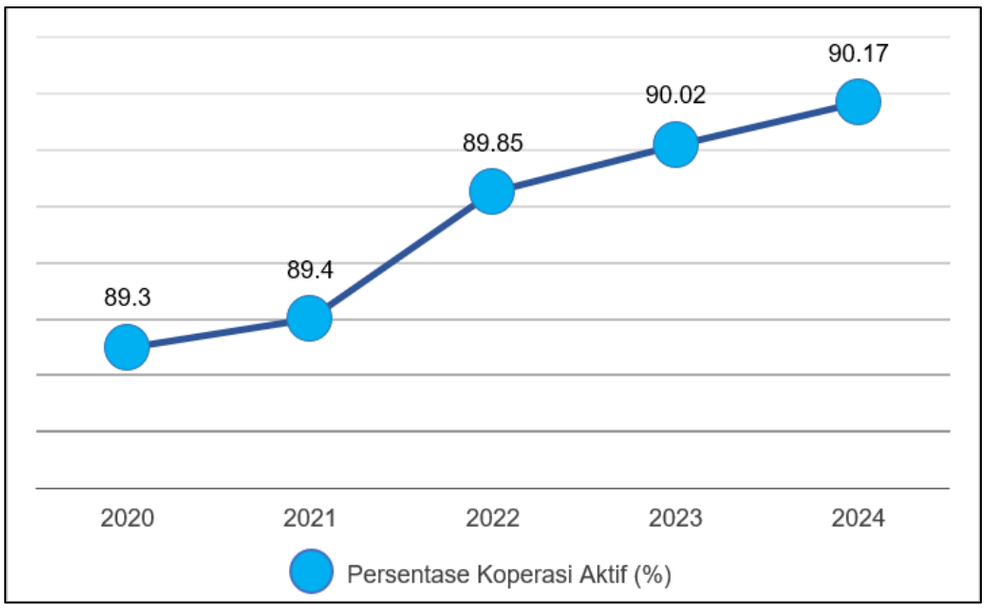
Pengembangan perekonomian di Kabupaten Kebumen, khususnya perekonomian kerakyatan dan berbasis kewirausahaan masih belum optimal di mana terjadi fluktuasi pada Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Kebumen. Adapun Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 2,17 persen setelah meningkat cukup signifikan di tahun 2022 sebesar 4,06 persen. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam pendampingan, permodalan, proses hingga pemasaran.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.45
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023

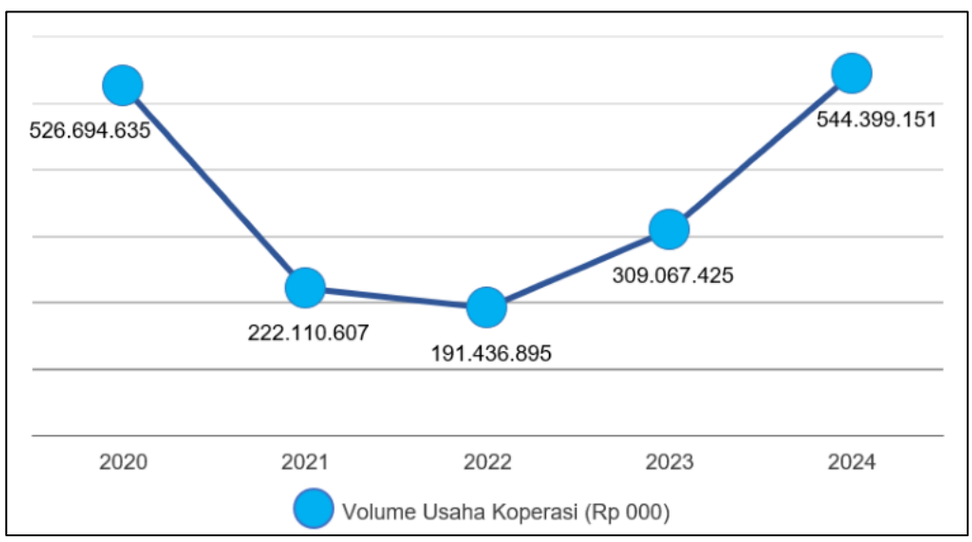
Sektor koperasi dan UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Persentase koperasi aktif mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dari 89,30 persen pada tahun 2020 menjadi 90,17 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan keberlanjutan kelembagaan dan aktivitas usaha koperasi.



Sumber: Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.46
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

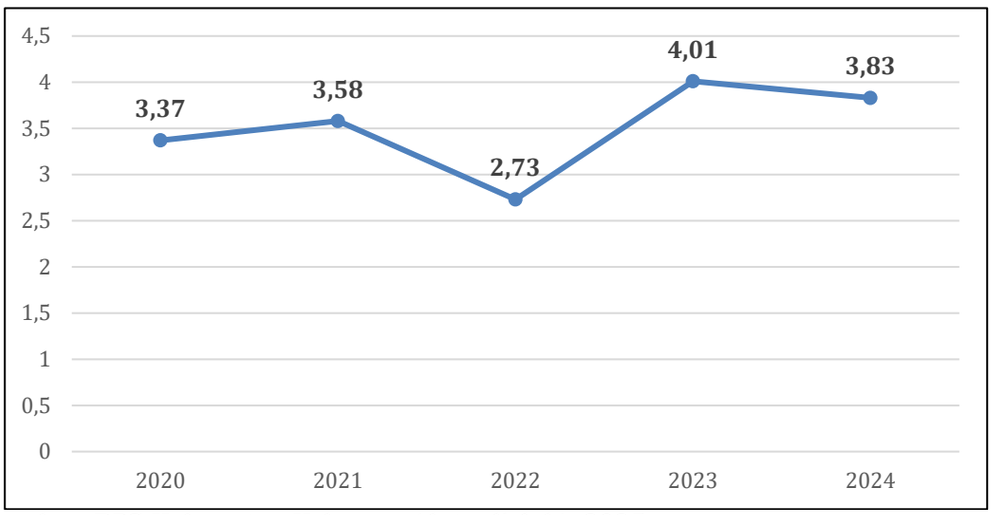
Dari sisi kinerja ekonomi, total volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan, dari Rp526.694.635000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp544.399.151.000,00 pada tahun 2024. Meskipun demikian, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil, yaitu sekitar 1,55 persen terhadap total PDRB. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran koperasi dan UMKM agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap struktur ekonomi daerah.



Sumber: Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.47
Volume Usaha Koperasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mengembangkan sektor industri pengolahan melalui pengembangan BUMD. Tingkat *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2024 telah mencapai 3,83 persen. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk BUMD baru yaitu Aneka Usaha Kebumen Jaya yang bergerak di beberapa sektor usaha. Diharapkan dengan pengembangan BUMD yang merupakan salah satu pendorong kenaikan derajat otonomi fiskal mampu mewujudkan kemandirian pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah hasil dari BUMD Kabupaten Kebumen.

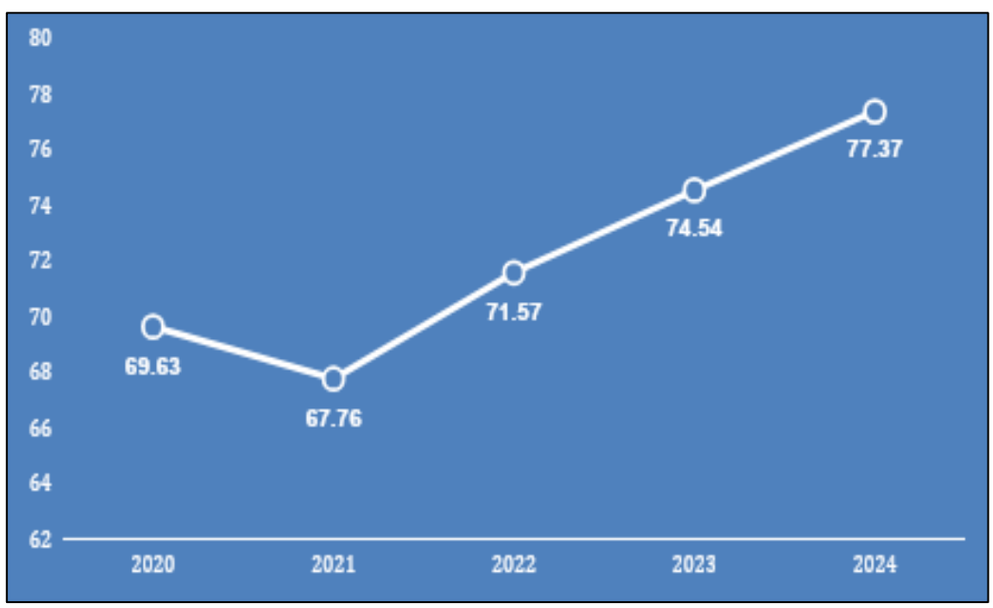


Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.48
Tingkat *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Pembangunan bidang ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan hingga mencapai 77,37. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan partisipasi angkatan kerja tahun 2020 yang memiliki besaran 69,63. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam akselerasi peningkatan lapangan usaha maupun kewirausahaan.



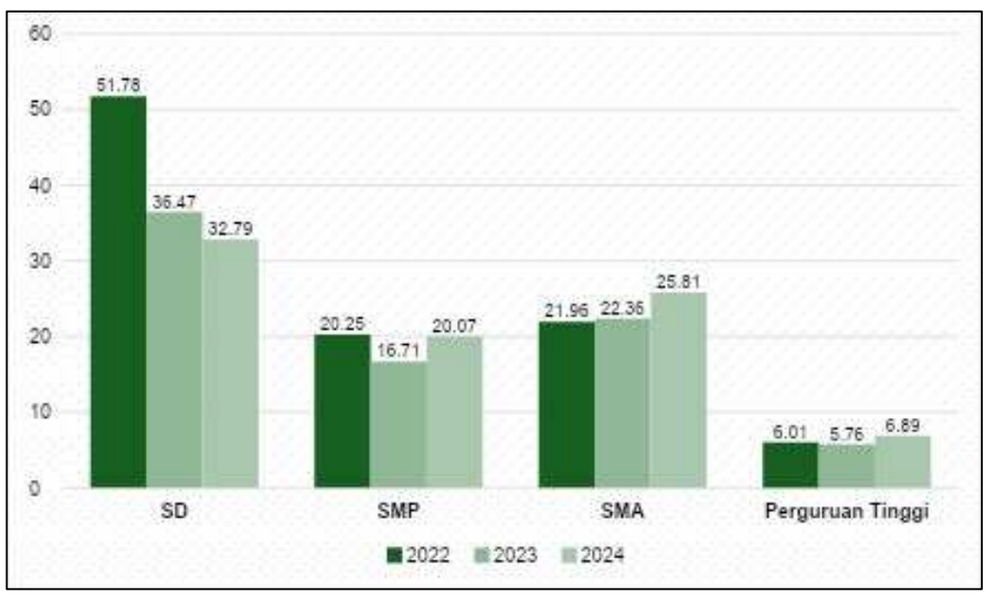
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Susenas 2022 hingga 2024, mayoritas **penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja** memiliki tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang SD. Pada tahun 2022, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SD mencapai 51,78 persen, tetapi mengalami penurunan signifikan menjadi 32,79 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan

adanya pergeseran ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan proporsi lulusan SMA dalam angkatan kerja, dari 21,96 persen pada 2022 menjadi 25,81 persen pada 2024. Begitu pula dengan lulusan perguruan tinggi meningkat dari 6,01 persen pada 2022 menjadi 6,89 persen pada 2024. Sementara itu, proporsi lulusan SMP mengalami sedikit penurunan dari 20,25 persen pada 2022 menjadi 20,07 persen pada 2024.

Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan menengah dan tinggi, yang dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas tenaga kerja di masa depan. Namun, meskipun proporsi lulusan SD dalam angkatan kerja terus menurun, angka tersebut masih cukup tinggi, sehingga peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu didorong untuk memastikan daya saing tenaga kerja yang lebih baik. Selain itu, peningkatan proporsi lulusan SMA dan perguruan tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas tenaga kerja, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

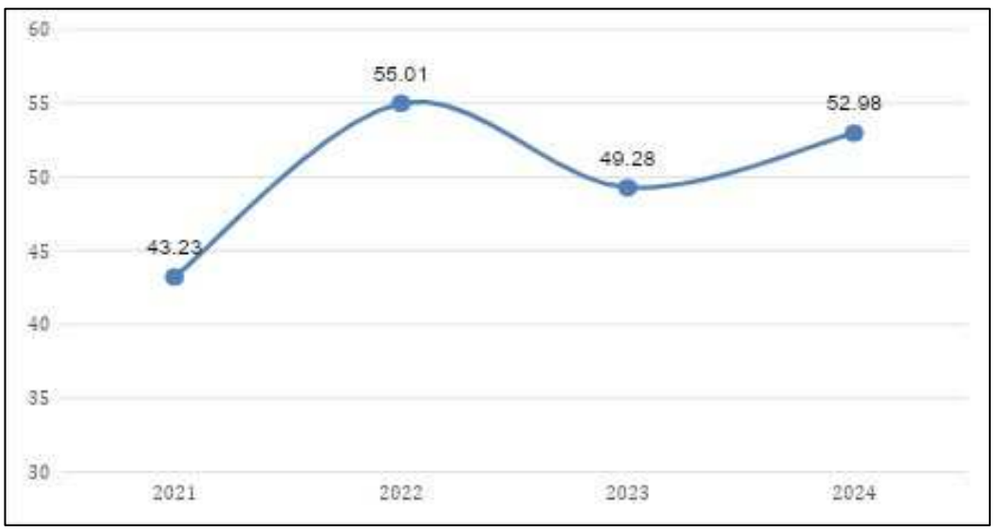


Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.50
Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2022-2024

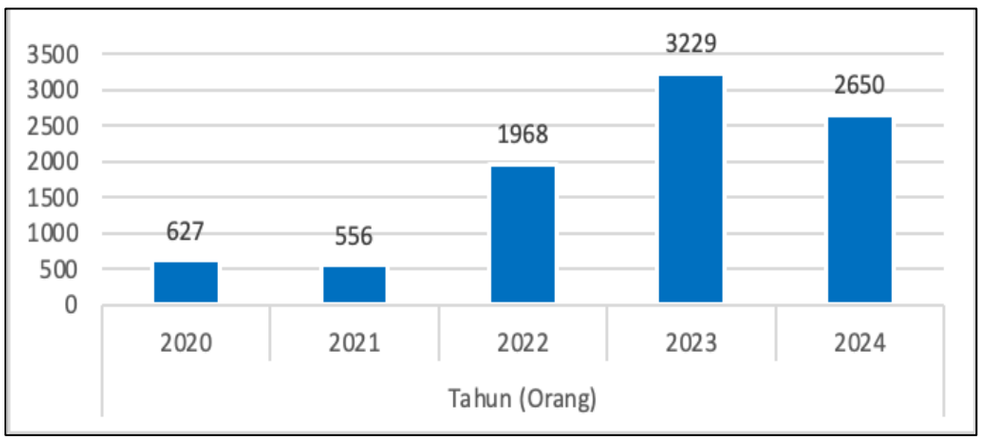
Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai

tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Kebumen sempat mencapai 55,01 pada tahun 2022 dan menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 52,98. Meskipun Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori inovatif, namun masih perlu adanya berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pelayanan publik yang adaptif dan profesional.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 (data diolah), 2025

Gambar II.51
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024



Sumber: Data Layanan Penempatan BP2MI, 2024

Gambar II.52
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Tabel II.63
Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024

Negara	2022	2023	2024
Malaysia	750	1360	723
Hongkong	484	882	873
Taiwan	259	458	474
Korea selatan	198	197	183
Singapura	129	131	146
Japan	81	113	154
Kerajaan Inggris & Irlandia Utara	26	0	1
Polandia	10	4	2
Arab Saudi	8	13	21
Brunei Darusalam	6	34	43
Italia	4	5	2
Rumania	3	0	1
Qatar	2	1	1
Uni Emirat Arab	2	6	2
Slovakia	2	13	0
Pulau Solomon	1	0	1
Yordania	1	1	0
Maladewa	1	1	1
Quwait	1	2	2
Hungaria	0	4	5
Mako	0	1	0
Turki	0	1	5
Kroasia	0	1	2
Bahrain	0	1	2
Zambia	0	0	3
Bulgaria	0	0	0
Persemakmuran Dominika	0	0	0
TOTAL	**1968**	**3229**	**2647**

Sumber: Data Layanan Penempatan BP2MI, 2024

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kebumen terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan terlihat dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kondisi sektor ekonomi pertanian dapat dilihat melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kebumen. Dalam rentang tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar 0,37 persen yang kemudian meningkat menjadi 4,52 persen pada tahun 2021. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi -1,18 persen. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kebumen mulai membaik pada tahun 2023 yang meningkat menjadi 2,25 persen. Adapun tren yang baik terus ditunjukkan hingga tahun 2024 di mana pertumbuhan ekonomi menjadi 2,59 persen.

Dari sisi kontribusi pertanian terhadap perekonomian, distribusi pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kebumen memiliki dominasi pada struktur ekonomi daerah. Meskipun mengalami penurunan di setiap tahunnya dari 21,79 persen pada tahun 2020 menjadi 19,86 persen pada tahun 2024, namun kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menduduki peringkat kedua pada struktur ekonomi Kebumen.

Berdasarkan data yang tersedia, kinerja produksi perikanan di kabupaten/kota menunjukkan tren yang bervariasi antara sektor tangkap dan budidaya selama periode 2020–2024. Secara umum, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023, namun terjadi penurunan pada 2024 yang perlu dianalisis penyebabnya, seperti faktor cuaca, stok sumber daya ikan, atau perubahan kebijakan. Produksi perikanan budidaya menunjukkan tren kenaikan yang relatif stabil dari tahun ke tahun, meskipun pertumbuhan persentase pada tabel tercatat nol di beberapa tahun, yang mungkin menandakan konsistensi produksi atau metode pencatatan yang tidak mencatat perubahan kecil.

Lonjakan besar pada 2024 menunjukkan potensi pengembangan sektor budidaya yang kuat.

Selama lima tahun terakhir, sektor tangkap mengalami fluktuasi dengan puncak produksi pada 2023, sedangkan sektor budidaya cenderung stabil dengan peningkatan bertahap dan lonjakan pada 2024. Penguatan strategi pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan serta percepatan pengembangan budidaya akan menjadi kunci menjaga tren positif di masa mendatang.

Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan berbagai program nyata yang mendukung penerapan ekonomi hijau, meliputi: (1) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, seperti pengolahan sampah organik melalui TPS3R Bank Sampah Samiun di Kelurahan Kebumen, TPS3R Berkah di Kelurahan Panjer, dan TPS3R Kecamatan Alian, serta pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan; (2) Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik ramah lingkungan, misalnya pertanian organik dan penggunaan pupuk hayati di Kecamatan Ayah; (3) Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, antara lain di Pantai Petanahan, Goa Jatijajar, dan Geopark Kebumen - UNESCO *Global Geopark* sebagai destinasi edukasi geologi berkelas dunia; serta (4) Transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan energi surya pada LPJU di koridor Kota Kebumen, mikrohidro di Desa Merden, Kecamatan Padureso, dan biogas dari limbah ternak seperti Demplot Biogas di Desa Karangrejo, program edukasi biogas di Desa Banyumudal, serta optimalisasi biogas di TPA Kaligending. Potensi EBT Kabupaten Kebumen ini dapat menjadi dasar dalam perancangan program energi terbarukan untuk mendukung target RUED dan strategi ekonomi hijau, dengan mengacu pada data Kementerian ESDM (tersedia di tautan ini) maupun data lokal yang dimiliki Kabupaten/Kota. Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam membangun ekonomi hijau melalui pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, pelestarian alam dan budaya, serta diversifikasi energi bersih.

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru di Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan, yang ditunjukkan melalui capaian seperti peningkatan tutupan lahan hijau di Pegunungan Serayu Selatan dan Geopark Kebumen, pengelolaan limbah padat di TPA Kalibeji Kecamatan Sempor dan TPA Wonokriyo Kecamatan

Gombong, pemanfaatan energi terbarukan di perkantoran daerah, serta penerapan ekonomi sirkuler di sentra industri kecil seperti batik Desa Jemur Kecamatan Pejagoan dan UMKM olahan pangan di Kecamatan Prembun; di sisi lain, sektor Ekonomi Biru mencatat peningkatan produksi perikanan tangkap di PPP Tegalretno Kecamatan Petanahan dan PPI Logending Kecamatan Ayah, pengembangan budidaya ramah lingkungan di Kecamatan Mirit dan Prembun, penambahan kawasan konservasi pesisir di Pantai Menganti dan Pantai Karangagung, serta perbaikan infrastruktur perikanan, meski tantangan berupa rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan teknologi, dan tekanan ekosistem masih dihadapi, sehingga ke depan strategi difokuskan pada diversifikasi produk bernilai tambah tinggi, penguatan pengawasan ekosistem, pengembangan wisata alam berkelanjutan seperti di Pantai Suwuk dan Pantai Wedi Putih, serta optimalisasi pembiayaan inovatif untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon berbasis sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Tabel II.64
Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 2020-2024 (Persen)

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	21,79	21,88	20,41	20,03	19,86
2	LPE PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	0,37	4,52	-1,18	2,25	2,59

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Dalam mendukung pencapaian Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*/GEI) di tingkat provinsi, Kabupaten Kebumen menampilkan kondisi terkini dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau untuk memastikan ketertelusuran antara kondisi, rencana program, dan target capaian.

1) Penerapan ekonomi sirkuler: Kabupaten Kebumen telah menerapkan ekonomi sirkuler melalui beberapa TPS3R aktif, seperti Bank Sampah Samiun di Kelurahan Kebumen, TPS3R Berkah di Kelurahan Panjer, dan TPS3R Kecamatan Alian, dengan pengelolaan limbah organik menjadi kompos dan limbah plastik menjadi produk kerajinan, meskipun partisipasi masyarakat dan kapasitas pengelolaan masih perlu ditingkatkan.

2) Konservasi dan transisi energi: Beberapa fasilitas publik mulai memanfaatkan energi terbarukan seperti PLTS atap dan program efisiensi energi telah diterapkan, meskipun penggunaan energi fosil masih dominan.
3) Pengelolaan hutan lestari, pertanian, dan perikanan berkelanjutan: Dilakukan melalui rehabilitasi hutan, praktik *agroforestry*, dan pertanian ramah lingkungan, namun pengendalian konversi lahan dan penerapan praktik berkelanjutan belum merata di seluruh desa.
4) Penerapan pembiayaan hijau: Mendukung usaha ramah lingkungan melalui skema pembiayaan dan insentif hijau, meskipun akses dan *awareness* masyarakat serta pelaku usaha masih perlu ditingkatkan. Meskipun GEI tidak diwajibkan sampai tingkat kabupaten/kota, kontribusi lokal sangat penting karena faktor pembentuk komposit indeks berasal dari program dan kegiatan daerah, sehingga data dan narasi kondisi ini menjadi dasar untuk menilai progres Kabupaten Kebumen dalam mendukung capaian GEI Provinsi.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Peningkatan akses internet di tingkat rumah tangga mencerminkan semakin terbukanya akses informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi berbasis digital. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet menunjukkan tren yang cukup fluktuatif yaitu sebesar 74,95% pada tahun 2020 menjadi 89,41% pada tahun 2024. Kondisi ini didorong oleh bertambahnya ketersediaan jaringan, semakin terjangkaunya perangkat digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses internet dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Daerah mendukung peningkatan akses internet kepada masyarakat. Peningkatan akses internet rumah tangga diharapkan dapat

mendukung terwujudnya transformasi digital daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel II.65
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (Persen)	74,95	80,77	90,82	82,31	89,41

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kebumen, 2025

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Adapun perwujudan transformasi digital suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pencapaian ekonomi sektor informasi dan komunikasi. Di Kabupaten Kebumen, pertumbuhan ekonomi sektor tersebut cukup baik dan secara umum berada di atas pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori informasi dan komunikasi pada tahun 2024 sebesar 8,64 persen dengan struktur ekonomi sebesar 2,41 persen. Kenaikan ini tentu menjadi dampak positif bagi perkembangan digitalisasi daerah dan diharapkan menjadi akselerator pencapaian pembangunan daerah.

Tabel II.66
Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (Persen)	14,21	6,02	2,35	9,84	8,64
Distribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (Persen)	2,55	2,56	2,38	2,38	2,41

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui *net* ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran.

Pada tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 18,50 persen di mana andil ini terus menurun sejak tahun 2021 yang sempat mencapai 20,37 persen. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi pengeluaran PMTB terus positif walaupun kadang mengalami perlambatan.

Secara umum, produk Kebumen diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar negeri, ke provinsi lain, maupun ke kabupaten lain di Indonesia. Meskipun demikian, impor mempunyai peran yang relatif besar karena permintaan domestik masih harus dipenuhi oleh produk dari impor. Perdagangan Kebumen yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Perdagangan Kebumen selalu menunjukkan posisi defisit 3-7 persen selama lima tahun terakhir. Komponen *Net* Ekspor Barang dan Jasa yang terus mengalami kontraksi meskipun besarannya terus berkurang menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Kebumen sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel II.67
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kebumen 2020-2024 (Persen)

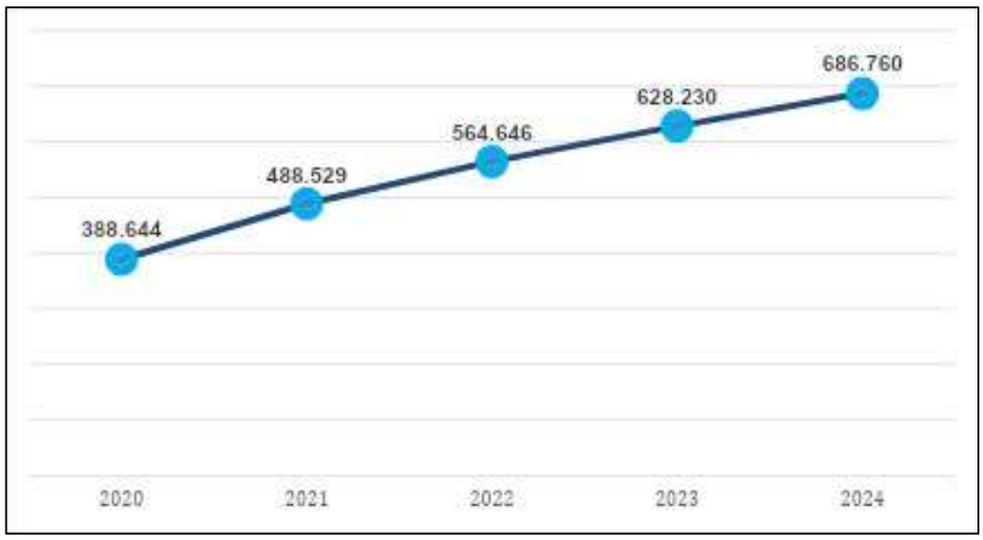
Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-7,68	6,82	2,33	3,30	3,22
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-19,11	44,60	17,10	-5,32	40,10
Distribusi PDRB (Persen)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	19,79	20,30	19,60	18,80	18,50
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-7,36	-5,54	-4,71	-4,56	-3,71

Sumber:BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kebumen menunjukkan tren pertumbuhan positif pasca pandemi, meskipun kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan dari 20,37 persen pada 2021 menjadi 18,50 persen pada 2024. Pertumbuhan PMTB sempat melonjak 6,82 persen pada 2021 akibat *rebound* ekonomi, kemudian melambat menjadi 3,22 persen pada 2024, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,45 persen. Nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kebumen terus meningkat dari Rp388,64 miliar pada 2020 menjadi Rp686,76 miliar pada 2024, mencerminkan kepercayaan investor yang terjaga. Meskipun demikian, kontribusi PMTB Kebumen terhadap PDRB masih berada di bawah rata-rata provinsi (19,12 persen pada 2024), sehingga diperlukan penguatan strategi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, optimalisasi promosi potensi daerah, dan pemberian insentif yang tepat sasaran untuk menarik investasi produktif berdaya ungkit tinggi.

Peningkatan pembangunan bidang penanaman modal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Nilai investasi di daerah ini menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar Rp388,644 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp488,529 miliar pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai investasi mencapai Rp564,646 miliar dan kembali meningkat menjadi Rp628,23 miliar pada tahun 2023 dan Rp686,76 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan investasi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kebumen, didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai kemudahan dalam perizinan, insentif bagi investor, serta pengembangan infrastruktur menjadi faktor utama dalam menarik minat investasi. Dengan tren yang positif ini, Kabupaten Kebumen memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.53
Realisasi Investasi (Miliar Rp.) Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Kemantapan infrastruktur dilihat dari Indeks Infrastruktur Daerah yang dibentuk dari 3 indikator infrastruktur, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum; Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Indeks Infrastruktur Perhubungan.

Pemantapan Infrastruktur Daerah memperhatikan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044. Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan

tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kemantapan infrastruktur dilihat dari Indeks Infrastruktur Daerah yang dibentuk dari 3 indikator infrastruktur, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan, dan Indeks Infrastruktur Perhubungan. Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2021 sebesar 64,59 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,42 persen dikarenakan terjadi perubahan rumus perhitungan komposit indeks tersebut. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari 56,55 persen (2021) menjadi 47,93 persen (2022); Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 54,50 persen (2021) menjadi 7,25 persen (2022); dan Indeks Infrastruktur Perhubungan dari 82,72 persen (2021) menjadi 75,08 persen (2022). Indeks infrastruktur terus mengalami penurunan dari 43,42 persen (2022) menjadi 39,61 persen (2024).

Tabel II.68
Indeks Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur (Persen)	62,78	64,59	43,42	43,81	39,61
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Persen)	56,15*	56,55*	47,93	49,15	48,56
3	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Persen)	49,51	54,50	7,25	7,94	1,73
4	Indeks Infrastruktur Perhubungan (Persen)	82,67	82,72	75,08	74,34	68,53

Sumber: DPUPR dan Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

**Perhitungan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2020-2021 belum menyertakan IKSI karena datanya tidak tersedia.*

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung meningkat, menunjukkan fluktuasi pada periode 2020–2024, dengan capaian tertinggi sebesar 17 pada tahun 2023 dan 2024 setelah sempat turun menjadi 14 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan adanya penambahan volume kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan penambahan panjang jalan. Oleh karena itu, beberapa ruas jalan di Kabupaten Kebumen mulai mengalami kemacetan, utamanya pada pagi hari ketika jam berangkat kerja dan

sekolah serta sore hari ketika jam pulang kerja dan sekolah. Kemacetan juga terjadi ketika musim liburan, termasuk ketika lebaran dan *long weekend.* Sementara itu kinerja kapasitas angkutan umum dan terminal di wilayah Kabupaten Kebumen juga cenderung meningkat hingga mampu mengangkut sebanyak 1.219.282 orang/barang pada tahun 2024. Untuk itu pemantapan sarana jalan dan transportasi masih perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen utamanya dalam rangka mengendalikan beban biaya logistik.

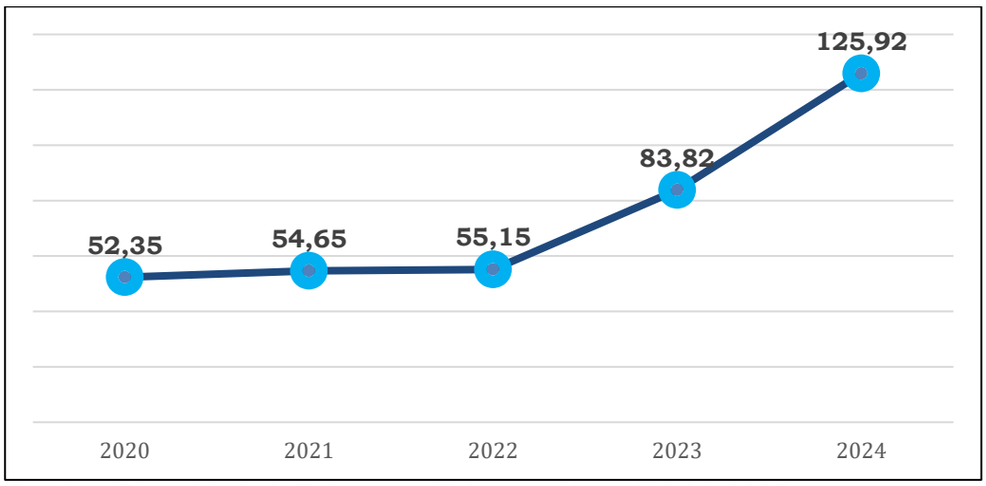
Tabel II.69
Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	16	16	14	17	17
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang/barang)	NA	1.140.893	1.181.840	1.218.291	1.219.282
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun (orang/barang)	NA	1.140.893	1.181.840	1.218.291	1.219.282

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas transportasi di Kabupaten Kebumen 2020-2024 relatif stabil dengan fokus pada peningkatan kualitas dan konektivitas jalan, jembatan, terminal, serta fasilitas pendukung. Stabilitas jumlah fasilitas utama mencerminkan prioritas perbaikan kondisi dibanding penambahan kuantitas. Ke depan, Pemerintah Kabupaten memprioritaskan rehabilitasi jalan belum mantap, modernisasi terminal/halte, optimalisasi pelabuhan, dan integrasi data infrastruktur berbasis GIS untuk mendukung perencanaan transportasi jangka panjang.

Kabupaten Kebumen masih menghadapi masalah permukiman kumuh, penyediaan akses hunian layak, serta pemenuhan akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman. Kondisi luasan kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Kebumen meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang tertangani mencapai 52,35 hektare dan terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 83,82 hektare pada tahun 2023 dan seluas 125,92 hektare pada tahun 2024.

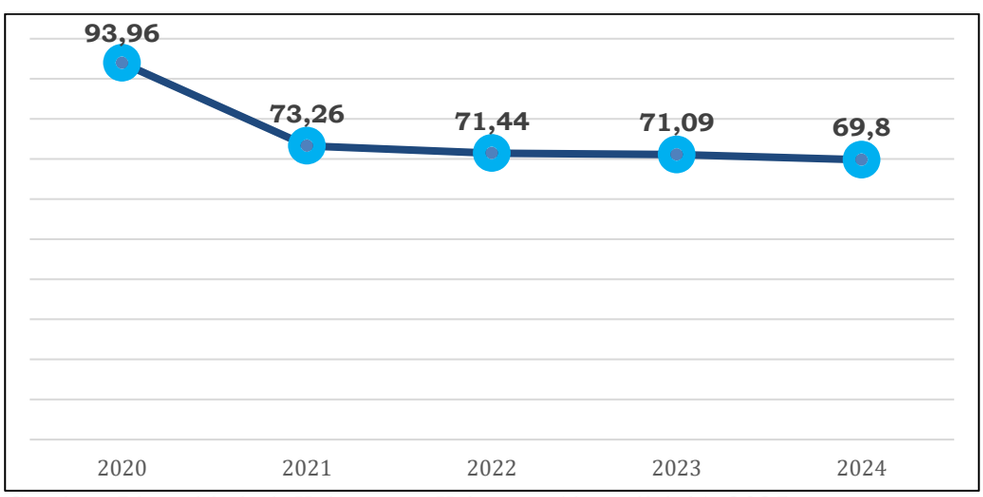


Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.54
Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Ha)

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak telah mencapai 93,67 persen, menunjukkan cukup tingginya hunian layak oleh masyarakat Kebumen. Namun, akses terhadap sarana, prasarana, dan utilitas perumahan seperti sanitasi aman dan air minum aman masih menjadi tantangan. Hingga tahun 2024, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman baru mencapai 3,67 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk memastikan hunian yang benar-benar layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Adanya penurunan capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024 dari 93,96 persen pada tahun 2020 menjadi 69,80 pada tahun 2024, karena terdapat updating data jumlah rumah tangga setiap tahun dari Disdukcapil sedangkan jumlah rumah layak huni tidak ada update data, hanya update penanganan realisasi RTLH 5 tahun.



Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.55
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024

Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Kebumen turun dari 93,96 persen pada 2020 menjadi 69,80 persen pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi pembaruan metode pengukuran yang lebih ketat, dampak sosial ekonomi pasca-pandemi, kerusakan rumah akibat bencana, serta masuknya data rumah tangga baru yang belum memenuhi kriteria kelayakan. Kondisi ini menuntut percepatan program bantuan perumahan, pembiayaan bagi MBR, dan perbaikan pasca bencana untuk mengembalikan capaian hunian layak. Terkait bencana, pada tahun 2026 dialokasikan tambahan anggaran sebesar Rp1 miliar melalui rapat Banggar untuk penanganan rumah korban bencana, sedangkan untuk 2027-2030 penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan data *baseline* BPBD dengan pembagian target tahunan mengacu pada Renstra Disperkimhub. Untuk RTLH, target tahun 2026 lebih tinggi karena adanya tambahan anggaran pokir, sedangkan target 2027-2030 kembali menggunakan data reguler sesuai ketersediaan anggaran.

Pembangunan daerah dimulai dari keberhasilan pembangunan desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), indikator keberhasilan pembangunan desa diukur menggunakan IDM sebagai indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM menggambarkan kemandirian desa berdasarkan konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu untuk menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, pemerintah menetapkan kerangka indeks baru yang digunakan untuk mengukur pembangunan desa. Indeks Desa menggantikan IDM dan menjadi indikator utama pembangunan desa pada periode 2025–2045. Dalam regulasi tersebut, pengukuran pembangunan desa dilakukan melalui enam dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih komprehensif terhadap kemajuan desa sekaligus mendukung arah pembangunan jangka panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang mudah, pelayanan umum yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sangat baik. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan keberhasilan pembangunan desa yang dicerminkan melalui enam dimensi indeks desa.

Dari 449 desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024 telah mencapai 152 desa yang berhasil mencapai kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22 persen pada tahun 2020 menjadi 33,85 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, jumlah desa maju juga terus meningkat dari 90 desa pada tahun 2020 menjadi 246 desa pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,6709 pada tahun 2020 menjadi 0,8864 pada tahun 2024. Selain itu, sejak tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa di Kabupaten Kebumen yang masuk kategori desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Tabel II.70
Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020–2024

No	Klasifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa mandiri	1	1	5	60	152
2	Desa maju	90	123	194	261	246
3	Desa berkembang	348	319	250	128	51
4	Desa tertinggal	10	6	0	0	0
5	Desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0
6	Persentase Desa Mandiri (Persen)	0,22	0,22	1,11	13,36	33,85
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6709	0,6861	0,6978	0,758	0,8864

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 410/178/KEP/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen ditetapkan 5 kawasan perdesaan, yaitu:

a. Kawasan Wisata Pesisir Menganti;
b. Kawasan Kampung Peternakan Sapi;
c. Kawasan Anyaman Pandan;
d. Kawasan Produk Unggulan Gula Semut; dan
e. Kawasan Kampung Batik.

Kawasan tersebut di atas dikembangkan di 22 desa di 7 kecamatan. Dari kelima kawasan perdesaan telah dibentuk 5 BUMDESMA Kawasan Perdesaan dengan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel II.71
BUMDESMA Kawasan Perdesaan

Kawasan	Nama BUMDESMA	Penyertaan Modal		
		APBD Kab. 2019-2021	APBD Provinsi	Jumlah
Wisata Pesisi Menganti	BUMDESMA Sapta Jaya	1.001.000.000	-	1.001.000.000
Anyaman Pandan	BUMDESMA Pandan Lima	667.000.000	250.000.000	927.000.000
Kampung Peternakan Sapi	BUMDESMA Jotapan Jaya	292.000.000	150.000.000	442.000.000
Kampung Batik	BUMDESMA Kreasi Tiga Bersaudara	411.000.000	150.000.000	561.000.000
Produk Unggulan Gula Semut	BUMDESMA Manunggal Karya	619.000.000	250.000.000	869.000.000
Jumlah		3.000.000.000	800.000.000	3.800.000.000

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Selanjutnya, pada tahun 2025 juga telah dibentuk Kawasan Perdesaan Pertanian di Kecamatan Mirit yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Wiromartan, Desa Wergonayan, Desa Lembupurwo, Desa Miritpetikusan, Desa Rowo, Desa Selotumpeng, Desa Sitibentar, Desa Mangunranan, Desa Karanggede, Desa Pekutan, Desa Kertodeso, Desa Patukgawemulyo, dan Desa Patukrejomulyo. Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Pertanian di Kabupaten Kebumen, komoditas unggulan pertanian yang akan dikembangkan di Kawasan Perdesaan Pertanian Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, yaitu komoditas jambu kristal, kelengkeng, pepaya california, dan jambu citra. Komoditas tersebut berpotensi untuk menjadi komoditas agribisnis

unggulan di kawasan tersebut ditinjau dari tingkat kesediaan petani yang tinggi untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut, potensi sumber daya alam yang mendukung kegiatan budidaya, dan potensi pasar komoditas yang sangat baik. Pengembangan agrowisata potensial dikembangkan untuk komoditas tanaman berbuah, baik jambu kristal, kelengkeng, pepaya, maupun jambu citra. Hal ini berkaitan dengan potensi Kabupaten Kebumen sebagai salah satu destinasi wisata alternatif di Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan desa dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur dasar dan membangun ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penilaian kategori BUM Desa baru dimulai pada tahun 2019 karena BUMDes secara masif baru mulai berdiri di desa paska lahirnya Undang-Undang Desa. Pada tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUM Desa dengan jenis usaha yang sangat bervariasi. Dalam perkembangannya pertumbuhan BUM Desa telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa meskipun belum optimal karena beberapa faktor seperti SDM pengelola BUM Desa yang kurang kompeten, permodalan yang masih kurang, pemilihan bidang usaha yang kurang tepat, masih terdapat BUM Desa yang belum berbadan hukum, dan sinergitas antara pengelola dengan pemerintah desa yang masih kurang.

Kemajuan BUM Desa di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan BUM Desa tingkat maju yang terus meningkat dari 2 BUM Desa pada tahun 2020 menjadi 15 BUM Desa pada tahun 2024. Sementara itu BUM Desa tingkat berkembang juga cenderung meningkat hingga mencapai 201 BUM Desa pada tahun 2024.

Tabel II.72
Pemeringkatan BUM Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	BUM Desa MAJU	2	5	9	17	15
2	BUM Desa BERKEMBANG	17	42	42	51	201
3	BUM Desa TUMBUH/PEMULA	246	272	287	304	113
4	BUM Desa DASAR/PERINTIS	124	83	111	77	120
5	Belum ada BUM Desa	60	47	0	0	0
Jumlah		449	449	449	449	449

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Pemeringkatan BUM Desa tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 di Jawa Tengah masih berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 dengan tingkatan klasifikasi BUM Desa Maju, Berkembang, Tumbuh dan Dasar, sedangkan Pemeringkatan BUM Desa Tahun 2024 di Jawa Tengah menggunakan regulasi dari pusat Kepmendes PDTT Nomor 145 Tahun 2022 dengan tingkatan pemeringkatan BUM Desa Maju, Berkembang, Pemula dan Perintis.

Pemenuhan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas kawasan budidaya pertanian serta saluran drainase yang baik terus diupayakan. Kabupaten Kebumen memiliki kawasan budidaya pertanian dengan luasan mencapai 120.695,42 hektare dengan luas lahan produktif sebesar 59.723,48 hektare (49,48 persen) dan tersebar di 26 kecamatan (berdasarkan analisis citra satelit bagi dasar penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044). Peningkatan produktivitas kawasan budidaya pertanian perlu didukung oleh penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi berupa jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Luasan irigasi kewenangan kabupaten mencapai 10.539 hektare sehingga capaian indeks kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebesar 59,21. Drainase yang ditangani oleh kabupaten terdiri dari drainase jalan kewenangan kabupaten dan drainase buangan irigasi. Panjang drainase jalan kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.1.1/554 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai jalan kabupaten, sedangkan drainase buangan irigasi kewenangan kabupaten adalah sepanjang 72,272 kilometer. Secara umum, persentase saluran drainase dalam kondisi baik cenderung meningkat dari 15,98 persen pada tahun 2020 menjadi 24,76 persen pada tahun 2024.

Peningkatan kondisi jalan mantap untuk pemenuhan sistem jaringan jalan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044 dalam rangka peningkatan konektivitas intrawilayah dan antarwilayah. Jaringan jalan yang berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan lancar secara merata. Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Kebumen sebesar 73,48 persen di tahun 2024. Kondisi ini tentu menjadi perhatian *stakeholder* dalam mewujudkan jalan yang berada dalam kondisi baik dan layak untuk

dilalui, baik dari segi permukaan, struktur, maupun daya dukung terhadap beban kendaraan.

Tabel II.73
Kondisi Jalan & Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024

Kondisi Jalan	2021 (Persen)	2022 (Persen)	2023 (Persen)	2024 (Persen)
Proporsi Kondisi Baik	60,82	30,42	44,3	40,49
Proporsi Kondisi Sedang	17,44	43,41	26,67	32,99
Proporsi Kondisi Rusak Ringan	12,02	16,87	15,51	16,4
Proporsi Kondisi Rusak Berat	9,72	9,3	13,52	10,12

Sumber: RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026, 2025

Keselamatan dan keamanan lalu lintas perlu ditingkatkan. Angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen meningkat dari 694 kejadian (2019) menjadi 1.178 kejadian (2024) dengan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan rata-rata mencapai 131 orang per tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas dengan pemasangan rambu-rambu sebanyak 2.811 unit, APILL 58 unit, dan LPJU yang terpasang 2.719 unit (2024). Berdasarkan data pada tahun 2024 menunjukkan Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota sebesar 60,67 persen.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Secara umum kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB komponen pengeluaran yang dihitung berdasarkan total nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Dengan PDRB ini dapat digambarkan pola konsumsi rumah tangga, peran pemerintah dalam mendukung pembangunan, tingkat investasi daerah, serta daya saing perdagangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari distribusi persentase PDRB menurut komponen pengeluaran yang menunjukkan proporsi masing-masing komponen pengeluaran terhadap total PDRB.

Data menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh konsumsi, yaitu sekitar 74-75 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan ekonomi daerah masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat di mana dikhawatirkan jika daya beli masyarakat menurun maka pertumbuhan ekonomi dapat berdampak signifikan. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan rendahnya kontribusi komponen lain, utamanya

investasi (PMTB) dan *net* ekspor yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar. Namun demikian, jika kontribusi konsumsi tinggi juga dapat memberikan potensi lebih bagi sektor ritel, perdagangan, dan jasa lainnya. Tingginya konsumsi menunjukkan aktivitas ekonomi cukup aktif di tingkat rumah tangga tetapi tidak selalu berarti terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya di kisaran 7-8 persen setiap tahun yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran semua tingkat pemerintah dari pusat, daerah hingga desa dengan fokus dan lokus program di wilayah Kabupaten Kebumen, di luar belanja modal yang tercatat sebagai PMTB. Persentase pengeluaran pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen yang kecil dapat menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (pemerintah). Selain itu, dapat diartikan belanja pemerintah tidak cukup signifikan berdampak pada perekonomian daerah jika komponen utama PDRB lainnya (misal konsumsi rumah tangga atau investasi) menurun.

Tingkat investasi memberikan kontribusi bagi PDRB cenderung menurun setiap tahunnya dari 22,71 persen pada tahun 2020 menjadi 20,43 persen pada tahun 2024 yang menunjukkan tingkat investasi relatif masih rendah, sehingga potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan kemampuan memberikan efek *multiplier* menjadi terbatas. Hal ini juga dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang tahan terhadap guncangan eksternal, karena investasi adalah salah satu motor penggerak utama inovasi dan produktivitas. Disisi lain perubahan inventori juga sangat kecil hanya sekitar 1,8 persen setiap tahunnya yang dapat menunjukkan produsen terbatas dalam melakukan ekspansi bisnis sehingga skala usahanya relatif stagnan. Begitu juga upaya penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Idealnya, menurut Bank Dunia dan IMF, proporsi investasi terhadap suatu perekonomian yang masih berkembang minimal di kisaran 30 persen agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Peningkatan investasi masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen.

Daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari *net* ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya defisit perdagangan di mana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Selain itu, dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar, utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *market seller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. *Net* ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah, serta masih lemahnya pemasaran. Investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen.

Tabel II.74
Distribusi Persentase PDRB menurut Komponen Pengeluaran
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Komponen PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga (Persen), terdiri dari:	75,79	74,63	74,87	75,36	75,42
	a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Persen)	73,94	72,80	73,04	73,52	73,47
	b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Persen)	1,85	1,83	1,83	1,84	1,95
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ *Government Expenditure* (Persen)	8,87	8,65	7,99	7,71	7,58
3	Tingkat Investasi (Persen) terdiri dari:	22,71	22,26	21,84	21,48	20,43
	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen)	19,79	20,37	19,63	18,82	18,50
	b. Perubahan Inventori	2,92	1,89	2,21	2,66	1,93
4	Net Ekspor (Persen)	-7,36	-5,54	-4,71	-4,56	-3,71

Sumber: BPS Kebumen (data diolah), 2024

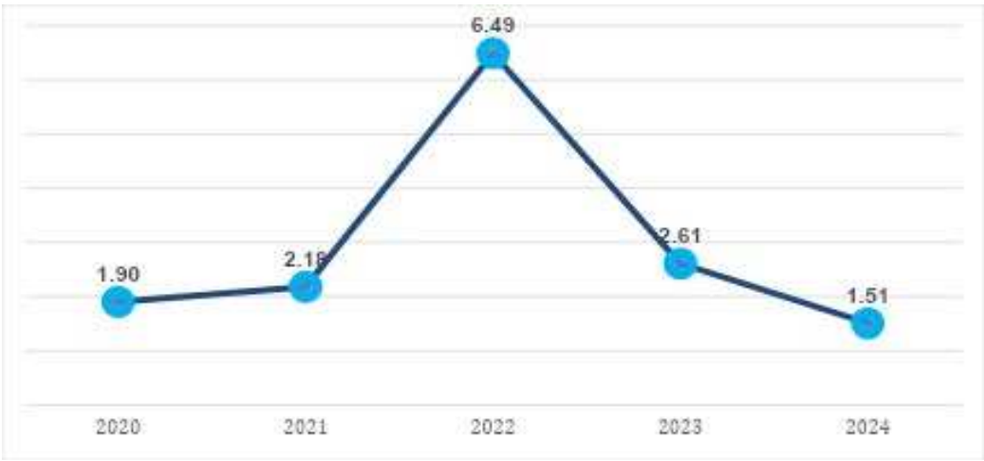
Berdasarkan data inflasi tahun 2024, Purwokerto sebagai wilayah representatif bagi Kabupaten Kebumen mencatat tingkat inflasi *year-on-year* (y-on-y) sebesar 1,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,16. Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, terjadi penurunan inflasi dari 2,61 persen pada tahun 2023 menjadi 1,51 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan stabilitas harga yang lebih terjaga sepanjang tahun, meskipun tetap perlu diwaspadai dinamika harga pada sektor-sektor strategis.

Secara keseluruhan, rata-rata inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 1,67 persen y-on-y dengan IHK 107,07. Dibandingkan rata-rata provinsi, tingkat inflasi Purwokerto (Kabupaten Kebumen) berada di bawah rata-rata, yang mengindikasikan lebih terkendalinya gejolak harga di masyarakat. Pada wilayah lain, inflasi Kota Tegal tercatat paling tinggi y-on-y sebesar 2,19 persen dan terendah terjadi di Surakarta dengan inflasi sebesar 1,50 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sehingga kondusivitas ekonomi terjaga.

Tabel II.75
Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Desember 2024

Wilayah	IHK	Inflasi Y-on-Y(Persen)	Inflasi M-on-M(Persen)	Inflasi Y-to-D(Persen)
Cilacap	106,78	1,82	0,52	1,82
Purwokerto	106,16	1,51	0,59	1,51
Wonosobo	109,00	1,52	0,72	1,52
Wonogiri	107,90	1,77	0,75	1,77
Rembang	110,43	1,54	0,56	1,54
Kudus	107,08	1,71	0,59	1,71
Surakarta	107,07	1,50	0,53	1,50
Semarang	106,09	1,69	0,50	1,69
Tegal	107,57	2,19	0,48	2,19
Jawa Tengah	**107,07**	**1,67**	**0,57**	**1,67**

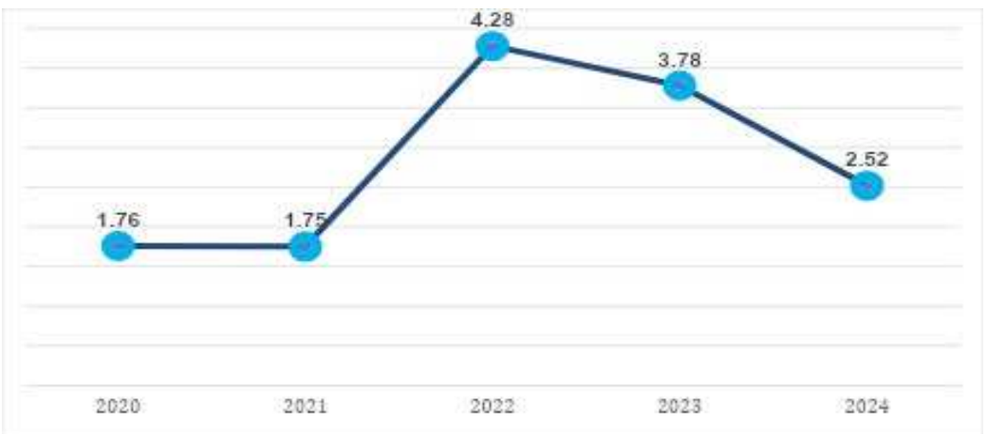
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Gambar II.56
Inflasi Tahunan Tahun 2020-2024

Sebagai perbandingan berdasarkan PDRB deflator, data Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebesar 2,52 yang menunjukkan perubahan harga. Berbeda dengan perhitungan inflasi secara umum yang biasanya menggunakan IHK dan IHP (Indeks Harga Produsen), sebagai perbandingan perhitungan inflasi secara deflator ini menunjukkan perubahan harga seluruh sektor PDRB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian baik harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan/jasa.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.57
Laju Implisit PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi makro, perlu melihat terhadap jasa keuangan, utamanya perbankan. Lembaga ini penting untuk menghubungkan pihak yang kelebihan dana (kreditor dan investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur dan pelaku usaha). Kelancaran aliran modal (likuiditas) sangat penting dalam perekonomian karena adanya efisiensi alokasi sumber daya dana yang berlebih kepada kelompok produktif serta memastikan

bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Lembaga intermediasi keuangan juga membantu mengurangi risiko bagi individu atau perusahaan dengan menyediakan instrumen keuangan seperti tabungan, deposito hingga asuransi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko kredit lebih baik dibandingkan individu. Lembaga intermediasi keuangan terutama yang berskala mikro dapat mewujudkan inklusi keuangan, yaitu dengan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan untuk mendapatkan layanan tersebut, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Kondisi likuiditas utamanya perbankan di Kabupaten Kebumen dapat tercermin di antaranya dari kondisi dana pihak ketiga (simpanan) dan kredit (pinjaman) di perbankan yang berada di Kabupaten Kebumen. Rasio total dana pihak ketiga pada seluruh bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dari 23,60 persen pada tahun 2020 menjadi 17,44 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin berkurangnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan kredit dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada rasio total dana pihak ketiga pada bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB yang cenderung menurun dari 1,93 persen pada tahun 2020 menjadi 1,59 persen pada tahun 2023. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas untuk dapat menyimpan kelebihan dana atau asetnya pada lembaga keuangan seperti perbankan.

Sementara itu, rasio total kredit pada Bank Umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB mengalami fluktuasi hingga hanya mencapai 15,01 persen pada tahun 2024. Sedangkan rasio total kredit pada bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB cenderung menurun dari 1,54 persen pada tahun 2020 menjadi 1,43 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya fungsi perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Akan tetapi, terjadi peningkatan proporsi kredit

UMKM terhadap total kredit dari 45,41 persen pada tahun 2020 menjadi 71,89 persen pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan inklusi keuangan. Kinerja perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen didukung dengan jenis jumlah kantor bank yang mencapai 66 unit pada tahun 2024 yang terdiri dari bank BUMN, BUMD, Swasta Nasional (konvensional dan syariah) dan BPR (konvensional dan syariah).

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stagnan dengan fluktuasi tipis. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,36 persen, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,38 persen pada 2021 dan mencapai puncaknya di angka 0,40 persen pada 2022. Namun, tren ini tidak berlanjut karena pada tahun 2023 rasio kembali turun ke 0,38 persen dan stagnan kembali ke level 0,36 persen di tahun 2024. Pola ini mencerminkan bahwa meskipun ada upaya optimalisasi pendapatan pajak, kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian daerah masih tergolong rendah dan belum menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Rasio di bawah 0,5 persen ini menandakan perlunya strategi yang lebih agresif dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat integrasi data ekonomi daerah agar penerimaan pajak mampu sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Tabel II.76
Kondisi Likuiditas Perbankan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum dan BPR per PDRB	23,60 persen	20,53 persen	19,42 persen	17,44 persen	NA
2	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	1,93 persen	1,97 persen	1,75 persen	1,59 persen	1,53 persen
3	Total Kredit Pada Bank Umum dan BPR per PDRB	17,85 persen	18,66 persen	21,79 persen	17,95 persen	15,01 persen
4	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	1,54 persen	1,53 persen	1,56 persen	1,43 persen	1,24 persen
5	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	45,41 persen	54,48 persen	56,27 persen	55,65 persen	71,89 persen
6	Jumlah kantor bank (unit)	101	110	72	66	66
7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,36	0,38	0,40	0,38	0,36
8	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	2,08	2,08	2,09	2,11	2,12

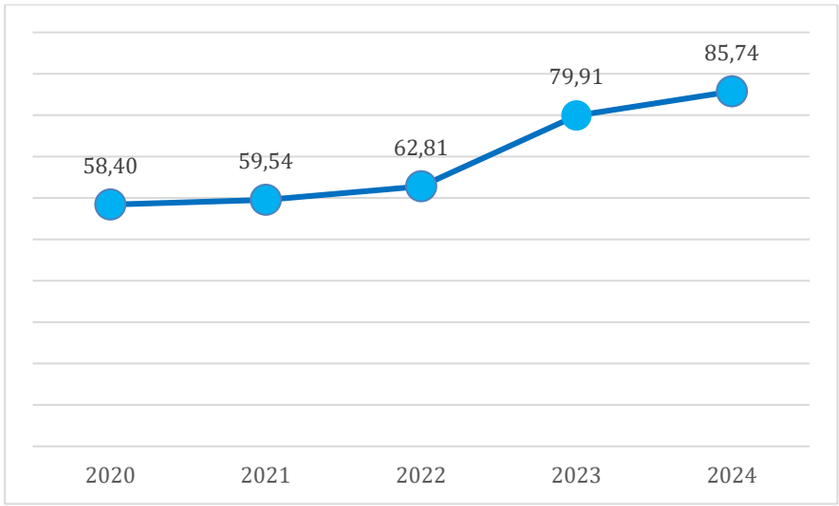
Sumber: Setda dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi profesional. Pemerintah daerah berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Mendasari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Terdapat penajaman tujuan Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik melalui sasaran strategis *general* dan tematik. Pada periode 2020-2024 terjadi peningkatan capaian dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, di mana IRB meningkat semula 58,40 (2020) menjadi 85,74 (2024). Perolehan indikator penilaian IRB yang cukup besar meliputi Rencana Aksi Pembangunan RB General (2,3), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (2,4), Tingkat Maturitas SPIP (2,64), SAKIP (2,70), Tingkat Digitalisasi Arsip (2,37), Indeks Kualitas Kebijakan (1,7), Indeks Reformasi Hukum (2,46), Indeks Tata Kelola Pengadaan (2,11), Indeks Sistem Merit (2,47), Indeks SPBE (7,33), Capaian Indikator Non Makro (3,86), Survei Penilaian Integritas (7,50) dan Survei Kepuasan Masyarakat (7,24).



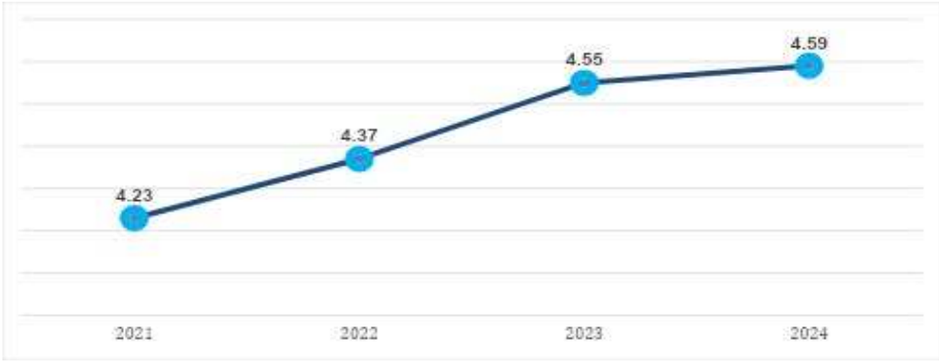
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.58
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Perhitungan IRB untuk Tahun 2023 terdapat perbedaan rumusan dari tahun sebelumnya, di mana ada penggabungan antara RB *General* dan RB Tematik. Capaian IRB Tahun 2023 sebesar 79,91 berasal dari 68,3 RB *General* dan 11,61 dari RB Tematik. Sedangkan untuk 2024 IRB diperoleh 85,74 berasal dari 75,46 RB *General* dan 10,28 dari RB Tematik. Peningkatan ini cukup tinggi pada aspek RB *General* sebesar 11,47 poin, di mana dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain terkait indikator survei penilaian integritas (7,5), SPBE (7,33), Survei Kepuasan Masyarakat (7,24), Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General (5,26) serta WTP (5).

Sementara itu, pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terus menunjukkan perbaikan yang signifikan, sebagaimana diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik. Indeks tersebut meningkat dari 4,23 pada tahun 2021 menjadi 4,59 pada tahun 2024 yang mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penilaian indeks ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain kebijakan pelayanan yang semakin responsif, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung, penguatan sistem informasi pelayanan publik yang memudahkan akses informasi bagi warga, serta keberhasilan dalam menyediakan kanal konsultasi dan pengaduan yang efektif. Selain itu, inovasi pelayanan publik yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat turut berkontribusi terhadap capaian tersebut, menandakan bahwa Kabupaten Kebumen berada

pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan publik.



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, 2024

Gambar II.59
Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024

Penguatan tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori baik. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kebumen yang diukur melalui Indeks SPBE meningkat dari 3,42 (2020) menjadi 4,07 (2024), termasuk kategori baik. Salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan SPBE adalah dengan menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI), di Kabupaten Kebumen penyelenggaraan SDI ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 050/22/Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 050/23/Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Evaluasi Mandiri Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2023, Skor Kematangan Keseluruhan Aspek Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kebumen sebesar 67,16 persen. Skor ini lebih tinggi dari rata-rata Skor Kematangan Daerah Penyelenggaraan SDI tingkat Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah yaitu sebesar 63,96 persen. Peningkatan tata kelola pemerintahan digital dalam mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan peningkatan aspek teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK.

Tabel II.77
Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	3,00	3,00	3,13	3,19	3,30
2.	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	2 Plus	3,00	3,12	3,18	3,27 (Level 3)
3	Nilai SAKIP	63,84	65,18	65,49	66,11	67,54
4.	Indeks Integritas Nasional	NA	76,46	74,80	78,19	75,00

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, 2025

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait keberlanjutan fiskal, tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya penerimaan daerah, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak hanya sebesar 0,38 persen dari PDRB ADHB pada tahun 2023. Pendapatan daerah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Pergeseran komposisi demografi yang menuju *ageing population* akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut yang tidak produktif lagi.

Upaya optimalisasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Kebumen terus dilakukan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengalami peningkatan. Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen telah mencapai level 3 dan kapabilitas APIP Kabupaten Kebumen juga telah mencapai level 3. Pada tahun 2024, Indeks Integritas Nasional berdasarkan Survei Penilaian Integritas telah mencapai 75,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Kabupaten Kebumen sejak tahun 2020 selama 4 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal yang terkait material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nilai SAKIP mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 67,54 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 66,11.

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas menunjukkan kinerja yang meningkat dari 76,46 pada tahun 2021 menjadi 78,19 pada tahun 2023 namun turun menjadi 75,00 pada tahun 2024 dan masuk dalam kategori waspada. Penurunan terjadi dikarenakan adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pengawasan dapat dilihat pada Tabel II.73.

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi

Kabupaten Kebumen tergolong tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan metode mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga tertentu. IKM menilai kualitas pelayanan yang diterima dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. IKM Kabupaten Kebumen sebesar 90,16 (2023). Selain itu, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 juga telah mencapai 4,59 atau telah mencapai kategori pelayanan prima. Dalam 5 tahun terakhir, capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kematian secara konsisten mencapai 100 persen, sementara cakupan kepemilikan KTP dan perekaman KTP elektronik mengalami peningkatan signifikan, masing-masing dari 99,36 persen (2020) menjadi 99,99 persen dan 99,62 persen (2024). Demikian pula, cakupan akta kelahiran meningkat dari 90,36 persen menjadi 99,44 persen pada periode yang sama. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga mengalami kemajuan, dari 31,21 persen (2020) menjadi 60,82 persen (2024). Namun demikian, pemanfaatan identitas kependudukan digital (KTP digital) masih rendah, baru mencapai 11,41 persen dari total pemilik e-KTP, di bawah target nasional sebesar 25 persen. Data kependudukan tersebut memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan lintas sektor di daerah.

Tabel II.78
Pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga terhadap jumlah kepala keluarga	100	100	100	100	100
2.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terhadap jumlah penduduk	99,36	98,95	98,00	98,25	99,99
3	Perekaman KTP elektronik (Persen)	99,36	98,09	99,11	98,25	99,62
4.	Cakupan Akta Kelahiran	90,36	96,60	99,15	99,43	99,51
5.	Cakupan Akta Kematian	100	100	100	100	100
6.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	31,21	39,66	44,43	55,79	60,82
7.	Penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital)	NA	NA	0,65	5,41	11,41

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 20245

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Capaian Indeks Ketertiban Umum selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang relatif baik, namun belum mencapai 100. Kondisi ini dipengaruhi oleh capaian komposit pembentuk indikator yang belum sepenuhnya optimal, khususnya pada persentase penanganan kebakaran yang memenuhi standar waktu tanggap (*response time rate*). Sementara itu, komponen tingkat penyelesaian pelanggaran peraturan daerah serta persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Belum optimalnya capaian penanganan kebakaran yang memenuhi standar waktu tanggap (*response time rate*) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jarak lokasi kejadian yang relatif jauh dari pos pemadam kebakaran, kendala akses jalan menuju lokasi kebakaran, serta kondisi armada pemadam kebakaran yang sebagian telah berusia tua, sehingga mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon awal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk melakukan penguatan sarana dan prasarana, penataan sebaran pos pemadam kebakaran, serta peningkatan aksesibilitas wilayah, guna mendorong perbaikan kinerja indikator tersebut pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel II.79
Indeks Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketertiban Umum	97,95	96,91	95,33	95,56	98,47

Sumber: Satpol PP KabupatenKebumen, Bakesbangpol Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Kondisi Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Kebumen relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai upaya penciptaan kantrantibmas

diupayakan oleh segenap *stakeholder* terkait, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk tetap menjaga keamanan lingkungannya. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.80
Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Tindak Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Narkoba	35	28	32	37	NA
2	Pembunuhan	1	0	3	0	2
3	Kekerasan Seksual	27	28	0	26	29
4	Penganiayaan	9	6	5	14	5
5	Pencurian	74	46	41	54	35
6	Penipuan	6	16	16	13	9
7	Pemalsuan Uang	0	0	1	0	1
Jumlah Total		**152**	**124**	**98**	**144**	**81**

Sumber: Polres Kabupaten Kebumen, 2025

Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di tahun 2024 dikarenakan tahun politik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Kebumen relatif dapat berjalan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian dan tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel II.81
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Bidang	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Politik	4	4	5	2	8
2	Bidang Ekonomi	1	0	3	2	4
Jumlah		5	4	8	4	12

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Kebumen, 2025

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memerlukan kewaspadaan serta peningkatan kualitas penanganan konflik sosial. Salah satu indikatornya terlihat dari kejadian konflik SARA, yaitu

benturan fisik disertai kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang dipicu oleh sentimen identitas seperti keturunan, agama, suku, dan golongan. Di Kabupaten Kebumen, sepanjang tahun 2020 hingga 2024 tercatat pernah terjadi konflik SARA pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Meskipun seluruh kejadian tersebut berhasil ditangani, pengawasan dini tetap perlu diperkuat melalui pemantauan hubungan antarkelompok masyarakat yang dilandasi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan gotong royong. Di sisi lain, upaya di bidang kesatuan bangsa dan politik juga diarahkan pada peningkatan pendidikan politik masyarakat guna memperkuat demokrasi. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024 yang mencapai 75,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan partisipasi pada pilkada tahun 2020 yang hanya mencapai 64 persen.

Tabel II.82
Jumlah Kejadian Konflik SARA dan Partisipasi Warga dalam Pemilu Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Kinerja Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	1	0	5	6
2	Partisipasi warga dalam pemilu	64 persen	NA	NA	NA	75,85 persen

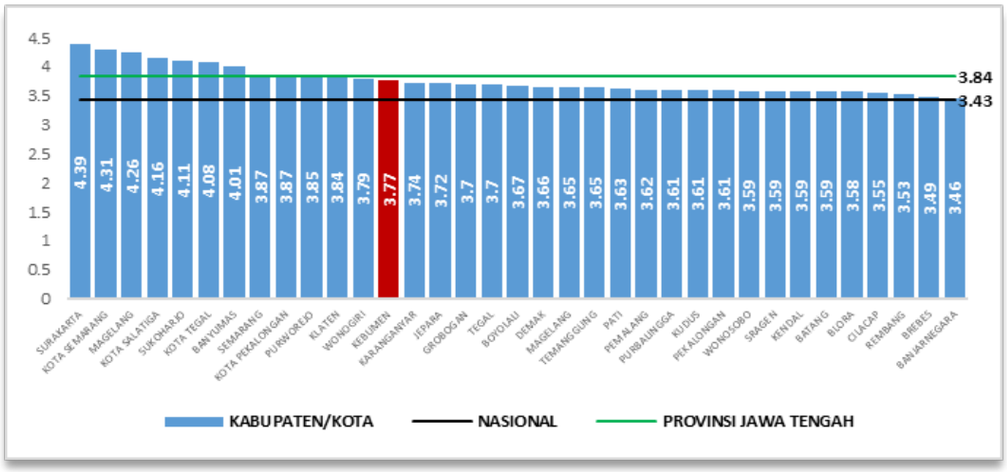
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Kebumen, 2025

Upaya penegakan hukum juga menunjukkan hasil positif, di mana pada tahun 2023 dan 2024 persentase penegakan peraturan daerah tercatat mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh perda yang telah ditetapkan dijalankan secara optimal. Keberhasilan tersebut turut memperkuat stabilitas sosial dan hukum, sekaligus mencerminkan kinerja pengawasan serta dukungan aparatur dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di wilayah Kebumen.

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintahan Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini

melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

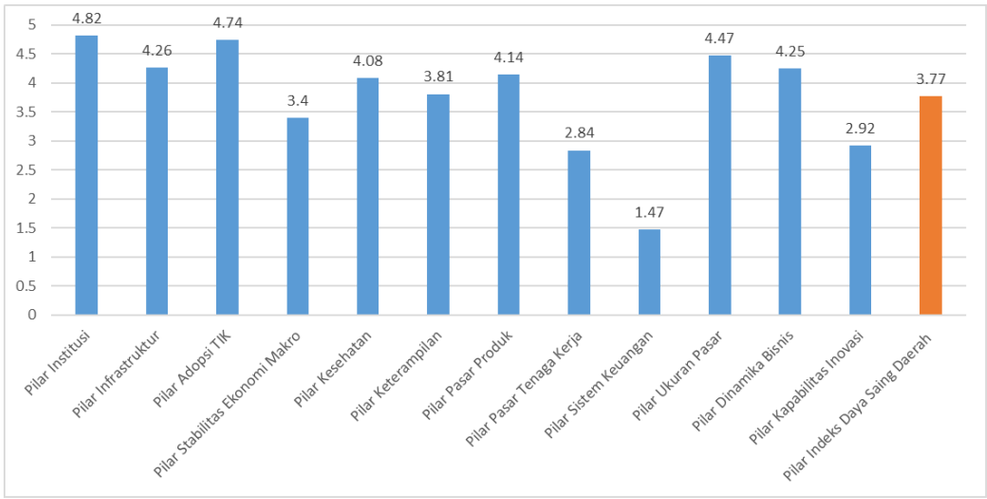


Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.60
Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen tahun 2024, skor yang dicapai adalah 3,77, yang menunjukkan kategori daya saing tinggi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas ekosistem ekonomi dan inovasi di Kabupaten Kebumen. Namun, skor ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (3,84) dan beberapa daerah lainnya di wilayah sekitar seperti Kabupaten Banyumas (4,01) dan Purworejo (3,85).

Meski demikian, Kabupaten Kebumen memiliki skor IDSD yang lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lainnya, seperti Kabupaten Cilacap (3,55), Kabupaten Banjarnegara (3,46), dan Purbalingga (3,61). Pengukuran IDSD 2024 masih mengacu pada empat aspek utama, yaitu ekosistem inovasi, aspek penguat, sumber daya manusia (SDM), dan aspek pasar, yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing.

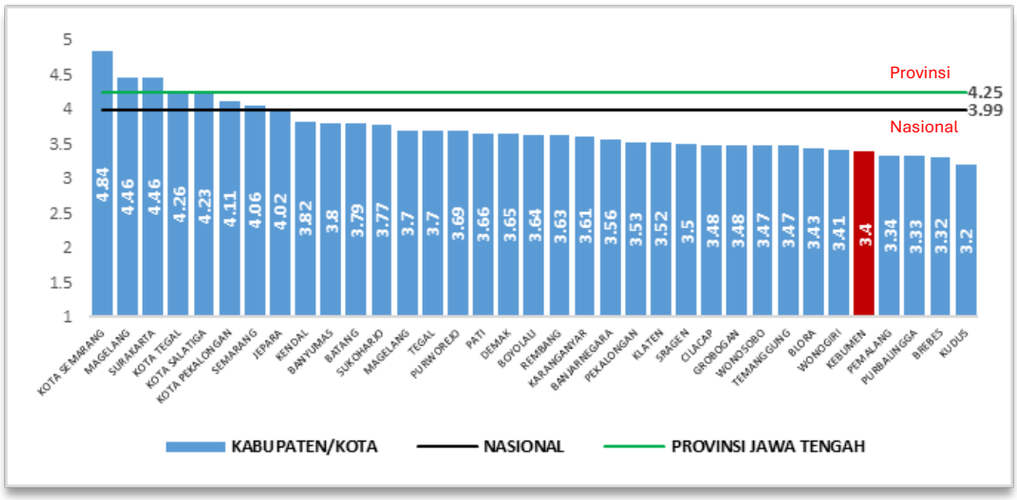


Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.61
Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Menurut Pilar
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Kerangka pengukuran IDSD 2024 terdiri dari 4 aspek yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pencapaian IDSD Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari pencapaian 4 aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sdm, dan aspek pasar. IDSD Kabupaten Kebumen unggul pada pilar institusi (4,82), pilar adopsi TIK (4,74), pilar ukuran pasar (4,47), pilar infrastruktur (4,26), dinamika bisnis (4,25), pilar pasar produk (4,14), dan pilar kesehatan (4,08). Namun, perlu peningkatan pada pilar keterampilan (3,81), pilar stabilitas ekonomi makro (3,4), pilar kapabilitas inovasi (2,92), pilar pasar tenaga kerja (2,84), dan pilar sistem keuangan (1,47).

Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah, meliputi empat pilar, yaitu stabilitas ekonomi makro, pasar produk, sistem keuangan dan ukuran pasar. Pilar stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, dan tingkat biaya hidup. Pilar pasar produk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Pilar sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian, dan pilar ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

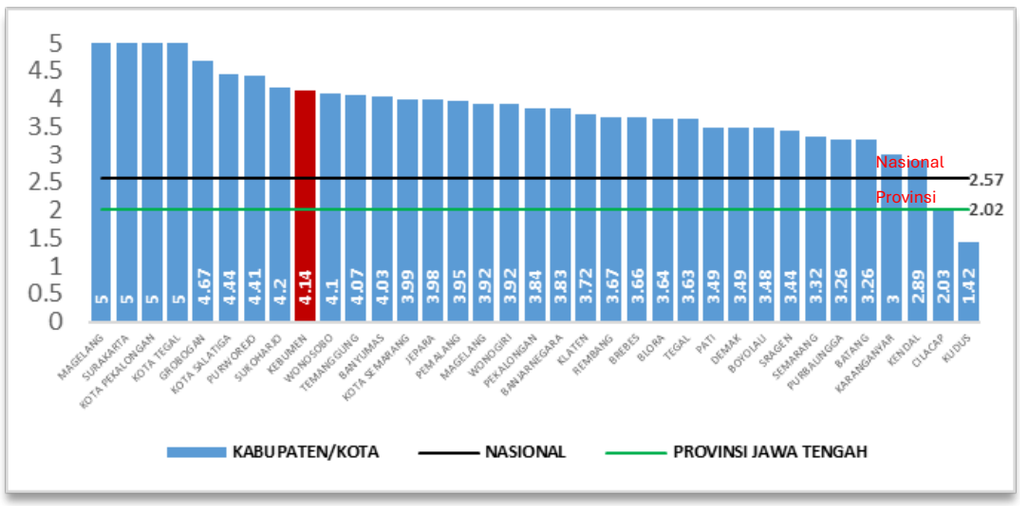


Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.62
Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2024

Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 3,40 (2024) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,25) dan skor Nasional (3,99). Pilar stabilitas ekonomi makro meliputi kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan nilai ICOR (investasi).

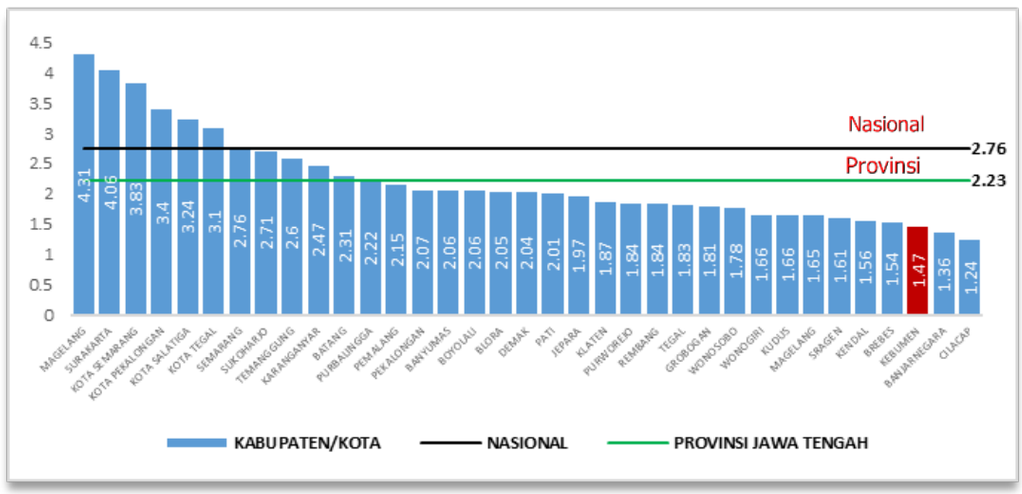
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sesuai dengan PMK Nomor 65 Tahun 2024 adalah 0,928 termasuk dalam kategori rendah. Pilar stabilitas ekonomi makro kedua yaitu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 5,30 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat semula 4,73 persen (2011) menjadi 5,11 persen (2023). TPT tahun 2024 terus menurun dibandingkan TPT tahun 2023 menjadi sebesar 5,07 persen. Selanjutnya, stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat dapat ditunjukkan dengan laju indeks implisit PDRB yang mencapai 3,78 persen pada tahun 2023 menurun menjadi 2,52 pada tahun 2024. Berikutnya, Nilai ICOR Kabupaten Kebumen belum tersedia oleh karena diproksi dengan kinerja PMTB yang secara nominal pada tahun 2024 sebesar Rp4.381,31 milyar atau tumbuh 3,22 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.244,70 milyar.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.63
Grafik Skor Pilar Pasar Produk Tahun 2024

Skor pilar pasar produk sebesar 4,14 (2024) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (2,57) dan Nasional (2,02). Pencapaian skor pasar produk menunjukkan kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Kondisi tersebut disebabkan peningkatan nilai tambah sektor pertanian tidak optimal akibat menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB pada sektor tersier Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 16.238,39 miliar. Selain itu, data *net* ekspor barang dan jasa secara riil masih menunjukkan defisit walaupun terus mengalami perbaikan dari minus 20,06 pada tahun 2011 menjadi minus 3,71 pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang masuk ke wilayah Kebumen (impor) lebih dominan dibandingkan jumlah barang dan jasa dari Kebumen yang dijual keluar wilayah (ekspor).



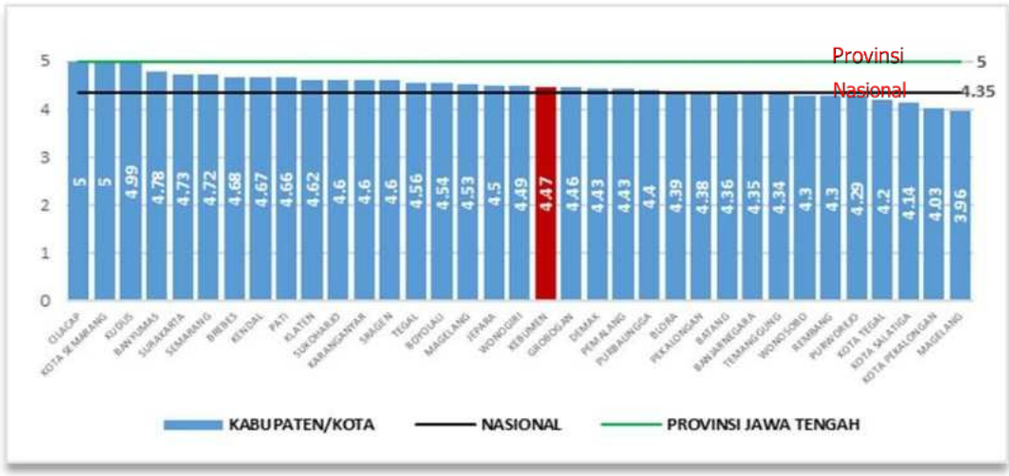
Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.64
Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan Tahun 2024

Skor pilar sistem keuangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,47, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (2,23) maupun Nasional (2,76). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sistem keuangan daerah, baik perbankan maupun non perbankan, dalam memediasi aktivitas perekonomian masih relatif terbatas. Hal ini tercermin dari capaian proporsi kredit swasta terhadap PDRB serta pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya UMKM.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi kredit UMKM di Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencapai Rp4.498.110 juta, yang terdiri atas kredit usaha mikro sebesar Rp2.597.949 juta, usaha kecil Rp1.571.427 juta, dan usaha menengah Rp328.735 juta. Struktur kredit tersebut menunjukkan dominasi usaha mikro, yang sekaligus mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha di Kebumen masih berada pada skala mikro dan kecil sehingga memerlukan dukungan permodalan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Tingginya proporsi kredit usaha mikro juga menegaskan peran strategis sektor UMKM dalam menopang perekonomian daerah, meskipun akses pembiayaan yang lebih luas dan inovatif masih menjadi tantangan.

Selain aspek kredit, pilar sistem keuangan juga diukur melalui indikator perlindungan sosial, khususnya kepemilikan jaminan kesehatan. Di Kabupaten Kebumen, terjadi peningkatan signifikan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS), dari 86 persen pada tahun 2020 menjadi 99,07 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kinerja positif dalam aspek inklusi perlindungan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko finansial akibat beban kesehatan. Dengan demikian, meskipun secara agregat skor pilar sistem keuangan Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional, terdapat potensi perbaikan melalui penguatan akses pembiayaan produktif dan kesinambungan perlindungan sosial..



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.65
Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar Tahun 2024

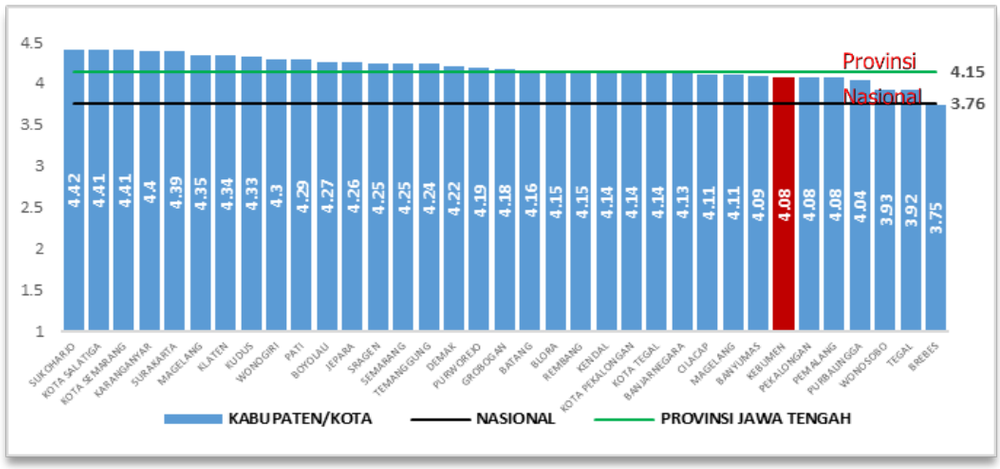
Skor pilar ukuran pasar Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencapai 4,47. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun capaian Kebumen masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,00, namun kinerjanya relatif lebih baik dibandingkan capaian nasional yang berada pada angka 4,35. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur pasar di Kebumen terus mengalami penguatan, meskipun optimalisasi potensi pasar daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu sejajar dengan capaian provinsi.

Pilar ukuran pasar menggambarkan sejauh mana struktur industri di suatu wilayah mampu menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini terlihat pada tren pertumbuhan ekonomi Kebumen yang konsisten meningkat, di mana PDRB ADHK 2010 naik dari Rp13.068.985,50 juta pada tahun 2011 menjadi Rp22.837,83 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya ekspansi pasar yang sejalan dengan penguatan kapasitas sektor-sektor ekonomi produktif.

Peningkatan PDRB tersebut tidak hanya mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengisyaratkan potensi Kebumen dalam memperluas basis pasar di masa mendatang. Apabila pertumbuhan ini diiringi dengan peningkatan daya saing industri lokal, penguatan inovasi, serta pemanfaatan teknologi, maka kontribusi pilar ukuran pasar dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, meskipun masih terdapat gap dengan capaian provinsi, Kebumen

memiliki peluang besar untuk memperkuat struktur pasar melalui strategi inovasi dan peningkatan produktivitas.

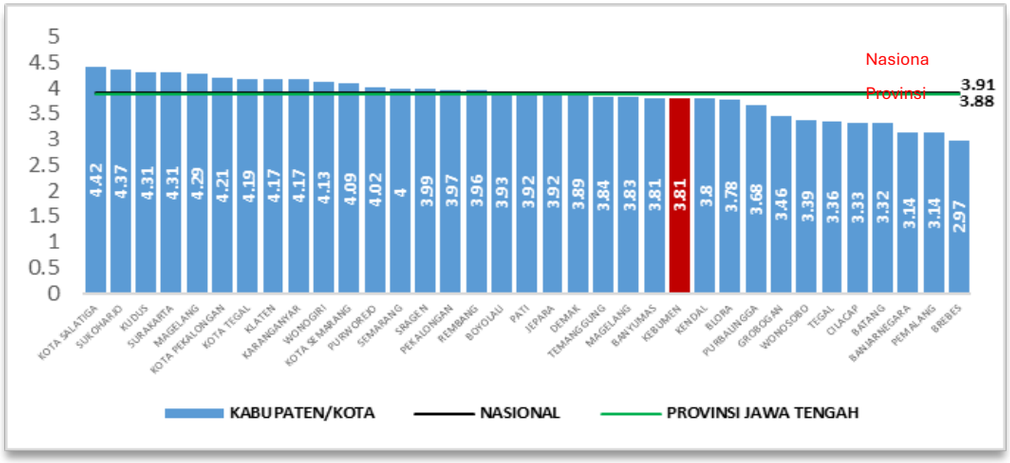
Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing sumber daya manusia, meliputi tiga pilar, yaitu kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Pilar kesehatan merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan pilar keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pilar pasar tenaga kerja mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.66
Grafik Skor Pilar Kesehatan Tahun 2024

Skor pilar Kesehatan IDSD Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 4,08 lebih rendah dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,15), tetapi lebih tinggi dibandingkan skor Nasional (3,76). Pilar kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup yang menunjukkan peningkatan dari semula 72,36 pada tahun 2011 menjadi 75,22 pada tahun 2024.

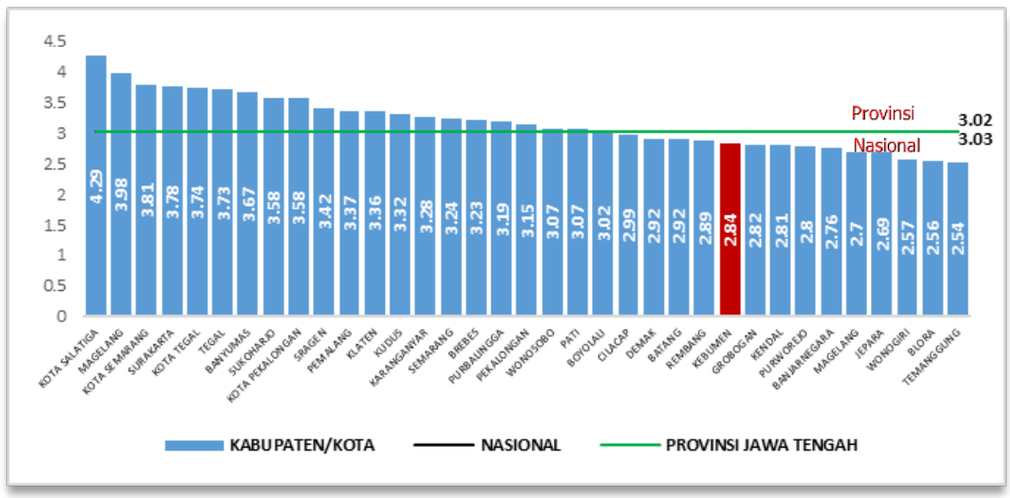


Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.67
Grafik Skor Pilar Keterampilan Tahun 2024

Skor pilar Keterampilan IDSD Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 3,81 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,88) dan Nasional (3,91). Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam mendukung keunggulan kompetitif saat ini maupun masa depan. Kondisi tenaga kerja saat ini dilihat dari rata-rata lama sekolah tercermin dalam RLS Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 7,87 tahun. Angka tersebut merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,87 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Keterampilan lulusan tercermin dalam pencapaian Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Kebumen sebesar 73,45 persen (2024) dan Persentase Keterserapan Tenaga Kerja sebesar 37,56 persen (2024). Kondisi ini tercermin juga pada Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di mana jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 39,19 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 23,79 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 28,89 persen, dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 8,1 persen.

Sedangkan untuk kondisi tenaga kerja masa depan dapat dilihat dari angka harapan sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah sebesar 13,39 tahun, lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah maupun Nasional. Angka tersebut mengindikasikan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Kebumen adalah 13,39 tahun (Diploma 2). Sementara, data berpikir kritis dalam mengajar saat ini belum tersedia. Rasio murid-guru pendidikan dasar sebagaimana data Rasio Guru-Murid pada jenjang SD/MI Tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:16,75. Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 20 siswa. Dapat dilihat bahwa rasio guru dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 16-17 siswa.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.68
Grafik Skor Pasar Tenaga Kerja Tahun 2024

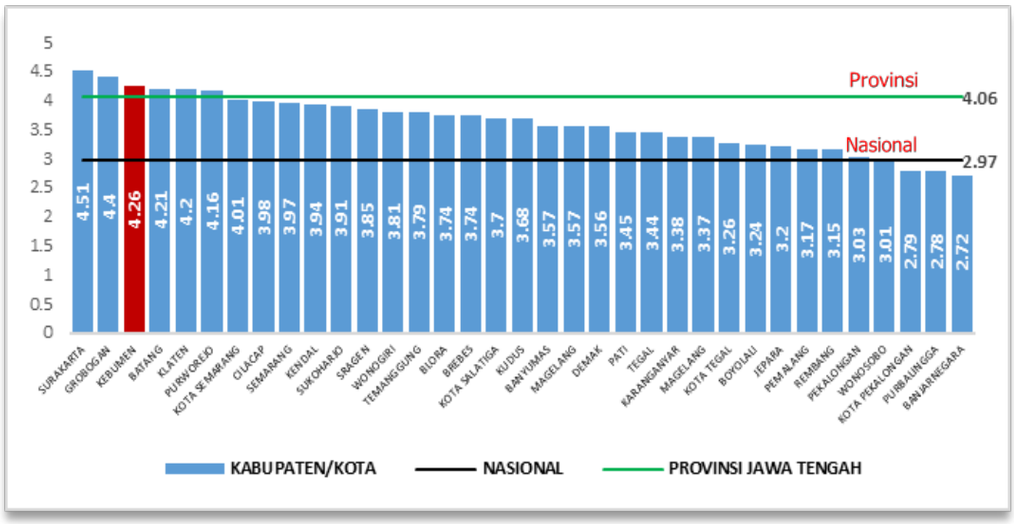
Skor pilar pasar tenaga kerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,84, lebih rendah dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (3,03) maupun Nasional (3,02). Capaian ini mencerminkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di Kebumen masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menekan tingkat pengangguran serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Aspek yang diukur meliputi kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, serta kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki, yang keseluruhannya menggambarkan kualitas dan daya saing pasar kerja daerah.

Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif yang dapat dicatat, khususnya dalam hal peningkatan upah pekerja. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kebumen mengalami kenaikan signifikan, dari Rp727.500 pada tahun 2011 menjadi Rp2.121.947 pada tahun 2024. Tren kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menegaskan upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penyesuaian upah dengan kondisi ekonomi yang berkembang.

Peningkatan upah ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik pasar kerja Kebumen serta mendorong produktivitas tenaga kerja. Namun demikian, tantangan lain seperti pengurangan kesenjangan gender dalam upah, peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, serta penciptaan lapangan kerja produktif masih menjadi agenda penting. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif untuk meningkatkan

kualitas pasar tenaga kerja sehingga kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah semakin optimal.

Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing fasilitasi/infrastruktur wilayah, meliputi dua pilar, yaitu infrastruktur dan adopsi TIK. Pilar infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian sedangkan pilar adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0.

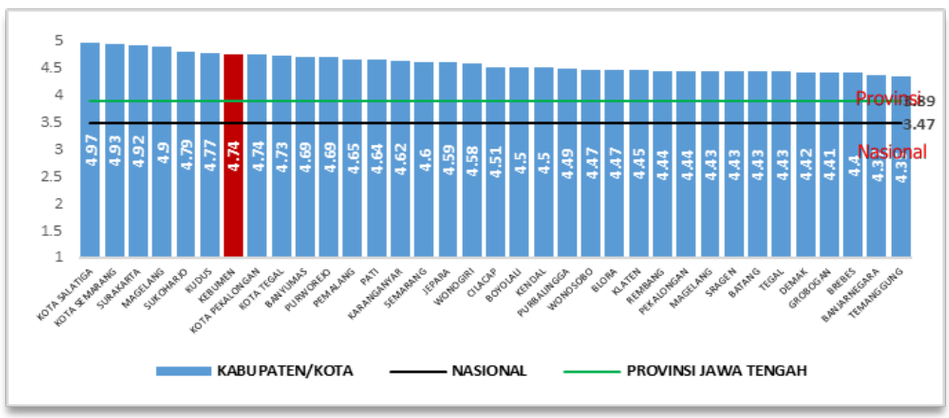


Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.69
Grafik Skor Pilar Infrastruktur Tahun 2024

Skor Pilar Infrastruktur IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 4,26 (2024) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,06) dan skor Nasional (2,97). Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah yang dielaborasi ke dalam 6 dimensi. Dimensi infrastruktur transportasi (jalan darat) dapat diproksi dengan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota (Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota) sebesar 73,48 persen (2024) serta v/c *ratio* sebesar 0,35 (2023) yang menunjukkan volume lalu lintas masih berada di bawah kapasitas jalan, yang berarti aliran lalu lintas relatif lancar dan tidak terjadi kemacetan signifikan. Sementara itu kondisi moda transportasi umum hingga tahun 2023 terdapat 1 terminal tipe A, 3 terminal tipe C, 887 unit angkutan umum untuk 35 trayek. Selain itu di wilayah Kabupaten Purworejo juga terdapat 1 terminal tipe A Purworejo dan 1 terminal tipe B Kutoarjo yang telah terlayani Trans Jateng. Selanjutnya, dimensi infrastruktur transportasi (jalur kereta api) yang di proksi dari layanan infrastruktur stasiun kereta api. Jumlah stasiun kereta api di Kabupaten Kebumen sebanyak 4 stasiun

pemberhentian penumpang, terdiri dari Stasiun Gombong, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, dan Stasiun Kutowinangun. Sementara itu terdapat rencana perpanjangan trayek Kereta Api Prambanan Ekspres sampai dengan Stasiun Kebumen, yang akan semakin mengintegrasikan wilayah Kebumen dengan Kutoarjo-Purworejo bahkan Yogyakarta hingga Surakarta. Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2023 sebanyak 36 perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api yang dijaga oleh PT. KAI sebanyak 19 perlintasan di mana 14 perlintasan kereta api dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan 3 perlintasan kereta api dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama masyarakat. Pada dimensi infrastruktur transportasi (udara), Kabupaten Kebumen mendapatkan akses layanan infrastruktur transportasi udara dari Yogyakarta *International Airport.* Sementara pada dimensi infrastruktur transportasi (pelabuhan) dilihat dari akses layanan pelabuhan dari Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Cilacap. Pada dimensi infrastruktur utilitas kelistrikan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,67 persen (2021) dan menjadi 100 persen pada tahun 2024. Sedangkan dimensi utilitas air minum ditunjukkan dengan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Kebumen masih sebesar 24 persen (2024).



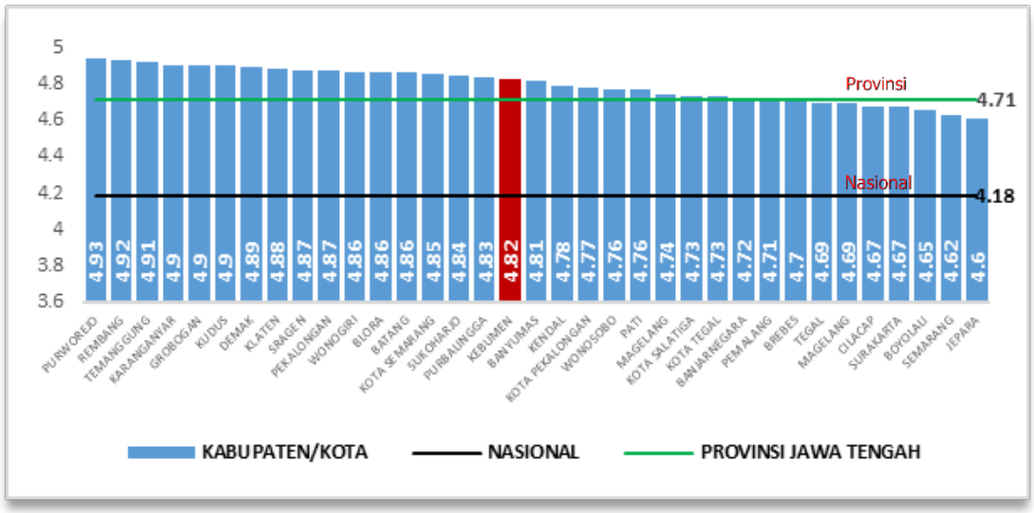
Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.70
Grafik Skor Pilar Adopsi TIK Tahun 2024

Skor Pilar Adopsi TIK IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 4,74 (2024) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,89) dan skor Nasional (3,47). Pilar Adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0 yang dielaborasi ke dalam satu dimensi. Dimensi adopsi TIK ditunjukkan dengan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan

terakhir masih sebesar 76,84 persen (Susenas 2024), artinya 8 dari 10 penduduk umur 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP/komputer sebesar 84,61 persen serta jangkauan jaringan 4G, artinya 8 dari 10 penduduk berumur 5 tahun ke atas pernah menggunakan telepon selular (HP)/nirkabel, atau komputer (PC/*desktop*, laptop, *notebook*, *tablet*) dalam tiga bulan terakhir.

Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing iklim investasi meliputi tiga pilar, yaitu institusi, dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi. Pilar institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan. Pilar dinamika bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan pilar kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.



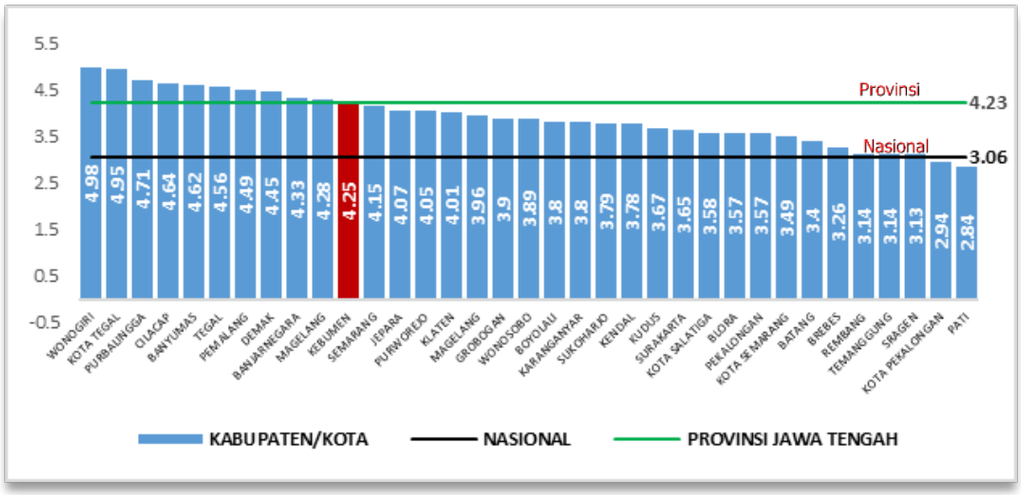
Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.71
Grafik Skor Pilar Institusi Tahun 2024

Skor Pilar Institusi IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 4,82 (2024) lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,71) dan skor Nasional (4,18). Pilar institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan yang dielaborasi ke dalam lima dimensi (keamanan, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah). Hal ini sejalan dengan kinerja beberapa indikator daerah yang ada.

Dimensi keamanan dapat diproksi dengan masih terdapat satu kasus kejadian SARA dan dapat ditangani. Dimensi *check and*

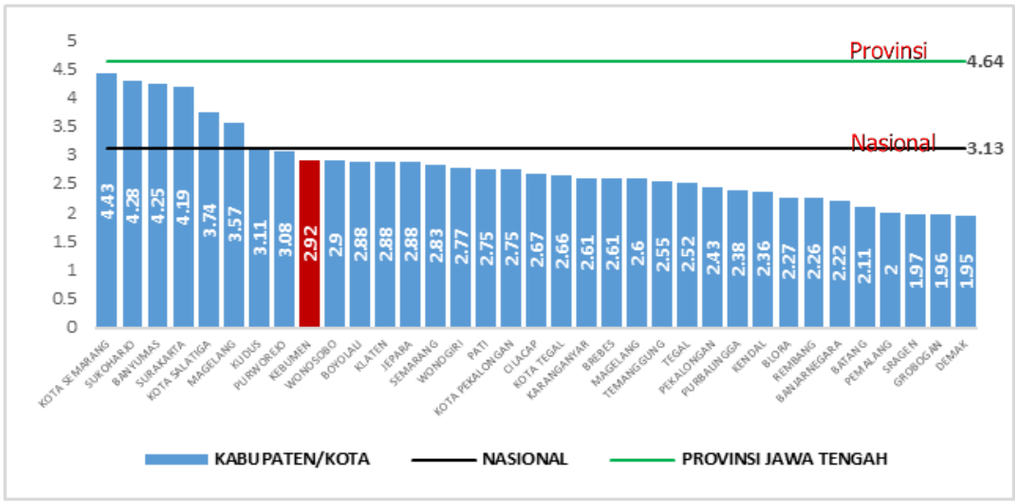
balance dapat diproksi dengan pencapaian SAKIP Kabupaten Kebumen sebesar 67,54 (2024). Dimensi transparansi dapat diproksi dengan pencapaian Indeks Integritas Nasional di mana pada tahun 2024 mencapai sebesar 75. Dimensi hak atas kepemilikan di mana pencapaian hak kepemilikan atas tanah belum optimal yaitu baru mencapai 70 persen bidang tanah di Kabupaten Kebumen yang telah bersertifikat. Selanjutnya, dimensi orientasi masa depan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dapat diproksi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai sebesar 69,86.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.72
Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis Tahun 2024

Skor dinamika bisnis IDSD Kabupaten Kebumen telah mencapai sebesar 4,25 (2024) berada di atas skor Provinsi Jawa Tengah (4,23) dan skor Nasional (3,06). Hal ini dilihat dari pertumbuhan Nomor Induk Berusaha dan kinerja pelayanan publik. Jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan pada tahun 2024 sebesar 25.132 izin dengan total nilai investasi 686,760 miliar. Kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 4,59 meningkat dari tahun 2020 yang nilainya sebesar 3,23.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.73
Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi Tahun 2024

Skor pilar kapabilitas inovasi IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 2,92 (2024) masih di bawah skor Provinsi Jawa Tengah (4,64) dan skor Nasional (3,13). Kondisi pencapaian skor kapabilitas inovasi tercermin dari keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Selain itu, pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 52,98 (2024) di bawah Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,85.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
a. Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *(B11)	Persen	NA	79,34	102,157	82,56	77,84
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	99,31	99,45	99,56	98,99	99,68
3	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	Persen	NA	NA	NA	9,61	11,52
4	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	NA	NA	58,88	65,79	67,46
5	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	NA	NA	36,34	43,01	57,51
6	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	NA	NA	71,44	76,43	79,93
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	NA	NA	55,84	66,23	68,05
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	17,77	20,88	47,12	92,72	86,93
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	62,93	63,17	68,67	86,42	71,12
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	NA	68,02	71,14	74,95	78,04
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	NA	76,03	72,17	74,32	74,48
12	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	NA	60,78	70,96	75,57	75,39
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	NA	60,87	69,86	76,03	74,87
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	NA	53,37	56,83	57,59	61,29
15	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	NA	54,48	59,09	61,36	63,74
b. Kesehatan							
1	Jumlah Kasus Kematian Ibu *(B2)	Orang	15	38	29	15	15
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita *(B3)	Persen	15,34	12,13	10,23	9,87	9,17
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	98,00	99,96	99,94	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	99,00	99,70	99,94	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	99,00	98,10	99,20	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	87,90	97,78	96,25	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	20,50	81,93	100	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	40,00	65,40	89,09	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	65,00	84,12	93,39	100,00	100,00
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	66,50	84,00	97,59	100,00	100,00
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	100,00	99,29	98,82	100,00	100,00
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	87,99	89,89	96,30	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	65,30	51,88	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	Persen	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Persen	3,92	5,60	6,48	7,59	9,66
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	73,30	75,17	78,71	78,71	78,75
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	86,37	87,80	96,83	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	93,00	91,99	78,81	86,97	96,22
5	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	99,22	99,48	99,11	99,69	99,42
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	77,07	78,26	73,84	73,96	73,48
7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	NA	82,38	100,00	58,66	55,14
8	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	NA	45,00	50,15	55,08
9	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	19	19	19	19	15
10	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	9,00	9,00	9,00	9,33	0,00
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	90,02	8,01	5,49	6,54	3,46
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	0	12,50	12,50	21,87	25,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	5	5	5	5	5
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	2,31	2,31	2,29	1,75	1,75
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
f. Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	19,48	100,00	99,59	100,00	100,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	32,16	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	53,29	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	29,57	100,00	100,00	99,89	100,00
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	NA	NA	73.855 (Usulan 42.920 Penidaklayakan 30.935)	28.714 (Usulan 17.652 Penidaklayakan 11.062)	21.051 (Usulan 14.746 Penidaklayakan 6.305)
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
a. Tenaga Kerja							
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	0	0	0	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	NA	NA	NA	NA	0,00
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	32.808.411,50	34.756.133,63	34.592.993,86	29.340.880,59	29.343.240,00
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	NA	56,36	56,36	60,90	100,00
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	5,76	51,50	82,49	29,22	26,02
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,05	93,06	93,26	93,37	93,41
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *(B21)	Indeks	0,416	0,359	0,349	0,344	0,328
3	Persentase ARG Daerah	Persen	15,89	19,30	25,95	45,98	27,73
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	13,51	15,89	15,83	11,94	15,34

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
c. Pangan							
1	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	Persen	6,4	2,81	5,31	21,35	40,05
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	87,00	85,90	90,00	91,90	93,05
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	50,38	52,67	54,96	58,78	30,43
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	96,47	95,52	88,28	91,63	92,75
d. Pertanahan							
1	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	100,00	0	100,00	100,00	56,66
2	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persen	11,00	17,00	26,00	34,00	41,00
3	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
e. Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *(B53)	Indeks	73,92	64,43	68,17	67,16	69,86
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	58,73	57,58	57,58	57,51	79,30
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persen	20,00	11,36	8,00	100,00	77,78
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persen	90,36	96,60	99,15	99,43	99,51
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	31,21	39,66	44,43	55,79	60,82

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	NA	NA	0,65	5,41	11,41
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	Persen	2,21	2,35	2,38	2,17	2,17
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*	Persen	70,77	68,58	69,05	69,00	67,11
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	16,34	17,66	15,72	14,66	11,80
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	11,00	15,70	15,70	10,30	15,70
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) *(B22)	Indeks	NA		58,67	63,17	63,90
i. Perhubungan							
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	NA	0,35	0,82	0,64	0,64
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *(B38)	Persen	33,62	38,43	53,99	59,23	60,67
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Persen	416,00	194,00	390,00	181,00	186,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
j. Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	NA	NA	NA	100,00	100,00
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	16,05	-63,69	-17,07	112,29	76,14
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
l. Penanaman Modal							
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	-56,21	25,70	15,58	11,26	9,32
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	101,74	124,62	142,23	156,67	169,57
m. Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	0,22	0,21	0,22	0,18	0,20
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	0	0,21	0	0,27	0,89
n. Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	NA	NA	NA	2,11	2,69
o. Persandian							
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	NA	NA	77,67	78,45	78,13

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
p. Kebudayaan							
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	21,98	0	26,92	76,15	76,15
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	2,00	3,00	3,00	4,00	12,10
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	NA	NA	NA	NA	1,25
q. Perpustakaan							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	NA	45,32	54,30	71,10	80,77
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12,39	12,85	18,69	18,85	16,91
r. Kearsipan							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	NA	80,23	81,58	92,07	93,15
3. Urusan Pilihan							
a. Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	9.068.530,00	9.646.661,67	9.138.317,30	12.898.015,49	9.522.860,00
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Kg	3.139.317,00	3.220.874,00	3.355.110,00	3.453.930,00	3.590.480,00
b. Pariwisata							
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	NA	238,43	13,41	-31,72	-10,64
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	0	-93,59	80,00	22,22	109,09
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pertanian							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	-5,94	16,21	-15,06	-16,12	12,13
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0,54	6,34	-24,04	21,47	-8,59

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	52,25	-20,88	-30,01	26,55	9,35
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	-0,65	0,85	-12,07	12,47	-23,74
5	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	8.914,10	3.550,00	2.150,00	1.168,00	937,08
6	Persentase Penyakit Hewan yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d. Kehutanan							
e. Energi dan Sumber Daya Mineral							
f. Perdagangan							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	12,94	18,13	23,71	30,32	36,34
g. Perindustrian							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	35,20	36,40	36,60	37,60	37,80
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Persen	NA	NA	NA	53,60	42,07

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan Dibandingkan dengan Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Dilakukan Pengawasan.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik' Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah Dilakukan Pembinaan.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h. Transmigrasi							
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a. Perencanaan							
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Keuangan							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	NA	34,19	25,80	30,63	31,62
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14,59	17,93	17,99	15,98	15,43
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	94,14	93,33	91,82	96,83	96,37
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	0,08	1,37	-0,66	-0,58	6,55
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	NA	NA	33,66	12,29	12,96
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	-8,53	-22,38	3,85	36,37	-12,92
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	NA	52,00	70,02	79,01	79,01

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
d. Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	Persen	75,00	70,00	87,50	83,33	71,43
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,96	0,89	0,94	0,96	0,99
e. Fungsi Pengawasan							
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	NA	2,66	3,13	3,19	3,30
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Level 2	Level 3 (hanya muncul level, tidak ada nilai)	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,18)	Level 3 (3,27)
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	NA	2,00	2,89	3,02	3,03
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	96,35	87,98	92,00	91,89	95,19
f. Fungsi Pengadaan							
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	NA	16,00	18,80	20,44	25,96
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	NA	1,94	4,80	17,42	18,39
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	NA	4,44	13,30	35,56	40,00
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	70,00	91,67	72,22	84,21	107,69
h. Pelayanan Publik							
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,04	4,23	4,37	4,55	4,59

Sumber: Bapperida Kab. Kebumen (data diolah), 2025

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar setiap warga negara untuk hidup layak, sehat, aman, dan berpendidikan. Melalui perwujudan SPM, pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi sekadar menyediakan layanan tetapi menjamin mutu dan pemerataan layanan dasar. Ini adalah transformasi besar dari orientasi birokrasi administratif menuju birokrasi yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat paling mendasar. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.

Tabel II.84
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Persentase (Persen) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	81,70	99	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (Persen) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (Persen) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	121	102	100	100	100
Bidang Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100	99,90	99,94	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100	99,70	99,94	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	99	98	99,20	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	97	97,70	96,25	100	100

No	Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	66	81,90	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	69	65,40	89,09	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	46	84	93,39	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	70	84	97,59	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	98	99,20	98,82	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	97	89,80	96,30	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	NA	51,80	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	92	100	100	100	100
Bidang Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86,40	82	97	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,95	72	77	100	100

No	Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase (Persen) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (Persen) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (Persen) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (Persen) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (Persen) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	NA
Bidang Urusan Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Persentase warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0	100	100	100

No	Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Sosial							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan paska	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2025

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Perekonomian Indonesia masih menghadapi masalah struktural, seperti menurunnya jumlah kelas menengah hingga 20 persen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah, sehingga konsumsi domestik sebagai motor penggerak ekonomi melambat. Selain itu, reformasi perpajakan juga menjadi sorotan penting, terutama dalam upaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 23 persen tanpa menaikkan tarif pajak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai reformasi ekonomi dan sosial agar pertumbuhan yang berkelanjutan dapat tercapai, terutama melalui penguatan sektor industri dan program kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan

keuangan menyangkut pengelolaan sumber Pendapatan Daerah, pengeluaran belanja, dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan meminimalkan sumber Pendapatan Transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Berikut gambaran mengenai kinerja keuangan 2020-2024 Kabupaten Kebumen.

2.2.1 Kinerja Keuangan 2020-2024

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Kinerja keuangan 2020-2024 dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

Tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada tahun 2020-2024 adalah melihat kemampuan kemandirian fiskal yang mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar, khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka, sehingga diartikan daerah tersebut stabil dan memiliki keberlanjutan finansial bagi pemerintahan daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.85
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan DOFD dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) cukup berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2020 (14,59 persen) sampai 2022 (17,99 persen) kemudian pada tahun 2023 (15,98 persen) mengalami penurunan cukup signifikan dan pada tahun 2024 (15,43 persen) kembali mengalami penurunan. Persentase rata-rata DOFD Kabupaten Kebumen dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mencapai 16,13 persen dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kebumen masih masuk di kategori "kurang". Penurunan DOFD (proporsi PAD terhadap total pendapatan menurun) karena pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kasus anomali yaitu meningkatnya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama pandemi COVID-19 berupa pendapatan dari tes PCR dan *treatment* lain yang memberikan kenaikan pendapatan signifikan bagi BLUD pada saat itu. Beberapa upaya atau inovasi yang telah dilakukan antara lain:

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas;
2. Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian daerah;
3. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

4. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan penanaman modal;
5. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;
6. Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan, serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta
9. Pembinaan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD.

Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya baik dari pajak maupun retribusi dengan cara yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Kebumen periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.86
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	2.763.229.307.230	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.021.509.721	3.137.714.774.634
PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.025.963.784	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.175.268.010
DOFD	14,59%	16,67%	17,99%	15,98%	15,43%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

2.2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan); dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 tahun terakhir perkembangan pendapatan Kabupaten Kebumen terus mengalami pertumbuhan yang positif di mana pendapatan tahun 2020 mencapai Rp2,768 triliun menjadi Rp3,137 triliun di tahun 2024. Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar berasal dari pos Pendapatan Transfer. Secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pada angka 3,23 persen. Secara rinci sumber pendapatan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.87
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	**2.763.229.307.230**	**2.832.035.015.733**	**2.847.196.017.404**	**2.901.021.509.721**	**3.137.714.774.634**	**3,23**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**403.025.963.784**	**472.017.087.115**	**512.346.375.475**	**463.650.961.705**	**484.175.268.010**	**4,69**
Pendapatan Pajak Daerah	100.877.584.517	112.474.854.190	129.843.875.322	137.222.705.502	139.434.789.479	**8,43**
Pendapatan Retribusi Daerah	22.068.306.403	23.652.739.277	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	**10,77**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.727.758.649	16.552.860.815	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	**8,57**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.352.314.215	319.336.632.833	336.486.804.682	278.423.869.096	289.654.925.316	**2,31**
PENDAPATAN TRANSFER	**2.223.453.074.285**	**2.222.632.960.883**	**2.329.703.641.941**	**2.435.850.438.454**	**2.634.976.497.624**	**4,34**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**2.074.494.939.094**	**2.059.293.466.080**	**2.123.296.694.941**	**2.250.967.223.263**	**2.366.631.446.811**	**3,35**
Dana Perimbangan	**1.624.225.405.094**	**1.607.599.153.080**	**1.706.540.321.941**	**1.783.201.602.063**	**1.884.523.490.811**	**3,79**
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	35.146.538.958	1.607.599.153.080	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	-0,83
Dana Alokasi Umum	1.197.504.293.000	-	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	2,20
Dana Alokasi Khusus	391.574.573.136	-	494.615.159.880	507.146.964.042	544.166.492.811	8,57
Dana Insentif Daerah	**-**	**46.433.860.000**	**-**	**11.805.728.000**	20.849.462.000	**-23,43**

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**450.269.534.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100,00**
Dana Otonomi Khusus	-					
Dana Penyesuaian	450.269.534.000					-100,00
Dana Desa		**405.260.453.000**	**416.756.373.000**	**455.959.893.200**	**461.258.494.000**	4,41
TRANSFER ANTAR DAERAH	**148.958.135.191**	**163.339.494.803**	**206.406.947.000**	**184.883.215.91**	**268.345.050.813**	**15,85**
Pendapatan Bagi Hasil	**130.966.524.602**	**157.491.424.803**	**175.763.136.000**	**174.243.934.191**	181.816.080.313	8,55
Bantuan Keuangan	**17.991.610.589**	**5.848.070.000**	**30.643.811.000**	**10.639.281.000**	**86.528.970.500**	**48,09**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.991.610.589	5.848.070.000	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	48,09
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**136.750.269.161**	**137.384.967.735**	**5.145.999.988**	**1.520.109.562**	**18.563.009.000**	**-39,30**
Pendapatan Hibah	**136.750.269.161**	**8.794.749.700**	**5.145.999.988**	**1.520.109.562**	18.563.009.000	**-39,30**
Pendatan Dana Darurat	**-**	**-**	**-**	**-**	-	
Pendapatan Lainnya		**128.590.218.035**	**-**	**-**	-	**-100,00**

Sumber: Dokumen LRA Audited, 2025

Proporsi Pendapatan Daerah di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis pendapatan daerahnya, masih didominasi oleh Pendapatan Transfer hampir di atas angka 80 persen di tiap tahunnya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil yaitu di bawah 20 persen. Dapat dikatakan bahwa kemandirian Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah, karena pendapatan daerahnya masih tergantung oleh Dana Transfer baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Selengkapnya proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Gambar II.74
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 (Persen)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Berkaitan dengan komponen PAD berupa Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak yang menjadi sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang

meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Sedangkan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1) Pajak Daerah

Perkembangan Pajak Daerah mengalami tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 8,43 persen dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pertumbuhan pajak dalam 5 tahun terakhir terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara keseluruhan, meskipun Pajak Daerah mengalami pertumbuhan namun masih relatif kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memungut Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, serta Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, serta Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pendapatan Retribusi di Kabupaten Kebumen dalam tren meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,77 persen dari Rp22,06 miliar (2020) dan meningkat di tahun 2024 menjadi Rp33,23 miliar. Melihat kondisi ini maka perlu dijaga momentum tumbuhnya kembali Retribusi Daerah terutama

pada sumber pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan/sampah, parkir, dan penggunaan kekayaan daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,57 persen dari Rp15,72 miliar (2020) menjadi Rp21,85 miliar (2024). Untuk meningkatkan dividen BUMD ke depan, opsi peningkatan manajemen BUMD dan suntikan modal bisa menjadi pertimbangan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 tahun terakhir mengalami kontraksi yaitu sebesar 2,31 persen dari Rp264,35 miliar (2020) menjadi Rp289,65 miliar (2023). Penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2022 yang sebesar Rp336,48 miliar yang kemudian menurun drastis di tahun 2023. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja BLUD yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:



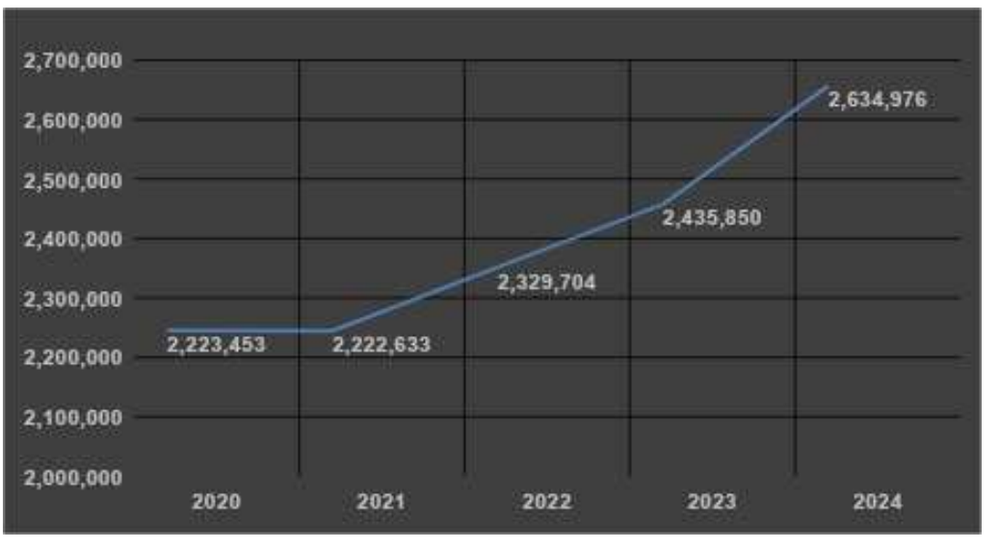
Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Gambar II.75
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Kebumen.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020 Pendapatan Transfer sebesar Rp2,273 triliun meningkat menjadi sebesar Rp2,634 triliun pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Gambar II.76
Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Secara proporsi Pendapatan Transfer ini masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan) secara rata-rata di atas 90,00 persen selama 5 tahun terakhir. sedangkan yang bersumber dari transfer antar daerah di bawah 10 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Gambar II.77
Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bersumber pada Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, serta Dana Desa. Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 tahun ke belakang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,35 persen, dengan komponen pembentuk terbesarnya adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,20 persen. Dana Desa menjadi aspek strategis dalam pengembangan wilayah setiap tahunnya juga meningkat sebesar 4,41 persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah bersumber pada Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pada realisasi keuangan daerah Kabupaten Kebumen, Pendapatan Bagi Hasil menjadi komponen terbesar pembentuk transfer antar daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,55 persen. Sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah menjadi pembentuk lainnya.

c. Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Definisi Pendapatan Lain-lain yang Sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Lain-lain yang Sah di Kabupaten

Kebumen mengalami penurunan cukup signifikan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar Rp136,75 miliar menurun menjadi sebesar Rp18,56 miliar pada tahun 2024. Pendapatan Lain-lain yang Sah di Kabupaten Kebumen ini bersumber dari Pendapatan Hibah. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Gambar II.78
Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

2.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan

berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi

   Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal

   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga

   Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer

   Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat, dari sebesar Rp2,73 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp3,12 triliun pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 sebesar 1,46 persen dimana pertumbuhan paling besar yaitu Belanja Transfer sebesar 6,03 persen. Komponen Belanja Daerah Kabupaten Kebumen meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Selengkapnya Belanja Daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut.

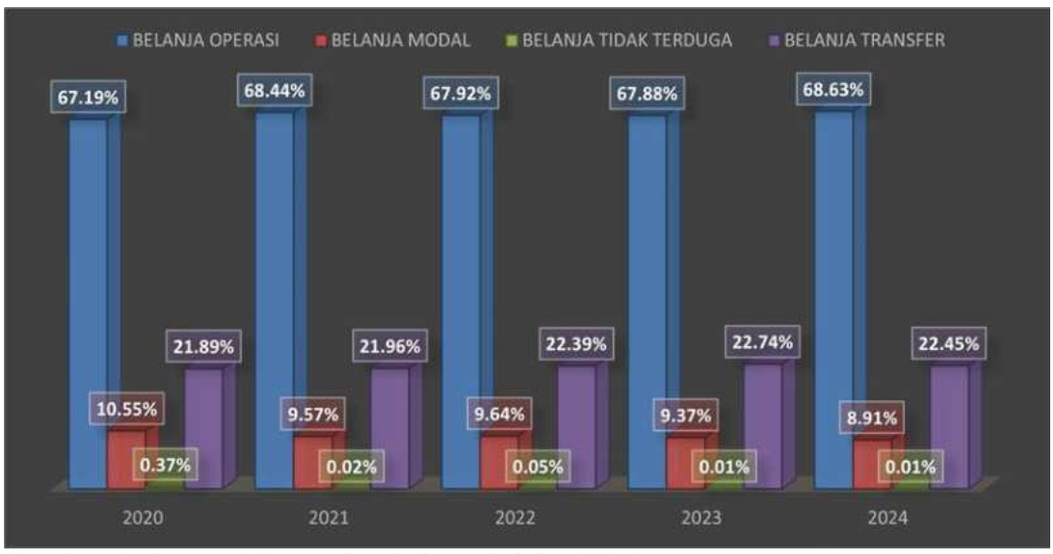
Tabel II.88
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**2.737.861.916.080**	**2.779.840.698.100**	**2.824.358.293.725**	**2.977.141.914.829**	**3.126.715.028.457**	**3,38**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.839.589.218.113**	**1.902.638.912.710**	**1.918.270.224.061**	**2.020.914.516.871**	**2.145.807.087.502**	**3,92**
2.1.1	**Belanja Pegawai**	1.169.696.600.650	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	**0,40**
2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	557.946.733.726	666.965.891.277	704.907.763.493	726.725.182.478	800.813.552.333	**9,45**
2.1.2	**Belanja Bunga**	-	-	-	-	-	
2.1.4	**Belanja Subsidi**	-	484.527.400	313.864.348	675.656.402	1.447.997.750	**44,04**
2.1.5	**Belanja Hibah**	81.112.633.737	72.414.174.601	59.752.651.931	128.698.064.603	145.243.409.681	**15,68**
2.1.6	**Belanja Bantuan Sosial**	30.833.250.000	21.478.899.729	11.088.807.122	11.040.168.523	9.875.120.500	**-24,77**
2.1.7	**Belanja Keuangan**	**-**	-	**-**	**-**		
2.2	**BELANJA MODAL**	**288.801.049.018**	**266.110.950.340**	**272.301.599.864**	**278.842.913.538**	**278.735.832.493**	**-0,88**
2.2.1	**Belanja Modal (Tanah)**	8.217.772.363	4.062.715.011	1.387.839.580	1.400.551.240	5.547.762.848	**-9,36**
2.2.2	**Belanja Peralatan dan Mesin**	89.087.259.542	112.083.903.500	102.152.506.285	65.799.396.633	117.947.198.909	**7,27**
2.2.3	**Belanja Bangunan dan Gedung**	43.302.380.801	44.827.545.305	34.758.067.305	75.265.208.901	40.299.475.917	**-1,78**
2.2.4	**Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan**	136.180.943.682	97.454.097.763	126.620.498.535	124.921.560.732	102.857.035.252	**-6,78**
2.2.5	**Belanja Aset Tetap Lainnya**	12.012.692.630	7.682.688.761	6.894.828.159	11.456.196.032	12.044.972.327	**0,07**
2.2.6	**Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)**	-	-	487.860.000	-	39.387.240	**-46,70**

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.188.825.249**	**545.318.400**	**1.295.204.500**	**409.940.801**	**323.000.000**	**-57,80**
2.3.1	**Belanja Tidak Terduga**	**10.188.825.249**	**545.318.400**	**1.295.204.500**	**409.940.801**	323.000.000	**-57,80**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**599.282.823.700**	**610.545.516.650**	**632.491.265.300**	**676.974.543.619**	**701.849.108.462**	**4,03**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**13.527.756.700**	**13.862.929.650**	**12.402.615.800**	**13.743.166.881**	**15.934.319.925**	**4,18**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	9.657.463.900	13.862.929.650	10.087.758.000	13.743.166.881	15.934.319.925	13,34
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	2.314.857.800			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.870.292.800	-		-	-	-100,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**585.755.067.000**	**596.682.587.000**	**620.088.649.500**	**663.231.376.738**	**685.914.788.537**	**4,03**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	**-**	**0**			
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	583.690.191.000	596.682.587.000	620.088.649.500	663.231.376.738	685.914.788.537	4,12
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	2.064.876.000	-	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.367.391.150	52.194.317.633	22.837.723.679	(76.120.405.108)	10.999.746.177	**(18,85)**

Sumber: Dokumen LRA Audited, 2025

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis Belanja Daerah mengalami tren yang fluktuatif. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen paling mendominasi yaitu Belanja Operasi dengan rasio sebesar hampir rerata di atas 67 persen, kemudian disusul oleh Belanja Transfer dengan rasio rerata 21 persen lebih. disusul Belanja Modal yang masih cukup sedikit yaitu di bawah 15 persen dan Belanja Tidak Terduga rerata di bawah 1 persen. Seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Gambar II.79
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024

a. Belanja Operasi

Dalam 5 tahun terakhir Belanja Operasi Kabupaten Kebumen telah tumbuh 3,92 persen per tahun dari Rp1,839 triliun (2020) menjadi Rp2,14 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh Belanja Operasi yang ada digunakan untuk Belanja Pegawai kemudian digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi Belanja Pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 63,58 persen dari total Belanja Operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 55,38 persen di tahun 2024. Sebaliknya proporsi Belanja Barang dan Jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari 30,33 persen (2021) menjadi 37,32 persen (2024). Sementara Belanja Operasi lainnya (Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 8 persen dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 7,30 persen.



Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.80
Realisasi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Meskipun secara proporsi Belanja Pegawai terus ditekan agar semakin mengecil namun secara nominal nilainya mengalami peningkatan dari Rp1,16 triliun (2020) menjadi Rp1,18 triliun (2024) atau rata-rata meningkat 3,92 persen per tahun. Posisi proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen dalam 5 tahun terakhir masih berkisar 55,38 persen. Penurunan Belanja Pegawai terjadi dikarenakan:

1) Jumlah ASN yang baru lebih kecil dibandingkan yang keluar (gaji ASN baru juga relatif lebih kecil dibandingkan yang pensiun), karena banyak yang pensiun adalah guru pada golongan IV. Sempat terjadi penerimaan P3K yang cukup besar di tahun 2021, namun tahun-tahun berikutnya menurun.
2) Dihapuskannya honorarium bagi ASN (kecuali TAPD) dan semakin kecilnya honor pengelola kegiatan.
3) Sempat terjadi penurunan besaran persentase insentif PAD. Sedangkan Belanja Hibah meningkat terutama di tahun 2023 dan 2024 dikarenakan adanya Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024.

b. Belanja Modal

Dalam 5 tahun terakhir Belanja Modal Kabupaten Kebumen mengalami tren menurun cukup signifikan yaitu -0,88 persen per tahun dari Rp288,80 miliar (2020) menjadi Rp278,75 miliar (2024). Menurunnya Belanja Modal tersebut disebabkan oleh

menurunnya hampir semua komponen Belanja Modal yaitu: Belanja Tanah (-9,36 persen per tahun); Belanja Bangunan dan Gedung (-1,78 persen per tahun); Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (-6,78 persen per tahun); dan Belanja Aset Lainnya (-46,70 persen per tahun). Sementara hanya Belanja Peralatan dan Mesin yang mengalami peningkatan yaitu 7,27 persen per tahun dari Rp89,08 miliar (2020) menjadi Rp117,94 miliar (2024). Belanja Modal secara nominal rupiah masih meningkat namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan peningkatan total belanja sehingga proporsinya menurun. Terbatasnya Belanja Modal karena selama ini masih mengandalkan dari sumber pendanaan DAK Fisik, DAU *Earmark* Pekerjaan Umum, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pendapatan Hibah. Peningkatan belanja infrastruktur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum akan diakselerasi pada tahun 2025-2027



Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen (data diolah), 2024

Gambar II.81
Proporsi Struktur Belanja Modal Kab. Kebumen Tahun 2020-2024

Selain untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam hal meningkatkan proporsi Belanja Modal. Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi Belanja Modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan Belanja Peralatan dan Mesin

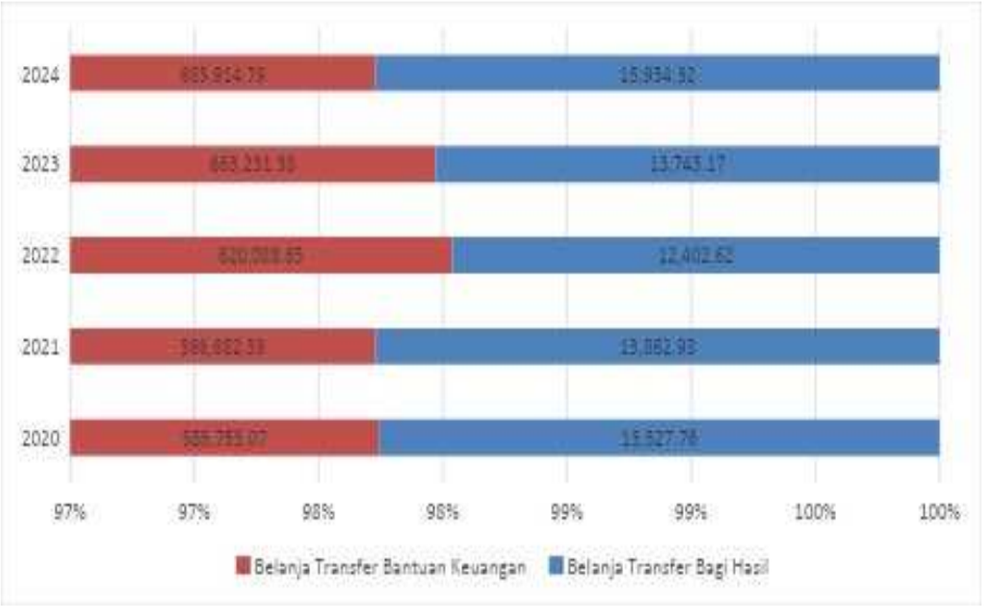
dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja Modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Posisi saat ini, proporsi Belanja Modal rata-rata hanya sebesar -0,88 persen per tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat untuk mendorong tumbuhnya investasi yang berdampak pada perekonomian daerah secara umum diperlukan infrastruktur yang memadai. Untuk itu arah kebijakan belanja ke depan harus berpijak pada peningkatan proporsi Belanja Modal secara bertahap dan berkelanjutan.

c. Belanja Tidak Terduga

Dalam 5 tahun terakhir realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kebumen mengalami penurunan cukup signifikan yaitu -57,80 persen per tahun dari Rp10,188 miliar (2020) menjadi Rp323,00 juta (2024). Belanja Tidak Terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya. Sehingga penurunan realisasinya dikarenakan tidak adanya hal yang sifatnya darurat/mendesak yang terjadi di Kebumen.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Komponen dari Belanja Transfer adalah Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dalam 5 tahun terakhir Belanja Transfer Kabupaten Kebumen relatif naik sekitar 4,03 persen per tahun dari Rp599,28 miliar (2020) menjadi Rp701,84 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya Belanja Transfer Bantuan Keuangan (Desa) yang tumbuh sebesar 4,03 persen dari Rp585,75 miliar (2020) menjadi Rp685,91 miliar (2024). Belanja Transfer Bagi Hasil mengalami pertumbuhan 4,18 persen per tahun dari Rp13,52 miliar (2020) menjadi Rp15,93 miliar (2024).



Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Gambar II.82
Realisasi Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

2.2.1.3 Pembiayaan

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari sebesar Rp194,58 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp174,96 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah selama tahun 2020- 2024 sebesar -2,62 persen. Rincian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -3,19 persen dengan komponen pembentuk dominannya bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan rerata sebesar -5.06 persen dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan rerata pertumbuhan sebesar -7,29 persen.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran Pembiayaan bersumber pada Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman

Daerah, dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kinerja Pengeluaran Pembiayaan daerah dalam waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari sebesar Rp9,55 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp3,440 miliar pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan daerah sebesar -18,06 persen.

Secara rinci Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.89
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**PEMBIAYAAN**	**194.582.918.416**	**216.985.309.566**	**235.979.627.199**	**240.811.890.878**	**174.965.945.878**	**-2,62**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**204.132.918.416**	**222.085.309.566**	**271.279.627.199**	**283.142.890.878**	**179.270.945.878**	**-3,19**
3.1.1	**Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	202.667.918.416	219.950.309.566	269.179.627.199	258.817.350.878	164.691.485.878	**-5,06**
3.1.2	**Pencairan Dana Cadangan**	-	-	-	22.225.540.000	12.774.460.000	**-42,52**
3.1.3	**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	-	-	-	-		
3.1.4	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	-	-	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000	**-7,29**
3.1.5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	1.465.000.000	2.135.000.000	-	-	-	**-100,00**
3.1.6	**Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**			-	-	-	
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**9.550.000.000**	**5.100.000.000**	**35.300.000.000**	**42.331.000.000**	**4.305.000.000**	**-18,06**
3.2.1	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	-	-	-	-	-	
3.2.2	**Penyertaan Modal Daerah**	8.050.000.000	3.000.000.000	18.200.000.000	20.231.000.000	2.500.000.000	**-25,35**
3.2.3	**Pembentukan Dana Cadangan**	-	-	15.000.000.000	20.000.000.000	-	**-100,00**
3.2.4	**Pemberian Pinjaman Daerah**	-	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000	**-4,92**
3.2.5	**Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	1.500.000.000	-	-	-	-	**-100,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**194.582.918.416**	**216.985.309.566**	**235.979.627.199**	**240.811.890.878**	**174.965.945.878**	**-2,62**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	219.950.309.566	269.179.627.199	258.817.350.878	164.691.485.770	185.965.692.055	-4,11

Sumber: Dokumen LRA Audited, 2025

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek), dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban (Utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

a. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) Aset Lancar, (ii) Investasi Jangka Panjang, (iii) Aset Tetap, (iv) Dana Cadangan, dan (v) Aset Lainnya.

Secara agregat, nilai Aset Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 1,53 persen per tahun, dari Rp4.525 triliun (2020) menjadi Rp4.809 triliun (2024). Adapun jenis Aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 tahun terakhir adalah Investasi Jangka Panjang (8,60 persen), Aset Tetap (1,75 persen). Aset Lancar yang mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -4,30 persen serta Aset Lainnya -1,45 persen.

b. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang Utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus Kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis Kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Kewajiban Jangka Pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren meningkat cukup signifikan sebesar 8,91 persen per tahun dari Rp41,790 miliar (2020) menjadi Rp58,789 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam, maka nilai Kewajiban Jangka Pendek terbesar disumbangkan oleh Utang Belanja, yang trennya juga relatif meningkat dari Rp40,507 miliar (2020) menjadi Rp56,780 miliar (2024).

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai Ekuitas Dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas Dana terbagi menjadi tiga kategori yakni Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan Modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada Utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai Ekuitas Dana Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara agregat mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,45 persen per tahun. Pada tahun 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp4,484 triliun, meningkat menjadi Rp4,750 triliun pada tahun 2024. Ekuitas menunjukkan tren kenaikan hingga tahun 2021, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024.

Penurunan nilai ekuitas dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek baru, atau mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang cermat menjadi penting untuk memitigasi risiko penurunan ekuitas.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menekan penurunan nilai ekuitas yaitu mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset,

mengelola operasional dengan efisien untuk mencegah penurunan pendapatan atau peningkatan biaya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.90
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	142.972.001.462,00	-	170.249.980.751,00	113.015.912.113,00	141.417.780.235,00	(0,27)
Kas di Bendahara Penerimaan	34.633.880,00	167.807.726.233,00	41.794.313,00	212.936.280,00	1.187.754.932,00	142,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	206.799,00	400.000,00	1.429.217,00		1.168.450,00	54,18
Kas di BLUD	71.363.739.445,98	96.376.474.671,98	87.496.345.014,98	49.367.509.581,98	32.797.905.100,98	(17,66)
Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-	
Kas di Bendahara BOS	-	4.995.026.294,00	1.037.127.884,00	893.163.639,00	136.175.766,00	(59,37)
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	
Kas Lainnya	5.614.042.929,00	-	-	1.208.402.886,00	12.970.689.783,00	23.29
Setara Kas	-	-	-	-	-	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak	6.846.684.862,00	7.474.389.558,00	7.980.512.527,00	9.358.194.241,00	9.358.194.241,00	8,13
Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	-	-	
Piutang Retribusi	2.645.872.630,00	3.453.384.530,00	4.079.655.400,00	4.359.106.740,00	4.359.106.740,00	13,29
Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-	-	

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	44.088.606.927,00	91.899.678.013,00	20.390.647.936,94	21.073.792.846,36	21.178.631.980,36	(16,75)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Piutang Transfer Antar Daerah	14.715.007.496,00	4.770.941.665,00	3.437.968.245,00	6.047.212.575,00		(100,00)
Penyisihan Piutang	(8.189.140.922,75)	-	(9.170.645.322,50)	(10.866.464.784,45)	-10.866.464.784,45	7,33
Beban Dibayar Dimuka	65.598.889,00	71.466.181,86	63.096.715,00	33.705.587,11	33.705.587,11	(15,34)
Piutang Lainnya	-	(10.027.551.584,00)	-	-	4.242.212.575,00	(175,07)
Persediaan	39.833.217.851,73	46.743.460.481,05	59.569.450.839,32	51.568.005.606,60	51.568.205.606,60	6,67
Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	
Jumlah Aset Lancar	**319.990.472.249**	**413.565.396.044**	**345.177.363.521**	**246.271.477.312**	**268.385.066.213**	**(4,30)**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir	35.000.000,00	-	862.539.000,00	-		(100,00)
Penyisihan Dana Bergulir			(862.539.000,00)			(100,00)
Penyisihan Investasi Jangka Panjang	-	-		-		
Jumlah Investasi Non Permanen	**35.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(100,00)**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	150.397.666.979,57	156.628.976.512,61	168.191.138.468,15	204.963.341.996,07	209.268.000.000,00	8,61
Jumlah Investasi Permanen	**150.397.666.980**	**156.628.976.513**	**168.191.138.468**	**204.963.341.996**	**209.268.000.000**	**8,61**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**150.432.666.980**	**156.628.976.513**	**168.191.138.468**	**204.963.341.996**	**209.268.000.000**	**8,60**
ASET TETAP						
Tanah	777.646.197.820,55	797.931.995.264,55	794.019.449.045,55	811.434.718.585,55	816.982.481.433,55	1,24
Peralatan dan Mesin	870.303.689.719,00	990.208.063.048,00	1.094.696.731.234,00	1.136.839.523.231,00	1.254.796.589.040,00	9,58
Gedung dan Bangunan	1.519.382.588.544,00	1.633.214.003.010,00	1.664.430.735.238,00	1.741.811.783.185,00	1.782.111.259.102,00	4,07
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.559.995.132.444,25	2.662.665.223.709,25	2.787.621.602.000,25	2.917.657.832.729,25	3.020.514.867.981,25	4,22
Aset Tetap Lainnya	132.900.631.859,00	138.004.707.625,00	143.266.418.481,00	111.986.224.096,00	124.031.196.423	(1,71)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Konstruksi dalam Pengerjaan	12.276.936.657,00	4.355.619.173,00	8.911.032.658,00	9.455.386.708,00	9.455.386.708,00	(6,32)
Akumulasi Penyusutan	(1.940.935.286.174,30)	(2.240.830.838.853,54)	(2.533.703.596.021,04)	(2.793.035.937.938,29)	-2.793.035.937.938,29	9,53
Jumlah Aset Tetap	**3.931.569.890.870**	**3.985.548.772.976**	**3.959.242.372.636**	**3.936.149.530.597**	**4.214.855.842.750**	**1,75**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	15.000.000.000,00	12.774.460.000,00		(100,00)
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**15.000.000.000**	**12.774.460.000**	**-**	**(100,00)**
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	-	(100,00)
Aset Tak Berwujud	3.914.993.030,00	5.253.586.030,00	5.873.323.030,00	5.922.595.030,00	5.961.982.270,00	11,09
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	(2.191.976.584,82)	(2.614.022.456,00)	(3.301.923.144,00)	(3.301.923.144,00)	10,79
Aset Lain-Lain	105.406.781.516,00	103.407.577.455,00	121.819.628.982,00	132.099.376.769,44	148.233.939.457,44	8,90
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.671.194.650,00)	-	-	(34.132.133.152.00)	(34.132.133.152,00)	112,59
Jumlah Aset Lainnya	**123.785.142.584**	**122.603.749.588**	**141.213.492.244**	**116.722.478.191**	**116.761.865.431**	**(1,45)**
JUMLAH ASET	**4.525.778.172.682**	**4.678.346.895.121**	**4.628.824.366.869**	**4.516.881.288.096**	**4.809.270.774.394**	**1,53**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.314.950,00	-	9.326.302,00	6.438.730,00	6.438.730,00	(34,18)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.248.346.951,00	917.294.717,83	1.109.331.028,94	2.002.249.183,97	-	(100,00)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemda Lainnya			35.466.051.092,00	-		(100,00)
Utang Belanja	40.507.386.063,00	63.080.169.175,00	-	-	56.780.960.062,00	8,81
Utang Beban	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	2.002.249.183,97	
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	
Utang Bunga	-	-	-	56.780.960.06,00	-	(100,00)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**41.790.047.964**	**63.997.463.893**	**36.584.708.423**	**58.789.647.976**	**58.789.647.976**	**8,91**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat						
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank						
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**41.790.047.964**	**63.997.463.893**	**36.584.708.423**	**58.789.647.976**	**58.789.647.976**	**8,91**
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	4.483.948.124.718,03	4.614.349.431.228,11	4.592.239.658.445,71	4.458.091.640.119,65	4.750.376.629.279,65	1,45
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	**4.483.948.124.718**	**4.614.349.431.228**	**4.592.239.658.446**	**4.458.091.640.120**	**4.750.376.629.280**	**1,45**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.525.738.172.682**	**4.678.346.895.121**	**4.628.824.366.869**	**4.516.881.288.096**	**4.809.166.277.256**	**1,53**

Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

d. Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Kebumen periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis Rasio Keuangan. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi Kewajiban atau membayar Utang Jangka Pendek-nya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut tidak likuid. Ada beberapa Rasio Likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah Rasio Lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai Rasio Aset Cepat atau rasio *acid-test.* Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, Rasio Lancar di atas dua telah dianggap baik.

Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 sedikit berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 7,66 persen (2020) menjadi 4,57 persen (2024). Hal ini menunjukkan bahwa Aset Lancar di tahun 2020 nilainya 7-8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 4-5 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai Rasio Lancar 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik terutama pada tahun 2023 dan 2024 karena nilainya dibawah 5. Komponen Aset Lancar yang paling banyak mempengaruhi penurunan Rasio Lancar adalah berkurangnya Kas BLUD.

Tabel II.91
Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	319.990.472.249	413.565.396.044	345.177.363.521	246.271.477.312	268.385.066.213
Kewajiban Lancar	41.790.047.964	63.997.463.893	36.584.708.423	58.789.647.976	58.789.647.976
Rasio Lancar	7,66	6,46	9,44	4,19	4,57

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

2) Rasio Solvabilitas

Rasio Utang terhadap ekuitas Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,012, sedangkan rasio Utang (Kewajiban) terhadap Aset pada tahun yang sama juga sebesar 0,012. Hasil analisis *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan nilai di sekitar 1 persen bahkan di bawah 1 per 100. Hal ini menggambarkan bahwa Aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup Kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya berasal dari ekuitas. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari kinerja Neraca Daerah menunjukkan kondisi yang sangat sehat.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran Rasio Utang Terhadap Modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *Debt to Equity Ratio*. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang Terhadap Modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio Utang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio Utang Modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah Utang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada Utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio Utang terhadap ekuitas Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 0,008 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 0,014. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2022 di mana nilai Kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,80 persen dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 di mana jumlah total Kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 1,39 persen dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2023 senilai 0,012 atau nilai Kewajiban yang ada hanya 1,24 persen dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah Kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Kebumen cukup untuk menjamin pembayaran Utang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.92
Analisis Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kewajiban	41.790.047.964	63.997.463.893	36.584.708.423	58.789.647.976	58.789.647.976
Ekuitas	4.483.948.124.718	4.614.349.431.228	4.592.239.658.446	4.458.091.640.120	4.750.376.629.280
Total Debt To Equity Ratio	0,009	0,014	0,008	0,013	0,012

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Utang terhadap Total Aktiva)

Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Utang terhadap Total Aktiva) merupakan perbandingan antara Utang (baik Utang Lancar maupun Utang Jangka Panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (Aset). Secara akuntansi, rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh Utang atau menunjukkan proporsi total Aset yang dibiayai oleh Utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya, rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Utang terhadap Ekuitas). Bedanya dalam rasio ini total Utang dibandingkan dengan nilai total Aset tanpa dikurangi Kewajiban yang ada. Oleh karena itu, rasionya akan sedikit lebih kecil. Jika dilihat dari data yang

ada, Rasio Utang terhadap Total Aktiva (Total Aset) Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dengan nilai rasio 0,0137, dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2022 dengan nilai rasio 0,0079. Oleh karena itu, secara keseluruhan Kabupaten Kebumen tidak memiliki risiko gagal bayar Kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total Aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah Utang yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel II.93
Analisis Rasio Utang terhadap Total Aktiva Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kewajiban	41.790.047.964	63.997.463.893	36.584.708.423	58.789.647.976	58.789.647.976
Aktiva	4.525.778.172.682	4.678.346.895.121	4.628.824.366.869	4.516.881.288.096	4.809.270.774.394
Total Debt To Total Asset Ratio	0,0092	0,0137	0,0079	0,0130	0.0122

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

3) Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran Aktiva Tetap (F*ixed Assets Turn Over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau Perputaran Aktiva Tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dll. Untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/penerimaan daerah.

Perkembangan Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2020

mencapai 0,103 dan meningkat hingga 0,115 di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik. Di mana pada tahun 2020 dari Rp3,931 triliun nilai Aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp403,02 miliar atau 10,25 persen dari nilai Aset Tetap dan pada tahun 2024 berkinerja lebih baik lagi. Di mana dengan memanfaatkan Aset senilai Rp4,214 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp484,17 miliar atau 11,49 persen dari nilai Aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan Aset Tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Hal ini disebabkan belum optimalnya pendayagunaan Aset seperti pemanfatan Aset tanah Pemerintah Kabupaten yang bisa disewakan ke masyarakat atau gedung pertemuan milik pemerintah daerah yang bisa disewakan.

Tabel II.94
Analisis Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	403.025.963.784	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.175.268.010
Aktiva Tetap (Aset Tetap)	3.931.569.890.870	3.985.548.772.976	3.959.242.372.636	3.936.149.530.597	4.214.855.842.750
Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,103	0,118	0,129	0,118	0.115

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

b) Perputaran Total Aktiva (*Total Assets Turn Over*)

Hampir mirip dengan Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Total Aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan Total Aset Daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif, di mana rasio dari nilai 0,089 di tahun 2020 menjadi 0,101 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan Total Aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 8,9 persen dari nilai Total Aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan Total Aset di tahun 2024 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 10,1 persen keuntungan dari nilai Total Aset yang ada.

Tabel II.95
Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	403.025.963.784	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.175.268.010
Total Aktiva (Jumlah Aset)	4.525.778.172.682	4.678.346.895.121	4.628.824.366.869	4.516.881.288.096	4.809.270.774.394
Rasio Perputaran Total Aktiva	0,089	0,101	0,111	0,103	0.101

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2020-2024

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan 2020-2024 bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata persentasenya sebesar 39,85 persen. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 42,57 persen sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 37,96 persen. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 43 persen bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat namun perlu ditekan ke depan. Oleh karena itu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan Belanja Pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.96
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	1.169.696,60	2.747.411,92	42,57%
2	2021	1.141.295,42	2.784.940,70	40,98%
3	2022	1.142.207,14	2.859.658,29	39,94%
4	2023	1.153.775,44	3.019.472,91	38,21%
5	2024	1.188.427,01	3.131.020,03	37,96%
Rata-Rata		**1.159.080,32**	**2.908.500,77**	**39,85%**

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Untuk menghitung kemampuan Belanja Daerah, maka diperlukan analisis terhadap Pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi Pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: Gaji dan Tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya, serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,93 persen per tahun dari Rp1,900 triliun (2020) menjadi Rp2,051 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya Belanja Hibah (15,68 persen), Belanja Transfer Bagi Hasil (4,76 persen), Belanja Transfer Bantuan (4,76 persen). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 tahun terakhir yang sebesar Rp1,940 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 67,15 persen. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 32,85 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali.

Secara keseluruhan perkembangan Pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.97
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**1.281.642.48**	**1.235.673.02**	**1.213.362.46**	**1.294.189.33**	**1.344.993.54**	**1,21**
1.1	Belanja Pegawai	1.169.696.60	1.141.295.42	1.142.207.14	1.153.775.44	1.188.427.01	0,40
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
1.3	Belanja Subsidi	-	484.53	313.86	675.66	1.448.00	
1.4	Belanja Hibah	81.112.63	72.414.17	59.752.65	128.698.06	145.243.41	15,68
1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.833.25	21.478.90	11.088.81	11.040.17	9.875.12	(24,77)
1.6	Belanja Keuangan	-	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**599.282.82**	**610.545.52**	**632.491.27**	**676.974.54**	**701.849.11**	**4,76**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	13.527.76	13.862.93	12.402.62	13.743.17	15.934.32	4,75
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	585.755.07	596.682.59	620.088.65	663.231.38	685.914.79	4,76
3	**Belanja Tidak Terduga**	**10.188.83**	**545.32**	**1.295.20**	**409.94**	**323.00**	**(16,02)**
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**9.550.00**	**5.100.00**	**35.300.00**	**42.331.00**	**4.305.00**	**(65,08)**
4.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	
4.2	Penyertaan Modal Daerah;	8.050.00	3.000.00	18.200.00	20.231.00	2.500.00	(40,71)
4.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	15.000.00	20.000.00	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	2.100.00	2.100.00	2.100.00	1.805.00	
4.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.500.00	-	-	-	-	(100.00)
	Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas	**1.900.664.13**	**1.851.863.86**	**1.882.448.93**	**2.013.904.82**	**2.051.470.64**	**1,93**

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan *netto* yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, serta Penerimaan Piutang Daerah. Anggaran dikatakan surplus apabila *netto* pendapatan lebih banyak dibandingkan *netto* belanja, sedangkan defisit apabila *netto* pendapatan lebih sedikit dibandingkan *netto* belanja. Dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp -12.462.28 juta Rp-118.451 juta. Sementara pada tahun 2020, 2021, 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.98
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.763.229.31	2.832.035.02	2.847.196.02	2.901.021.51	3.137.714.77
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.737.861.92	2.779.840.70	2.824.358.29	2.977.141.91	3.126.715.03
3	Pengeluaran Pembiayaan	9.550.00	5.100.00	35.300.00	42.331.00	4.305.00
	(Defisit Riil)	**15.817.39**	**47.094.32**	**-12.462.28**	**-118.451.41**	**6.694.75**

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel II.99
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	202.667.92	219.950.31	269.179.63	258.817.35	164.691.49
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**202.667.92**	**219.950.31**	**269.179.63**	**258.817.35**	**164.691.49**

Sumber: Dokumen LRA Audited (data diolah), 2025

Dengan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur dengan melihat gambaran mengenai komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya. Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Kebumen, karena sebagian besar target kinerjanya sudah tercapai. SILPA akibat penghematan belanja itu terjadi ketika kinerja yang ditetapkan sudah tercapai tanpa harus menggunakan 100 persen anggaran yang telah direncanakan. Secara rinci perhitungan analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kebumen 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel II.100
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024 (dalam Juta)

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	**202.667,92**	**100%**	**219.950,31**	**100%**	**269.179,63**	**100%**	**258.817,35**	**100%**	**164.691,49**	**100%**
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	202.667,92	100%	219.950,31	100%	269.179,63	100%	258.817,35	100%	164.691,49	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: Dokumen LRA Audited, 2025

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah serta ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Belanja Daerah. Pada analisis kerangka pendanaan juga telah diasumsikan berlakunya ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah maupun ketentuan teknis yang telah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2026-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan Pendapatan Daerah antara lain:

1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis Pendapatan Daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Kebumen masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan meskipun trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya. Mengingat kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Kebumen seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor

7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, badan-badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Kebumen termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, serta sumber-sumber pendanaan lain yang dapat diusahakan oleh pemerintah daerah.

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola Pendapatan Daerah dalam 5 tahun mendatang antara lain:

a. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
b. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
c. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
d. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
f. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah seperti pariwisata, pertanian, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
g. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Kebijakan Pendapatan Daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026-2030 diharapkan dapat tumbuh 1,80 persen pertahun dari Rp3,329 triliun (2026) menjadi Rp3,575 triliun (2030). Hal ini diantaranya didasarkan pada kebijakan efisiensi dari pusat yang diperkirakan akan memperkecil pertumbuhan transfer pemerintah pusat yang selama ini mendominasi proporsi total Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Dalam rangka menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis, maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara itu, untuk sumber pendapatan seperti Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung minimal bahkan beberapa komponennya diasumsikan mengalami pertumbuhan yang flat atau sama dengan target pada APBD (RAPBD Perubahan) Tahun 2025.

Untuk proyeksi PAD sendiri selama pada tahun 2026-2030 diharapkan dapat tumbuh 4,75 persen pertahun dari Rp592 miliar (2026) menjadi Rp713 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD menunjukkan harapan terjadinya pertumbuhan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditargetkan dapat tumbuh antara 4-9 persen pertahun, kecuali Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diproyeksikan tetap sama dengan target pada RAPBD Perubahan Tahun 2025. Hal ini dikarenakan karena Lain-lain PAD yang Sah berisi Pendapatan Denda dan pendapatan yang berasal dari jasa giro dan deposito. Pendapatan Denda diharapkan turun yang menunjukkan semakin efisien dan efektifnya pengelolaan pendapatan sebanding dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari jasa giro dan deposito.

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan tumbuh, di sisi lain kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen masih terbatas, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah. Sementara itu, kebutuhan

pembiayaan pembangunan semakin meningkat, khususnya untuk penguatan infrastruktur. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengembangkan strategi pendanaan alternatif di luar APBD. Beberapa pendekatan yang bisa didorong antara lain:

1) Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik.
2) Pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/CSR yang disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah.
3) Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, filantropi, dan dunia usaha, untuk mendukung program sosial dan inovasi daerah.
4) Optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja BUMD guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Rata-rata nilai Total Aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset, beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui beberapa strategi antara lain:

1) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta, dengan cara ini pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
2) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan.
3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi, pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi

sumber PAD yang signifikan.

4) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial, pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
5) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
7) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik, pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
8) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan, dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas ruang fiskal, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor secara lebih strategis dan berkelanjutan.

2.2.3.2 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara detail per komponen pembentuk PAD yaitu:

a. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi Pajak dDaerah untuk tahun 2026-2030 dilakukan terhadap 7 jenis Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) Kabupaten Kebumen. Pajak Daerah

diproyeksikan meningkat dari Rp247 miliar (2026) menjadi Rp300 miliar (2030) atau mengalami pertumbuhan sekitar 4,90 persen per tahun lebih tinggi dibandingkan asumsi rata-rata pertumbuhan PAD yaitu 4,75 persen pertahun. Fokus pertumbuhan pajak ini dengan memanfaatkan potensi opsen PKB yang akan mampu mendorong Pajak Daerah secara signifikan karena nilai nominalnya yang besar. Selain itu juga dengan memaksimalkan potensi pajak lainnya khususnya dari pos Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sebagai komponen Pajak Barang dan Jasa tertentu.

Penerimaan Daerah dari sektor PKB di Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang besar namun belum sepenuhnya tergarap optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan, banyaknya kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kebumen, serta minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah menjadi tantangan utama. Selain itu, masih ada kelemahan dalam integrasi data kendaraan, terutama yang berpindah kepemilikan namun belum balik nama, yang berdampak pada tidak akuratnya data objek pajak. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi opsen perlu diarahkan pada tiga pendekatan utama: intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan pengawasan, razia terpadu, dan pemberian insentif bagi pembayar pajak tepat waktu. Ekstensifikasi diarahkan pada pendataan ulang kendaraan bermotor, terutama di desa-desa, serta program pemutihan dan insentif balik nama kendaraan luar daerah yang berpindah ke Kabupaten Kebumen. Sementara itu, digitalisasi melalui sistem pembayaran online, aplikasi pengingat pajak, dan integrasi data antara Samsat, Dinas Perhubungan, dan Disdukcapil dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi.

Dengan strategi yang tepat, peningkatan pendapatan dari PKB diharapkan dapat menopang dukungan pembiayaan pada program prioritas pembangunan daerah 5 tahun ke depan, khususnya dalam sektor infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah pengelola Pendapatan Daerah, Samsat, dan mitra kepolisian juga menjadi kunci dalam mendongkrak efektivitas strategi opsen ini. Selain sebagai sumber pendanaan,

peningkatan pajak kendaraan juga mencerminkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya secara berkelanjutan. Selain itu, juga perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Adapun secara umum target minimal proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Kebumen. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
4) Optimalisasi pendapatan opsen PKB melalui peningkatan koordinasi dan penguatan sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam upaya optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam hal ini, utamanya secara masif bersinergi dengan Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan penerimaan opsen PKB dengan beberapa kegiatan yang sudah disepakati bersama seperti Program Sengkuyung Prioritas dan sebagainya.

5) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
6) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
7) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
8) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
9) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

b. Proyeksi Retribusi Daerah

Seperti halnya Pajak Daerah, proyeksi Retribusi Daerah untuk tahun 2026-2030 dilakukan terhadap ke-3 jenis Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) Kabupaten Kebumen. Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2026-2030 ditargetkan dari Rp306 miliar (2026) menjadi Rp364 miliar (2030) atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,50 persen masih sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PAD yaitu sebesar 4,75 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan

yang dikelola oleh BLUD, yang memberikan proporsi terbesar baik terhadap Retribusi Daerah maupun PAD secara agregat, diasumsikan hanya tumbuh 1,64 persen pertahun. Untuk itu, diperlukan strategi agar dapat memaksimalkan pendapatan Retribusi Daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan kesehatan, persampahan, dan sebagainya.
2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
7) Diversifikasi Pendapatan Retribusi: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.

8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik

c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 7 BUMD yaitu Apotik Lukulo, PDAM, PD BPR Kebumen, PD BPR BKK Kebumen, Bank Jateng, PT BPR BKK Jateng dan PT Aneka Usaha. Mendasari Naskah Akademik Raperda Penyertaan Modal tahun 2026-2030 diasumsikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh 8,16 persen pertahun dari Rp26,438 miliar (2026) menjadi Rp36,187 miliar (2030). Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif agar dalam meningkatkan labanya sehingga porsi dividen yang didapat juga semakin besar melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain;
2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik;

3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran;
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru;
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam;
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran;
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi;
8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD;
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan; serta
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

d. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-2030 diasumsikan sama dengan target pada RAPBD Perubahan Tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya asumsi penurunan denda sebagai upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan yang sepadan dengan peningkatan pendapatan dari jasa giro dan deposito.

2.2.3.3 Proyeksi Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer secara umum terbagi menjadi dua pada masing-masing komponennya. Yang pertama untuk komponen Pendapatan Transfer yang bersifat mandatori seperti DAU *Earmark,* DBHCHT, DAK, dan Dana Desa bersifat konstan sama dengan asumsi pada RAPBD Perubahan Tahun 2025. Sementara untuk yang bersifat non mandatori seperti DBH dan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya diasumsikan adanya peningkatan. Dari asumsi masing-masing komponen Pendapatan Transfer maka diperoleh proyeksi pertumbuhan Pendapatan Transfer yang ditargetkan meningkat sebesar 1,13 persen pertahun dari Rp2,736 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,862 triliun pada tahun 2030. Proyeksi Pendapatan Transfer dilakukan terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Transfer Antardaerah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3.4 Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami pertumbuhan sebesar 0,96 persen pertahun yaitu dari Rp2,608 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,709 triliun per tahun pada tahun 2030. DBH diasumsikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,50 persen pertahun dari Rp64,251 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp68,183 miliar pertahun pada tahun 2030. Komponen DBH non DBHCHT diasumsikan meningkat 3 persen pertahun dengan asumsi inflasi terkendali pada level tersebut. Sementara itu, komponen DBH yang berupa DBHCT diasumsikan konstan karena dianggap mandatori

serta pada proyeksi DBH juga diasumsikan terdapat komponen insentif fiskal yang diproyeksikan tumbuh konstan sama dengan target pada RAPBD Perubahan Tahun 2025. Insentif Fiskal diasumsikan sebagai bagian DBH karena selama ini adanya alokasi Insentif Fiskal telah mengurangi alokasi DBH.

DAU diasumsikan meningkat sebesar 1,5 persen per tahun yaitu dari Rp1,587 triliun pada Tahun 2026 menjadi Rp1,684 triliun pada tahun 2030. Peningkatan terjadi pada komponen DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya yaitu sebesar 1,67 persen per tahun. Asumsi kenaikan ini diharapkan dapat menutupi penambahan CPNS, P3K baru dan P3K Paruh Waktu sebanyak 2.370 orang jauh lebih banyak dibandingkan rata-rata ASN yang pensiun setiap tahun sekitar 500 orang, dimana mulai tahun 2026 harus dibayarkan selama 14 bulan penuh sehingga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar secara nominal. Selain itu dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat juga diasumsikan akan dilakukan pengangkatan P3K baru selama tahun 2027-2030 sebanyak 1.808 orang. Sementara itu, untuk komponen DAU *Earmark* yang bersifat mandatori diasumsikan sama dengan RAPBD Perubahan Tahun 2025, kecuali DAU *Earrmark* Pekerjaan Umum yang diasumsikan sama dengan APBD Murni Tahun 2025 yang diharapkan dapat mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan publik. Seperti halnya DAU *Earmark,* DAK dan Dana Desa yang bersifat mandatori juga diasumsikan sama dengan target pada RAPBD Perubahan Tahun 2025.

2.2.3.5 Proyeksi Pendapatan Transfer Antardaerah

Untuk Pendapatan Transfer Antardaerah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan pemprov hanya melakukan asumsi pada Pendapatan DBH dari Provinsi. Selama tahun 2026-2030, Pendapatan DBH dari Provinsi diasumsikan meningkat dari Rp128,179 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp153,056 miliar pada tahun 2030 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,53 persen per tahun. Proyeksi Pendapatan Transfer Antardaerah 2025-2030 telah berupaya menyesuaikan dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

tahun 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB tahun pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut akan berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah.

2.2.3.6 Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Selama ini, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah khususnya dari pemerintah pusat. Hingga penyusunan Rancangan RPJMD ini belum terdapat informasi dari pemerintah pusat mengenai adanya skema hibah sehingga tidak diasumsikan selama tahun 2026-2030.

Secara rinci proyeksi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II.101
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (Rupiah)

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2026-2030
	TOTAL PENDAPATAN	**3.329.004.585.136**	**3.363.358.523.627**	**3.432.076.978.553**	**3.502.855.880.199**	**3.575.774.934.323**	**1,80%**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**592.312.574.590**	**620.447.421.883**	**649.918.674.422**	**680.789.811.457**	**713.127.327.502**	**4,75%**
A.1.	Pajak daerah	247.911.672.050	263.779.116.813	275.293.497.447	287.402.298.433	300.094.351.063	4,90%
A.2.	Retribusi daerah	306.081.999.686	315.988.856.293	331.562.659.760	347.876.218.895	364.964.672.088	4,50%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	26.438.212.432	28.798.758.355	31.181.826.792	33.630.603.707	36.187.613.929	8,16%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah	11.880.690.422	11.880.690.422	11.880.690.422	11.880.690.422	11.880.690.422	0,00%
B	**Pendapatan Transfer**	**2.736.692.010.546**	**2.742.911.101.744**	**2.782.158.304.131**	**2.822.066.068.742**	**2.862.647.606.821**	**1,13%**
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.608.512.093.423	2.608.512.093.423	2.641.540.204.611	2.675.228.878.024	2.709.591.324.904	0,96%
B.1.1.	Dana Perimbangan	2.174.288.530.423	2.174.288.530.423	2.207.316.641.611	2.241.005.315.024	2.275.367.761.904	1,14%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	64.251.041.560	64.251.041.560	65.536.062.391	66.846.783.639	68.183.719.312	1,50%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.587.154.517.863	1.587.154.517.863	1.618.897.608.220	1.651.275.560.385	1.684.301.071.592	1,50%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	0,00%

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2026-2030
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	508.386.990.000	508.386.990.000	508.386.990.000	508.386.990.000	508.386.990.000	0,00%
B.1.2.	Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0,00%
B.1.3.	Dana Desa	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	0,00%
B.2.	Pendapatan Transfer Antardaerah	128.179.917.123	134.399.008.322	140.618.099.520	146.837.190.718	153.056.281.917	4,53%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	128.179.917.123	134.399.008.322	140.618.099.520	146.837.190.718	153.056.281.917	4,53%
B.2.2.	Bantuan Keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	0	0	0	0	0	0,00%
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0,00%

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Tabel II.102
Proyeksi Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030	RATA-RATA KONTRIBUSI PER TAHUN
	TOTAL PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17,79%	18,45%	18,94%	19,44%	19,94%	18,91%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82,21%	81,55%	81,06%	80,56%	80,06%	81,09%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Walaupun masih terbatas asumsi Pendapatan Daerah pada tahun 2026-2030 memproyeksikan adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Kontribusi PAD diharapkan akan terus meningkat dari 17,79 persen pada tahun 2026 menjadi 19,94 persen pada tahun 2030 atau dengan rata-rata proporsi sebesar 18,91 persen per tahun.

2.2.3.7 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan melihat semakin terbatasnya ruang fiskal daerah maka kualitas Belanja Daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui:

1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya yang berupa Belanja Modal yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area dimana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.

7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dalam 5 tahun ke depan diproyeksikan meningkat dari Rp3,388 triliun (2026) menjadi Rp3,587 triliun (2030) atau tumbuh sebesar 1,45 persen per tahun. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi Belanja Modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya akan diupayakan dapat diminimalkan.

2.2.3.8 Proyeksi Belanja Operasi

Proyeksi Belanja Operasi dilakukan pada setiap komponen Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Secara agregat Belanja Operasi diproyeksikan tumbuh sebesar 1,89 persen pertahun dari Rp2,246 triliun (2026) menjadi Rp2,418 triliun (2030).

a. Proyeksi Belanja Pegawai

Belanja Pegawai secara agregat terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, baik PNS, P3K maupun P3K Paruh Waktu, insentif PAD maupun Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan DPRD. Secara nominal Belanja Pegawai akan meningkat dari Rp1,319 triliun (2026) menjadi Rp1,370 triliun (2030) atau tumbuh sebesar 0,96 persen per tahun. Pertumbuhan karena adanya asumsi kenaikan Gaji dan Tunjangan ASN serta

Tunjangan Kinerja PNS sekitar 3 persen per tahun menyesuaikan inflasi yang diharapkan dapat terkendali pada level tersebut dan kenaikan gaji P3K Paruh Waktu sekitar 5 persen per tahun menyesuaikan rata-rata kenaikan UMK Kabupaten Kebumen pertahun selama tahun 2020-2024. Selain itu juga mengasumsikan adanya pengangkatan P3K baru selama tahun 2027-2030 sebanyak 1.808 orang, sedangkan untuk CPNS tidak diproyeksikan karena diasumsikan adanya *zero growth* PNS (jumlah PNS pensiun sama dengan jumlah CPNS yang diangkat). Namun demikian, Belanja Pegawai juga diharapkan dapat terus menurun proporsinya terhadap total Belanja Daerah. Hal ini sebagai upaya pemenuhan Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30 persen dari total belanja yang akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2024. Dari asumsi perhitungan berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan proporsi Belanja Pegawai pada RPJMD sepanjang tahun 2026 yaitu sebesar 30,55 persen diharapkan dapat menurun menjadi 30,28 persen pada tahun 2030, semakin mendekati dari ketentuan maksimal 30%.

Tabel II.103
Proyeksi Perhitungan Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
A.	Total Belanja Pegawai	1.319.089.854.015	1.315.578.124.730	1.347.915.320.458	1.369.885.063.844	1.370.155.854.405
B.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	282.870.523.000	282.870.523.000	282.870.523.000	282.870.523.000	282.870.523.000
C.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.052.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000
D.	Total Belanja Pegawai yang berasal dari luar TKD yang telah ditentukan penggunaannya (A-B-C)	1.035.166.831.015	1.031.655.101.730	1.063.992.297.458	1.085.962.040.844	1.086.232.831.405
E.	Total Belanja Daerah	3.388.704.904.336	3.378.045.519.745	3.510.367.197.156	3.609.046.330.488	3.587.294.687.601
F.	Proporsi Belanja Pegawai yang berasal dari luar TKD yang telah ditentukan penggunaannya terhadap Belanja Daerah (D/E)	30,55%	30,54%	30,31%	30,09%	30,28%

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) Formulasi dan Pemanfaatan Pinjaman Daerah yang Efektif: melakukan formulasi pinjaman daerah untuk pembangunan yang sifatnya produktif dan berdampak luas.
2) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya. pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
3) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
4) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
5) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan daring dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
6) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

7) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

b. Proyeksi Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,43 persen pertahun dari Rp839 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp958 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini dikarenakan menyesuaikan laju perkembangan harga barang dan jasa yang diperkirakan dapat terkendali pada kisaran 3 persen per tahun.

c. Proyeksi Belanja Subsidi

Belanja Subsidi diasumsikan sama setiap tahun yaitu sebesar Rp2,92 miliar yang akan digunakan sebagai Subsidi Bunga dalam rangka membantu kemudahan permodalan UMKM serta Subsidi Harga dalam rangka peningkatan pengendalian harga, utamanya barang kebutuhan pokok masyarakat.

d. Proyeksi Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat sekitar 2,72 persen per tahun. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan signifikan Belanja Hibah pada tahun 2028 dan 2029 yang diasumsikan juga mencakup hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029. Mendasari pelaksanaan hibah Pilkada pada tahun 2024, pada tahun n-1 Pilkada akan dihibahkan sebesar 40 persen dan sisanya sebesar 60 persen akan dihibahkan pada tahun n Pilkada. Sesuai perhitungan pada Permendagri 15/2023, Belanja Hibah bersama dengan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal merupakan komponen pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu paling rendah 40 persen dari Total Belanja Daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

e. Proyeksi Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan 5,00 persen pertahun sebagai upaya intervensi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Sesuai perhitungan pada Permendagri 15/2023, Belanja Bantuan Sosial bersama dengan Belanja Hibah dan Belanja Modal merupakan komponen pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu paling rendah 40 persen dari Total Belanja Daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

2.2.3.9 Proyeksi Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2026-2030 diproyeksikan akan terus meningkat dimana bersama dengan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial merupakan komponen pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu paling rendah 40 persen dari Total Belanja Daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023. Selain itu. Belanja Modal diharapkan diprioritaskan karena dapat memberikan efek *multiplier* bagi perekonomian daerah.

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi Belanja Modal akan ditingkatkan dari Rp413 miliar (2026) menjadi Rp440 miliar (2030) atau sekitar 1,59 persen per tahun. Namun demikian, kenaikan signifikan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2026 yaitu sebesar 47,44 persen jika dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 yang masih sekitar Rp280,58 miliar.

2.2.4 Proyeksi Belanja Tidak Terduga

Untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2026-2030 ditargetkan konstan yaitu sebesar Rp2 miliar per tahun. Penggunaan Belanja Tidak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

2.2.4.1 Proyeksi Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2026-2030 yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat diarahkan untuk pengembangan Desa Mandiri serta sebagai upaya desa mendukung penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (seperti penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting*). Untuk Belanja Transfer ditargetkan sedikit mengalami peningkatan yaitu dari Rp726,297 miliar (2026) menjadi Rp726,588 miliar (2030) atau tumbuh 0,01 persen per tahun.

Secara lengkap asumsi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2026 hingga 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II.104
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (Rupiah)

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030	RATA-RATA PERTUMBUHAN PER TAHUN (%)
	Total Belanja (A+B+C+D)	3.388.704.904.336	3.378.045.519.744	3.510.367.197.156	3.609.046.330.488	3.587.294.687.601	1,45%
A.	Belanja Operasi	2.246.729.984.483	2.235.535.391.819	2.344.323.865.084	2.440.837.595.016	2.418.532.841.999	1,89%
1.	Belanja Pegawai	1.319.089.854.015	1.315.578.124.730	1.347.915.320.458	1.369.885.063.844	1.370.155.854.405	0,96%
2.	Belanja Barang dan Jasa	839.416.660.483	831.380.640.927	883.463.060.488	945.621.703.145	958.643.506.449	3,43%
3.	Belanja Subsidi	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000	0,00%
4.	Belanja Hibah	79.030.652.985	79.070.168.311	103.109.703.396	115.149.258.247	79.188.832.876	2,72%
5.	Belanja Bantuan Sosial	6.272.817.000	6.586.457.850	6.915.780.743	7.261.569.780	7.624.648.269	5,00%
B.	Belanja Modal	413.677.365.987	414.139.944.304	437.600.511.432	439.693.270.550	440.173.729.133	1,59%
C.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%
D.	Belanja Transfer	726.297.553.866	726.370.183.621	726.442.820.640	726.515.464.922	726.588.116.468	0,01%

Sumber: Tim Penyusun, 2025

2.2.4.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memproyeksikan pembiayaan pada 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2026-2030. Pembiayaan yang dimaksud terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan Kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito.
2) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Dengan melihat kinerja Belanja Daerah 5 tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1) Prioritas Belanja Modal: melakukan efisiensi di pos belanja lainnya khususnya Belanja Pegawai untuk dialokasikan pada Belanja Modal khususnya pada jenis Belanja Modal yang mempunyai daya ungkit terhadap masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.

3) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
4) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
5) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola Utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
6) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
7) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
8) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

2.2.4.3 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dilakukan terhadap masing-masing komponennya yaitu:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.
   SiLPA diasumsikan maksimal 3,45 persen terhadap total belanja, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024, Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah dan daerah dengan kapasitas fiskal tersebut memiliki batas defisit maksimal sebesar 3,45%. Proyeksi SiLPA pada tahun 2026 dimaksimalkan hingga batas maksimal 3,45 persen karena kemampuan pendapatan daerah yang masih rendah, khususnya PAD. Sedangkan proyeksi SiLPA tahun 2027-2030 diasumsikan dibawah 3 persen sebagai upaya peningkatan ketepatan perencanaan anggaran. SiLPA pada tahun 2026-2030 juga telah mengasumsikan SiLPA BLUD dimana penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan pada APBD tahun berkenaan;
2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
   Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2025 yang diperoleh dari Dana Talangan Pangan sebesar Rp1.500.000.000.00 dan Dana Talangan Perikanan sebesar Rp600.000.000.00;
3) Pencairan Dana Cadangan
   Pencairan Dana Cadangan diasumsikan secara total sebesar Rp60.000.000.000,00 yang diperoleh dari 3 tahun pembentukan dana cadangan mulai tahun 2026 hingga tahun 2028 sebesar Rp20.000.000.000.00 setiap tahun. Mendasari pelaksanaan hibah Pilkada pada tahun 2024, pada tahun n-1 Pilkada (tahun 2028) akan dihibahkan sebesar 40 persen atau Rp24.000.000.000.00 dan sisanya sebesar 60 persen atau Rp36.000.000.000.000 akan dihibahkan pada tahun n Pilkada (tahun 2029).

2.2.4.4 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan

Proyeksi pengeluaran pembiayaan dilakukan terhadap masing-masing komponennya yaitu:

1) Pembentukan Dana Cadangan diasumsikan sama setiap tahun yaitu sebesar Rp20.000.000.000.00. Dana Cadangan selama tahun 2026 hingga 2028 akan digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2029, sedangkan Dana Cadangan pada tahun 2029-2030 akan digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2034. Dengan adanya Dana Cadangan diharapkan pendanaan penyelenggaraan Pilkada tidak membebani tahun anggaran tertentu, namun demikian pembentukan Dana Cadangan ini harus segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda);
2) Penyertaan Modal (investasi) daerah diasumsikan berdasarkan Narasi Akademik Perda Penyertaan Modal pada tahun 2026-2030 yang diharapkan dapat ditetapkan tahun depan, kecuali untuk tahun 2026 adanya penambahan Rp20 miliar untuk rehabilitasi Pasar Gombong yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat kebakaran; serta
3) Pemberian Pinjaman Daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2025 yang berupa Dana Talangan Pangan sebesar Rp1.500.000.000.00 dan Dana Talangan Perikanan sebesar Rp600.000.000.00.

Berdasarkan perhitungan asumsi dan proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan daerah, setiap tahun dari tahun 2026 hingga tahun 2030 diperoleh *netto* pembiayaan bernilai positif yang digunakan menambah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Belanja Daerah. Secara lengkap asumsi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2026 hingga 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II.105
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
A.	Penerimaan Pembiayaan	119.010.319.200	52.061.996.117	116.099.218.602	144.500.450.288	50.329.753.278
A.1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	116.910.319.200	49.961.996.117	89.999.218.602	106.400.450.288	48.229.753.278
A.2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
A.3.	Pencairan Dana Cadangan			24.000.000.000	36.000.000.000	
B.	Pengeluaran Pembiayaan	59.310.000.000	37.375.000.000	37.809.000.000	38.310.000.000	38.810.000.000
B.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
B.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	37.210.000.000	15.275.000.000	15.709.000.000	16.210.000.000	16.710.000.000
B.3.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	59.700.319.200	14.686.996.117	78.290.218.602	106.190.450.288	11.519.753.278

Sumber: Tim Penyusun. 2025

2.2.4.5 Sumber Pembiayaan Alternatif

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menginisiasi Pembiayaan Alternatif utamanya dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan/aktivitas CSR di Kabupaten Kebumen seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

Tabel II.106
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Badan Usaha	Nama Kegiatan/ Aktivitas CSR	Nilai CSR	Sasaran	Volume Sasaran
1.	PT Sucofindo	Pemberian Infak & Sodaqoh, Kegiatan sosial keagamaan	Rp100.000.000	Kepala Keluarga (KK)	13 KK
2.	PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Surveyor Indonesia Gas Metan	Bantuan Paket Sembako Ramadhan 1444 H/ 2023	Rp200.000.000	Kepala Keluarga (KK)	21 KK
3.	BAZNAS Kabupaten Kebumen	Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Rp269.000.000	RTLH	24 unit
4.	PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp7.150.000	Warga miskin	100
		Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp2.429.000	Warga miskin	25
		Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp800.000	Warga miskin	10
		Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp6.000.000	Warga miskin	50
		Jumlah fakir miskin yang dibantu	Rp750.000	Warga miskin	
5.	PT BPR BKK KEBUMEN (Perseroda)		Rp6.000.000	Warga miskin	200
6.	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Dukungan Kegiatan untuk Kontingen Perkumpulan Olahraga Tunanetra Indonesia	6.000.000		

No	Badan Usaha	Nama Kegiatan/ Aktivitas CSR	Nilai CSR	Sasaran	Volume Sasaran
		Dukungan Kegiatan Penguatan Kapasitas Bunda PAUD Kebumen	3.525.000		
		Bantuan Kegiatan capacity Building Peningkatan SDM	25.000.000		
		Bantuan Mudik Lebaran dan Balik Rantau Gratis	4.500.000		
		Bantuan Paket Sembako Tahrim Ramadhan 1445 H	22.500.000		
		Sembako Kegiatan Tahrim 1445 H untuk Masyarakat Duafa dan tidak mampu	7.500.000		
		Dukungan Paket Sembako Hari Raya Idul Fitri 1445 H	4.125.000		
		Dukungan Kegiatan Olahraga dan Gowes	12.500.000		
		Dukungan Paket Sembako Kegiatan Sosialisasi Sanitasi Lingkungan	9.000.000		
		Dukungan Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1556 H	6.000.000		
		Dukungan Kegiatan Khataman Akbar Kemerdekaan RI	6.000.000		

Sumber : Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berupaya meningkatkan pendanaan CSR diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan;
2. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah;
3. memberikan arahan kepada Badan Usaha di Daerah dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan komitmen Badan Usaha untuk berkontribusi pada program pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;

5. memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk: hibah, beasiswa, subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan, promosi, dan/atau bentuk lainnya yang ditentukan Badan Usaha;
7. Usaha Kecil, Menengah dan koperasi dapat turut aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan;
8. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
9. Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; serta
10. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah dimana hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Selain CSR, pemerintah Kabupaten Kebumen akan berupaya menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD, dan pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, penguatan kerjasama antar wilayah serta antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan peran filantropi, dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan, lingkungan hidup, dan/atau lainnya dalam kegiatan pembangunan.

Tabel II.107
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
	TOTAL PENDAPATAN	**3.329.004.585.136**	**3.363.358.523.627**	**3.432.076.978.553**	**3.502.855.880.199**	**3.575.774.934.323**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**592.312.574.590**	**620.447.421.883**	**649.918.674.422**	**680.789.811.457**	**713.127.327.502**
A.1.	Pajak daerah	247.911.672.050	263.779.116.813	275.293.497.447	287.402.298.433	300.094.351.063
A.2.	Retribusi daerah	306.081.999.686	315.988.856.293	331.562.659.760	347.876.218.895	364.964.672.088
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	26.438.212.432	28.798.758.355	31.181.826.792	33.630.603.707	36.187.613.929
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah	11.880.690.422	11.880.690.422	11.880.690.422	11.880.690.422	11.880.690.422
B	**Pendapatan Transfer**	**2.736.692.010.546**	**2.742.911.101.744**	**2.782.158.304.131**	**2.822.066.068.742**	**2.862.647.606.821**
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.608.512.093.423	2.608.512.093.423	2.641.540.204.611	2.675.228.878.024	2.709.591.324.904
B.1.1.	Dana Perimbangan	2.174.288.530.423	2.174.288.530.423	2.207.316.641.611	2.241.005.315.024	2.275.367.761.904
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	64.251.041.560	64.251.041.560	65.536.062.391	66.846.783.639	68.183.719.312
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.587.154.517.863	1.587.154.517.863	1.618.897.608.220	1.651.275.560.385	1.684.301.071.592
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	508.386.990.000	508.386.990.000	508.386.990.000	508.386.990.000	508.386.990.000
B.1.2.	Insentif Fiskal	0	0	0	0	0
B.1.3.	Dana Desa	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.179.917.123	134.399.008.322	140.618.099.520	146.837.190.718	153.056.281.917

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	128.179.917.123	134.399.008.322	140.618.099.520	146.837.190.718	153.056.281.917
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	0	0	0	0	0
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
	Total Belanja (A+B+C+D)	3.388.704.904.336	3.378.045.519.744	3.510.367.197.156	3.609.046.330.488	3.587.294.687.601
A.	Belanja Operasi	2.246.729.984.483	2.235.535.391.819	2.344.323.865.084	2.440.837.595.016	2.418.532.841.999
1.	Belanja Pegawai	1.319.089.854.015	1.315.578.124.730	1.347.915.320.458	1.369.885.063.844	1.370.155.854.405
2.	Belanja Barang dan Jasa	839.416.660.483	831.380.640.927	883.463.060.488	945.621.703.145	958.643.506.449
3.	Belanja Subsidi	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000
4.	Belanja Hibah	79.030.652.985	79.070.168.311	103.109.703.396	115.149.258.247	79.188.832.876
5.	Belanja Bantuan Sosial	6.272.817.000	6.586.457.850	6.915.780.743	7.261.569.780	7.624.648.269
B.	Belanja Modal	413.677.365.987	414.139.944.304	437.600.511.432	439.693.270.550	440.173.729.133
C.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
D.	Belanja Transfer	726.297.553.866	726.370.183.621	726.442.820.640	726.515.464.922	726.588.116.468
A.	Penerimaan Pembiayaan	119.010.319.200	52.061.996.117	116.099.218.602	144.500.450.288	50.329.753.278
A.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	116.910.319.200	49.961.996.117	89.999.218.602	106.400.450.288	48.229.753.278
A.2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
A.3.	Pencairan Dana Cadangan			24.000.000.000	36.000.000.000	

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
B.	Pengeluaran pembiayaan	59.310.000.000	37.375.000.000	37.809.000.000	38.310.000.000	38.810.000.000
B.1.	Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
B.2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	37.210.000.000	15.275.000.000	15.709.000.000	16.210.000.000	16.710.000.000
B.3.	Pemberian pinjaman daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	59.700.319.200	14.686.996.117	78.290.218.602	106.190.450.288	11.519.753.278

Sumber: Tim Penyusun, 2025

2.2.4.6 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mendanai pembangunan daerah pada RPJMD Tahun 2026-2030, dilakukan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, setelah dikurangi Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (termasuk yang bersumber dana DAU *Earmark* untuk Gaji P3K dan DAK Non Fisik Sertifikasi Guru), Gaji dan Tunjangan KDH dan DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan, serta juga dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan daerah. Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk mendanai belanja prioritas daerah. Seperti tercantum pada tabel di bawah, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah diasumsikan cukup fluktuatif yaitu meningkat dari Rp2,069 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,239 triliun pada tahun 2029, namun kemudian menurun menjadi Rp2,217 triliun pada tahun 2030. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2028 dan 2029 berupa penarikan Dana Cadangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan proses Pilkada Tahun 2029.

Tabel II.108
Asumsi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

No	Uraian	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
A.	Pendapatan	3.329.004.585.136	3.363.358.523.627	3.432.076.978.553	3.502.855.880.199	3.575.774.934.323
B.	Penerimaan Pembiayaan	119.010.319.200	52.061.996.117	116.099.218.602	144.500.450.288	50.329.753.278
C.	Total Penerimaan (A+B)	3.448.014.904.336	3.415.420.519.745	3.548.176.197.156	3.647.356.330.488	3.626.104.687.601
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:					
D.	Belanja Pegawai:	1.319.089.854.015	1.315.578.124.730	1.347.915.320.458	1.369.885.063.844	1.370.155.854.405
E.	Pengeluaran Pembiayaan	59.310.000.000	37.375.000.000	37.809.000.000	38.310.000.000	38.810.000.000
F.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (C-D-E)	2.069.615.050.321	2.062.467.395.015	2.162.451.876.698	2.239.161.266.644	2.217.138.833.195

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja prioritas seperti tercantum pada tabel di bawah. dimana belanja prioritas terbagi menjadi Prioritas I dan II. Belanja Prioritas I terdiri dari:

1) Belanja yang bersifat mandatori dan diasumsikan konstan setiap tahun dan sama dengan RAPBD Tahun 2025 yaitu belanja yang bersumber dana DBHCHT, DAU *Earmark*, DAK, DD, dan ADD serta Belanja Tidak Terduga; serta
2) Belanja yang bersifat mandatori yang dapat berubah setiap tahun yaitu belanja yang bersumber dari penerimaan PKB dan opsen PKB, Pajak Tenaga Listrik, Pajak Rokok, Pajak Air Tanah serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (diluar PKB dan pendapatan BLUD) dengan masing-masing ketentuan perhitungan minimal. Selain itu Belanja BLUD yang disesuaikan dengan penerimaannya baik dari sisi pendapatan maupun SiLPA BLUD, BPJS perangkat desa yang mengalami kenaikan sesuai kebutuhan, serta belanja dari penarikan dana cadangan yang akan digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan Pilkada Tahun 2029.

Untuk prioritas II rencananya akan dialokasikan untuk:

1) Belanja Operasional dan Prioritas OPD (termasuk kecamatan dan kelurahan) yaitu belanja rutin kantor serta belanja program pencapaian target dan sasaran Renstra OPD; serta
2) Belanja Kebijakan Daerah dalam rangka akselerasi pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel II.109
Asumsi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

No	Uraian	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
A.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan, yang selanjutnya digunakan untuk belanja prioritas sebagai berikut:	2.069.615.050.321	2.062.467.395.015	2.162.451.876.698	2.239.161.266.644	2.217.138.833.195
B.	Prioritas I adalah belanja mandatory yang terdiri dari:	1.397.696.719.819	1.406.768.385.191	1.440.190.490.987	1.461.563.413.135	1.433.880.456.790
B.1.	Belanja minimal 10% dari penerimaan PKB dan opsen PKB	12.230.990.215	12.632.296.936	13.179.811.529	13.753.517.743	14.354.725.161
B.2.	Belanja minimal 10% dari penerimaan Pajak Tenaga Listrik	5.177.130.793	5.436.744.289	5.696.357.785	5.955.971.281	5.960.000.000
B.3.	Belanja minimal 37,5% dari penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk JKN	27.805.914.880	29.155.014.836	30.504.114.792	31.853.214.747	33.202.314.703
B.4.	Belanja minimal 12,5% dari penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum tentang rokok	9.268.638.293	9.718.338.279	10.168.038.264	10.617.738.249	11.067.438.234
B.5.	Belanja minimal 10% dari penerimaan Pajak Air Tanah	42.973.941	44.175.798	45.377.655	46.579.512	47.000.000
B.6.	Belanja BLUD dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD (pendapatan BLUD)	262.440.702.830	263.394.218.690	268.764.315.332	274.308.626.562	280.035.160.292
B.7.	Belanja BLUD dari SiLPA BLUD	14.189.087.000	18.718.830.000	19.019.957.000	19.071.395.000	19.085.248.000

No	Uraian	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
B.8.	Belanja dari penerimaan DBHCHT	19.216.338.000	19.216.338.000	19.216.338.000	19.216.338.000	19.216.338.000
B.9.	Belanja dari penerimaan DAU *Earmark* Kelurahan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
B.10.	Belanja dari penerimaan DAU *Earmark* Pendidikan	88.612.618.000	88.612.618.000	88.612.618.000	88.612.618.000	88.612.618.000
B.11.	Belanja penerimaan dari DAU *Earmark* Kesehatan	30.807.786.000	30.807.786.000	30.807.786.000	30.807.786.000	30.807.786.000
B.12.	Belanja dari penerimaan DAU *Earmark* Pekerjaan Umum	25.977.721.000	25.977.721.000	25.977.721.000	25.977.721.000	25.977.721.000
B.13.	Belanja dari penerimaan DAK Fisik	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000	14.495.981.000
B.14.	Belanja dari penerimaan DAK Non Fisik (diluar untuk Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru)	224.463.967.000	224.463.967.000	224.463.967.000	224.463.967.000	224.463.967.000
B.15.	Belanja dari Penerimaan Insentif Fiskal	-	-	-	-	-
B.16.	Belanja Transfer ke Desa dari Penerimaan Dana Desa	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000
B.17.	ADD	199.756.666.400	199.756.666.400	199.756.666.400	199.756.666.400	199.756.666.400
B.18.	BPJS perangkat desa	5.596.730.000	5.659.730.000	5.722.730.000	5.785.730.000	5.848.730.000
B.19.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.189.911.466	20.254.395.963	21.335.148.231	22.415.999.641	22.525.200.000
B.20	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
B.21	Belanja dari penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi	-	-	-	-	-

No	Uraian	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
B.22	Belanja dari Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
B.23	Belanja dari Penerimaan Dana Cadangan	-	-	24.000.000.000	36.000.000.000	-
C.	Prioritas II terdiri dari:	671.918.330.502	655.699.009.824	722.261.385.711	777.597.853.509	783.258.376.405
C.1.	Belanja Operasional dan Prioritas OPD dan Kecamatan	198.389.474.179	259.962.925.376	285.490.564.975	327.178.672.778	377.690.159.036
C.2.	Belanja Kebijakan	473.528.856.322	395.736.084.448	436.770.820.735	450.419.180.731	405.568.217.370
D	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (A-B-C)	-	-	-	-	-

Sumber: Tim Penyusun, 2025

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif. Memahami hal tersebut dalam pembangunan Kabupaten Kebumen, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis juga harus menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran, dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan dan pencapaian tujuan pembangunan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Kebumen, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional/global, nasional, regional, dan isu dalam lingkup Kabupaten Kebumen, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan daerah adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum kondisi daerah yakni pada sub bab 2.1. Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah melalui metode *fishbone* dalam merumuskan permasalahan dengan mempertimbangkan data per aspek yang tertuang pada sub bab 2.1 maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

Tabel II.110
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
IPM, Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Dengan demikian sejak tahun 2020, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi.	Peningkatan IPM masih belum optimal, walaupun mencapai kategori tinggi tapi masih belum maksimal jika dibandingkan dengan capaian dengan Kabupaten sekitar.	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang adil dan inklusif.
Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 hingga mencapai 3,97 persen, namun melandai kembali hingga tahun 2024 7,87 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata mengenyam pendidikan selama 7,87 tahun atau baru menduduki jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama).	RLS masih belum mencapai nilai standar maksimal yaitu 15 Tahun. Pada saat ini mayoritas masyarakat masih mencapai pendidikan pada tingkat SMP.	
Kemampuan numerasi siswa juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Numerasi siswa SD meningkat dari 42,83 persen pada 2022 menjadi 73,68 persen pada 2024, sementara numerasi siswa SMP mengalami kenaikan dari 57,69 persen pada 2022 menjadi 82,34 persen pada 2024. Meskipun peningkatan ini menggembirakan, numerasi siswa SD masih berada di bawah standar kompetensi minimum 75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi lebih lanjut, seperti metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis pemecahan masalah, agar siswa dapat lebih memahami konsep-konsep matematika secara lebih baik.	Numerasi SD dan SMP masih perlu ditingkatkan.	
Berdasarkan data Rapor Pendidikan, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa SD dan SMP antara tahun 2022 hingga 2024. Kemampuan literasi membaca siswa SD meningkat dari 58,59 persen pada 2022 menjadi 84,28 persen pada 2024, sementara siswa SMP mengalami peningkatan dari 79,10 persen pada 2022 menjadi 87,29 persen pada 2024.	Kemampuan literasi membaca masih perlu ditingkatkan.	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 74,73 persen pada tahun 2021 menjadi 75,22 pada tahun 2024. Pada 2021, UHH Kabupaten Kebumen mampu tumbuh sebesar 0,20 persen, kemudian pada periode berikutnya terus melambat hingga pada 2023 tercatat tumbuh 0,17 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan UHH Kabupaten Kebumen meningkat yaitu sebesar 0,32 persen.	Usia Harapan Hidup (UHH) belum mencapai nilai standar maksimal 85 tahun, sehingga masih perlu peningkatan dalam bidang kesehatan.	
Terus meningkatnya angka notifikasi kasus TBC di tahun 2020 sejumlah 140 dan 2023 mencapai 209 walaupun sempat menurun di 2024 mencapai 199. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC masih mencapai 95%, artinya belum semua ditemukan, kemudian angka keberhasilan pengobatan masih mencapai 83, artinya belum 100 persen berhasil terobati.	Penemuan dan pengobatan kasus TBC masih belum optimal.	
Melihat kondisi kesehatan pada satuan keluarga yang memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Kinerja kesehatan keluarga ditunjukkan dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) untuk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 sebesar 0,15 meningkat menjadi 0,2 pada Tahun 2023. Berdasarkan penilaian, jika IKS < 0,5 maka berarti IKS Kabupaten Kebumen masih masuk pada kategori keluarga tidak sehat.	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Kebumen masih masuk pada kategori keluarga tidak sehat.	
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan semula 15,34 persen (2020) menjadi 9,17 persen (2024). Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan hasil yang beragam. Persentase gizi buruk Kabupaten Kebumen meningkat dari 0,02 persen (2020) menjadi 0,05 persen (2023). Namun berhasil kembali ke angka 0,02 persen (2024).	Penurunan stunting masih perlu ditingkatkan dan adanya peningkatan persentase gizi buruk.	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Akses layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional meningkat dari 86,00 persen (2020) menjadi 99,07 persen (2024).	Masih adanya masyarakat yang belum mengikuti/terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.	
Mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang SD. Pada tahun 2022, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SD mencapai 51,78 persen, tetapi mengalami penurunan signifikan menjadi 32,79 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan proporsi lulusan SMA dalam angkatan kerja, dari 21,96 persen pada 2022 menjadi 25,81 persen pada 2024. Begitu pula dengan lulusan perguruan tinggi yang meningkat dari 6,01 persen pada 2022 menjadi 6,89 persen pada 2024. Sementara itu, proporsi lulusan SMP mengalami sedikit penurunan dari 20,25 persen pada 2022 menjadi 20,07 persen pada 2024. Namun, meskipun proporsi lulusan SD dalam angkatan kerja terus menurun, angka tersebut masih cukup tinggi, sehingga peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu didorong untuk memastikan daya saing tenaga kerja yang lebih baik.	Angkatan kerja memiliki kualitas yang relatif masih rendah, karena sebagian besar memiliki pendidikan tertinggi SD.	
Capaian pengeluaran riil per kapita memiliki tren yang terus meningkat sepanjang tahun. Pengeluaran per kapita di tahun 2020 sebesar Rp8.901 ribu meningkat menjadi Rp10.176 ribu pada tahun 2024. Peningkatan ini selain disebabkan adanya inflasi, juga mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Kebumen sehingga mampu meningkatkan pengeluaran konsumsi hingga mencapai 4,54 persen di tahun 2024.	Kondisi ekonomi masyarakat masih perlu peningkatan, pengeluaran perkapita per tahun Kabupaten belum maksimal hal ini karena capaian 10.176 ribu belum mencapai standar nilai maksimum pengeluaran per kapita 26.572,352 ribu rupiah.	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Di Kabupaten Kebumen, kinerja iBangga mengalami peningkatan dari 58,67 pada 2022 menjadi 63,90 pada 2024. Meskipun mengalami perbaikan, angka ini masih berada di bawah nilai 70, yang berarti kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk dalam kategori cukup baik atau berkembang.	Kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk dalam kategori cukup baik atau berkembang, sehingga kualitas keluarga masih perlu ditingkatkan.	
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) membaik dari 0,416 pada 2020 menjadi 0,328 pada 2024, menunjukkan pengurangan ketimpangan dalam akses dan partisipasi gender di berbagai sektor. Sementara itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada 2022 tercatat sebesar 65,21 yang masih berada di bawah batas minimal kategori baik (nilai 80). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan perlindungan hak-hak anak secara optimal.	Ketimpangan gender masih perlu dioptimalkan, agar pembangunan kesetaraan gender dapat berimplikasi pada pembangunan. Jika dibandingkan dengan daerah lain ketimpangan gender kabupaten kebumen masih tinggi.	
Indeks Ketahanan Pangan tahun 2020 mencapai 80,41 dan 2024 mencapai 81,21.	Indeks Ketahanan pangan 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih dibawah Kabupaten Purworejo dan Cilacap. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketersediaan pangan masih mencapai 33,43 persen, artinya masih adanya ketergantungan bahan pangan dari daerah luar.	
Status distribusi potensi daya dukung pangan di Kabupaten Kebumen 2023 masih belum terlampaui.		
Peningkatan persentase ketersediaan pangan dari 6,4 persen pada 2020 menjadi 33,42 persen pada 2024 menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, angka ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar pangan di Kabupaten Kebumen masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga upaya untuk meningkatkan produksi lokal perlu terus diperkuat.		
Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Selama periode 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin turun dari 17,59 persen (2020) menjadi 15,71 persen (2024). Setelah peningkatan pada 2020 dan 2021 yang mencapai 17,59 persen dan 17,83 persen sebagai dampak Pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan mulai mengalami tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.	Tingkat kemiskinan mengalami penurunan tapi angka kemiskinan masih tinggi.	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengalami peningkatan positif dari 34,97 persen pada tahun 2022 menjadi 37,36 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, terdapat kebutuhan tenaga kerja tambahan seperti petugas ad hoc di tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan, badan *ad hoc* lainnya, hingga tenaga pendukung teknis. Para tenaga kerja sementara ini juga didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan selama masa tugas mereka, sehingga meningkatkan jumlah kepesertaan secara signifikan, meskipun bersifat temporal. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan lembaga penyelenggara kegiatan publik terhadap pemberian perlindungan jaminan sosial semakin baik. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga pertumbuhan kepesertaan ini tetap berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada adanya event besar, tetapi melalui upaya penguatan regulasi, sosialisasi, serta kemudahan pendaftaran bagi pekerja di semua sektor.	Terjadi penurunan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, hal ini mengindikasikan dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen masih rentan terhadap faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan efisiensi operasional perusahaan.	
LPE mengalami penurunan di tahun 2024 (5,3) sebanyak 0,36 poin jika dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 5,66.	Adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor industri pengolahan	2. Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal
Struktur tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar, dengan proporsi tertinggi berada pada kelompok tamat SD/sederajat sebesar 30,40 persen dari total penduduk. Terdapat 16,76 persen penduduk yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, serta 8,31 persen yang belum tamat SD/sederajat.	TPT mengalami penurunan, dan TPT relatif rendah namun kualitas/daya saing angkatan kerja masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar masih berpendidikan SD	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Meskipun sektor koperasi menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya persentase koperasi aktif dan volume usaha dalam periode 2020–2024, kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil, yaitu sekitar 1,55 persen terhadap PDRB.	Sektor koperasi masih perlu ditingkatkan	
Jumlah tamu wisatawan terus meningkat dari 854.315 orang pada tahun 2020 menjadi 2.614.639 orang pada tahun 2024. Tercatat 23 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Kebumen pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 0 orang.	Jumlah tamu wisatawan perlu terus ditingkatkan, terutama tamu wisatawan mancanegara.	
Sektor pariwisata juga dapat dilihat dari LPE PDRB sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang dalam perkembangannya pada tahun 2022 mencapai 28,31 dan menurun hingga 10,35 di tahun 2024	Terjadi penurunan sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum sebagai proksi produktivitas sektor pariwisata.	
Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2021 sebesar 64,59 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,42 persen dikarenakan terjadi perubahan rumus perhitungan komposit indeks tersebut. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari 56,55 persen (2021) menjadi 47,93 persen (2022); Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 54,50 persen (2021) menjadi 7,25 persen (2022); dan Indeks Infrastruktur Perhubungan dari 82,72 persen (2021) menjadi 75,08 persen (2022). Indeks Infrastruktur terus mengalami penurunan dari 43,42 persen (2022) menjadi 39,61 persen (2024).	Indeks Infrastruktur daerah masih perlu dioptimalkan agar mencapai capaian yang lebih maksimal. Jika melihat hasil evaluasi capaian indeks infrastruktur masih belum mencapai target.	3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Keselamatan dan keamanan lalu lintas perlu ditingkatkan. Angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen meningkat dari 694 kejadian (2019) menjadi 1.178 kejadian (2024) dengan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan rata-rata mencapai 131 orang per tahun.	Keselamatan dan keamanan lalu lintas masih perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kecelakaan.	
Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Kebumen menurun semula 77,07 persen pada tahun 2020 menjadi 73,48 persen di tahun 2024.	Terjadi penurunan jalan dengan kondisi mantap.	
Pencapaian persentase akses sanitasi aman Kabupaten Kebumen masih sebesar 3,67 persen (2024) akibat terbatasnya kesadaran dan kapasitas masyarakat menggunakan jamban sehat dan akses air minum aman 39,54 persen.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan lingkungan yang berkualitas.	
Tahun 2024 dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hanya 152 desa yang telah masuk kategori desa mandiri.	Desa dalam kategori mandiri masih dibawah 50 persen dari total desa di Kabupaten Kebumen.	
Permasalahan lingkungan dapat dilihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 69,86 dengan kategori sedang. IKLH Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif dikarenakan perbedaan metodologi penghitungan. Adapun kenaikan indeks ini dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya komponen Indeks Kualitas Air (53,11), Indeks Kualitas Udara (91,42), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (58,73).	Kualitas lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan, terutama pada indeks kualitas air dan tutupan lahan.	4. Belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Kinerja pengelolaan sampah dan pengurangan sampah dengan timbulan sampah, semula 37,38 persen (2020) menjadi 53,26 persen (2024) dengan capaian ini terlihat pengelolaan sampah masih belum optimal. Nilai capaian ini masih belum optimal dibandingkan dengan target sampah yang harus terangkut 100 persen.	Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah.	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026 menunjukkan tingkat risiko multibahaya Kabupaten Kebumen pada kategori tinggi untuk kelas bahaya, kategori sedang untuk kelas kerentanan, kategori tinggi untuk kelas kapasitas dan kategori sedang untuk kelas risiko. Indeks Risko Bencana Kabupaten Kebumen tahun 2024, yaitu 121,38 meningkat (lebih buruk) dibandingkan tahun 2020 pada angka 114,67.	Masih tingginya indeks risiko bencana.	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2024 mencapai 0,87. Kondisi IKD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sehingga Kabupaten Kebumen perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.	Belum maksimalnya peningkatan indeks ketahanan daerah.	
Indeks Reformasi Birokrasi meningkat semula 58,40 (2020) menjadi 85,74 (2024). Perolehan indikator penilaian IRB yang cukup besar meliputi rencana aksi pembangunan RB General (2,3), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (2,4), tingkat maturitas SPIP (2,64), SAKIP (2,70), tingkat digitalisasi arsip (2,37), Indeks Kualitas Kebijakan (1,7), Indeks Reformasi Hukum (2,46), Indeks Tata Kelola Pengadaan (2,11), Indeks Sistem Merit (2,47), Indeks SPBE (7,33), capaian indikator non makro (3,86), Survei Penilaian Integritas (7,50) dan Survei kepuasan Masyarakat (7,24).	Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemda, beberapa poin terkait dengan organisasi, kualitas kebijakan, dan reformasi hukum capaiannya relatif masih rendah.	5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sesuai dengan PMK Nomor 65 Tahun 2024 adalah 0,928 termasuk dalam kategori rendah sedangkan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 0,36 persen.	Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah.	

Data/Narasi Sub Bab 2.1	Justifikasi Permasalahan Dari Data Sub Bab 2.1	Permasalahan
Indeks Pembangunan Kebudayaan mengalami fluktuasi. Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah, indeks tersebut menunjukkan kenaikan dari 59,12 (2020) menjadi 60,89 (2023). Namun, angka ini masih termasuk pada kategori sedang yang mencerminkan adanya tantangan dalam pelestarian budaya lokal. Sebagai upaya melestarikan budaya, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11,50 persen cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) telah dilestarikan di Kabupaten Kebumen. Dukungan masyarakat dalam mengapresiasi warisan budaya dan sejarah ditunjukkan dengan jumlah kunjungan ke tempat sejarah sebesar 46.436 orang pada tahun 2024. Selain itu, upaya pemanfaatan kesenian juga terus dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan. Pada tahun 2024 terdapat 17,32 persen kelompok kesenian aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian. Pengembangan kebudayaan juga terus dilakukan di lembaga pendidikan dengan adanya 64,07 persen satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan.	Adanya fluktuasi pembangunan kebudayaan dan belum optimalnya pengembangan kebudayaan serta pemanfaatan kesenian yang ditunjukan dengan adanya penurunan dari tahun sebelumnya.	6. Meningkatnya potensi pergeseran nilai budaya

Sumber: Analisis Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada tabel di atas maka berikut permasalahan pembangunan Kabupaten Kebumen dan penjabarannya.

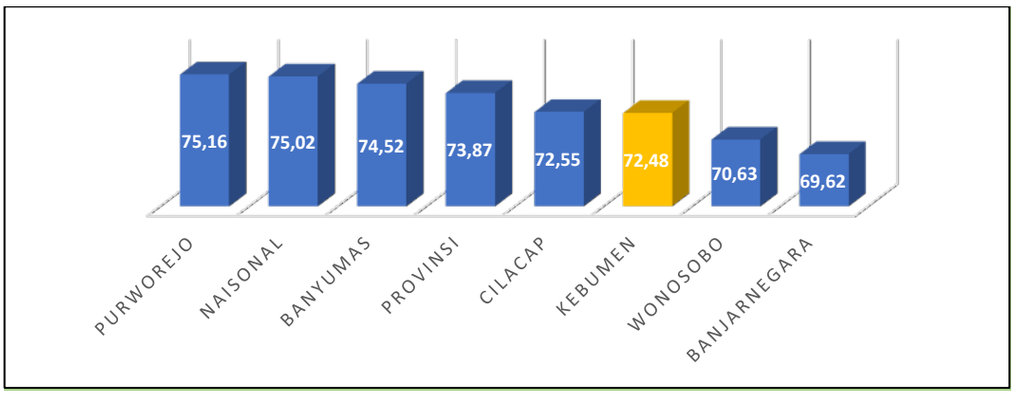


Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.83
Permasalahan Daerah Kabupaten Kebumen

1. **Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang adil dan inklusif**

   Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi utama menuju pembangunan yang adil dan inklusif. Meskipun pada tahun 2024 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen tercatat sebesar 72,48 dan termasuk dalam kategori tinggi menurut klasifikasi UNDP, namun capaian ini masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata IPM provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kebumen masih memerlukan peningkatan berkelanjutan agar tidak hanya masuk dalam kategori tinggi, tetapi juga mampu bersaing dengan wilayah lain di sekitarnya.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah), 2025

Gambar II.84
IPM Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024

Salah satu indikator yang mencerminkan belum optimalnya pembangunan SDM di Kabupaten Kebumen adalah capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang pada tahun 2024 hanya mencapai 7,87 tahun, setara dengan jenjang pendidikan tingkat SMP. Angka ini masih jauh dari standar maksimal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, yakni 15 tahun, yang mencerminkan pencapaian hingga pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dewasa di Kabupaten Kebumen masih berpendidikan hingga jenjang menengah pertama, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia daerah. Selain itu, meskipun terdapat peningkatan pada kemampuan numerasi siswa, seperti peningkatan numerasi siswa SD dari 42,83 persen (2022) menjadi 73,69 persen (2024), capaian ini masih berada di bawah ambang batas kompetensi minimum 75 persen. Demikian pula pada jenjang SMP, meskipun terjadi peningkatan numerasi dari 57,69 persen menjadi 82,34 persen, kualitas pembelajaran masih memerlukan penguatan agar siswa tidak hanya memahami konsep matematika secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya secara kontekstual. Kemampuan literasi membaca juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan pada siswa SD dari 58,59 persen (2022) menjadi 84,28 persen (2024), serta pada siswa SMP dari 79,10 persen menjadi 87,29 persen. Namun, capaian ini tetap menuntut perhatian karena sebagian peserta didik masih belum mencapai standar ideal.

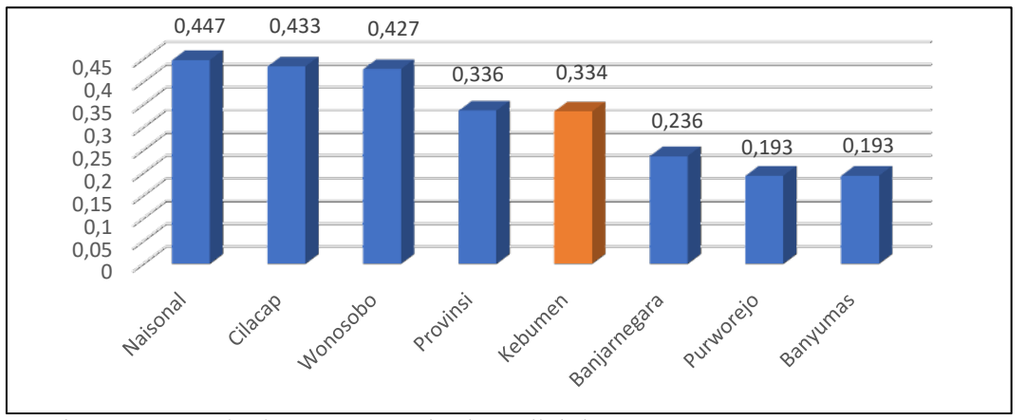
Dari aspek kesehatan, meskipun Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 74,73 tahun pada 2021 menjadi 75,22 tahun pada 2024, angka ini masih berada di bawah standar ideal nasional sebesar 85 tahun. Perlambatan laju pertumbuhan UHH pada 2022 dan 2023 menunjukkan adanya stagnasi dalam peningkatan kualitas hidup. Selain itu, kasus Tuberkulosis (TBC) juga masih menjadi tantangan, dengan peningkatan

notifikasi kasus dari 186 (2022) menjadi 209 kasus (2023). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC masih berada pada angka 95,00 persen, sementara keberhasilan pengobatan baru mencapai 83,00 persen, mencerminkan belum optimalnya pengendalian penyakit menular di tingkat masyarakat. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh rendahnya kualitas kesehatan keluarga, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang hanya mencapai 0,2 pada 2023, masih berada di bawah ambang batas sehat sebesar 0,5. Ini menandakan bahwa sebagian besar keluarga di Kebumen masih tergolong tidak sehat. Di sisi lain, meskipun prevalensi stunting menurun dari 15,34 persen (2020) menjadi 9,17 persen (2024), peningkatan persentase balita dengan gizi buruk dari 0,01 persen menjadi 0,05 persen dalam periode yang sama menunjukkan adanya tantangan baru dalam penanganan kualitas gizi anak.

Akses terhadap layanan kesehatan juga menunjukkan perbaikan, dengan peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dari 86,00 persen (2020) menjadi 99,07 persen (2024). Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan nasional, yang mengindikasikan ketimpangan akses layanan dasar. Dari sisi ketenagakerjaan, meskipun proporsi angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SD menurun dari 51,78 persen (2022) menjadi 32,79 persen (2024), angka tersebut masih menunjukkan dominasi pekerja berpendidikan rendah. Proporsi lulusan SMA dan perguruan tinggi tahun 2024 meningkat menjadi masing-masing 25,81 persen dan 6,89 persen, tetapi masih belum mencukupi untuk mendorong produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sangat diperlukan untuk mendorong kualitas SDM.

Dari sisi ekonomi, capaian pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Kebumen meningkat dari Rp8.901 ribu (2020) menjadi Rp10.176 ribu (2024), dengan pertumbuhan konsumsi sebesar 4,54 persen pada tahun 2024. Namun, angka ini masih jauh dari standar pengeluaran per kapita ideal sebesar Rp26.572,352 ribu, yang menandakan daya beli masyarakat Kebumen masih rendah. Kualitas keluarga juga masih menjadi persoalan, tercermin dari capaian iBangga yang baru mencapai 63,90 pada tahun 2024, masih di bawah ambang batas 70 untuk kategori baik. Hal ini menandakan bahwa kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kebumen masih dalam tahap berkembang. Sementara itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan gender telah menunjukkan hasil positif, dengan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,416 (2020) menjadi

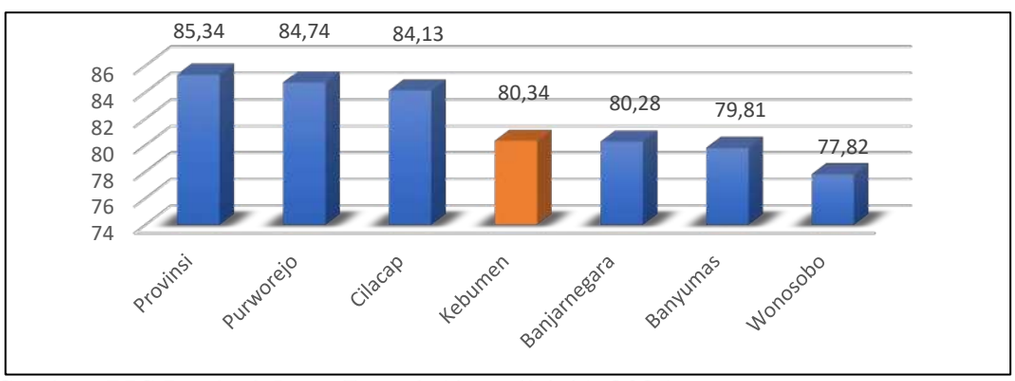
0,328 (2024). Namun, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih perlu diperkuat agar kesetaraan dapat benar-benar diwujudkan. Indeks Perlindungan Anak (IPA) juga masih di bawah standar ideal, yakni sebesar 65,21 pada tahun 2022, yang menunjukkan masih adanya celah dalam pemenuhan hak-hak dasar anak.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah), 2025

Gambar II.85
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

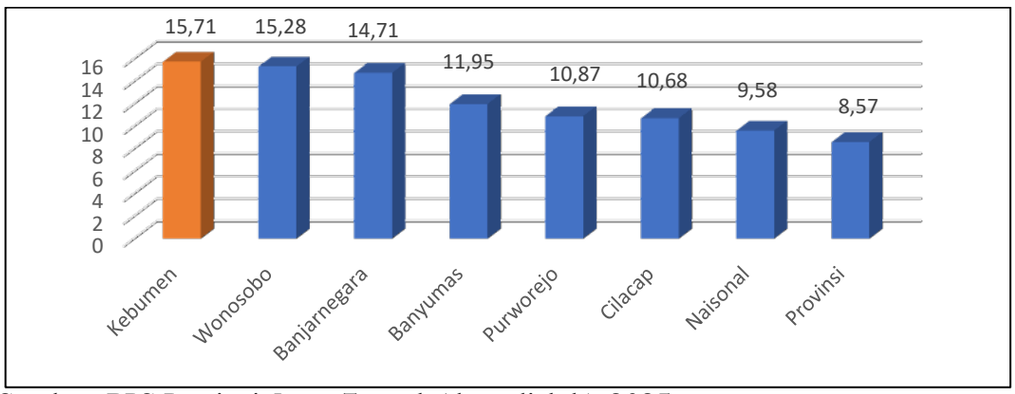
Ketidakseimbangan ini turut berdampak pada aspek lainnya, salah satunya adalah ketahanan pangan yang menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen pun menghadapi tantangan. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan meningkat dari 80,34 (2023) menjadi 81,21 (2024), persentase ketersediaan pangan lokal hanya mencapai 33,42 persen, menandakan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi ini berisiko terhadap stabilitas pasokan dan ketahanan pangan jangka panjang, apalagi jika dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Cilacap, capaian Kabupaten Kebumen masih berada di bawah rata-rata.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah), 2025

Gambar II.86
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Kemiskinan menjadi aspek lain yang menuntut perhatian. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 17,59 persen (2020) menjadi 15,71 persen (2024), angka ini masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih hidup dalam kondisi kekurangan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah), 2025

Gambar II.87
Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar
Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan SDM yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Fokus utama meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi dan peningkatan produktivitas pertanian, serta penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada isu ketimpangan gender dengan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Kerja sama dengan berbagai pihak baik akademisi, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, juga ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Kebumen dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

2. Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal

Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi lokal yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif. Namun, hingga saat ini upaya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing masih belum optimal. Pemanfaatan serta pengembangan potensi lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya inovasi dan nilai tambah pada produk unggulan daerah. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, menghadapi kendala dalam akses permodalan, teknologi, serta pasar yang lebih luas. Selain itu, infrastruktur pendukung dan konektivitas antarwilayah masih perlu ditingkatkan guna memperlancar distribusi hasil produksi dan menarik investasi.

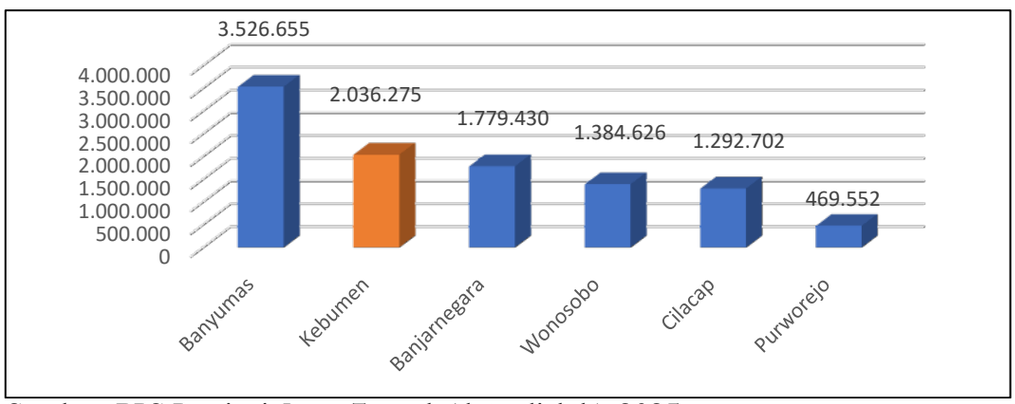
Perekonomian Kabupaten Kebumen mengalami perlambatan sebagaimana tercermin dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2024 yang hanya mencapai 5,30 persen, menurun sebesar 0,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,66 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh melemahnya sektor industri pengolahan yang selama ini merupakan salah satu kontributor utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen, dengan kontribusi sebesar 22,69 persen pada tahun 2024. Ketergantungan terhadap sektor ini menjadi risiko tersendiri ketika produktivitasnya melemah, sehingga diversifikasi sektor ekonomi menjadi hal yang mendesak.

Di sisi lain, sektor ketenagakerjaan menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT yang relatif rendah dan cenderung menurun, namun hal ini tidak serta merta mencerminkan kondisi ideal. Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Kebumen masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD), yang berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja secara umum. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja berbasis potensi lokal.

Sektor koperasi dan UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Persentase koperasi aktif mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dari 89,30 persen pada tahun 2020 menjadi 90,17 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan keberlanjutan kelembagaan dan aktivitas usaha koperasi, Dari sisi kinerja ekonomi, total volume usaha koperasi juga

mengalami peningkatan, dari Rp526.694.635000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp544.399.151.000,00 pada tahun 2024. Meskipun demikian, kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil, yaitu sekitar 1,55 persen terhadap total PDRB. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran koperasi dan UMKM agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap struktur ekonomi daerah.

Potensi pariwisata sebagai sektor strategis juga belum dimaksimalkan. Meski jumlah wisatawan meningkat dari 854.315 pada tahun 2020 menjadi 2.614.639 pada tahun 2024, angka ini masih kalah bersaing dibandingkan dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Banyumas yang pada tahun 2024 mencapai 3.526.655 wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara juga masih sangat rendah, meskipun terdapat peningkatan dari 11 orang pada tahun 2023 menjadi 23 orang pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pengembangan dan promosi pariwisata, termasuk optimalisasi potensi Global Geopark Kebumen, belum sepenuhnya efektif. Terlebih lagi, kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum dalam PDRB justru mengalami penurunan signifikan, dari 28,31 pada tahun 2022 menjadi hanya 10,35 pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa sektor pendukung pariwisata belum mampu mengikuti tren peningkatan kunjungan, sehingga peluang ekonomi yang seharusnya tercipta dari sektor ini belum tergarap maksimal.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah), 2025

Gambar II.88
Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Kabupaten Kebumen dan Sekitar Kebumen Tahun 2023

Dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan sektor basis dengan *Location Quotient* (LQ) sebesar 1,61 (2023), juga menunjukkan tren perlambatan. Kontribusinya terhadap PDRB turun dari 21,79 persen (2020) menjadi 19,86 persen (2024). Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti perubahan iklim, lambatnya regenerasi petani dan nelayan, minimnya adopsi teknologi, serta lemahnya kelembagaan ekonomi. Masalah lingkungan seperti pencemaran plastik dan limbah

pertanian juga turut menurunkan produktivitas sektor ini. Alih fungsi lahan dan belum optimalnya sistem irigasi menambah kompleksitas tantangan di sektor ini, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN).

Dengan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen belum tumbuh secara inklusif dan berdaya saing karena belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal. Setiap sektor memiliki peluang namun belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Infrastruktur yang memadai sejatinya menjadi fondasi utama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, hingga tahun 2024, kualitas dan persebaran infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Kebumen masih menunjukkan berbagai ketimpangan yang memerlukan perhatian strategis.

Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2021 sebesar 64,59 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,40 persen dikarenakan terjadi perubahan rumus perhitungan komposit indeks tersebut. Pada tahun 2022-2024 Indeks infrastruktur terus mengalami penurunan dari 43,40 menjadi 39,61. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari 56,15 persen (2022) menjadi 48,56 persen (2024); Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 7,25 persen (2022) menjadi 1,73 persen (2024); dan Indeks Infrastruktur Perhubungan dari 75,00 persen (2022) menjadi 68,53 persen (2024).

Ketimpangan lainnya terlihat pada kondisi jalan. Proporsi jalan mantap di Kabupaten Kebumen menurun dari 77,07 persen (2020) menjadi 73,48 persen di tahun 2024. Bahkan, berdasarkan data tahun 2024, hanya 40,49 persen jalan yang berada dalam kondisi baik, sementara 10,12 persen dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini tidak hanya memperburuk mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi barang dan jasa serta akses terhadap pelayanan publik. Penurunan kualitas

infrastruktur jalan ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, yang melonjak dari 694 kejadian (2019) menjadi 1.178 kejadian (2024), dengan korban meninggal rata-rata mencapai 131 orang per tahun. Fakta ini menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan dan keamanan transportasi di wilayah ini masih perlu mendapat perhatian lebih.

Di sisi lain, akses terhadap sanitasi aman dan air minum layak juga masih sangat terbatas. Pada tahun 2024, akses sanitasi aman baru mencapai 3,67 persen, sementara akses terhadap air minum aman hanya 39,54 persen. Rendahnya angka ini mencerminkan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan lingkungan, serta keterbatasan kapasitas dan infrastruktur pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Situasi ini menjadi hambatan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur juga berkaitan erat dengan tingkat kemandirian desa. Dari 449 desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024, baru 152 desa atau sekitar 33,85 persen yang masuk dalam kategori desa mandiri. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas desa masih berada pada tahap berkembang atau tertinggal, yang mencerminkan masih rendahnya akses terhadap layanan dasar, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta ekonomi produktif. Ketimpangan ini menandakan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen, meskipun telah menunjukkan arah perbaikan, masih belum optimal dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur publik yang tidak hanya berorientasi pada output fisik semata, tetapi juga memastikan pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, serta pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang efektif. Sinergi antarpemangku kepentingan dan penguatan tata kelola pembangunan menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Kebumen.

4. **Belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim**

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya. Perubahan iklim membawa berbagai risiko, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada sektor pertanian, serta kenaikan suhu yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat. Namun, upaya untuk mengurangi dampak negatif serta beradaptasi terhadap perubahan iklim ini masih belum optimal.

Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Program mitigasi seperti pengurangan emisi karbon, penghijauan, serta pengelolaan sampah dan energi terbarukan belum sepenuhnya diterapkan secara luas. Di sisi lain, upaya adaptasi seperti penguatan infrastruktur tahan bencana, perlindungan daerah pesisir dari abrasi, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan iklim masih perlu diperkuat. Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, pendanaan yang memadai, serta program yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan dapat dilihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 69,86. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 60,8 Tahun 2024, serta lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang berada di level 73,07* (Data Sementara 2024, BPS). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen masih perlu ditingkatkan guna mencapai standar yang lebih baik.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks ini antara lain masih adanya pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta degradasi lahan akibat aktivitas pertanian, industri, dan eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali. Selain itu, masih terbatasnya ruang terbuka hijau serta minimnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.

Kondisi lingkungan hidup memberikan dampak pada kondisi kebencanaan yang berpotensi terjadi. Memahami hal tersebut, potensi

risiko bencana di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada indeks risiko bencana sebesar 121,38 dengan kategori tinggi.

Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, seperti peningkatan pengelolaan limbah dan sampah, rehabilitasi kawasan yang terdampak pencemaran, serta penguatan regulasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan upaya yang lebih optimal, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen dapat terus meningkat dan sejajar dengan capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, namun pada tataran implementasi masih dijumpai sejumlah kelemahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara umum, tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya mampu mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek efisiensi birokrasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari 58,40 pada tahun 2020 menjadi 85,74 pada tahun 2024 menunjukkan adanya progres positif. Perolehan indikator penilaian IRB yang cukup besar meliputi Rencana Aksi Pembangunan RB General (2,3), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (2,4), Tingkat Maturitas SPIP (2,64), SAKIP (2,70), Tingkat Digitalisasi Arsip (2,37), Indeks Kualitas Kebijakan (1,7), Indeks Reformasi Hukum (2,46), Indeks Tata Kelola Pengadaan (2,11), Indeks Sistem Merit (2,47), Indeks SPBE (7,33), Capaian Indikator Non Makro (3,86), Survei Penilaian Integritas (7,50) dan Survei kepuasan Masyarakat (7,24), masih berada pada kisaran yang rendah. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kualitas kelembagaan dan pengambilan keputusan strategis belum sepenuhnya berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 berada pada angka 2,70. Capaian ini merefleksikan masih adanya sejumlah persoalan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja, antara lain indikator RPJMD yang

belum sepenuhnya terukur, kualitas penjenjangan kinerja yang belum didasarkan pada *logical framework* dan *critical success factors*, serta data monitoring dan evaluasi yang belum akurat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam pengelolaan kinerja, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, agar lebih mampu menunjukkan keterkaitan antara anggaran dan hasil yang dicapai.

Dalam aspek fiskal, kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,928 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang tergolong dalam kategori rendah. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pun hanya sebesar 0,36 persen. Fakta ini menggambarkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri, serta menjadi tantangan dalam menjalankan tata kelola anggaran yang efisien dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, nilai IRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 yang sebesar 85,74 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 91,28 dengan kategori A. Selisih ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kualitas reformasi birokrasi antara daerah dan provinsi, yang perlu ditanggapi dengan strategi percepatan perbaikan tata kelola secara lebih intensif di tingkat kabupaten.

Adapun dalam pelaksanaan pelayanan publik, meskipun tingkat digitalisasi arsip mencapai skor 2,37 dan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menyentuh angka 7,33, hal ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dalam proses pelayanan dan manajemen internal pemerintahan. Di sisi lain, Survei Penilaian Integritas (7,50) dan Survei Kepuasan Masyarakat (7,24) menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas dan layanan pemerintah sudah cukup baik, namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan terutama dalam kecepatan, kemudahan akses, dan transparansi layanan.

Kendala yang dihadapi secara umum meliputi prosedur birokrasi yang belum efisien, penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya transparan, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan implementasi kebijakan juga perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan serta mendorong budaya kerja yang akuntabel. Di samping itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menandakan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya diwujudkan. Keterbukaan informasi

menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya untuk membenahi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal dan partisipasi masyarakat. Dengan komitmen bersama dan langkah strategis yang konsisten, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen dapat berkembang menuju arah yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

6. Meningkatnya potensi pergeseran nilai budaya

Kabupaten Kebumen tengah menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi. Pergeseran nilai budaya secara perlahan namun nyata mulai tampak dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perubahan pola pikir, gaya hidup individualistis, serta kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan penyaringan budaya luar secara kritis. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesopanan, serta penghargaan terhadap warisan leluhur mulai mengalami penurunan intensitas dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini tercermin dari fluktuasi Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kebumen yang berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan penurunan dari 59,12 pada tahun 2020 menjadi 60,89 pada tahun 2023. Meskipun mengalami kenaikan menjadi 60,89 pada tahun 2023, angka tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan masih berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pelestarian budaya lokal belum berjalan secara optimal, baik dari sisi perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatannya.

Lebih lanjut, upaya pelestarian warisan budaya seperti Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) masih sangat terbatas, yakni hanya sebesar11,50 persen pada tahun 2024. Persentase yang rendah ini menegaskan bahwa sebagian besar aset budaya belum tersentuh program pelestarian secara sistematis. Dukungan masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan budaya lokal juga masih perlu diperkuat, tercermin dari jumlah kunjungan ke tempat sejarah yang hanya mencapai 46.436 orang sepanjang tahun 2024. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan potensi sejarah Kebumen yang cukup besar.

Dalam hal pemanfaatan kesenian sebagai media pelestarian budaya, partisipasi kelompok kesenian juga belum menggembirakan. Hanya 17,32 persen kelompok kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan seni pada tahun 2024, menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengorganisasian, pendanaan, maupun apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional. Selain itu, minat generasi muda terhadap budaya lokal juga mulai bergeser, ditandai dengan rendahnya ketertarikan terhadap kegiatan seni tradisi yang lebih banyak dianggap tidak relevan dengan gaya hidup modern.

Upaya untuk mengarusutamakan kebudayaan dalam dunia pendidikan telah dilakukan, dengan 64,07 persen satuan pendidikan memiliki guru muatan lokal (mulok) untuk pelajaran bahasa daerah atau seni budaya. Namun, angka ini juga menandakan bahwa sekitar sepertiga satuan pendidikan di Kebumen masih belum menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dalam proses pendidikan, sehingga belum mampu secara menyeluruh membentuk karakter siswa yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara optimal. Pergeseran nilai budaya tidak hanya berdampak pada identitas masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan kohesi sosial dan keberlanjutan warisan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pelestarian yang lebih intensif dan terstruktur, seperti penguatan peran komunitas budaya, peningkatan alokasi anggaran untuk pelestarian kesenian, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh adat, dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci agar Kabupaten Kebumen tidak hanya mampu menjaga warisan budaya, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang kuat dan berdaya saing di tengah tantangan global.

Dengan rumusan permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan per urusan sebagai berikut.

Tabel II.111
Keterkaitan Permasalahan Pokok dan Permasalahan Per Urusan

Permasalahan Pokok	Bidang Urusan	Permasalahan Per Urusan
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang adil dan inklusif	Pendidikan	Belum optimalnya pembangunan sistem pendidikan di jenjang pendidikan dasar
	Kesehatan	Masih rendahnya kesiapan dalam implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer
	Pangan	Belum optimalnya Penyediaan pangan masyarakat
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang sejahtera
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
	Pemuda	Masih rendahnya kreativitas dan kewirausahaan pemuda dapat dilihat dari jumlah wirausaha muda yang masih rendah
	Olahraga	Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah
	Perpustakaan	Belum optimalnya tingkat kunjungan ke perpustakaan
	Transmigrasi	Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten
	Sosial	Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal	Koperasi	Penurunan omzet koperasi di Kabupaten Kebumen
	UMKM	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro
	Penanaman modal	Ketidakpastian ekonomi global mengakibatkan berkurangnya jumlah penanaman modal dalam skala investasi kategori besar;
	Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan
	Pertanian	Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian
	Perindustrian	Belum optimalnya pembangunan sektor industri menengah
	Pariwisata	Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata
	Pemukiman	masih adanya potensi sengketa tanah antara pemda dengan masyarakat.
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas	Perumahan	Masih tingginya angka Backlog/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	Penataan Ruang	Belum adanya rencana rinci serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan
	Pekerjaan umum	Belum optimalnya akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan

Permasalahan Pokok	Bidang Urusan	Permasalahan Per Urusan
	Pekerjaan umum	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kebinamargaan
	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Kawasan perdesaan belum berperan dalam pengembangan ekonomi kewilayahan
	Perhubungan	Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah belum memadai sehingga belum mampu mengakselerasi aktivitas perekonomian
	Perdagangan	Pertumbuhan komoditas perdagangan perlu untuk terus didorong selain pada produktivitas dalam negeri juga untuk konsumsi ekspor
Belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Lingkungan	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan
	Trantibum	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat tanggap bencana
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel	Kependudukan dan catatan sipil	Belum optimalnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil
	komunikasi dan informatika	Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika
	Pemberdayaan masyarakat desa	belum optimalnya jumlah desa/kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku
	Penunjang Pemerintahan	Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi
	Penunjang Pemerintahan	Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama termasuk proses pembahasan dan harmonisasi
	Penunjang Pemerintahan	Belum terintegrasinya proses perencanaan penganggaran dengan penatausahaan dan evaluasi
	Penunjang Pemerintahan keuangan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah dikarenakan proporsi pendapatan asli daerah yang masih kecil
	Penunjang Pemerintahan keuangan	Masih rendahnya pengelolaan keuangan daerah
	Penunjang Pemerintahan Kepegawaian	Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur
	Penunjang Pemerintahan Pengawasan	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu
	Trantibum	Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan daerah
	Kewilayahan	Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan
Meningkatnya potensi pergeseran nilai budaya	Kebudayaan	Masih belum banyaknya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional sehingga jumlah grup kesenian dari kebumen pada tahun 2023 tidak bertambah

Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa mendatang. Isu strategis berfungsi sebagai "pengarah utama" dalam penyusunan kebijakan pembangunan 5 tahunan, sehingga isu strategis diharapkan mampu menjadi rencana transformasi daerah kedepan. Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi urgensi terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat berbagai isu strategis internasional (isu global) yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik dan geoekonomi global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 5.0, serta pergeseran budaya akibat digitalisasi. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Berikut penjabaran isu global:



Sumber: RPJMN 2025-2029

Gambar II.89
Isu Global

1. **Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global terus berkembang, mempengaruhi stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di berbagai negara. Ketergantungan pada impor bahan baku, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan dagang internasional menjadi tantangan yang harus diantisipasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan memperkuat rantai pasok lokal, mendorong ekspor produk bernilai tambah, serta meningkatkan daya saing industri domestik, suatu negara dapat lebih adaptif terhadap perubahan global dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dunia.

2. **Dampak Perubahan Iklim Global**

Perubahan iklim global membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca ekstrem, hingga naiknya permukaan air laut. Fenomena ini mengancam ketahanan pangan, mengganggu ekosistem, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi juga terasa, terutama bagi negara berkembang yang lebih rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif melalui kebijakan ramah lingkungan, transisi menuju energi bersih, serta kesadaran global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca guna menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

3. **Perkembangan Teknologi Industri 5.0**

Perkembangan teknologi dalam era Industri 5.0 membawa transformasi besar dalam berbagai sektor dengan menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan robotika. Industri 5.0 berfokus pada personalisasi, keberlanjutan, serta kesejahteraan manusia dalam proses produksi. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan keterampilan baru, etika dalam penggunaan AI, serta dampak terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, adaptasi yang bijak dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat global.

4. Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam budaya global, mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Digitalisasi dan akses mudah terhadap informasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih cepat, namun juga dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional. Gaya hidup yang semakin individualistis, perubahan pola konsumsi media, serta hilangnya beberapa aspek budaya lokal menjadi tantangan dalam menjaga identitas budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai budaya agar perubahan yang terjadi tetap sejalan dengan jati diri masyarakat.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, serta rendahnya produktivitas. Isu-isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen. Berikut penjabaran isu strategis nasional:



Sumber: RPJMN 2025-2029

Gambar II.90
Isu Strategis Nasional

1. **Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif**

RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan (resiliensi) ekonomi nasional melalui penguatan sektor unggulan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, penguatan daya tahan ekonomi di tingkat daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat mendorong peningkatan investasi, penguatan rantai pasok domestik, dan peningkatan nilai tambah produk lokal sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi.

2. **Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendorong daya saing nasional. Peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas dalam memperkuat kapasitas manusia di era ekonomi digital dan industri 5.0. Pemerintah pusat juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan literasi teknologi untuk memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi dan industri.

3. **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi terjadinya pergeseran struktur kelas masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia menciptakan peluang dalam pengembangan pasar domestik, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Penguatan akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, dan inklusi keuangan menjadi strategi utama dalam mengatasi ketidaksetaraan ini.

4. **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan pengawasan pembangunan juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

5. Rendahnya Produktivitas

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi di Indonesia. Keterbatasan teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya inovasi menjadi faktor utama yang menyebabkan stagnasi produktivitas. Pemerintah pusat mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan riset dan pengembangan (R&D), penerapan teknologi industri 5.0, serta pengembangan ekosistem inovasi di tingkat daerah.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan asta cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada prioritas nasional tersebut, Kabupaten Kebumen dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.

Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, 17 program prioritas, dan *quick wins* RPJMN 2025-2029 melalui kontribusi pada sektor unggulannya. Dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, Kebumen berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sektor pertanian dan peternakan. Terkait misi peningkatan SDM, Kebumen

memperkuat pendidikan berbasis komoditas unggulan untuk menjembatani kebutuhan industri. Pada program prioritas hilirisasi industri, kawasan Solo-Kebumen-Karanganyar-Sukoharjo menjadi koridor strategis pengembangan industri pengolahan. Selain itu, *quick wins* seperti penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan dijalankan melalui program kesehatan dan ketahanan pangan lokal. Dengan peran tersebut, Kebumen tidak hanya menjadi pilar pembangunan regional, tetapi juga kontributor nyata terhadap target pembangunan nasional.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

RPJMD Kabupaten Kebumen, penting untuk melakukan telaahan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaahan arahan RPJMN terhadap wilayah Jawa, dan telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Kebumen, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Kebumen dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

1. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan arahan kebijakan kewilayahan pada tiap Provinsi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Jawa Tengah. Beberapa hal yang menjadi intervensi dalam pembangunan Kabupaten Kebumen dijabarkan sebagai berikut:

A. Kabupaten Kebumen sebagai lokasi Swasembada Pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto, dengan *highlight* intervensi sebagai berikut:
   1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Banjarcahyana, D. I. Singomerto, D. I. Serayu, D. I. Wadaslintang, D. I. Sempor, dan D. I. Tajum.
   2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
   3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).

4) Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
5) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
6) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
7) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment* area WS Serayu-Bogowonto
8) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau.
9) Pembangunan infrastruktur PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Candradimuka.
10) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
11) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk & pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
12) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar & pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi & korporasi petani; pembiayaan dana bergulir & kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
13) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya

lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

B. Kabupaten Kebumen sebagai kawasan konservasi Geopark Kebumen, dengan *highlight* intervensi sebagai berikut:
   1) Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem.
   2) Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi.
   3) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota Perairan.
   4) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi.
   5) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
   6) Penurunan kecelakaan dengan misal intervensi yang berada di titik-titik rawan kecelakaan juga pendekatan kontekstual daerah pariwisata atau industri.

2. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Pada konsep rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen yang dijabarkan sebagai berikut.

A. Isu Strategis
   1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
   2. Penurunan tingkat kemiskinan.
   3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan.
   4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
   5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.
   6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
   7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat.
   8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

B. Visi

   Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang maju, berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045”

C. Misi

Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagai berikut.



Gambar II.91
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

3. Telaah RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen RPJPD pada tahap I, sehingga perlu diperhatikan tema dan arah kebijakan pada tahap I RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Dengan ini beberapa poin penting dalam dokumen RPJPD yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut.

A. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

Isu strategis RPJPD yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan berbasis demografi;
b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas;
c. Pengembangan kawasan dan penggunaan lahan sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Kebumen;
d. Peningkatan kesejahteraan bagi semua;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah berbasis UMKM;
f. Penerapan ekonomi berkelanjutan;
g. Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
h. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel, melayani, dan mengayomi masyarakat;
i. Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah; dan
j. Perubahan iklim.

B. Visi RPJPD

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 adalah:

“Kabupaten Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi Kabupaten Kebumen 2025-2045 sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas, tata kelola pemerintahan yang handal, berdaya saing tinggi, terkoneksi antar wilayah, perekonomian yang tumbuh inklusif dan merata, infrastruktur dasar yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari, dan memiliki kebudayaan yang beradab untuk mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan isu strategis, serta memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta memperhatikan Visi Jawa Tengah 2045: Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Dengan memiliki sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan indikator IPM dan target pada tahap I sebesar 74,00-75,00.

2. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan nasional meningkat, dengan indikator indeks reformasi birokrasi dengan target 2025-2029 sebesar 79,94 dan kapabilitas inovasi dengan target 2,92-3,72.
3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan target 2025-2029 sebesar 5,00-5,50.
4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan di tahun 2025-2029 mencapai 10,43-11,20.
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* dengan indikator penurunan emisi GRK (Ton CO2eq) dengan target 2025-2029 mencapai 4.592.235,71.

C. Misi RPJPD

Dalam RPJPD Kabupaten Kebumen memiliki 6 misi yaitu:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.
b. Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance.*
c. Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif.
d. Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal.
e. Mewujudkan kesejahteraan sosial.
f. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

D. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahapan pertama arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen Periode 2025-2029 adalah Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Kebumen. Pada tahap ini dilakukan dengan penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, daerah yang kompetitif dan inovatif, perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan tahapan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua dan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan karakter dan literasi, pemajuan budaya, peningkatan

pengarusutamaan gender serta kualitas keluarga untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing difokuskan pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* merupakan tahapan kebijakan penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, pelayanan publik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif dan berbasis teknologi informasi serta perwujudan kondusifitas wilayah. Penguatan landasan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* difokuskan pada peningkatan perbaikan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis *big data* dan *artificial intelligent*, serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, merupakan tahapan kebijakan pengembangan jaringan riset dan inovasi daerah dan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kapabilitas inovasi. Penguatan landasan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif difokuskan pada peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal merupakan tahapan kebijakan penguatan produksi dan hilirisasi melalui peningkatan nilai tambah berbasis potensi unggulan yang saling terintegrasi dan berdaya saing di pasar domestik maupun

global, peningkatan kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja, mendorong pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan transformasi digital, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Penguatan landasan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi untuk pemerataan pendapatan, serta peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung peningkatan sistem transportasi antar wilayah dan penerapan ekonomi hijau.

Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tahapan kebijakan peningkatan integrasi dan kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan perlindungan sosial, peningkatan daya beli, pengurangan beban pengeluaran, perbaikan pola konsumsi, peningkatan ketahanan pangan serta pemerataan pendapatan. Penguatan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan, serta peningkatan upaya perlindungan sosial.

Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan tahapan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup, manajemen pengelolaan lingkungan, serta peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana. Penguatan landasan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya air dan energi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

4. Telaah KLHS-RPJMD Kabupaten Kebumen

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kebumen dengan total indikator yang relevan sejumlah 189 indikator, maka terdapat 99 indikator (52,00%) sudah tercapai, 64 indikator (34,00%) belum tercapai, 10 indikator (5,00%) belum dilaksanakan, dan 16 indikator (8,00%) belum ada data.
    a) Pilar sosial yang relevan dengan Kabupaten Kebumen sejumlah 85 indikator terdapat 47 indikator (55,00%) sudah mencapai target nasional, 29 indikator (34,00%) belum tercapai, dan 9 indikator (11,00%) tidak ada data.
    b) Pilar ekonomi yang relevan dengan Kabupaten Kebumen sejumlah 48 indikator terdapat 26 indikator (54,00%) sudah mencapai target nasional, 17 indikator (35,00%) belum tercapai, 3 indikator (6,00%) belum dilaksanakan, dan 2 indikator (4,00%) tidak ada data.
    c) Pilar lingkungan yang relevan dengan Kabupaten Kebumen sejumlah 35 indikator terdapat 12 indikator (34,00%) sudah mencapai target nasional, 11 indikator (31%) belum tercapai, 7 indikator (20,00%) belum dilaksanakan, dan 5 indikator (14,00%) tidak ada data.
    d) Pilar hukum dan tata kelola yang relevan dengan Kabupaten Kebumen 21 indikator terdapat 14 indikator (67,00%) sudah mencapai target nasional, 7 indikator (33,00%) belum tercapai. Pada pilar hukum dan tata Kelola terdapat 7 indikator belum tercapai.
2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum mencapai target, belum dilaksanakan dan belum memiliki data menjadi permasalahan atau isu TPB. Adapun hasil pengelompokan terhadap indikator TPB yang menjadi permasalahan dikelompokkan menurut pilar berikut:
    a) Pilar Sosial : (1) Belum terpenuhinya akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas; (2) Peningkatan derajat kesehatan yang terjangkau dan merata; (3) Jaminan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi serta cukup untuk semua; (4) Pengentasan penyakit menular, terabaikan, dan penyakit tidak menular; (5) Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana; (6) Pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan disabilitas; dan (7) Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

b) Pilar Ekonomi : (1) Pengembangan infrastruktur energi terbarukan; (2) Peningkatan pekerjaan yang layak; (3) Kontribusi sektor pariwisata potensial yang berkelanjutan; dan (4) Penguatan lembaga keuangan untuk industri kecil menengah.
c) Pilar Lingkungan : (1) Penguatan kelembagaan sumber daya air dan peningkatan akses air minum; (2) Belum meratanya akses sanitasi yang aman di masyarakat; (3) Pelestarian dan perlindungan sumber daya hutan dan lahan; (4) Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi dari hulu sampai hilir; (5) Peningkatan kepatuhan instrumen penataan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (6) Penguatan wilayah tangguh bencana dan perubahan iklim terutama pada wilayah rentan.
d) Pilar Hukum dan Tata Kelola : (1) Peningkatan kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan; dan (2) Peningkatan akses pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

3. Dengan capaian pada berbagai pilar dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, maka isu strategis KLHS Kabupaten Kebumen meliputi:
   a) Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan distribusi kesejahteraan sosial.
   b) Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan.
   c) Ancaman degradasi hutan dan lahan.
   d) Belum meratanya akses sanitasi, pelayanan sampah dan air bersih yang aman dan berkelanjutan.
   e) Peningkatan ancaman intensitas multi bencana dan perubahan iklim.
   f) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Isu strategis yang diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kebumen mencerminkan tantangan lintas sektor yang mendesak untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan belum meratanya distribusi kesejahteraan sosial menunjukkan perlunya kebijakan yang menjamin akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Di sisi lain, rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan mengindikasikan

pentingnya transformasi ekonomi lokal berbasis agribisnis, pariwisata berkelanjutan, serta inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Hal ini harus diselaraskan dengan penguatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap dinamika pasar dan perubahan teknologi.

Sementara itu, persoalan lingkungan seperti degradasi hutan dan lahan, keterbatasan akses layanan dasar lingkungan (air bersih, sanitasi, dan persampahan), serta meningkatnya ancaman multi bencana akibat perubahan iklim, menuntut perencanaan pembangunan yang berwawasan ekologis dan tangguh terhadap risiko. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Kebumen perlu mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan sektoral, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan wilayah, maupun perlindungan sumber daya alam. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal, khususnya dalam penerapan sistem berbasis teknologi informasi, perlu ditingkatkan guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan modern. Integrasi seluruh isu strategis KLHS ini ke dalam RPJMD menjadi krusial agar pembangunan di Kebumen tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keadilan antar generasi.

5. Telaah RTRW Kabupaten Kebumen

Dalam mendukung fokus pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang termuat dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2023-2043 (Perda Kabupaten Kebumen No 1 Tahun 2024). Penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis agribisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

(i) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: (a) pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan (b) pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung Agrobisnis dan pariwisata.

(ii) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas: (a) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi: pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup; serta (b) Kebijakan pengembangan Kawasan Budidaya meliputi: (a) pengembangan ekonomi Wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan; dan (b) peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(iii) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: (a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing; dan (b) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

Strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen antara lain:

(i) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya meliputi: (a) mengembangkan kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; (b) mengembangkan kawasan perdesaan sebagai penyangga Kawasan Perkotaan; dan (c) meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya.

(ii) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung agrobisnis dan pariwisata meliputi: (a) mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh; (b) mengembangkan sistem jaringan energi; (c) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi; (d) mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan (e) mengembangkan jaringan prasarana untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan.

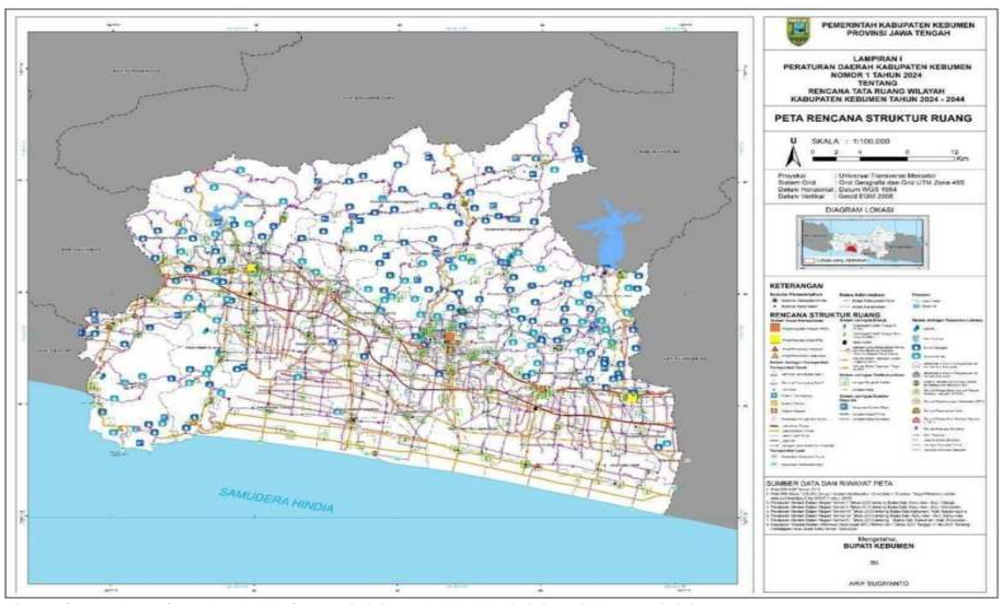
(iii) Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan meliputi: (a) mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (b) meningkatkan peran kawasan hutan produksi; (c) mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat untuk mewujudkan nilai tambah daerah; (d) mengembangkan kawasan pertanian sebagai pusat agrobisnis; (e) menetapkan dan melestarikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan; (f) mengembangkan kawasan perikanan; (g) mengendalikan kegiatan di kawasan pembangkitan tenaga listrik; (h) mengembangkan kegiatan pada kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi; (i) mengembangkan kawasan pariwisata; (j) mengembangkan dan mengendalikan kawasan permukiman; (k) menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30,00 persen dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20,00 persen ruang terbuka hijau publik dan 10,00 persen ruang terbuka hijau privat; dan (l) mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30,00 persen.

(iv) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; (b) mengembangkan dan meningkatkan pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri; dan (c) mengoptimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kabupaten.

(v) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan (b) mengembangkan dan meningkatkan nilai Kawasan Kota Pusaka Gombong dengan menambah kegiatan pendukung yang sesuai.

Arahan penataan ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2023-2044, terbagi menjadi arahan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

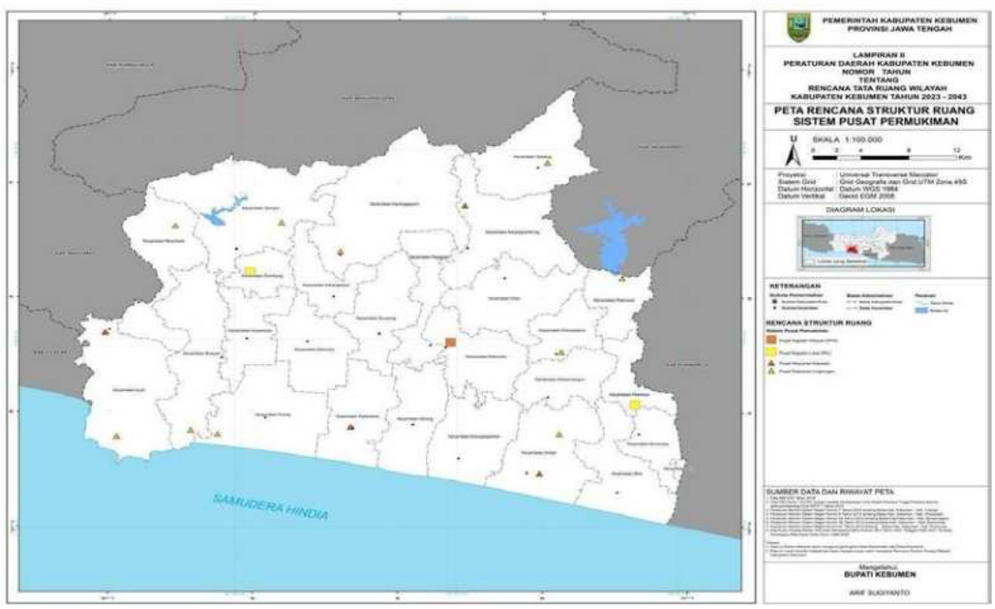
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pontoh & Kustiwan (2009) menambahkan bahwa struktur ruang kota terdiri atas pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan didukung oleh jaringan jalan yang saling berkaitan membentuk sistem spasial. Struktur ruang juga dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan kota. Struktur ruang dapat memberi arah bagi perkembangan pola ruang yang terkait dengan pola penggunaan lahan. Kondisi struktur ruang kota juga mempengaruhi pola perilaku penduduk, terutama pola pergerakan penduduk karena menyangkut jaringan pergerakan (Hakim, 2010). Perkembangan aktivitas ekonomi mempengaruhi perubahan struktur ruang dilihat dari pola penggunaan lahan dan jaringan jalan (Nilayanti and Brotosunaryo, 2012). Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar II.92
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen

Dalam struktur ruang wilayah, pusat-pusat kegiatan berfungsi sebagai simpul atau pusat pelayanan/pertumbuhan wilayah. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Kebumen terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Setiap simpul memiliki hubungan fungsional dengan simpul lainnya. Konfigurasi simpul menjadi dasar penyusunan jaringan prasarana. Simpul-simpul tersebut memiliki wilayah pelayanan atau jangkauan (Adisasmita, 2014). Lebih lanjut, keberadaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas di sekitarnya (Ariyanto, 2017). Lahagina *et al.* (2015) menjelaskan bahwa beberapa hal yang mendorong munculnya pusat pelayanan seperti faktor lokasi, ketersediaan sumber daya, aglomerasi, dan investasi pemerintah. Pusat pelayanan terletak pada lokasi yang memiliki nilai strategis karena akan berfungsi sebagai simpul kegiatan.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar II.93
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kebumen

Di Kabupaten Kebumen beberapa pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya dan tercantum dalam RTRW Kabupaten Kebumen karena memiliki fungsi strategis. RTRW Kabupaten Kebumen menunjukkan (i) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi: Kecamatan Alian, Buluspesantren, Kebumen, Klirong, dan Pejagoan. (ii) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar meliputi Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Rowokele, Gombong, Sempor, Adimulyo, Karanganyar, dan Sruweng; dan (b) Kawasan Perkotaan Prembun meliputi Kecamatan Ambal, Kutowinangun, Mirit, dan Prembun. (iii) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Ambal meliputi Kecamatan Ambal, Buluspesantren, Mirit, Kebumen, dan Klirong; (b) Kawasan Perkotaan Ayah meliputi Kecamatan Ayah; (c) Kawasan Perkotaan Karangsambung meliputi Kecamatan Karangsambung; dan (d) Kawasan Perkotaan Petanahan meliputi Kecamatan Petanahan, Puring, dan Klirong. (iv) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan meliputi PPL Jladri di Kecamatan Buayan, PPL Karangduwur di Kecamatan Ayah, PPL Giyanti di Kecamatan Rowokele, PPL Karanggayam di Kecamatan Karanggayam, PPL Padureso di Kecamatan Padureso, PPL Poncowarno di Kecamatan Poncowarno, PPL Sadang Kulon di Kecamatan Sadang, PPL Semali di Kecamatan Sempor, PPL Sinungrejo di Kecamatan Ambal, dan PPL Tambakmulyo di Kecamatan Puring.

Tabel II.112
Pembagian PKW, PKL, PPK, PPL pada tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No.	Kecamatan	Hierarki Fungsi dan Orde Kota			
		I	II	III	IV
		PKW	PKL	PPK	PPL
1.	Ayah			√	√
2.	Buayan		√		√
3.	Puring			√	√
4.	Petanahan			√	
5.	Klirong	√		√	
6.	Buluspesantren	√		√	
7.	Ambal		√	√	√
8.	Mirit		√	√	
9.	Prembun		√		
10.	Kutowinangun		√		
11.	Alian	√			
12.	Kebumen	√		√	
13.	Pejagoan	√			
14.	Sruweng		√		
15.	Adimulyo		√		

No.	Kecamatan	Hierarki Fungsi dan Orde Kota			
		I	II	III	IV
		PKW	PKL	PPK	PPL
16.	Kuwarasan		√		
17.	Rowokele		√		√
18.	Sempor		√		√
19.	Gombong		√		
20.	Karanganyar		√		
21.	Karanggayam				√
22.	Sadang				√
23.	Bonorowo	X	X	X	X
24.	Padureso				√
25.	Poncowarno				√
26.	Karangsambung			√	

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 (data diolah), 2024

Keterangan:
: Indikasi Program
: Non Indikasi Program

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan transportasi laut. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa jalan tol Cilacap-Yogyakarta, terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kebumen, dan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggayam, Kebumen, dan Gombong. Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi sistem jaringan jalur kereta api antar kota Double track Jawa Selatan dan Kereta api Jakarta-Surabaya, sistem jaringan stasiun kereta api penumpang meliputi stasiun Gombong, stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen dan stasiun Kutowinangun, sistem jaringan stasiun kereta api barang meliputi stasiun Gombong dan stasiun Kebumen, dan sistem jaringan stasiun kereta api operasi meliputi stasiun Gombong, stasiun Ijo, stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen, stasiun Kutowinangun, stasiun Prembun, stasiun Soka, dan stasiun Wonosari.

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau (Dermaga Waduk Sempor, Dermaga Logending, Dermaga Kademangan, Dermaga Desa Kademangan Demangsari, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang). Selain itu, sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan perikanan pantai Logending dan pangkalan pendaratan ikan (Argopeni, Karangduwur, Lembupurwo, Pasir, Rowo, Surorejan, Tangulangin, dan Tegalretno).

Rencana struktur ruang sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Kabupaten Kebumen memiliki sistem jaringan energi yang terintegrasi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan (jalur pipa BBM Cilacap-Jogja-Teras Kebumen) dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pejengkolan, PLTA Sempor, PLTA Wadaslintang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Merden, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jalur transmisi Pedan-Kesugihan, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gombong-Kesugihan, SUTT Gombong-Rawalo, SUTT Kebumen-Gombong, SUTT Kebumen-Purworejo, SUTT Kesugihan-Purworejo, SUTT Purworejo-Gombong, SUTT Purworejo-Wadaslintang, SUTT Wonosobo- Wadaslintang, Gardu Induk Gombong, Gardu Induk Kebumen, dan Gardu Induk Wadaslintang.

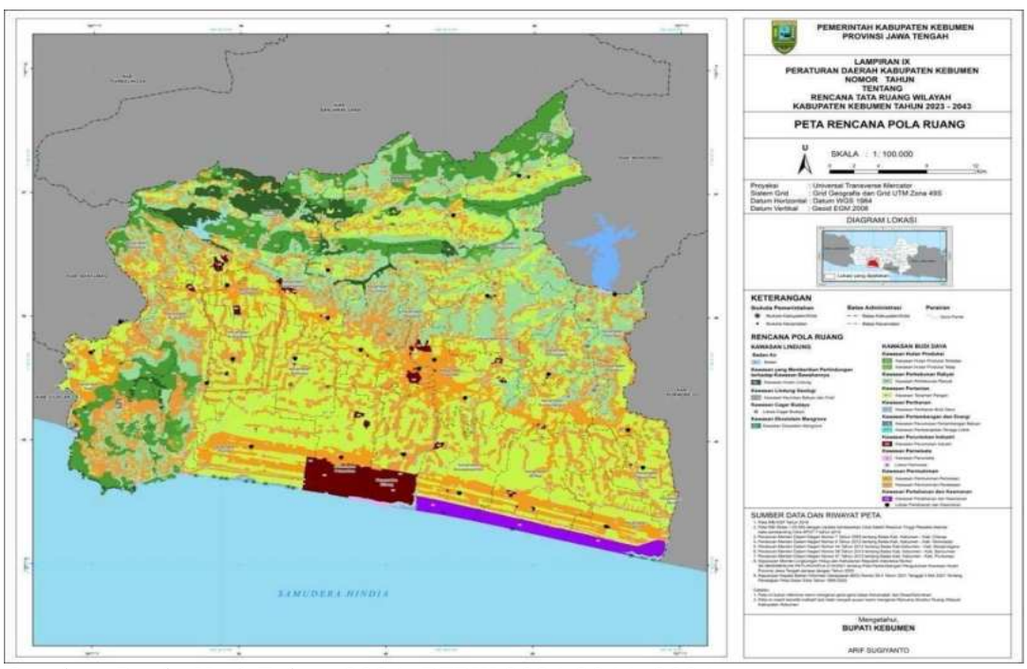
Rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berada di Kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, dan Sruweng. Jaringan bergerak berupa Jaringan bergerak seluler berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Bangunan sumber daya air berupa bendungan, embung, dan long storage meliputi Bendungan Sempor, Bendungan Wadaslintang, Bendungan Pejengkolan, Embung Banjararjo, Embung Bulurejo, Embung DAS Kalong, Embung Giritirto, Embung Kalirejo, Embung Kalisana, Embung Kedungweru, Embung Krakal, Embung Pandansari, Embung Peniron, Embung Penusupan, Embung Rahayu, Embung Sadangwetan, Embung Seboro, Embung Seling, Embung Srati, Embung Tlepok, Embung Triwarno, Embung Tugu, Embung Wonosari, dan Long Storage Sidomukti.

Rencana struktur ruang sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan

Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi) dan bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal dan sumur pompa). Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari SPAL Non Domestik dan SPAL Domestik. Sistem Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) . Sistem jaringan persampahan terdiri dari Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sistem jaringan evakuasi bencana diperuntukan bagi jenis bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan longsor terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana. Sistem drainase terdiri dari jaringan drainase primer dan sekunder.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar II.94
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Kebumen terdiri dari (a) Badan Air luas kurang lebih 1.415 hektare; (b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung luas kurang lebih 3.820 hektare; (c) Kawasan Konservasi berupa Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil (taman pulau kecil) luas kurang lebih 0,5 hektare; (d) Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi (Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil) luas kurang lebih 5 hektare; (e) Kawasan Cagar Budaya berada di Benteng Van Der Wijck dan DKT Gombong di Kecamatan Gombong, serta SMP N 1 Prembun di Kecamatan Prembun; dan (f) Kawasan Ekosistem Mangrove luas kurang lebih 63 hektare.

Rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri atas (1) Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.077 hektare dan kawasan hutan produksi tetap seluas 655 hektare; (2) Kawasan perkebunan rakyat seluas 23.788 hektare; (3) Kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan seluas 44.113 hektare yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 43.154 hektare (97,83 persen); (4) Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya seluas 241 hektare;(5) Kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas 94 hektare dan kawasan pembangkitan tenaga listrik berupa gardu induk seluas 5 hektare; (6) Kawasan peruntukan industri seluas 3.310 hektare; (7) Kawasan pariwisata seluas 172 hektare (Kali Ratu, Pantai Karangbolong, Pantai Logending, Pantai Suwuk, Pantai Watubale, Waduk Wadaslintang, dan Pantai Pandan Kuning) dan lokasi pariwisata (Bukit Pentulu, Curug Sindaro, Jembangan, Gading Paradise, Goa Petruk, Goa Barat, Goa Jatijajar, Hutan Mangrove, Pantai di sepanjang pesisir Kabupaten, Pantai Lampon, Pantai Menganti, Pemandian Air Panas Krakal, Selo Asri Seboro, Songging Waterpark, Taman Banyulangit, Tubing Sungai Padureso, Tubing Sungai Luk Ulo, Taman Reptile Adimulyo, dan Waduk Sempor); (8) Kawasan permukiman perkotaan seluas 12.784 hektare dan kawasan permukiman perdesaan seluas 27.620 hektare; dan (9) Kawasan pertahanan dan keamanan (daerah latihan TNI seluas 2.238 hektare, Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen dan Markas Komando Rayon Militer).

Tabel II.113
Indikasi Program Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program Rencana Pola Ruang									
	PKW	PKL	PPK	PPL	Badan Air	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Konservasi (taman pulau kecil)	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan hutan produksi terbatas	Kawasan hutan produksi tetap	Kawasan perkebunan rakyat	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
Ayah			√	√	√	√	√			√	√		√	√
Buayan		√		√	√	√					√	√	√	√
Puring			√	√	√								√	√
Petanahan			√											√
Klirong	√		√		√									√
Buluspesantren	√		√		√								√	√
Ambal		√	√	√	√									√
Mirit		√	√		√					√			√	√
Prembun		√			√				√				√	√
Kutowinangun		√			√			√					√	√
Alian	√				√	√						√	√	√
Kebumen	√		√		√								√	√
Pejagoan	√				√	√					√		√	√
Sruweng		√			√	√							√	√
Adimulyo		√			√									√
Kuwarasan		√			√									√
Rowokele		√		√	√	√					√		√	√
Sempor		√		√	√	√					√	√	√	√
Gombong		√			√				√				√	√
Karanganyar		√			√	√					√		√	√
Karanggayam				√	√	√		√			√	√	√	√
Sadang				√	√			√			√	√	√	√
Bonorowo	X	X	X	X	√									√
Padureso				√	√	√					√	√	√	√
Poncowarno				√	√								√	√
Karangsambung			√		√	√		√			√	√	√	√

Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program Rencana Pola Ruang								
	PKW	PKL	PPK	PPL	Kawasan perikanan budidaya	Kawasan peruntukan pertambangan batuan	Kawasan pembangkitan tenaga listrik (gardu induk)	Kawasan peruntukan industri	Kawasan pariwisata	Lokasi pariwisata	Kawasan permukiman perkotaan	Kawasan permukiman perdesaan	Kawasan pertahanan dan keamanan
Ayah			√	√	√	√			√	√	√	√	√
Buayan		√		√		√		√	√		√	√	√
Puring			√	√	√			√	√		√	√	√
Petanahan			√					√	√		√	√	√
Klirong	√		√					√	√		√	√	√
Buluspesantren	√		√					√			√	√	√
Ambal		√	√	√			√	√			√	√	√
Mirit		√	√								√	√	√
Prembun		√									√	√	√
Kutowinangun		√				√					√	√	√
Alian	√									√	√	√	√
Kebumen	√		√					√			√	√	√
Pejagoan	√							√		√	√	√	√
Sruweng		√				√					√	√	√
Adimulyo		√								√	√	√	√
Kuwarasan		√					√	√			√	√	√
Rowokele		√		√		√					√	√	√
Sempor		√		√				√		√	√	√	√
Gombong		√					√	√			√	√	√
Karanganyar		√						√			√	√	√
Karanggayam				√						√		√	√
Sadang				√						√		√	√
Bonorowo	X	X	X	X							√	√	√
Padureso				√			√		√	√		√	√
Poncowarno				√						√		√	√
Karangsambung			√							√	√	√	√

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 (data diolah), 2024

Keterangan:

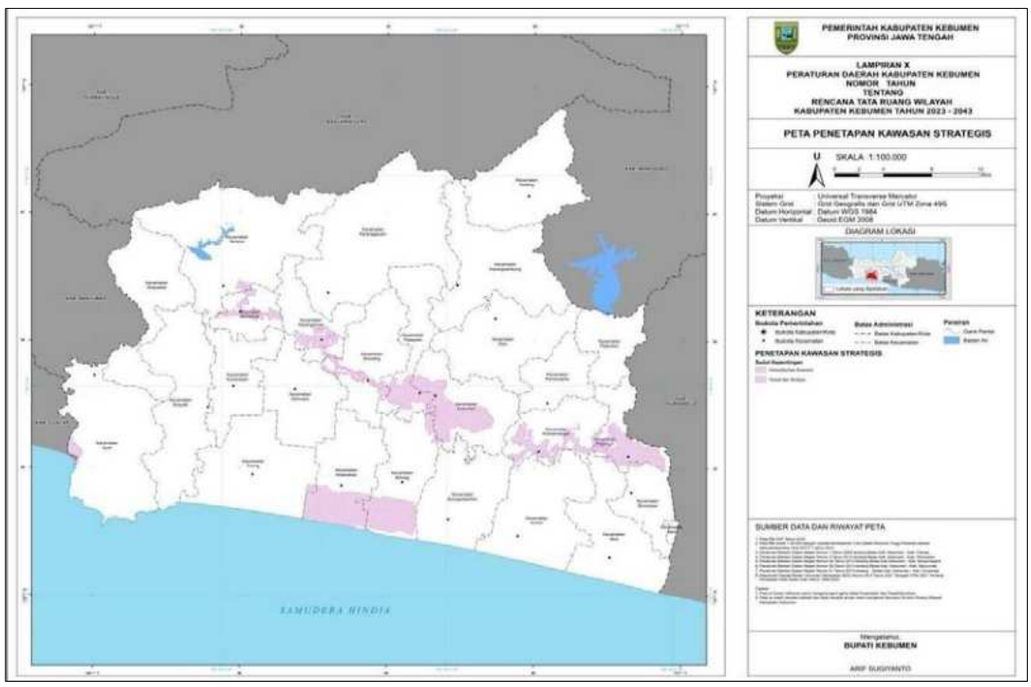
: Indikasi Program : Non Indikasi Program

Kawasan strategis Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan strategis provinsi di Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kebumen, terdiri atas (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten meliputi: (a) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, (b) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan (c) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (a) Kawasan industri Kebumen, (b) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong, (c) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng, (d) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen, (e) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun, dan (f) Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan industri Kebumen merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan industri terpadu sedangkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan strategis pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan industri Kebumen bertujuan mewujudkan kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan arah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong sebagai kawasan perdagangan dan jasa dan pusat pariwisata budaya dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen sebagai kawasan pusat pemerintahan yang didukung perdagangan dan jasa dan industri dengan arah pengembangan pusat pemerintahan, industri, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun sebagai kawasan

pusat perdagangan dan jasa berbasis agribisnis dengan arah pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah bertujuan mewujudkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah sebagai kawasan pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan arah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Pusaka Gombong. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya bertujuan mewujudkan sebagai kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka Gombong di Kecamatan Gombong adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar II.95
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Penentuan pusat kegiatan tidak hanya melihat dari aspek kebijakan tetapi juga melihat kebutuhan pengembangan wilayah. Pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya untuk meningkatkan kinerja pusat permukiman dalam memberikan pelayanan sarana prasarana intra dan antar wilayah di Kabupaten Kebumen. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi: Kecamatan Alian, Buluspesantren, Kebumen, Klirong, dan Pejagoan. Kawasan perkotaan Kebumen akan dikembangkan sebagai Kawasan yang memiliki nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah seperti: pembangunan desa terpadu,

pengembangan geopark, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman pangan, produksi garam, kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, Kawasan Industri Petanahan, pengembangan sentra-sentra industri, pengembangan ekspor produk unggulan, kawasan pariwisata, pengembangan lokasi pariwisata, pengembangan pariwisata budaya, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan ekonomi kreatif, kawasan permukiman perkotaan, pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, Kawasan Industri Kebumen, Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, pengembangan perdagangan dan jasa, dan Kawasan Kota Pusaka Gombong.

Tabel II.114
Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen

No	PKW Kawasan Perkotaan Kebumen	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen											
		Pembangunan Desa Terpadu	Pengembangan Geopark	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Tanaman Pangan	Produksi Garam	Kawasan Peruntukan Industri yang Ramah Lingkungan	Kawasan Industri Petanahan	Pengembangan Sentra-Sentra Industri	Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	Kawasan Pariwisata
1.	Klirong	√	√				√	√	√	√	√	√	√
2.	Bulus pesantren					√	√		√		√	√	
3.	Alian			√	√	√	√						
4.	Kebumen	√	√			√	√		√		√	√	
5.	Pejagoan	√		√		√			√		√	√	

No	PKW Kawasan Perkotaan Kebumen	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen											
		Pengembangan Lokasi Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Budaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Ekonomi Kreatif	Kawasan Permukiman Perkotaan	Pengembangan Ekonomi Berbasis Koperasi dan UMKM	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren	Kawasan Industri Kebumen	Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah	Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Kota Pusaka Gombong
1.	Klirong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Bulus pesantren	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
3.	Alian	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√
4.	Kebumen		√			√		√	√		√	√	√
5.	Pejagoan	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 (data diolah), 2024

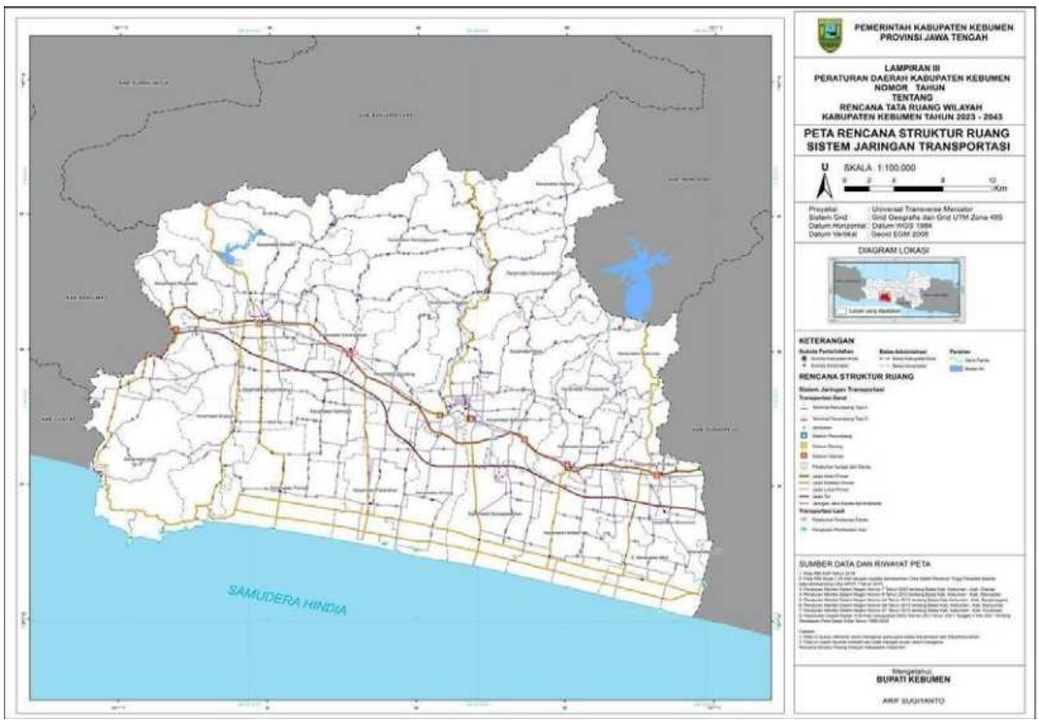
Keterangan:

: Indikasi Program

: Non Indikasi Program

Keberadaan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas di sekitarnya. Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan transportasi laut. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa jalan tol Cilacap-Yogyakarta, serta terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kebumen, terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggayam, Kebumen, dan Gombong. Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi sistem jaringan jalur kereta api antar kota Double track Jawa Selatan dan Kereta api Jakarta-Surabaya, serta sistem jaringan stasiun kereta api penumpang meliputi Stasiun Gombong, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, dan Stasiun Kutowinangun; sistem jaringan stasiun kereta api barang meliputi Stasiun Gombong dan Stasiun Kebumen; dan sistem jaringan stasiun kereta api operasi meliputi Stasiun Gombong, Stasiun Ijo, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutowinangun, Stasiun Prembun, Stasiun Soka dan Stasiun Wonosari.

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau Dermaga Waduk Sempor, Dermaga Logending, Dermaga Kademangan, Kali Ijo Kademangan Demangsari Kecamatan Ayah, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang. Selain itu, sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan perikanan pantai Logending dan pangkalan pendaratan ikan (Argopeni Kecamatan Ayah, Karangduwur Kecamatan Ayah, Lembupurwo Kecamatan Mirit, Pasir Kecamatan Ayah, Rowo Kecamatan Mirit, Surorejan Kecamatan Puring, Tanggulangin Kecamatan Klirong, dan Tegalretno Kecamatan Petanahan).



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar II.96
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi
Kabupaten Kebumen

Sistem jaringan transportasi yang menghubungkan Pusat Kegiatan Kabupaten Kebumen (PKW, PKL, PPK, dan PPL) sebagai hubungan fungsional perkembangan wilayah dalam mendukung pencapaian fokus pembangunan daerah. Indikasi program sistem jaringan transportasi dalam melayani kebutuhan aktivitas pusat kegiatan Kabupaten Kebumen yaitu pengembangan jalan arteri primer, pengembangan jalan kolektor primer, pengembangan jalan lokal primer, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan layang (*flyover*) di perlintasan rel kereta api, pembangunan jalan lingkar (Gombong, Karanganyar, Prembun), pengembangan terminal penumpang tipe A, pengembangan terminal penumpang tipe C, pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan terminal penumpang tipe B, pembangunan terminal barang, pengembangan dan pemeliharaan jembatan, pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota (*double track* Jawa Selatan), pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota, pengembangan stasiun penumpang, pengembangan stasiun barang, pengembangan stasiun operasi, pengembangan dermaga, pengembangan pelabuhan perikanan pantai logending, pengembangan pangkalan pendaratan ikan, dan pembangunan tempat pelelangan ikan.

Tabel II.115
Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi

Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program sistem jaringan transportasi								
	PKW	PKL	PPK	PPL	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Pembangunan Jalan Tol	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Terminal barang
Ayah			√	√		√	√				√		
Buayan		√		√	√	√	√	√			√		
Puring			√	√		√	√				√		
Petanahan			√			√	√	√			√		
Klirong	√		√		√	√	√	√					
Buluspesantren	√		√			√	√	√			√		
Ambal		√	√	√	√	√	√	√			√		
Mirit		√	√			√	√	√			√		
Prembun		√			√	√	√						√
Kutowinangun		√			√	√	√						
Alian	√					√	√				√		
Kebumen	√		√		√	√	√	√	√	√		√	
Pejagoan	√					√	√						
Sruweng		√			√		√						
Adimulyo		√				√	√	√					
Kuwarasan		√					√	√					
Rowokele		√		√	√		√	√					√
Sempor		√		√		√	√						
Gombong		√			√		√			√	√		
Karanganyar		√			√		√				√		
Karanggayam				√		√	√						
Sadang				√			√						
Bonorowo	X	X	X	X			√	√					
Padureso				√		√	√						
Poncowarno				√			√						
Karangsambung			√			√	√				√		

Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program sistem jaringan transportasi								
	PKW	PKL	PPK	PPL	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota (Double Track Jawa Selatan)	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	Pengembangan Stasiun Penumpang	Pengembangan Stasiun Barang	Pengembangan Stasiun Operasi	Pengembangan Dermaga	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
Ayah			√	√						√	√	√	
Buayan		√		√									
Puring			√	√								√	√
Petanahan			√									√	
Klirong	√		√									√	
Buluspesantren	√		√										√
Ambal		√	√	√									
Mirit		√	√									√	√
Prembun		√											
Kutowinangun		√					√		√				
Alian	√												
Kebumen	√		√		√	√	√	√	√				
Pejagoan	√								√				
Sruweng		√											
Adimulyo		√											
Kuwarasan		√											
Rowokele		√		√					√				
Sempor		√		√						√			
Gombong		√					√	√	√				
Karanganyar		√					√		√				
Karanggayam				√									
Sadang				√									
Bonorowo	X	X	X	X									
Padureso				√						√			
Poncowarno				√									
Karangsambung			√										

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 (data diolah), 2024

Keterangan:

: Indikasi Program

: Non Indikasi Program

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen yang diarahkan untuk mewujudkan daerah yang **sejahtera, mandiri, berbasis agribisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan** sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025–2029. Penekanan pada kemandirian dan kesejahteraan tercermin dalam upaya peningkatan ekonomi lokal melalui hilirisasi sektor pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan kawasan produksi berbasis komoditas unggulan. Di sisi lain, potensi pariwisata berbasis alam dan budaya yang tersebar di kawasan selatan dan tengah Kebumen menjadi titik tumpu pembangunan sektor jasa yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. RPJMD Kebumen merespons tujuan RTRW tersebut melalui penjabaran visi dan misi daerah yang mengintegrasikan aspek tata ruang dengan pembangunan sektoral. Misalnya, pengembangan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur konektivitas antar wilayah, serta penyediaan layanan dasar difokuskan pada kawasan strategis yang mendukung pengembangan agribisnis dan destinasi pariwisata. Penataan ruang tidak hanya dilihat sebagai urusan spasial, tetapi juga sebagai kerangka untuk menciptakan distribusi pertumbuhan yang merata, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pemerataan akses ekonomi dan pelayanan publik. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen operasional yang mengakselerasi pencapaian tujuan RTRW secara konkret dan terukur.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kebumen

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Dengan menggunakan metode analisis lingkungan strategis (*Environmental Scanning)* yang mana analisis ini digunakan untuk melihat dan mempertimbangkan dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen. Sehingga berdasarkan identifikasi dari berbagai permasalahan, isu global, nasional maupun regional, maka ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Kebumen dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kabupaten Kebumen terus berupaya memperkuat tata kelola di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar hal ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan sosial yang nantinya akan meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen. Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang dasar. Meskipun angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan namun pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi aspek penting yang terus ditingkatkan. Program pendidikan vokasi juga diperkuat guna menyiapkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, di sektor kesehatan, upaya peningkatan layanan kesehatan dilakukan dengan memperluas cakupan fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas tenaga medis. Penyediaan layanan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, menjadi prioritas dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan angka harapan hidup, serta mengurangi angka stunting. Selain itu, edukasi tentang pola hidup sehat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam pembangunan kesehatan di Kebumen. Untuk mencapai SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing, kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Dengan tata kelola yang baik serta sinergi berbagai pihak, Kabupaten Kebumen dapat menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan.

2. **Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial**

Dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya mencakup upaya menurunkan angka penduduk miskin, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang saling terkait, seperti masih tingginya ketimpangan gender dalam akses ekonomi dan layanan dasar, serta belum optimalnya perlindungan terhadap anak-anak dari kelompok rentan. Ketimpangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, minimnya pemberdayaan ekonomi perempuan, serta masih terbatasnya layanan perlindungan sosial bagi anak menunjukkan bahwa kemiskinan bukan semata soal pendapatan, melainkan juga soal ketidakadilan akses dan perlindungan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan ke depan perlu didesain secara holistik, dengan mengintegrasikan perspektif gender dan perlindungan anak ke dalam program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara inklusif.

Kabupaten Kebumen terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui strategi berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, optimalisasi basis data perlindungan sosial menjadi langkah penting dalam memastikan bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Data Terpadu dan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lebih transparan dan efisien. Dengan data yang valid dan terkini, program-program seperti bantuan sosial tunai, subsidi pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diberikan secara lebih optimal kepada masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan hasil kajian rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 maka beberapa daerah prioritas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu kecamatan Padureso, Alian, Rowokele, Sempor, Karanggayam dan Karangsambung.

Selain bantuan sosial, Kebumen juga terus mendorong program pemberdayaan ekonomi berbasis inklusi. Melalui pemanfaatan data perlindungan sosial, masyarakat miskin dapat diarahkan untuk mendapatkan akses pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta program padat karya yang dapat meningkatkan kemandirian

ekonomi. Penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan gender, dan perlindungan anak

Kolaborasi dan Sinergi antar instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan pemanfaatan basis data yang lebih akurat, kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta penguatan program pemberdayaan ekonomi, Kabupaten Kebumen dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan

Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi komoditas unggulan yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga industri kreatif. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal, diperlukan strategi hilirisasi ekonomi yang berbasis pada pengolahan dan diversifikasi produk dari komoditas unggulan daerah. Salah satu langkah strategis dalam hilirisasi adalah pengembangan industri pengolahan berbasis lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dapat diperkuat dengan mendorong pengolahan hasil pertanian seperti beras organik, olahan hasil hortikultura, dan pengembangan produk turunan dari tanaman perkebunan seperti kopi dan kelapa. Begitu pula dengan sektor perikanan, di mana hasil tangkapan laut dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti ikan asap, abon ikan, hingga produk berbasis ekspor.

Berdasarkan hasil analisis dalam kajian produk unggulan daerah maka pengembangan perekonomian daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan alat analisis *Location Quotients* (LQ), *Shift Share* maupun tipologi klassen dan dengan pemetaan melalui analisis *overlay* ketiganya, dan mengelaborasi melalui analisis *Boston Consulting Group* (BCG) *Matrix* dan *Product Life Cycle* (PLC) didapatkan delapan calon produk unggulan daerah Kabupaten Kebumen yaitu gula semut, industri kerajinan anyaman bambu, industri emping, pembibitan sapi PO, udang vaname, garam, pembibitan kelapa genjah entog kebumen.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2039 dan berdasarkan hasil analisis maka industri

unggulan di Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai dasar pengembangan industri selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2019-2039) adalah fokus pada industri makanan; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri tekstil; dan industri bahan galian bukan logam lainnya (genteng dan batu mulia). Kemudian beberapa poin penting dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) di Kabupaten Kebumen pengembangan per wilayah industri yang dijabarkan sebagai berikut:

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Kebumen dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

   Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI di Kabupaten Kebumen ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang terdiri dari kawasan peruntukan untuk industri besar pada 5 kecamatan, industri menengah pada 7 kecamatan dan industri kecil dan mikro yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Kebumen direncanakan dibangun Kawasan Industri di Kecamatan Petanahan. Dengan adanya kawasan industri diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal. Potensi Kabupaten Kebumen dalam pembangunan kawasan industri antara lain dengan semakin dekatnya jarak antara Kebumen dengan New Yogyakarta International Airport, dilalui oleh Jalur Jalan Lintas Selatan dan Jalan Tol (dalam rencana) dan dilalui oleh *Double Track* Kereta Api.

2) Pengembangan Sentra IKM

Sebagaimana sentra pada umumnya, maka pengembangan sentra IKM ini termasuk di dalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga harus memberikan insentif khusus, agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang.

Selain itu, penguatan akses pasar dan pemasaran digital menjadi faktor penting dalam mendukung hilirisasi ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform *e-commerce*, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kebumen dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dukungan dalam bentuk pelatihan digitalisasi usaha, branding, serta sertifikasi produk juga diperlukan agar produk lokal mampu bersaing di pasar modern. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung hilirisasi dengan memberikan fasilitas pendampingan, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB). Dengan adanya ekosistem yang mendukung, masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengembangkan usaha berbasis komoditas unggulan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Melalui hilirisasi ekonomi yang terencana dan berorientasi pada nilai tambah, Kabupaten Kebumen dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas.

4. Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Kabupaten Kebumen terus berupaya menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan pilar utama dalam penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam tidak lagi semata berorientasi pada peningkatan hasil pembangunan ekonomi jangka pendek, tetapi diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem, menjamin regenerasi sumber daya, serta memberikan manfaat ekonomi yang merata lintas

generasi. Penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan menuntut adanya tata kelola lingkungan yang partisipatif, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kelembagaan lokal dalam pengawasan dan konservasi. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang bijak bukan hanya menjadi dasar ketahanan lingkungan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tahan terhadap krisis ekologis.

Prinsip pembangunan ini menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, serta ramah lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan mendatang. Salah satu langkah konkret dalam penerapan ekonomi berkelanjutan adalah penguatan sektor pertanian berbasis ekologi. Dengan mayoritas masyarakat mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, penerapan praktik pertanian organik, sistem irigasi hemat air, serta diversifikasi tanaman menjadi solusi untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Selain itu, kebijakan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia juga terus didorong guna menjaga keseimbangan ekosistem. Di sektor industri dan UMKM, pembangunan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan limbah produksi. Para pelaku usaha didorong untuk menggunakan bahan baku ramah lingkungan, mengelola limbah dengan sistem daur ulang, serta memanfaatkan teknologi yang lebih hemat energi. Pemerintah daerah juga memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat mengakses pelatihan dan insentif dalam rangka mengadopsi praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal yang meliputi sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif. Menindaklanjuti hal ini, Kabupaten Kebumen juga mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata seperti pantai, pegunungan, dan situs budaya dikembangkan dengan pendekatan ramah lingkungan, di mana masyarakat setempat turut berperan dalam pengelolaannya guna menciptakan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian adanya penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam konteks mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan

pangan, tetapi juga akses, kualitas, dan stabilitas distribusinya bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan masih menghadapi tekanan akibat degradasi lahan, perubahan iklim, keterbatasan regenerasi petani, serta minimnya hilirisasi produk. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan harus terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui inovasi pertanian ramah lingkungan, penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan teknologi digital, serta penciptaan rantai pasok yang adil dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang bagi masyarakat.

Dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada prinsip ekonomi hijau juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan, Kabupaten Kebumen dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Melalui penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Kebumen dapat mencapai kemajuan ekonomi yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

5. Penataan infrastruktur kewilayahan dan digital guna peningkatan aksesibilitas dan konektivitas

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Untuk itu, penataan infrastruktur yang berbasis digital dan kewilayahan menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi dan komunikasi yang lebih efisien, modern, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam penataan infrastruktur adalah pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas transportasi umum guna menghubungkan wilayah pedesaan dengan pusat ekonomi dan layanan publik. Dengan adanya konektivitas yang lebih baik, distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, serta

akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja semakin mudah.

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah merupakan isu strategis yang krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing daerah. Permasalahan keterbatasan akses antarwilayah, terutama pada kawasan perdesaan, pesisir, dan daerah tertinggal, masih menjadi hambatan dalam mobilitas barang, jasa, dan manusia. Oleh karena itu, penataan infrastruktur kewilayahan harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik, tetapi juga pada perluasan infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi ekonomi berbasis teknologi. Integrasi antara konektivitas fisik dan digital ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar, informasi, dan pasar, serta mempercepat pertumbuhan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan.

Selain infrastruktur kewilayahan, Kabupaten Kebumen juga mendorong penguatan infrastruktur digital sebagai bagian dari transformasi menuju era digital. Pembangunan jaringan internet yang lebih luas dan merata menjadi prioritas untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan digital seperti *e-government, e-commerce*, dan pendidikan berbasis teknologi. Pengembangan *smart village* juga menjadi salah satu inisiatif untuk mempercepat digitalisasi di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, layanan publik, serta peluang ekonomi berbasis digital. Lebih lanjut, integrasi sistem teknologi informasi dalam tata kelola kewilayahan juga terus diperkuat. Penerapan *Geographic Information System* (GIS) dalam perencanaan tata ruang, monitoring infrastruktur, serta manajemen bencana menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data. Dengan pemanfaatan teknologi ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan lahan, mempercepat respons terhadap bencana, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur publik. Dengan penataan infrastruktur yang terencana, Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas bagi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

6. Degradasi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Kabupaten Kebumen menghadapi tantangan terkait degradasi lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pencemaran air dan udara. Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim global, yang menyebabkan cuaca ekstrem, peningkatan suhu, serta bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang semakin sering terjadi. Salah satu bentuk degradasi lingkungan yang signifikan adalah kerusakan hutan dan lahan kritis, yang berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung ekosistem. Berkurangnya vegetasi alami mempercepat erosi tanah dan mengganggu keseimbangan hidrologi, sehingga meningkatkan risiko bencana alam. Selain itu, pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri juga menjadi ancaman bagi ketersediaan air bersih di wilayah Kebumen.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah terus memperkuat strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Beberapa langkah yang telah dan terus dilakukan meliputi:

1) Mitigasi Perubahan Iklim
   - Rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kembali melalui program penanaman pohon dan pelestarian hutan sebagai upaya menekan emisi karbon serta mengurangi risiko bencana banjir dan longsor.
   - Peningkatan energi terbarukan dan efisiensi energi, termasuk pemanfaatan energi surya dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.
   - Pengelolaan sampah berbasis *circular economy*, seperti pengurangan sampah plastik, daur ulang, dan optimalisasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang lebih ramah lingkungan.

2) Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
   - Penguatan sistem peringatan dini bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor.
   - Pengembangan pertanian yang adaptif terhadap iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan sistem irigasi hemat air untuk mengurangi dampak perubahan pola cuaca terhadap sektor pertanian.

- Pembangunan infrastruktur hijau, seperti tanggul pesisir untuk mengurangi abrasi dan banjir rob, serta ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

  Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam upaya mengatasi degradasi lingkungan serta membangun ketahanan daerah terhadap perubahan iklim. Dengan penerapan kebijakan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Kebumen dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

7. Percepatan Reformasi Birokrasi berbasis pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya mempercepat reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan warga. Salah satu langkah utama dalam percepatan reformasi birokrasi adalah penguatan digitalisasi layanan publik. Melalui penerapan *e-government*, berbagai layanan administrasi seperti perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial kini semakin mudah diakses oleh masyarakat secara daring. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dan maladministrasi.

Selain itu, Kebumen juga terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pelatihan serta pengembangan kapasitas pegawai dilakukan secara berkelanjutan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan berbasis solusi. Sistem meritokrasi juga diterapkan guna memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah menerapkan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Layanan pengaduan publik berbasis digital memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan serta masukan

terkait layanan pemerintahan, sehingga respons dan perbaikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Kabupaten Kebumen juga berfokus pada penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Proses perizinan yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu lama kini diarahkan menjadi lebih simpel melalui sistem layanan terpadu satu pintu (PTSP), yang memastikan perizinan usaha dan layanan publik dapat diakses secara lebih cepat dan transparan. Melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik, Kabupaten Kebumen menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan birokrasi yang semakin efisien, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

8. Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah

Dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat, Kabupaten Kebumen perlu memperkuat riset dan inovasi daerah sebagai landasan utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah. Riset yang berbasis pada potensi lokal serta inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah daerah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam riset dan inovasi. Melalui kemitraan ini, berbagai sektor dapat berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan daerah, seperti pertanian berbasis teknologi, industri kreatif, serta pariwisata berbasis kearifan lokal. Misalnya, riset dalam bidang pertanian dapat membantu petani mengadopsi teknologi pertanian cerdas (*smart farming*) guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga terus mendorong penguatan ekosistem inovasi dan pengembangan teknologi melalui program inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup lokal. Dengan

memberikan pelatihan, akses pendanaan, serta fasilitas riset dan pengembangan (R&D), inovator lokal dapat menciptakan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mendukung penggunaan data dan teknologi dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan *big data*, *artificial intelligenc*e (AI), dan *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai sektor, seperti transportasi, tata ruang, dan pelayanan publik, dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan solusi berbasis teknologi bagi masyarakat. Lebih lanjut, untuk memperkuat daya saing daerah, Kabupaten Kebumen berkomitmen dalam mendorong pendidikan dan penelitian berbasis inovasi. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, penelitian yang dilakukan dapat lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, penguatan literasi teknologi dan keterampilan digital bagi generasi muda juga menjadi prioritas agar SDM Kabupaten Kebumen semakin kompetitif di era ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan memperkuat riset dan inovasi daerah, Kabupaten Kebumen dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

9. Menurunnya karakter dan norma di masyarakat

Kabupaten Kebumen tengah menghadapi tantangan dalam menjaga karakter dan norma sosial masyarakat di tengah perubahan zaman. Modernisasi, urbanisasi, serta kemajuan teknologi telah membawa pergeseran dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Norma-norma seperti gotong royong, tata krama, serta kepedulian sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Kebumen mulai mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, menurunnya tingkat toleransi dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatnya sikap individualisme di berbagai aspek kehidupan.

Fenomena ini juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal serta minimnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi faktor utama dalam melemahnya norma sosial. Selain itu, semakin berkurangnya

interaksi sosial langsung akibat dominasi penggunaan teknologi digital juga berkontribusi terhadap perubahan pola perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih banyak berinteraksi melalui dunia maya dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun tokoh masyarakat. Penguatan pendidikan karakter di sekolah, revitalisasi budaya gotong royong melalui program-program berbasis komunitas, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga norma sosial harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu ada dukungan dalam menciptakan ruang sosial yang mendorong interaksi dan kebersamaan, seperti kegiatan keagamaan, seni budaya, serta program kepemudaan berbasis nilai-nilai tradisional. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai elemen masyarakat, diharapkan karakter dan norma sosial masyarakat Kebumen dapat kembali diperkuat sebagai identitas yang kokoh di tengah perubahan zaman.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah. Kabupaten Kebumen dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Kebumen dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi RPJMD Kabupaten Kebumen

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

"KEBUMEN BERDAYA:
KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA"

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jati diri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

3.1.2 Misi RPJMD Kabupaten Kebumen

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1) **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif**. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2) **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan**. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3) **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan**. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
4) **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi***. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5) **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal**. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas

Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

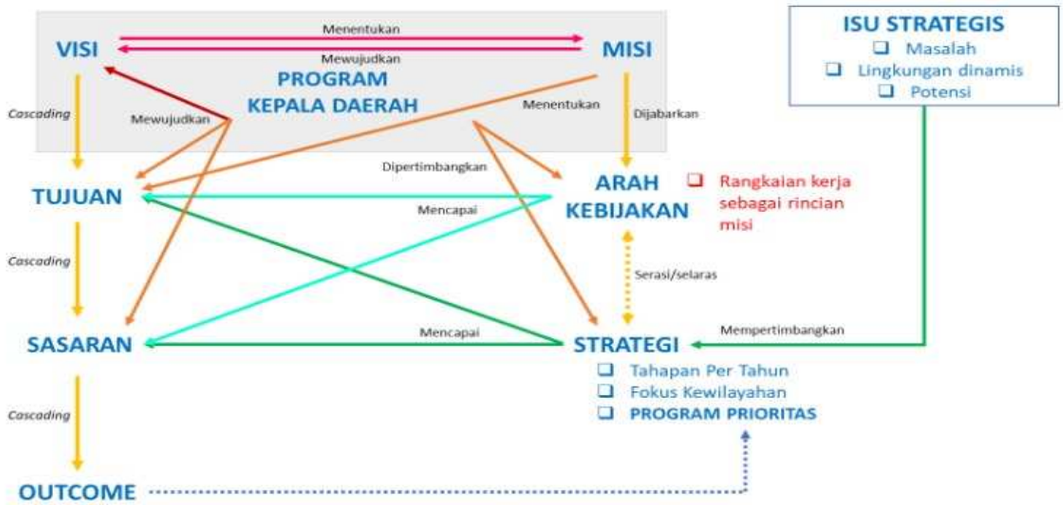
Penyusunan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dengan misi pembangunan provinsi maupun nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan selaras dengan pembangunan yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Keterkaitan misi Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut.



Gambar III.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025-2030

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD). Secara skematik, keterkaitan antara visi dan misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, adalah sebagai berikut.



Gambar III.2
Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berdasarkan gambar III.2, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan turunan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dengan memperhatikan pokok visi; (2) untuk mewujudkan visi dan pokok visi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*.

Pada dasarnya, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kabupaten Kebumen dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas serta berdasarkan visi dan misi kepala daerah maka sasaran pada setiap tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. **T1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
   - Meningkatnya kualitas pendidikan
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. **T2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah
   - Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
   - Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi
   - Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata
   - Meningkatnya kesempatan kerja

3. **T3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat
   - Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat
   - Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum
   - Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
   - Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah

4. **T4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
   - Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern
   - Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT

5. **T5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
   - Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : "KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA"	**Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera**		**Indeks Pembangunan Manusia *(A1)**	**Indeks**	**72,48**	**72,88**	**73,80**	**73,95**	**74,10**	**74,50**	**74,90**
			Tingkat Kemiskinan *(A5)	**Persen**	**15,71**	**14,71-13,90**	**14,30-13,40**	**13,27-12,41**	**12,24-11,42**	**11,20-10,43**	**10,50-9,73**
MISI 1: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif		Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia *(B48)	Persen	20,76	20,80	20,85	20,89	20,94	20,98	21,02
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	63,43	64,80	65,45	66,11	66,76	67,41	68,06
		Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	84,95	85,41	85,70	86,33	86,79	87,25	87,70
MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan	**Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi *(A4)**	**Persen**	**5,30**	**5,40-6,30**	**5,80-6,30**	**6,50-7,00**	**6,90-7,30**	**7,40-8,00**	**7,80-8,30**
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota *(B29)	**Juta rupiah**	**27,29**	**31,67**	**36,05**	**40,44**	**40,82**	**49,20**	**54,16**
		Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,59	2,72	2,86	3,00	3,15	3,31	3,47

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,12	2,13	2,13	2,14	2,15	2,15	2,16
			Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-3,71	-3,50	-3,00	-2,50	-2,00	-1,50	-1,00
MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, *Ngopeni*, *Ngayomi*, dan *Ngayemi*		Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,00	6,30	6,62	6,95	7,29	7,66	8,04
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,35	10,87	11,47	12,07	12,67	13,27	13,87
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat yang Damai, *Guyub*, dan Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka *(B34)	Persen	5,07	4,77	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif		**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**39,61**	**47,11**	**48,45**	**49,53**	**50,83**	**52,30**	**53,76**
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif *(A6)	**Ton CO2Eq**	**151.888,21**	**1.985.634,95**	**2.192.567,90**	**2.399.500,84**	**3.495.868,28**	**4.592.235,71**	**5.688.603,15**
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	1,73	5,75	6,95	8,30	9,87	11,78	14,24

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	68,53	86,03	86,83	87,67	88,45	89,24	90,02
		Sasaran 3.3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	48,56	49,54	51,56	52,62	54,17	55,89	57,02
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri *(B36)	Persen	NA	35,41	38,31	41,20	44,10	46,99	49,89
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	61,57	65,26	65,79	66,32	66,85	67,38	67,91
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana *(B56)	Indeks	121,38	118,42-116,96	117,19-115,12	115,96-113,29	114,73-111,45	113,50-109,60	112,27-107,77
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		**Indeks Reformasi Birokrasi *(A2)**	**Indeks**	**85,74**	**86,03**	**86,33**	**86,62**	**86,91**	**87,21**	**87,50**
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,30	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik *(B23)	Indeks	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72
	Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan		**Indeks Kebudayaan**	**Indeks**	**11,50**	**12,26**	**14,72**	**17,18**	**19,65**	**22,11**	**22,48**
			Indeks Kesalehan Sosial *(B17)	**Indeks**	**82,38**	**82,41**	**82,79**	**83,16**	**83,54**	**83,91**	**84,29**
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan *(B13)	Persen	7,64	12,10	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47
		Sasaran 5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	NA	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
			Indeks Ketertiban Umum	Indeks	98,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan Tujuan dan sasaran di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran RPJMN	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMN	Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah
		Tujuan 1. Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Tujuan 1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan**	**Tingkat Kemiskinan**
			Tingkat Kemiskinan		**PDRB per Kapita**
Sasaran 4 Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		**Indeks Reformasi Birokrasi**
Sasaran 3 Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Indeks Modal Manusia
	Indeks Gini	Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		Tingkat Pengangguran Terbuka
	Kontribusi PDRB KTI	**Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Pertumbuhan Ekonomi
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten/Kota		Inflasi

Tujuan/ Sasaran RPJMN	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMN	Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 1 Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju	Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	GNI per Kapita	Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah		
	Kontribusi PDB Maritim		Net Ekspor Barang dan Jasa		
	Kontribusi PDB Manufaktur	Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan		
		Sasaran 2.4 Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		

Tujuan/ Sasaran RPJMN	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMN	Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah
		Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	**Indeks Infrastruktur**		
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif		
Sasaran 5 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Intensitas Emisi GRK	Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks Infrastruktur Perhubungan		
		Sasaran 3.3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri		
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana		

Tujuan/ Sasaran RPJMN	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMN	Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen	Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Indikator Tujuan/ Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah
		Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	**Indeks Reformasi Birokrasi**		
Sasaran 2 Meningkatnya Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional	*Global Power Index*	Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Indeks Integritas Nasional
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP		Indeks Demokrasi Indonesia
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik		Otonomi Fiskal Daerah
		Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	**Indeks Kebudayaan**		
			Indeks Kesalehan Sosial		
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan		
		Sasaran 5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan		
			Indeks Ketertiban Umum		

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Memahami bahwa RPJMD memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana strategis perangkat daerah agar setiap Perangkat Daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Tabel III.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Tujuan 1 Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	**Indeks Pembangunan Manusia *(A1)**			
	Tingkat Kemiskinan *(A5)			
Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia *(B48)	**Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian**	**Indeks Ketahanan Pangan *(B51)**	**Pangan**
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) *(B52)	Pangan
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Pangan
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**	**Sosial**
		Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	Sosial
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	**Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam aktivitas pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	**Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga**	**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun *(B7)**	**Pendidikan**
			Harapan Lama Sekolah *(B8)	
		Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Literasi Membaca SD *(B9)	Pendidikan
			Literasi Membaca SMP *(B9)	
			Numerasi SD *(B9)	
			Numerasi SMP *(B9)	
			Karakter SD	
			Karakter SMP	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi *(B10)	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	
			Skor Kemampuan Literasi SD	
			Skor Kemampuan Literasi SMP	
			Skor Kemampuan Numerasi SD	
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	
			Iklim Inklusivitas SD	
			Iklim Inklusivitas SMP	
			Iklim Keamanan SD	
			Iklim Keamanan SMP	
			Iklim Kebinekaan SD	
			Iklim Kebinekaan SMP	

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**Perpustakaan**
		Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan *(B12)	Perpustakaan
		Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga	**Indeks Pembangunan Olahraga**	**Kepemudaan dan Olahraga**
		Meningkatnya derajat kebugaran jasmani	Indeks Kebugaran Jasmani	Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan**	**Usia Harapan Hidup *(B1)**	**Kesehatan**
		Meningkatnya pelayanan kesehatan-khususnya ibu dan anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu *(B2)	Kesehatan
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita *(B3)	
			Angka Kematian Balita	
		Meningkatnya penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	
		Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional *(B6)	
			Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	
		Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) *(B22)**	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/ TFR)*	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	**Laju Pertumbuhan Ekonomi *(A4)**			
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/ Kota (Juta Rupiah) *(B29)			
Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	**Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian**	**Nilai Produksi Pertanian**	**Pertanian**
		Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Sektor Pertanian	Pertanian
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan daya saing ekonomi sektor perikanan	**Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan**	**Kelautan dan Perikanan**
		Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah Net Ekspor Barang dan Jasa	**Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan**	**LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**Perdagangan**
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan
		Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB) *(B44)**	**Penanaman Modal**
		Meningkatnya penanaman modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Penanaman Modal
Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	**Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan**	**Rasio PDRB Industri Pengolahan *(B30)**	**Perindustrian**
		Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan	**Rasio Kewirausahaan Daerah *(B46)**	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB *(B47)	Koperasi
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga	**Indeks Pembangunan Pemuda**	**Kepemudaan dan Olahraga**
		Meningkatnya potensi kewirausahaan pemuda	Indeks Kewirausahaan Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran 2.4 Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah**	**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum *(B31)**	**Pariwisata**
		Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-Rata Lama Tinggal	Pariwisata
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan	Pariwisata
		Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Pariwisata

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka *(B34)	**Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *(B35)**	**Tenaga Kerja**
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Kelulusan Uji Kompetensi	Tenaga Kerja
		Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan *(B35)	Tenaga Kerja
		Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan	**Indeks Kepuasan Transmigran**	**Transmigrasi**
		Meningkatnya transmigran yang menetap	Persentase Kumulatif Transmigran yang Menetap	Transmigrasi

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Tujuan 3 Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	**Indeks Infrastruktur**			
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif *(A6)			
Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	**Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha**	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Meningkatnya kualitas hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak *(B39)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks Infrastruktur Perhubungan	**Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah**	**Rasio Konektivitas**	**Perhubungan**
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *(B38)	Perhubungan
Sasaran 3.3. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	**Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah serta meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria**	**Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik**	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *(B37)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya akses air minum rumah tangga perkotaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan *(B57)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya akses air minum rumah tangga perdesaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perdesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota *(B58)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya cakupan fasilitas publik yang inklusif	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif *(B50)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah serta meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Fasilitasi Reforma Agraria**	**Pertanahan**
		Meningkatnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Reforma Agraria	Pertanahan
Sasaran 3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri *(B36)	**Meningkatkan kemandirian desa**	**Indeks Desa**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
		Meningkatnya status desa	Persentase kenaikan status desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan daya saing ekonomi sektor perikanan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *(B53)**	**Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya perbaikan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya perbaikan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan daya saing ekonomi sektor perikanan	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah *(B55)	Lingkungan Hidup
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan	**Tingkat pemanfaatan EBT dalam pembangunan**	**Energi dan Sumber Daya Mineral**
		Meningkatnya pemanfaatan EBT	Persentase Pemanfaatan EBT	Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana *(B56)	**Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana**	**Indeks Ketahanan Daerah**	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Capaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Tujuan 4 Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	**Indeks Reformasi Birokrasi *(A2)**			
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan meningkatkan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan**	**Nilai EKPPD**	**Sekretariat Daerah**
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum *(B24)	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Indeks Akses Keuangan Daerah	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah	**Persentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku**	**Kearsipan**
		Meningkatnya SDM pengelola arsip yang kompeten dan profesional	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Kearsipan

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	**Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah**	**Perencanaan**
		Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	**Kapabilitas Inovasi *(A3), *(B28)**	**Penelitian dan Pengembangan**
		Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan tata kelola keuangan daerah	**Opini BPK atas Laporan Keuangan**	**Keuangan**
			Derajat Otonomi Fiskal Daerah	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Meningkatnya pendapatan asli daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan PAD	Keuangan
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB *(B41)	Keuangan
		Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan	**Indeks Pembangunan Statistik**	**Statistik**
		Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang Lolos Validasi	Statistik

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan	**Indeks Keamanan Informasi**	**Persandian**
		Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tandatangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	Persandian
		Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja, dan berintegritas serta meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan	**Indeks Sistem Merit**	**Kepegawaian**
		Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Nilai Dimensi Ketepatan Penempatan Jabatan dan Kinerja ASN	Kepegawaian
		Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja, dan berintegritas serta meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi**	**Pendidikan dan Pelatihan**
		Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	**Meningkatkan integritas daerah**	**Indeks Integritas Nasional *(B25)**	**Pengawasan**
		Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Kapabilitas APIP	Pengawasan
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik *(B23)	**Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD**	**Sekretariat DPRD**
		Meningkatnya keterpenuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan agenda DPRD	Persentase Agenda DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	Sekretariat DPRD
		Meningkatkan kepemilikan dokumen admindukcapil dan pemanfaatan data	**Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data**	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen admindukcapil	Persentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Kewilayahan**
		Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Kewilayahan
		Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(B26)**	**Komunikasi dan Informatika**
			Indeks Pemerintah Digital	
		Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet *(B40)	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Komunikasi dan Informatika

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Tujuan 5 Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	**Indeks Kebudayaan**			
	Indeks Kesalehan Sosial *(B17)			
Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan *(B13)	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah**	**Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat**	**Kebudayaan**
		Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Kebudayaan	Kebudayaan
Sasaran 5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan Meningkatkan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan**	**Indeks Fasilitasi Keagamaan**	**Sekretariat Daerah**
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Kelembagaan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitasi Sarana Prasarana	Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
	Indeks Ketertiban Umum	**Meningkatkan kondusivitas wilayah dan rasa aman dari bahaya kebakaran**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda**	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**
			Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran *(response time rate*)	
		Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase penanganan pelanggaran Perda	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Persentase petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan stabilitas keamanan daerah	**Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini	Jumlah Kejadian Konflik SARA *(B27)	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025
**Indikator Utama Pembangunan*

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan 5 tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 adalah **"KEBUMEN BERDAYA (Kebumen Beriman Maju Sejahtera Berbudaya)"** Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespon dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses *cascading* kinerja, dimulai dari visi hingga capaian *outcome*, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kebumen, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:



Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Gambar III.3
Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Tabel III.4
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan	Penguatan Daya Saing Daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat	Penguatan landasan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta mendukung ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Percepatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Pemantapan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar untuk mendukung penguatan daya saing daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar untuk Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Penguatan landasan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan	AK 1. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan	AK 1. Pemantapan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial	AK 1. Pemantapan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan	AK 1. Perwujudan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
	AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.	AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.	AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.	AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.	AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 3. Penguatan kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial	AK 3. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial	AK 3. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan program padat karya berbasis potensi lokal	AK 3. Optimalisasi tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial	AK 3. Implementasi tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial yang berkualitas
	AK 4. Pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, terutama desa tertinggal dan kantong kemiskinan, meliputi jalan penghubung antar-desa, jembatan, akses air bersih, sanitasi layak, komunikasi dan listrik	AK 4. Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah	AK 4. Pembangunan di desa wisata dan kawasan perdesaan strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru	AK 4. Pemantapan kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kebumen	AK 4. Perwujudan pemerataan infrastruktur layanan dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan dan perlindungan kaum marjinal, serta produktivitas desa dan ekonomi berkelanjutan
	AK 5. Penyediaan perumahan sederhana yang sehat untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin	AK 5. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, penataan kawasan wisata dan sarana penunjang lainnya	AK 5. Kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur produktif berbasis potensi lokal	AK 5. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat	AK 5. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
	AK 6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan berkualitas	AK 6. Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif	AK 6. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat		
	AK 7. Penguatan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan	AK 7. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat			

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 8. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak, warga miskin, dan korban kekerasan				
	AK 9. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat				
	AK 10. Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan dasar dan ketahanan pangan seperti jalan, drainase dan irigasi				
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	Penguatan landasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	Percepatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	Pemantapan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan dasar di seluruh wilayah	AK 1. Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga	AK 1. Akselerasi pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta akses dan fasilitasi pendidikan jenjang perguruan tinggi.	AK 1. Pemantapan pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta akses dan fasilitasi pendidikan jenjang perguruan tinggi.	AK 1. Pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta akses dan fasilitasi pendidikan jenjang perguruan tinggi.

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 2. Penguatan landasan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal	AK 2. Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal	AK 2. Akselerasi peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal	AK 2. Pemantapan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal	AK 2. Perwujudan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
	AK 3. Penguatan landasan pembangunan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional	AK 3. Pembinaan kepemudaan dan olahraga	AK 3. Pembinaan kepemudaan dan olahraga	AK 3. Pembinaan kepemudaan dan olahraga	AK 3. Pembinaan kepemudaan dan olahraga
	AK 4. Pengembangan infrastruktur digital pendidikan	AK 4. Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan	AK 4. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan	AK 4. Pembangunan sekolah ramah anak dan ramah disabilitas dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai	AK 4. Perwujudan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan berbasis kebutuhan lokal
	AK 5. Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sarana pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal	AK5. Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan			
	AK 6. Pembinaan kepemudaan dan olahraga				

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar	Akselerasi pemenuhan dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam rangka penguatan pelayanan dasar	Pemantapan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan kesehatan yang unggul dan berdaya saing menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen yang bermutu dan berdaya saing menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan secara inklusif	AK 1. Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah	AK 1. Pengembangan infrastruktur pelayanan kesehatan berbasis teknologi, seperti telemedicine dan sistem rekam medis elektronik	AK 1. Pembangunan fasilitas kesehatan ramah disabilitas dan ramah anak dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai.	AK 1. Perwujudan akses setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat
	AK 2. Penguatan landasan penurunan angka kematian ibu dan bayi	AK 2. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi	AK 2. Pemantapan penurunan angka kematian ibu dan bayi	AK 2. Penguatan jejaring rujukan pelayanan kesehatan antar-fasilitas dengan sistem transportasi dan komunikasi yang efektif	AK 2. Perwujudan manajemen pelayanan kesehatan berbasis standar pelayanan minimal (SPM) dan prinsip keselamatan pasien
	AK 3. Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan dan perluasan keterjangkauan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah	AK 3. Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	AK 3. Akselerasi pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	AK 3. Integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan dengan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pelatihan tenaga medis dan paramedis	AK 3. Perwujudan penurunan angka kesakitan dan kematian melalui layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 4. Penguatan landasan pemenuhan sarana prasarana yang memadai dan tenaga kesehatan yang profesional	AK 4. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan	AK 4. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur penunjang kesehatan masyarakat, termasuk posyandu, ambulans desa, dan fasilitas gawat darurat terpadu	AK 4. Pemeliharaan, rehabilitasi, dan modernisasi fasilitas kesehatan secara berkala	AK4. Mengoptimalkan peran layanan kesehatan dalam mendukung produktivitas dan kualitas hidup masyarakat
				AK 5. Pemantapan tata kelola kelembagaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	
Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Pengembangan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan, termasuk penyediaan sarana produksi, jaringan distribusi, dan fasilitas penunjang usaha guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Akselerasi pengembangan kemandirian perekonomian desa berbasis infrastruktur pembangunan yang merata dan handal berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Pemantapan perekonomian kerakyatan yang mandiri, kuat dan berdaya saing dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan produktivitas daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkokoh kemandirian ekonomi daerah dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 1. Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi hasil produksi pertanian maupun industri lokal	AK 1. Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya	AK 1. Akselerasi pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi hasil produksi pertanian maupun industri lokal	AK1. Pemantapan peran BUMDes dan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi dengan dukungan sarana produksi, peralatan, dan teknologi tepat guna	AK 1. Perwujudan pembangunan infrastruktur produktif dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat
	AK 2. Penyediaan sarana produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memadai, terjangkau, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha	AK 2. Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	AK 2. Penguatan fasilitas distribusi dan logistik desa seperti pasar desa, gudang, dan pusat distribusi hasil produksi yang terintegrasi dengan pasar regional	AK 2. Penguatan akses teknologi informasi dan layanan digital di desa untuk memperluas akses pasar dan mempermudah pemasaran produk lokal	AK 2. Perwujudan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif
	AK 3. Penyediaan infrastruktur pendukung ketahanan pangan seperti lumbung pangan desa, sistem irigasi modern, dan peralatan mekanisasi pertanian	AK 3. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat	AK 3. Peningkatan kemitraan antara desa, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk pembiayaan usaha produktif desa	AK 3. Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	AK 3. Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
	AK 4. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan pertanian terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan	AK 4. Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*	AK 4. Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	AK 4. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal	AK 4. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 5. Penyiapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*	AK 5. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal	AK 5. Akselerasi kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*	AK 5. Akselerasi kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*	AK 5. Akselerasi kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*
	AK 6. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		AK 6. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		
Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif	Penguatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Akselerasi pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang mendukung peningkatan iklim investasi dan ekonomi berkelanjutan	Pemantapan iklim investasi yang tumbuh dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan pertumbuhan investasi yang inklusif, produktif dan memperluas cakupan pembangunan di wilayah perdesaan menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Peningkatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan	AK 1. Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan	AK 1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha yang mengembangkan sektor unggulan, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal	AK 1. Penerapan regulasi investasi yang transparan, sederhana, dan berkeadilan	AK 1. Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 2. Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor industri, perdagangan, dan jasa	AK 2. Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	AK 2. Penguatan investasi padat karya melalui pemberian kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor	AK 2. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan dan pendampingan investasi	AK 2. Penguatan investasi padat karya melalui pemberian kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor
	AK 3. Integrasi antara perencanaan investasi dengan pembangunan kewilayahan			AK 3. Penguatan investasi padat karya melalui pemberian kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor	
Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM	Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui platform digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (*shared production facilities*) dan gudang penyimpanan	AK 1. Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 2. Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (*training center*) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global	AK 2. Pengembangan *creative hub* dan *co-working space* untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya	AK 2. Pengembangan *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM	AK 2. Peningkatan kapasitas *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM	AK 2. Perwujudan platform *e-marketplace* daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional
				AK 3. Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal	AK 3. Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap
				AK 4. Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	
Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan	Penguatan landasan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana yang terintegrasi dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah dalam rangka penguatan pelayanan publik	Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik	Akselerasi pemerataan pembangunan kewilayahan, khususnya dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Pemantapan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas penunjang produksi sesuai karakteristik dan potensi lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang wilayah, mitigasi bencana, dan prinsip keberlanjutan lingkungan yang terintegrasi menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 1. Penguatan pondasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan	AK 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan	AK 1. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan	AK 1. Penataan ulang tata ruang lingkungan kumuh dengan memperhatikan kepadatan penduduk, keterjangkauan akses, dan keberlanjutan lahan	AK 1. Perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan perumahan
	AK 2. Pembangunan dan revitalisasi sarana dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi sehat di kawasan berpotensi kumuh	AK 2. Pengembangan akses transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian, khususnya kepariwisataan dan UMKM	AK 2. Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa	AK 2. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data spasial untuk memantau perkembangan kawasan kumuh secara berkala	AK 2. Perwujudan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi hunian yang memenuhi standar kelayakan dengan memanfaatkan program bantuan pemerintah dan kemitraan swasta
	AK 3. Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dan persampahan berbasis masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan	AK 3. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	AK 3. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	AK 3. Peningkatan konektivitas untuk mendukung penguatan daya saing daerah	AK 3. Peningkatan konektivitas untuk mendukung penguatan daya saing daerah
	AK 4. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis jaringan perpipaan dan sumur bor komunal untuk menjamin akses air bersih			AK 4. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	AK 4. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
	AK 5. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang				

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pascabencana guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang ramah lingkungan dan tahan bencana, dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Implementasi inovasi teknologi hijau pada sektor unggulan daerah guna meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi karbon menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Pemantapan pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Penguatan landasan fasilitas pengelolaan sampah terpadu berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) di kawasan permukiman dan pusat aktivitas	AK 1. Pengembangan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal	AK1. Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli lingkungan di tingkat desa/kelurahan	AK 1. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah dan limbah berbasis sirkular ekonomi di tingkat desa dan kawasan perkotaan	AK 1. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup
	AK 2. Pengembangan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) seperti taman kota, jalur hijau, dan hutan kota untuk meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan lingkungan	AK 2. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan	AK 2. Peningkatan program insentif bagi masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pelestarian lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi air	AK 2. Penguatan program inovasi desa hijau yang memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk pelestarian lingkungan	AK 2. Pemantapan penanggulangan bencana daerah dan penguatan masyarakat tanggap bencana
	AK 3. Peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur publik, permukiman, dan fasilitas umum terhadap risiko bencana		AK 3. Pengembangan program inovasi desa hijau yang memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk pelestarian lingkungan	AK 3. Penguatan inovasi pada pembuatan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal	AK 3. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
			AK 4. Peningkatan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal	AK 4. Peningkatan pendidikan publik tentang pola hidup rendah karbon dan kesiapsiagaan bencana	
			AK 5. Penguatan kelembagaan desa tangguh bencana dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan relawan setempat		
Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional	Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan	Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan	Penguatan pelayanan publik berbasis IT dengan program pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan penguatan potensi desa untuk mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan digital, manajerial, dan pelayanan prima agar mampu memberikan layanan publik yang responsif, transparan, dan berbasis data dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan pusat layanan publik terpadu berbasis digital untuk memperkuat keterjangkauan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pemerataan kesejahteraan menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi	AK 1. Peningkatan pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi	AK 1. Penguatan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi	AK 1. Pengelolaan karier pegawai dengan membangun talent pool untuk memetakan, mengembangkan, dan mempromosikan pegawai potensial	AK 1. Perwujudan sistem layanan publik digital yang terpadu dan transparan

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 2. Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan	AK 2. Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan	AK 2. Penguatan integrasi data kemiskinan, ketenagakerjaan, dan potensi ekonomi desa untuk perencanaan program pemberdayaan potensi desa	AK 2. Penguatan budaya kerja berbasis kinerja, profesionalisme, integritas, dan orientasi pelayanan publik	AK 2. Implementasi pengelolaan manajemen PNS berbasis sistem merit
	AK 3. Peningkatan literasi digital masyarakat dan pelatihan ASN agar mampu mengoperasikan dan mengembangkan layanan publik berbasis teknologi	AK 3. Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT	AK 3. Pengembangan *training center digital* bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan di bidang pertanian modern, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan	AK 3. Membangun *Integrated Service Platform* yang menggabungkan seluruh layanan publik lintas sektor dalam satu portal digital.	AK 3. Perwujudan kualitas aparatur negara yang adaptif dan inovatif
	AK 4. Pengembangan dan integrasi sistem layanan publik berbasis digital yang terhubung antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	AK 4. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	AK 4. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	AK 4. Penguatan audit internal berbasis digital dengan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala	AK 4. Pemantapan kapabilitas inovasi
	AK 5. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat			AK 5. Penguatan kapabilitas inovasi	AK 5. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
				AK 6. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif	Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan publik	Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan	Akselerasi penataan tata kelola administrasi desa, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Penguatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset, pelayanan publik, dan promosi investasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien	AK 1. Akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien	AK 1. Penguatan pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien	AK 1. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan pertumbuhan investasi daerah	AK 1. Perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah yang berbasis data, indikator kinerja terukur, dan prinsip *result-based management*
	AK 2. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	AK 2. Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	AK 2. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	AK 2. Penguatan sistem pengawasan penggunaan aset daerah	AK 2. Penerapan *e-government* untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.
	AK 3. Peningkatan kemandirian pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi	AK 3. Akselerasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah	AK 3. Penguatan pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah	AK 3. Penguatan kemampuan memanfaatkan teknologi oleh ASN dalam pelayanan publik dan pemasaran investasi	AK 3. Integrasi tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip antikorupsi, etika publik, dan penguatan budaya pelayanan

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 4. Peningkatan sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah	AK 4. Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah	AK 4. Penguatan sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah baik pada level desa/kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah		
Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal	Penguatan landasan pengembangan pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan seni tradisional sebagai ruang pembelajaran, interaksi sosial, dan pelestarian warisan budaya dalam rangka penguatan pelayanan kepada masyarakat	Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Penguatan pusat kegiatan budaya dan keagamaan di desa sebagai ruang pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi untuk pengolahan potensi desa dan pembangunan kawasan perdesaan	Pemantapan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
	AK 1. Penyediaan dan fasilitasi revitalisasi dan pengembangan pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas	AK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian	AK 1. Penguatan aktivitas pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas	AK 1. Penguatan peran tokoh agama, adat, dan budaya sebagai mentor atau pembina generasi muda	AK 1. Perwujudan penguatan karakter dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan
	AK 2. Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan, adat, dan budaya bagi generasi muda di sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat	AK 2. Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan	AK 2. Penguatan pemanfaatan media digital dan platform kreatif untuk menyebarluaskan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya daerah	AK 2. Penguatan tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati sebagai budaya sosial yang memperkuat persatuan	AK 2. Perwujudan program pembangunan memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 3. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pendidikan pesantren yang layak, aman, dan sesuai standar mutu pendidikan	AK 3. Penguatan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan citra positif daerah		AK 3. Peningkatan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal untuk membentuk generasi pemimpin berintegritas	
		AK 4. Pengembangan kurikulum pesantren yang memadukan pendidikan agama, kewirausahaan, keterampilan hidup (*life skills*), dan penguatan karakter		AK 4. Penguatan kelembagaan masyarakat adat dan organisasi keagamaan untuk berperan dalam pengawasan serta pengendalian dampak pembangunan	
Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan publik	Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik	Penguatan tradisi gotong royong sebagai modal sosial dalam pembangunan infrastruktur desa dan fasilitas publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Pemantapan keamanan terpadu melalui partisipasi masyarakat, kemitraan (pemerintah–swasta–komunitas), serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan lingkungan kondusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam kehidupan keseharian masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

STRATEGI	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	AK 1. Pengembangan sistem deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas, dan gangguan ketertiban umum	AK 1. Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif	AK 1. Penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	AK 1. Peningkatan koordinasi antarinstansi keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah	AK 1. Perwujudan ketertiban, keamanan, dan kerukunan masyarakat berbasis kondusivitas wilayah
	AK 2. Fasilitasi kegiatan sosialisasi hukum, peraturan daerah, dan nilai-nilai toleransi untuk memperkuat kesadaran hukum dan kerukunan antarwarga	AK 2. Pembentukan forum komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan mengantisipasi potensi konflik	AK 2. Peningkatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa	AK 2. Penguatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa	AK 2. Perwujudan forum dialog lintas agama, etnis, dan budaya secara rutin untuk memelihara harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal.
	AK 3. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memperkuat kohesi sosial				

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan ekologi yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut terkait keselarasan antara strategi utama strategi prioritas, dan arah kebijakan dengan tema pembangunan Kabupaten Kebumen:

TEMA 2026

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pemenuhan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, jaringan transportasi, irigasi, serta sarana air bersih akan membuka keterhubungan antarwilayah, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok secara lebih cepat dan efisien. Dengan konektivitas yang baik, wilayah pedesaan maupun terpencil dapat terintegrasi ke dalam rantai ekonomi daerah, sehingga peluang usaha, investasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin terbuka.

Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan seperti gudang penyimpanan, pasar tani, jaringan irigasi, dan pusat distribusi akan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat. Upaya ini tidak hanya mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga dan gangguan distribusi, tetapi juga memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Dengan demikian, pemenuhan infrastruktur yang terencana dan inklusif akan menjadi penggerak utama bagi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun dalam tema tahun 2026 tahap I memiliki **strategi utama** yaitu:

1. **Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Penguatan landasan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta mendukung ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan landasan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
      - Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
      - Penguatan kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
      - Pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, terutama desa tertinggal dan kantong kemiskinan, meliputi jalan penghubung antar-desa, jembatan, akses air bersih, sanitasi layak, komunikasi dan kemandirian energi perdesaan
      - Penyediaan perumahan sederhana yang sehat untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin
      - Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan berkualitas
      - Penguatan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan
      - Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak, warga miskin, dan korban kekerasan
      - Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
      - Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan dasar dan ketahanan pangan seperti jalan, drainase dan irigasi
2. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Penguatan landasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan dasar di seluruh wilayah

- Penguatan landasan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
- Penguatan landasan pembangunan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional
- Pengembangan infrastruktur digital pendidikan
- Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sarana pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal
- Pembinaan kepemudaan dan olahraga

3. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan kualitas layanan kesehatan secara inklusif
      - Penguatan landasan penurunan angka kematian ibu dan bayi
      - Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan dan perluasan keterjangkauan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah
      - Penguatan landasan pemenuhan sarana prasarana yang memadai dan tenaga kesehatan yang profesional
4. **Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pengembangan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan, termasuk penyediaan sarana produksi, jaringan distribusi, dan fasilitas penunjang usaha guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi hasil produksi pertanian maupun industri lokal
      - Penyediaan sarana produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memadai, terjangkau, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha
      - Penyediaan infrastruktur pendukung ketahanan pangan seperti lumbung pangan desa, sistem irigasi modern, dan peralatan mekanisasi pertanian

- Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan pertanian terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan
- Penyiapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*
- Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal

5. **Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Penguatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan
      - Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor industri, perdagangan, dan jasa
      - Integrasi antara perencanaan investasi dengan pembangunan kewilayahan
6. **Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital
      - Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (*training center*) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global
7. **Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Penguatan landasan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana yang terintegrasi dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah dalam rangka penguatan pelayanan publik**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan pondasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan
- Pembangunan dan revitalisasi sarana dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi sehat di kawasan berpotensi kumuh
- Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dan persampahan berbasis masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan
- Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis jaringan perpipaan dan sumur bor komunal untuk menjamin akses air bersih
- Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

8. **Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pascabencana guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan landasan fasilitas pengelolaan sampah terpadu berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) di kawasan permukiman dan pusat aktivitas
      - Pengembangan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) seperti taman kota, jalur hijau, dan hutan kota untuk meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan lingkungan
      - Peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur publik, permukiman, dan fasilitas umum terhadap risiko bencana
9. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi

- Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan
- Peningkatan literasi digital masyarakat dan pelatihan ASN agar mampu mengoperasikan dan mengembangkan layanan publik berbasis teknologi
- Pengembangan dan integrasi sistem layanan publik berbasis digital yang terhubung antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

10. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan publik**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien
        - Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi
        - Peningkatan kemandirian pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi
        - Peningkatan sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah
11. **Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Penguatan landasan pengembangan pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan seni tradisional sebagai ruang pembelajaran, interaksi sosial, dan pelestarian warisan budaya dalam rangka penguatan pelayanan kepada masyarakat**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Penyediaan dan fasilitasi revitalisasi dan pengembangan pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas
        - Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan, adat, dan budaya bagi generasi muda di sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat
        - Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pendidikan pesantren yang layak, aman, dan sesuai standar mutu pendidikan

12. **Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan publik**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Pengembangan sistem deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas, dan gangguan ketertiban umum
        - Fasilitasi kegiatan sosialisasi hukum, peraturan daerah, dan nilai-nilai toleransi untuk memperkuat kesadaran hukum dan kerukunan antarwarga
        - Peningkatan sarana dan prasarana keamanan serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memperkuat kohesi sosial

TEMA 2027

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pemenuhan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pengembangan pariwisata sebagai motor percepatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, transportasi publik, jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas penduduk, dan memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik secara merata. Infrastruktur yang memadai juga menjadi prasyarat bagi terbukanya peluang ekonomi baru, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi, sehingga mendorong pertumbuhan usaha lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi, sarana transportasi, penunjuk arah, fasilitas pendukung, dan konektivitas digital akan meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan. Dengan berkembangnya pariwisata, sektor terkait seperti kuliner, kerajinan, perhotelan, dan jasa transportasi akan tumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar bagi produk lokal. Melalui sinergi antara penguatan pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata, pemenuhan infrastruktur akan menjadi katalis penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam tema tahun 2027 tahap II memiliki **strategi utama** yaitu:

1. **Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
      - Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
      - Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
      - Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah
      - Pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, penataan kawasan wisata dan sarana penunjang lainnya
      - Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
      - Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
2. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga
      - Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
      - Pembinaan kepemudaan dan olahraga
      - Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan
      - Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
      - Pengembangan sekolah unggulan dan inklusif yang merata dan berkelanjutan

3. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah
        - Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi
        - Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
        - Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan
4. **Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya
        - Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis kewilayahan dan ekonomi kreatif
        - Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat
        - Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match
        - Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal

5. **Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan
      - Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
6. **Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital
      - Pengembangan *creative hub* dan *co-working space* untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya
7. **Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan
      - Pengembangan akses transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian, khususnya kepariwisataan dan UMKM
      - Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

8. **Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Pengembangan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
        - Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan
9. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Peningkatan pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi
        - Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan
        - Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT
        - Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
10. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien

- Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
- Akselerasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah
- Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah

11. **Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian
        - Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan
        - Penguatan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan citra positif daerah
        - Pengembangan kurikulum pesantren yang memadukan pendidikan agama, kewirausahaan, keterampilan hidup (*life skills*), dan penguatan karakter
12. **Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif
        - Pembentukan forum komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan mengantisipasi potensi konflik

TEMA 2028

Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan

Percepatan pemerataan infrastruktur menjadi langkah kunci dalam memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar dan mendorong ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa serta kawasan perdesaan. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, listrik, air bersih, dan fasilitas layanan publik yang merata akan menghubungkan desa-desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Infrastruktur yang terdistribusi secara adil akan mengurangi kesenjangan antarwilayah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan.

Pemerataan infrastruktur akan menjadi pendorong bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, energi terbarukan, dan pariwisata berbasis alam. Dengan akses transportasi dan logistik yang memadai, produk-produk unggulan desa dapat menembus pasar yang lebih luas, sementara fasilitas pendukung produksi dan pemasaran akan meningkatkan nilai tambahnya. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pengelolaan potensi desa secara berkelanjutan akan menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Adapun dalam tema tahun 2028 tahap III memiliki **strategi utama** yaitu:

1. **Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Percepatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Pemantapan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
        - Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
        - Integrasi pembangunan infrastruktur dengan program padat karya berbasis potensi lokal

- Pembangunan di desa wisata dan kawasan perdesaan strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru
- Kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur produktif berbasis potensi lokal
- Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat

2. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Percepatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Akselerasi pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta akses dan fasilitasi pendidikan jenjang perguruan tinggi.
      - Akselerasi peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
      - Pembinaan kepemudaan dan olahraga
      - Akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan
      - Peningkatan kapasitas sekolah unggulan dan inklusif yang merata dan berkelanjutan
3. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Akselerasi pemenuhan dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam rangka penguatan pelayanan dasar.** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pengembangan infrastruktur pelayanan kesehatan berbasis teknologi, seperti telemedicine dan sistem rekam medis elektronik
      - Pemantapan penurunan angka kematian ibu dan bayi
      - Akselerasi pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
      - Pemenuhan ketersediaan infrastruktur penunjang kesehatan masyarakat, termasuk posyandu, ambulans desa, dan fasilitas gawat darurat terpadu

4. **Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Akselerasi pengembangan kemandirian perekonomian desa berbasis infrastruktur pembangunan yang merata dan handal berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Akselerasi pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi hasil produksi pertanian maupun industri lokal serta penguatan dan pemberdayaan BUMDes dan koperasi desa untuk pengembangan perekonomian desa
      - Penguatan fasilitas distribusi dan logistik desa seperti pasar desa, gudang, dan pusat distribusi hasil produksi yang terintegrasi dengan pasar regional
      - Peningkatan kemitraan antara desa, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk pembiayaan usaha produktif desa
      - Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
      - Akselerasi kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match
      - Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
5. **Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Akselerasi pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang mendukung peningkatan iklim investasi dan ekonomi berkelanjutan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha yang mengembangkan sektor unggulan, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal
      - Penguatan investasi padat karya melalui pemberian kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor

6. **Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Peningkatan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital
      - Pengembangan *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM
7. **Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Akselerasi pemerataan pembangunan kewilayahan, khususnya dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan
      - Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa
      - Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
8. **Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang ramah lingkungan dan tahan bencana, dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli lingkungan di tingkat desa/kelurahan
      - Peningkatan program insentif bagi masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pelestarian lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi air

- Pengembangan program inovasi desa hijau yang memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk pelestarian lingkungan
- Peningkatan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
- Penguatan kelembagaan desa tangguh bencana dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan relawan setempat

9. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Penguatan pelayanan publik berbasis IT dengan program pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan penguatan potensi desa untuk mendukung ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi
      - Penguatan integrasi data kemiskinan, ketenagakerjaan, dan potensi ekonomi desa untuk perencanaan program pemberdayaan potensi desa
      - Pengembangan training center digital bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan di bidang pertanian modern, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan
      - Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
10. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Akselerasi penataan tata kelola administrasi desa, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
       - Penguatan pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien
       - Penguatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
       - Penguatan pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah

- Penguatan sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah baik pada level desa/kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah

11. **Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Penguatan pusat kegiatan budaya dan keagamaan di desa sebagai ruang pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi untuk pengolahan potensi desa dan pembangunan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Penguatan aktivitas pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas
        - Penguatan pemanfaatan media digital dan *platform* kreatif untuk menyebarluaskan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya daerah
12. **Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Penguatan tradisi gotong royong sebagai modal sosial dalam pembangunan infrastruktur desa dan fasilitas publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
        - Peningkatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa

TEMA 2029

Penguatan Daya Saing Daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Penguatan daya saing daerah menjadi landasan penting dalam mewujudkan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya). Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan, Kebumen diarahkan untuk mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dukungan infrastruktur yang memadai, kemudahan investasi, dan penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan produktivitas daerah secara menyeluruh.

Selain itu, penguatan daya saing Kebumen juga akan dibangun dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian nilai-nilai budaya serta lingkungan. Integrasi prinsip keberlanjutan, pelestarian kearifan lokal, dan penguatan identitas daerah akan memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang beriman, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kebumen Berdaya akan terwujud sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya secara berkelanjutan.

Adapun dalam tema tahun 2029 tahap IV memiliki **strategi utama** yaitu:

1. **Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemantapan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar untuk mendukung penguatan daya saing daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemantapan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
      - Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
      - Optimalisasi tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
      - Pemantapan kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kebumen
      - Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
2. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemantapan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemantapan pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta akses dan fasilitasi pendidikan jenjang perguruan tinggi.
      - Pemantapan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
      - Pembinaan kepemudaan dan olahraga

- Pembangunan sekolah ramah anak dan ramah disabilitas dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai
- Pemantapan sekolah unggulan dan inklusif yang merata dan berkelanjutan

3. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemantapan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan kesehatan yang unggul dan berdaya saing menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pembangunan fasilitas kesehatan ramah disabilitas dan ramah anak dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai.
      - Penguatan jejaring rujukan pelayanan kesehatan antar-fasilitas dengan sistem transportasi dan komunikasi yang efektif
      - Integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan dengan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pelatihan tenaga medis dan paramedis
      - Pemeliharaan, rehabilitasi, dan modernisasi fasilitas kesehatan secara berkala
      - Pemantapan tata kelola kelembagaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
4. **Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemantapan perekonomian kerakyatan yang mandiri, kuat dan berdaya saing dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemantapan peran BUMDes dan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi dengan dukungan sarana produksi, peralatan, dan teknologi tepat guna
      - Penguatan akses teknologi informasi dan layanan digital di desa untuk memperluas akses pasar dan mempermudah pemasaran produk lokal
      - Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif

- Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
- Akselerasi kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*

5. **Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemantapan iklim investasi yang tumbuh dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penerapan regulasi investasi yang transparan, sederhana, dan berkeadilan
      - Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan dan pendampingan investasi
      - Penguatan investasi padat karya melalui pemberian kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor
6. **Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui platform digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (*shared production facilities*) dan gudang penyimpanan
      - Peningkatan kapasitas marketplace lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM
      - Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal
      - Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap

7. **Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Pemantapan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas penunjang produksi sesuai karakteristik dan potensi lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penataan ulang tata ruang lingkungan kumuh dengan memperhatikan kepadatan penduduk, keterjangkauan akses, dan keberlanjutan lahan
      - Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data spasial untuk memantau perkembangan kawasan kumuh secara berkala
      - Peningkatan konektivitas untuk mendukung penguatan daya saing daerah
      - Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
8. **Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Implementasi inovasi teknologi hijau pada sektor unggulan daerah guna meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi karbon menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah dan limbah berbasis sirkular ekonomi di tingkat desa dan kawasan perkotaan
      - Penguatan program inovasi desa hijau yang memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk pelestarian lingkungan
      - Penguatan inovasi pada pembuatan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
      - Peningkatan pendidikan publik tentang pola hidup rendah karbon dan kesiapsiagaan bencana
9. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional** memiliki strategi prioritas meliputi:

a. **Penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan digital, manajerial, dan pelayanan prima agar mampu memberikan layanan publik yang responsif, transparan, dan berbasis data dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Pengelolaan karier pegawai dengan membangun talent pool untuk memetakan, mengembangkan, dan mempromosikan pegawai potensial
   - Penguatan budaya kerja berbasis kinerja, profesionalisme, integritas, dan orientasi pelayanan publik
   - Membangun *Integrated Service Platform* yang menggabungkan seluruh layanan publik lintas sektor dalam satu portal digital.
   - Penguatan audit internal berbasis digital dengan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala
   - Penguatan kapabilitas inovasi
   - Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

10. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Penguatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset, pelayanan publik, dan promosi investasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
       - Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan pertumbuhan investasi daerah
       - Penguatan sistem pengawasan penggunaan aset daerah
       - Penguatan kemampuan memanfaatkan teknologi oleh ASN dalam pelayanan publik dan pemasaran investasi
11. **Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Pemantapan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan peran tokoh agama, adat, dan budaya sebagai mentor atau pembina generasi muda
- Penguatan tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati sebagai budaya sosial yang memperkuat persatuan
- Peningkatan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal untuk membentuk generasi pemimpin berintegritas
- Penguatan kelembagaan masyarakat adat dan organisasi keagamaan untuk berperan dalam pengawasan serta pengendalian dampak pembangunan

12. **Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Pemantapan keamanan terpadu melalui partisipasi masyarakat, kemitraan (pemerintah–swasta–komunitas), serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan lingkungan kondusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Peningkatan koordinasi antarinstansi keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah
        - Penguatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa

TEMA 2030

Perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Perwujudan Kebumen Berdaya Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya menjadi arah strategis pembangunan daerah yang menempatkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kelestarian lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat sebagai landasan moral, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Dengan mengoptimalkan potensi lokal di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, Kebumen akan tumbuh sebagai daerah yang mandiri dan produktif.

Di sisi lain, perwujudan visi ini juga menekankan pentingnya menjaga harmoni antara modernisasi dan pelestarian budaya daerah. Nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan seni akan terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai

identitas Kebumen yang khas, sekaligus menjadi daya tarik pariwisata dan perekat sosial masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kebumen Berdaya akan menjadi daerah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan tetap teguh pada jati diri berbudaya.

Adapun dalam tema tahun 2030 tahap V memiliki **strategi utama** yaitu:

1. **Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Perwujudan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar untuk Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Perwujudan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
      - Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif
      - Implementasi tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial yang berkualitas
      - Perwujudan pemerataan infrastruktur layanan dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan dan perlindungan kaum marjinal, serta produktivitas desa dan ekonomi berkelanjutan
      - Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
2. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Perwujudan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta akses dan fasilitasi pendidikan jenjang perguruan tinggi
      - Perwujudan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
      - Pembinaan kepemudaan dan olahraga
      - Perwujudan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan berbasis kebutuhan local

3. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Perwujudan layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen yang bermutu dan berdaya saing menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Perwujudan akses setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat
        - Perwujudan manajemen pelayanan kesehatan berbasis standar pelayanan minimal (SPM) dan prinsip keselamatan pasien
        - Perwujudan penurunan angka kesakitan dan kematian melalui layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi
        - Mengoptimalkan peran layanan kesehatan dalam mendukung produktivitas dan kualitas hidup masyarakat
4. **Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Perwujudan produktivitas daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkokoh kemandirian ekonomi daerah dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Perwujudan pembangunan infrastruktur produktif dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat
        - Perwujudan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif
        - Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
        - Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
        - Akselerasi kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match
5. **Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif** memiliki strategi prioritas meliputi:

a. **Perwujudan pertumbuhan investasi yang inklusif, produktif dan memperluas cakupan pembangunan di wilayah perdesaan menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen
   - Penguatan investasi padat karya melalui pemberian kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor

6. **Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen
      - Perwujudan *platform e-marketplace* daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional
      - Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap
7. **Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan** memiliki strategi prioritas meliputi :
   a. **Perwujudan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang wilayah, mitigasi bencana, dan prinsip keberlanjutan lingkungan yang terintegrasi menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan perumahan
      - Perwujudan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi hunian yang memenuhi standar kelayakan dengan memanfaatkan program bantuan pemerintah dan kemitraan swasta
      - Peningkatan konektivitas untuk mendukung penguatan daya saing daerah

- Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

8. **Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah** memiliki strategi prioritas meliputi :
   a. **Pemantapan pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup
      - Pemantapan penanggulangan bencana daerah dan penguatan masyarakat tanggap bencana
      - Pengendalian eksploitasi sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan
9. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional** memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. **Perwujudan pusat layanan publik terpadu berbasis digital untuk memperkuat keterjangkauan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pemerataan kesejahteraan menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Perwujudan sistem layanan publik digital yang terpadu dan transparan
      - Implementasi pengelolaan manajemen PNS berbasis sistem merit
      - Perwujudan kualitas aparatur negara yang adaptif dan inovatif
      - Pemantapan kapabilitas inovasi
      - Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
10. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
       - Perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah yang berbasis data, indikator kinerja terukur, dan prinsip *result-based management*

- Penerapan *e-government* untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.
- Integrasi tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip antikorupsi, etika publik, dan penguatan budaya pelayanan

11. **Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Perwujudan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).** Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Perwujudan penguatan karakter dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan
        - Perwujudan program pembangunan memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat
12. **Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat** memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. **Perwujudan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam kehidupan keseharian masyarakat menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)**. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Perwujudan ketertiban, keamanan, dan kerukunan masyarakat berbasis kondusivitas wilayah
        - Perwujudan forum dialog lintas agama, etnis, dan budaya secara rutin untuk memelihara harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal.

3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui *cascading* kinerja yang dimulai dari visi hingga *outcome*, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Tabel III.5
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
-1	-2	-3	-4	-5	-6
VISI KABUPATEN KEBUMEN					
KEBUMEN BERDAYA (KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA)					
Misi 1					
Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif					
	1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera			Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan	
		1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	
			1.1.1 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			1.1.3 Meningkatnya kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Sosial
			1.1.4 Meningkatnya cakupan perlindungan jaminan sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial (Dengan Satuan: Persen)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			1.1.5 Terjaminnya pemenuhan hak anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) (Dengan Satuan: Penghargaan)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			1.1.6 Meningkatnya perlindungan khusus anak	Cakupan Perlindungan Anak (Dengan Satuan: Persen)	Program Perlindungan Khusus Anak
			1.1.7 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan (Dengan Satuan: Persen)	Program Perlindungan Perempuan
			1.1.8 Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			1.1.9 Meningkatnya layanan PMKS di luar panti kewenangan kabupaten yang tertangani	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Rehabilitasi Sosial
			1.1.10 Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			1.1.11 Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengawasan Keamanan Pangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			1.1.12 Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			1.1.13 Meningkatnya angka kecukupan energi	Angka Kecukupan Energi (Dengan Satuan: Kkal)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	
			1.2.1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Pendidikan
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV (Dengan Satuan: Persen)	
			1.2.2 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Pendidikan
			1.2.3 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Pendidikan
			1.2.4 Meningkatnya pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Dengan Satuan: Nilai)	Program Pembinaan Perpustakaan
			1.2.5 Meningkatnya Cakupan Prestasi Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			1.2.6 Meningkatnya Persentase prestasi Olahraga	Persentase prestasi Olahraga (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	
			1.3.1 Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Dengan Satuan: Persen)	
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)* (Dengan Satuan: Persen)	
			1.3.2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			1.3.3 Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan (Dengan Satuan: Persen)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			1.3.4 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			1.3.5 Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Misi 2					
Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan					
	2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	
		2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah		LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
			2.1.1 Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersedian Prasarana Pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			2.1.2 Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			2.1.3 Meningkatnya kinerja penyuluhan pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyuluhan Pertanian
			2.1.4 Meningkatnya penerbitan izin usaha pertanian dan peternakan	Persentase Izin Usaha Pertanian dan Peternakan (Dengan Satuan: Persen)	Program Perizinan Usaha Pertanian
			2.1.5 Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			2.1.6 Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			2.1.7 Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			2.1.8 Meningkatnya Pengelolaan perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			2.1.9 Meningkatnya Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			2.1.10 Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Garam (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	
				Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan: Persen)	
			2.1.11 Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	
				Net Ekspor Barang dan Jasa	
			2.2.1 Meningkatnya pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Ekspor
			2.2.2 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (Dengan Satuan: Persen)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			2.2.3 Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			2.2.4 Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga (Dengan Satuan: Persen)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			2.2.5 Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (Dengan Satuan: Persen)	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			2.2.6 Tercapainya Pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pelayanan Penanaman Modal
			2.2.7 Tercapainya realisasi nilai investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi penanaman modal (Dengan Satuan: Milyar rupiah)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			2.2.8 Terlaksananya Kegiatan Usaha yang telah terverifikasi dan dilakukan Pengendalian	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			2.2.9 Meningkatnya calon pelaku usaha/penanam modal yang menginvestasikan modalnya di daerah	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal (Dengan Satuan: Persen)	Program Promosi Penanaman Modal
		2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi		LPE Kategori Industri Pengolahan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			2.3.1 Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			2.3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			2.3.3 Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			2.3.4 Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		2.4 Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata		LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	
			2.4.1 Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemasaran Pariwisata
			2.4.2 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			2.4.3 Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		2.5 Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
			2.5.1 Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lembaga LPK yang berizin (Dengan Satuan: Persen)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			2.5.2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar (Dengan Satuan: Persen)	Program Penempatan Tenaga Kerja
			2.5.3 Meningkatnya Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Hubungan Industrial
Misi 3					
Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan					
	3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif			Indeks Infrastruktur Penurunan Emisi GRK Kumulatif	
		3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	
			3.1.1 Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			3.1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh (Dengan Satuan: Persen)	Program Kawasan Permukiman
			3.1.3 Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Perumahan
			3.1.4 Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat		Indeks Infrastruktur Perhubungan	
			3.2.1 Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		3.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	
			3.3.1 Meningkatnya Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Jalan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			3.3.2 Meningkatnya Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Cakupan drainase yang tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			3.3.3 Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			3.3.4 Pengembangan Jasa Konstruksi yang terampil	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			3.3.5 Meningkatnya Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			3.3.6 Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung kantor dalam kondisi baik dan inklusif (Dengan Satuan: Persen)	Program Penataan Bangunan Gedung
		3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan		Persentase Desa Mandiri	
			3.4.1 Meningkatnya legalitas kelembagaan, partisipasi dalam musyawarah desa dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			3.4.2 Meningkatnya Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan: Persen)	Program Penataan Desa
			3.4.3 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama (misalnya jalan, pasar, atau irigasi) (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
			3.4.4 Meningkatnya Desa dengan Layanan Administrasi baik	Persentase Desa Dengan Layanan Administrasi Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			3.5.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			3.5.2 Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			3.5.3 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten (Dengan Satuan: Ha)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			3.5.4 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Persampahan
			3.5.5 Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Tingkat Kabupaten	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3 (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			3.5.6 Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			3.5.6 Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Udara yang Kualitasnya Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			3.5.7 Tercapainya Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan: Persen)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			3.5.8 Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			3.5.9 Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			3.5.10 Meningkatnya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase potensi pemanfaatan EBT (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
		3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	
			3.6.1 Meningkatnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD (Dengan Satuan: Angka)	Program Penanggulangan Bencana
			3.6.2 Meningkatnya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD (Dengan Satuan: Angka)	
			3.6.3 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD (Dengan Satuan: Angka)	
			3.6.4 Meningkatnya Penanganan korban Bencana dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Bencana

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Misi 4					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni, ngayomi,* dan *ngayemi*					
	4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan				
		4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP	
			4.1.1 Meningkatnya Kinerja ASN dengan predikat minimal baik	Persentase Kinerja ASN dengan Predikat Minimal Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Kepegawaian Daerah
			4.1.2 Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dengan satuan: Persen)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			4.1.3 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Dengan Satuan: Indeks)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Indeks Zakat Nasional (IZN) (Dengan Satuan: Poin)	
				Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			4.1.4 Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur (Dengan Satuan: Persen)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			4.1.5 Meningkatnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	
			4.1.6 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	
			4.1.7 Meningkatnya fasilitasi riset dan inovasi daerah	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Riset dan Inovasi Daerah
			4.1.8 Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			4.1.9 Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD (Dengan Satuan: Persen)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern		Nilai Maturitas SPIP	
			4.2.1 Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Indeks Pelayanan Publik	
			4.3.1 Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			4.3.2 Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Dengan Satuan: Kategori)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			4.3.3 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan: Persen)	Program Pencatatan Sipil
			4.3.4 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan. (Dengan Satuan: Persen)	Program Pendaftaran Penduduk
			4.3.5 Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan. (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			4.3.6 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			4.3.7 Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			4.3.8 Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Dengan Satuan: Indeks)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Misi 5					
Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal					
	5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan			Indeks Kebudayaan	
				Indeks Kesalehan Sosial	
		5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBtb) yang dilestarikan*	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			5.1.1 Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			5.1.2 Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kebudayaan
			5.1.3 Meningkatnya presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kurikulum
		5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan		Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	
				Indeks Ketertiban Umum	
			5.2.1 Terlaksananya penyelesaian pelanggaran trantibum dan pelindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			5.2.2 Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			5.2.3 Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			5.2.4 Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			5.2.5 Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			5.2.6 Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			5.2.7 Telaksananaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan: Persen)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

3.2.3 Program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2025-2029

A. Program Unggulan dan Prioritas Bupati

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat. Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program Unggulan KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel III.6
Keterkaitan Program Unggulan KDH Kabupaten Kebumen dengan Program Prioritas RPJMD

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
1.	**Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge**	Meningkatkan kualitas dan mempermudah akses pendidikan untuk semua, diantaranya melalui: perbaikan data base, peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah wilayah pinggiran, peningkatan kualitas kurikulum lokal, bea siswa miskin dan/ atau prestasi, insentif guru di wilayah pinggiran/ perbatasan, fasilitasi pembiayaan pendidikan jenjang perguruan tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora
			Program Pembinaan Perpustakaan	Disarpus
		Meningkatkan kualitas derajat Kesehatan masyarakat melalui kualitas dan kemudahan akses layanan, peningkatan Kesehatan ibu dan anak, fasilitasi sarana transportasi pasien 24 jam, insentif tenaga Kesehatan di wilayah pinggiran/perbatasan, dan peningkatan sarana prasarana yang memadahi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
2.	**Mangan Wareg dan Bergizi**	Meningkatkan kualitas pangan dan gizi melalui: percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, gizi buruk melalui pemenuhan makan bergizi anak, serta gizi keluarga terutama lansia.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Distapang
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
3.	**Sregep Ngode**	Program perluasan lapangan kerja minimal 5000 tenaga kerja melalui upaya mendekatkan investasi pada wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, memberikan akses tenaga kerja difabel, perempuan, dan masyarakat marjinal lainnya, dan fasilitasi pembiayaan calon pekerja migran	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
4.	**Biyunge Momong**	Program ini difokuskan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan, diantaranya penyandang disabilitas, lansia, anak, warga miskin, dan KDRT.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos P3A
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinkes PPKB

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
5.	**Perempuan Berdaya**	Program ini dikhususkan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan kesempatan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, peminggiran, dan diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan menjadi berdaya, kritis, dan mandiri.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinsos P3A
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
			Program Perlindungan Perempuan	
6.	**Plesir Bareng & Bakulan Laris**	Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergisitas pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan pedagang kecil guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat melalui : optimalisasi tatakelola wisata milik daerah, mendorong wisata berbasis masyarakat, bela dan beli produk Kebumen, optimalisasi kerjasama pengembangan wisata Kawasan geopark, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga lainnya	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Disperindag KUKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
7.	**Petani Makmur dan Swadaya Pangan**	Program ini diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan,pemberdayaan petani, dan pembiayaan sektor pertanian secara menyeluruh dan meringankan beban petani, mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: pengadaan bibit, pendampingan, dan memfasilitasi kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak terkait	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distapang
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DLHKP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
8.	**Njamu Bergas**	Akronim: Gawe Jalan, Jembatan Mulus, Air Bersih dan Irigasi. Program percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong - kantong kemiskinan dan wilayah strategis pengembangan ekonomi, seperti: jalan, jembatan, air bersih, irigasi dan infrastruktur dasar yang meliputi: akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak yang strategi pelaksanaannya disesuaikan kondisi geografis.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Disperkimhub
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
9.	**Lingkungan Bersih Lestari**	Program pelestarian lingkungan hidup, Pengurangan Kawasan kumuh dan ketahanan bencana yang akan dilakukan melalui: pemberdayaan masyarakat dalam gerakan sadar menanam, Desa Tangguh Bencana, program stimulan ADD dan/atau BHPR berbasis ekologi, dan mendorong pembangunan ramah bencana, serta memperkuat kerjasama sinergis dengan program pengembangan kawasan geopark, dalam hal pemberdayaaan, edukasi, dan konservasi.	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Kawasan Permukiman	Disperkimhub
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHKP
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Program Pengelolaan Persampahan	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Program Penanganan Bencana	Dinsos P3A
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
10.	**ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif**	Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui sistem merit menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Program Pendaftaran Penduduk	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
11.	**Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge**	Program ini pada hakikatnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif melalui talkshow, kongkow, media sosial, media pengaduan, temu kangen dengan masyarakat, dan peningkatan kualitas forum musyawarah perencanaan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
12.	**Desa Berdaya**	Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
			Program Penataan Desa	
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
13.	**Anak Soleh**	Merupakan program untuk memfasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan guna mencetak anak yang soleh/ berbudi luhur, melalui sosialisasi ayo mondok/ ngaji/ sekolah agama, fasilitasi legalitas hukum kelembagaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas, bea siswa, insentif ustadz/ guru, dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes PPKB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
14.	**Muda Kreatif (Anake Biyunge)**	Program diarahkan untuk meningkatkan peran serta aktif anak muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan sector strategis lainnya serta membangun Kebumen Tecno Kreatif sebagai bentuk penghargaan terhadap ruang ekspresi kaum muda untuk menggerakkan inovasi pengembangan Kebumen berbasis digital.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Disdikpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
15.	**Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**	Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembagan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa,seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud
			Program Pengembangan Kebudayaan	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua PD
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas	PD Pengampu
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

3.2.4 Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Arahan Nasional dan Provinsi

3.2.4.1 Arahan Nasional

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat dua pembagian kawasan dengan total sejumlah 19 kawasan yang berada di Kabupaten Kebumen, yaitu:

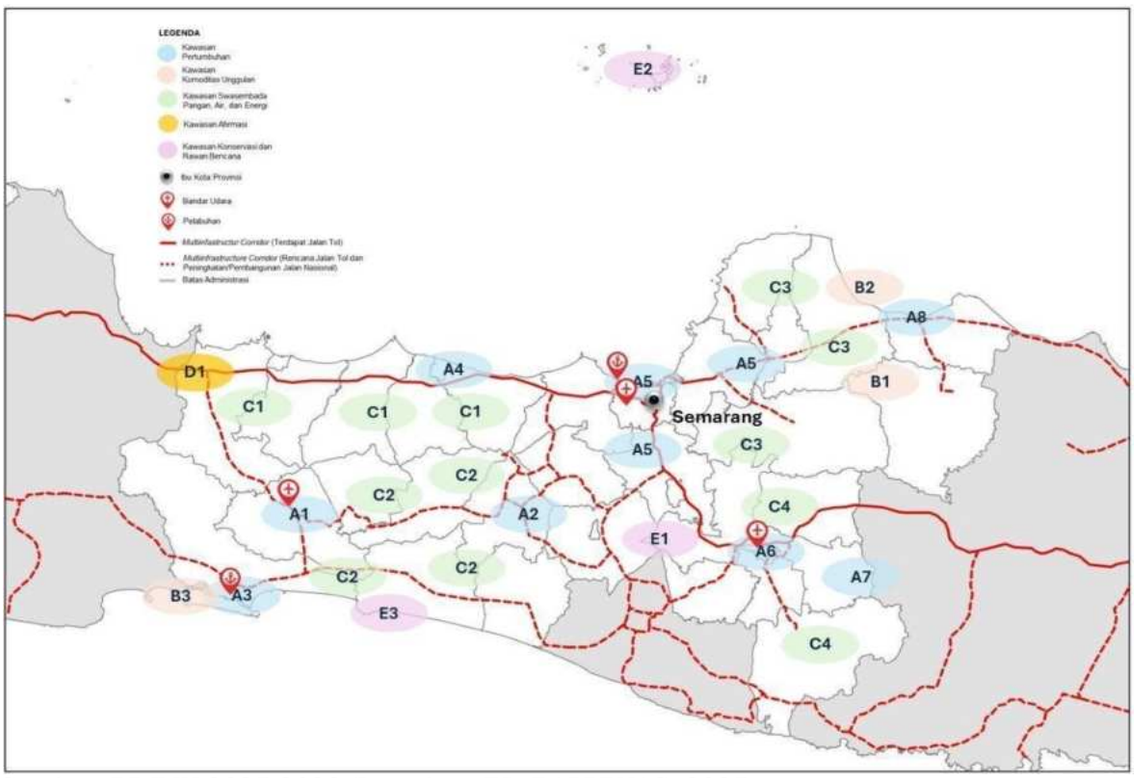
1. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

   Wilayah kawasan swasembada pangan, air, dan energi dieng-serayu-bogowonto (Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, **Kabupaten Kebumen**, Kabupaten Purworejo)

2. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

   Wilayah kawasan konservasi *Geopark* Kebumen yaitu meliputi:

   a. Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem.
   b. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi.
   c. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan.
   d. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi.
   e. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

Gambar III.4
Pengembangan Kewilayahan di Jawa Tengah pada RPJMN 2025-2029

b. Arahan Program Strategis Nasional

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengakomodasi dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional.

Program Strategis Nasional merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN dan RKP. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun dukungan Kabupaten Kebumen pada arahan ini sebagai berikut:

Tabel III.7
Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Sekolah rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Pembangunan 3 juta rumah	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan Pangan	Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
Kesehatan untuk Semua	Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Makan bergizi gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM
	Kemudahan perizinan di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

3.2.4.2 Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

a. Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 35 Program Delegasi yang menjadi prioritas pembangunan lintas kabupaten/kota. Kabupaten Kebumen menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program-program tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam program prioritas daerah serta inisiatif unggulan Bupati Kebumen. Dukungan ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur desa, peningkatan layanan sosial dan kesehatan, hingga reformasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan inklusif. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8
Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
EKONOMI	Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan *sport center* dengan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten/kota.	Muda Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Sregep Ngode	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Perempuan Berdaya	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.	Plesir Bareng & Bakulan Laris	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Sregep Ngode	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Ekosistem ekonomi syariah: Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.	Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Plesir Bareng & Bakulan Laris	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	Subsidi modal dan pendampingan UMKM (1 RT 1 Kelompok UMKM).	Plesir Bareng & Bakulan Laris	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau.		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa.		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	BUMDes Berdaya: Kepastian hukum dan bantuan modal usaha bagi setiap BUMDes di Jawa Tengah.	Desa Berdaya	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
INFRASTRUKTUR	Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni: Program "1 KK 1 Rumah Layak Huni", pengembangan pusat rekreasi, promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi menjadi 30Persen kewenangan kabupaten/kota dan 20Persen desa.	Lingkungan Bersih Lestari	Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Njamu Bergas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas: Dibangun di setiap kecamatan.	Biyunge Momong	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Perlindungan Perempuan
	Pengembangan Wisata: Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru.	Plesir Bareng & Bakulan Laris	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Desa mandiri energi: Pengembangan bio gas, hydro, dan tenaga surya.	Lingkungan Bersih Lestari	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling, puskesmas pembantu, dan layanan kesehatan di setiap desa.	Sehat dan Cerdas Bareng Biyunge	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
LINGKUNGAN	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun wilayah desa.	Lingkungan Bersih Lestari	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat.		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana		Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Penanganan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
SUMBER DAYA MANUSIA	Sekolah Unggulan: Mendorong sekolah unggulan di setiap kecamatan.	Anak Soleh	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi: Pelatihan berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK).	ASN Nyaman, Terampil, Dan Inovatif	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Cek kesehatan gratis.	Sehat dan Cerdas Bareng Biyunge	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin.	Biyunge Momong	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengembangan tambak ikan nila.	Petani Makmur Dan Swadaya Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan.	Sehat dan Cerdas Bareng Biyunge	Program Pengelolaan Pendidikan
	Peningkatan pelatihan sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.	Petani Makmur Dan Swadaya Pangan	Program Perizinan Usaha Pertanian

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan.	Perempuan Berdaya	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata.	Muda Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan.	Anak Soleh	Program Pengelolaan Pendidikan
	Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan.	Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Penyediaan minimal 1 dokter dan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu.	Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Peningkatan kualitas hidup lansia.	Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Taruna Karya Mandiri: Program Kartu Zilenial untuk membuka lapangan kerja.	Muda Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga.	Muda Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

FOKUS	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM UNGGULAN BUPATI	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas ASN dan perangkat desa.	ASN Nyaman, Terampil, Dan Inovatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak.	Biyunge Momong	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Perlindungan Perempuan
	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI, dan P-IRT secara gratis.	Mangan Wareg Dan Bergizi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Desa maju dan berdaya: Pengembangan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, sistem informasi desa (SID), dan tim tanggap bencana.	Desa Berdaya	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Desa Berdaya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Peningkatan operasional kader Posyandu.	Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

b. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. 10 (sepuluh) WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. WP Cibalingmas, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
3. WP Petanglong, meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
4. WP Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
5. WP Jekuti, meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
6. WP Banglor, meliputi: Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
7. WP Wonobanjar, meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
8. WP Keburejo, meliputi: **Kabupaten Kebumen** dan Kabupaten Purworejo;
9. WP Gelangmanggung, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
10. WP Subosukawonosraten, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Keburejo berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

a. Pengembangan *Geo-Tourism* (*Geopark* Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY

1) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:

a) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Kutoarjo – Borobudur yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api (Prameks Yogyakarta – Kutoarjo) serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata (Borobudur) dan perindustrian.
b) Penyelesaian pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perekonomian (sebagai DTW dan Sentra Oleh-Oleh UMKM serta Pusat Kuliner Khas Kebumen dan Purworejo).
c) Fasilitasi dorongan perpanjangan layanan Kereta Api Prameks dari semula Yogyakarta – Kutoarjo menjadi Yogyakarta – Kutoarjo – Kebumen.
d) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan Mandiraja – Gombong.
e) Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi pendukung akses dan konektivitas untuk pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang; akses ke Jalan Nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY.
f) Mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan keselamatan jalan wisata Pantai *Geopark* Karangsambung Karangbolong- KSPN Dieng.

2) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
a) Pengembangan daya tarik wisata *Geopark* Karangsambung dan Pantai.
b) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya.
c) Pengembangan desa wisata *Geopark* Kebumen.
d) Pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang.

b. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kelapa, tanaman pangan, garam, daging, perikanan tangkap, dan budi daya)

1) Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
a) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana diantaranya: alat mesin pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; Pengembangan korporasi produksi.

b) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) dan saluran irigasi pergaraman.

c) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung DAS Kalong.

d) Mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian (sistem kolaborasi pertanian swasta).

2) Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:

a) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian.

b) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan.

c) Pemasaran dan branding produk.

d) Pengembangan pelabuhan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran.

c. Inisiasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kebumen

1) Fasilitasi promosi investasi kawasan industri Kebumen.

2) Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan untuk menjawab isu permasalahan strategis di WP Keburejo, antara lain sebagai berikut:

1) Lingkup Sosial dan Kependudukan

a) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan Swasta serta program jambanisasi;

b) Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi unggulan dan mendorong sekolah inklusif;

c) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2) Lingkup Perekonomian

a) Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
b) Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
c) Mendorong investasi yang mendukung potensi wilayah yang sejalan kebijakan geopark.

3) Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

a) Mendorong optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Keburejo (SPAM) Regional Keburejo;
b) Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
c) Mendorong sinergi pengelolaan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
d) Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir selatan;
e) Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
f) Pengembangan *Geopark* melalui jelajah *Geopark/ Geoheritage*, serta peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark*;
g) Mendukung dan memfasilitasi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

3.2.5 Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen

Adapun kebijakan pengembangan di wilayah Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam Perda RTRW adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
   a. Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya dengan strategi:
      - mengembangkan Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
      - mengembangkan Kawasan Perdesaan sebagai penyangga Kawasan Perkotaan; dan
      - meningkatkan keterkaitan antarkawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya.
   b. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung Agrobisnis dan pariwisata dengan strategi:
      - Mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh;
      - Mengembangkan sistem jaringan energi;

- Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
- Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
- Mengembangkan jaringan prasarana untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan.

2. Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
   a. Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung
      - Pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dengan strategi:
        - Mempertahankan, melestarikan, dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung;
        - Menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
        - Menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;
        - Melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air
      - Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup dengan strategi:
        - Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
        - Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
        - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
   b. Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya
      - Pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan dengan strategi:
        - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budi daya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
        - Meningkatkan peran Kawasan hutan produksi;
        - Mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat untuk mewujudkan nilai tambah daerah;

- Mengembangkan Kawasan pertanian sebagai pusat Agrobisnis;
- Menetapkan dan melestarikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan;
- Mengembangkan Kawasan perikanan;
- Mengendalikan kegiatan di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- Mengembangkan kegiatan pada Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi;
- Mengembangkan Kawasan Pariwisata;
- Mengembangkan dan mengendalikan Kawasan permukiman;
- Menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30 persen dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20 persen Ruang Terbuka Hijau publik dan 10 persen Ruang Terbuka Hijau privat; dan
- Mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30 persen.

o Peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- Mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

3. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

a. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing dengan strategi:

- Menetapkan Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- Mengembangkan dan meningkatkan pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri; dan
- Mengoptimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten.

b. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya dengan strategi:
   - Menetapkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
   - Mengembangkan dan meningkatkan nilai Kawasan Kota Pusaka Gombong dengan menambah kegiatan pendukung yang sesuai.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodisasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya, yang termuat dalam lampiran sub-bab ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel IV.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.014.546.876.968**		**2.061.935.531.700**		**2.136.565.241.545**		**2.202.398.037.818**		**2.223.817.799.782**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**1.088.188.194.721**		**1.112.700.650.486**		**1.158.433.919.733**		**1.202.651.499.758**		**1.225.880.219.740**		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					858.750.568.721		875.583.559.486		911.980.928.733		953.229.075.758		985.090.795.740	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67,54	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	90,30	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					222.167.806.000		231.130.398.800		240.466.298.800		243.435.732.068		234.802.732.336	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Dengan Satuan:Persen)	44,77	44,77	44,80		44,83		44,86		44,89		44,92		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (Dengan Satuan:Persen)	71,12	78,06	79,06		80,06		81,06		82,06		83,06		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Dengan Satuan:Persen)	103,71	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B (Dengan Satuan:Persen)	85,03	85,03	86,03		87,03		88,03		89,03		90,03		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					80.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah /seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah /seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (Dengan Satuan:Persen) *(B16)	64,07	64,31	64,55		65,04		65,52		66,00		66,48		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					7.149.820.000		5.846.692.200		5.846.692.200		5.846.691.932		5.846.691.664	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (Dengan Satuan:Persen)	16,37	16,37	16,59		16,81		17,03		17,25		17,47		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Presentase Pengajuan Izin yang dilayani	Presentase Pengajuan Izin yang dilayani (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**578.373.202.245**		**589.618.743.299**		**602.191.369.265**		**615.099.803.575**		**626.330.222.409**		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					424.462.248.406		434.420.954.264		445.877.248.011		457.578.916.743		467.959.667.969	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinkes PPKB)(Dengan Satuan:Nilai)	72,15	72,20	72,25		72,30		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dinkes PPKB) (Dengan Satuan:Indeks)	89,24	89,30	89,40		89,50		89,60		89,75		90,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (RSUD Dr. Soedirman) (Dengan Satuan:Nilai)	70,35	70,35	71,00		71,27		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (RSUD Prembun) (Dengan Satuan:Nilai)	74,70	74,75	74,80		74,85		74,90		74,95		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (RSUD Prembun) (Dengan Satuan:Indeks)	91,45	91,46	91,47		91,48		91,49		91,50		91,51		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (RSUD Dr. Soedirman) (Dengan Satuan:Indeks)	87,20	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					150.860.165.839		152.055.473.135		153.036.924.254		154.101.602.832		154.801.489.440	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (Dengan Satuan: Persen)	NA	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Dengan Satuan: Persen	84,41	93,61	93,61		94,00		94,00		94,00		95,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)* (Dengan Satuan: Persen)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		92,25		92,81		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.983.818.000		2.043.333.900		2.113.349.000		2.186.336.000		2.262.470.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan: Persen)	93,74	94,00	94,25		94,50		94,75		95,00		95,25		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					557.948.000		574.688.000		605.317.000		637.666.000		671.841.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan (Dengan Satuan: Persen)	74,67	76,33	78,00		79,67		81,33		83,00		84,67		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					509.022.000		524.294.000		558.531.000		595.282.000		634.754.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat (Dengan Satuan: Persen)	16,50	17,00	19,00		21,00		23,00		25,00		27,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**293.624.939.667**		**307.154.270.389**		**308.714.422.314**		**311.363.869.922**		**313.131.478.041**		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.700.012.656		27.349.170.287		29.329.079.639		28.197.757.848		28.926.753.781	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	71,00	71,00	72,00		72,51		73,76		75,00		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	90,40	90,40	90,45		90,50		90,55		90,60		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					19.196.501.000		25.225.000.000		29.385.000.000		25.385.000.000		25.385.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan: Persen)	78,75	78,75	79,98		81,18		82,38		83,58		83,58		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					9.550.000.000		9.400.000.000		9.400.000.000		9.400.000.000		9.200.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM (Dengan Satuan: Persen)	2,65	3,17	3,70		4,23		4,76		5,29		5,82		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					34.936.200.000		19.900.000.000		20.000.000.000		19.550.000.000		20.000.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Cakupan drainase yang tertangani (Dengan Satuan: Persen)	0,20	0,78	0,65		0,48		1,18		1,85		1,05		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					8.230.000.000		20.730.000.000		10.730.000.000		6.730.000.000		20.730.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Inklusif (Dengan Satuan: Persen)	82,15	82,15	83,86		83,88		83,90		83,92		83,94		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.918.148.840		2.350.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.550.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Tertanganinya bangunan gedung+bangunan SPAM yang membutuhkan DED	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani (Dengan Satuan: Persen)	15,00	15,00	16,00		17,00		18,00		19,00		20,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					188.454.077.171		200.560.100.102		205.805.342.675		217.661.112.074		204.699.724.260	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan: Persen)	70,65	70,65	75,94		78,37		80,68		82,52		84,36		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil (Dengan Satuan: Persen)	55,08	64,92	65,16		65,24		65,32		65,48		65,48		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.340.000.000		1.340.000.000		1.415.000.000		1.790.000.000		1.340.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan: Persen)	65,71	73,90	79,00		84,00		88,96		93,93		97,62		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**6.394.805.600**		**5.492.131.750**		**5.488.282.150**		**5.574.819.691**		**5.621.422.603**		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.271.602.000		1.741.206.550		1.741.206.550		1.788.037.336		1.794.936.428	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					748.942.000		473.445.300		473.445.300		489.979.753		506.679.550	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (Dengan Satuan: Persen)	0,00	1,21	2,42		3,63		4,84		6,05		4,76		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2.252.576.000		2.085.704.800		2.085.704.800		2.094.761.848		2.103.909.466	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan: Persen)	3,46	10,29	11,47		12,96		14,89		17,50		21,21		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.121.685.600		1.191.775.100		1.187.925.500		1.202.040.754		1.215.897.159	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Dengan Satuan: Persen)	3,67	5,93	11,95		17,97		23,98		29,99		30,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**32.862.170.575**		**31.651.429.346**		**31.602.976.494**		**34.122.323.844**		**34.075.097.692**		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.260.022.490		13.724.036.740		15.921.775.736		18.232.661.204		18.850.065.470	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP) (Dengan Satuan:Nilai)	72,10	72,20	72,30		72,40		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Satpol PP) (Dengan Satuan:Indeks)	90,30	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.565.245.960		7.974.907.174		6.018.038.773		5.797.872.853		4.926.939.266	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					577.858.168		908.409.050		430.501.003		515.074.803		518.691.093	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	22,00	29,00	43,00		61,00		81,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.250.740.227		5.426.287.189		5.333.344.619		5.780.142.315		5.812.389.411	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BPBD) (Dengan Satuan:Nilai)	70,20	70,50	71,27		72,00		73,00		74,00		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (BPBD) (Dengan Satuan:Indeks)	90,30	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.208.303.730		3.617.789.193		3.899.316.363		3.796.572.669		3.967.012.452	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD (Dengan Satuan:Angka)	0,75	0,75	0,76		0,77		0,78		0,79		0,80		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD (Dengan Satuan:Angka)	0,85	0,85	0,86		0,87		0,88		0,89		0,90		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD (Dengan Satuan:Angka)	0,88	0,88	0,89		0,90		0,91		0,92		0,93		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**15.103.564.160**		**15.318.306.430**		**30.134.271.589**		**33.585.721.028**		**18.779.359.297**		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.611.252.537		6.059.675.257		7.328.649.966		7.766.330.545		6.582.126.914	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68,78	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	85,00	85,00	85,50		86,00		86,50		87,00		87,50		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					101.467.000		101.467.000		1.394.167.000		1.404.167.000		101.467.000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	72,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					3.190.000		10.000.000		60.000.000		40.000.000		10.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.277.615.223		2.993.115.223		8.828.615.223		11.852.384.083		4.640.725.983	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya layanan PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.506.047.400		5.526.047.400		6.413.847.400		6.413.847.400		6.536.047.400	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya cakupan perlindungan jaminan sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial (Dengan Satuan: Persen)	80,27	80,27	92,00		92,00		92,00		92,00		92,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					583.611.000		607.620.550		6.088.611.000		6.088.611.000		888.611.000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					20.381.000		20.381.000		20.381.000		20.381.000		20.381.000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Meningkatnya Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persentase TMP yang Dikelola (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**253.145.211.000**		**221.838.055.281**		**223.555.168.218**		**224.011.763.722**		**230.823.116.977**		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**8.719.604.588**		**8.916.859.982**		**9.185.156.965**		**9.516.176.074**		**9.740.196.742**		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.151.898.588		7.340.359.982		7.596.156.965		7.878.176.074		8.091.996.742	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67,54	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	90,40	90,40	90,45		90,50		90,55		90,60		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					14.000.000		15.000.000		59.000.000		29.500.000		17.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan besar yang telah menyusun RTK Mikro (Dengan Satuan: Persen)	12,90	19,35	35,48		51,61		67,74		83,87		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					804.806.000		789.000.000		755.000.000		808.000.000		816.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lembaga LPK yang berizin (Dengan Satuan: Persen)	96,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					326.400.000		349.000.000		351.000.000		371.000.000		377.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar (Dengan Satuan: Persen)	26,02	26,52	27,02		27,52		28,02		28,52		29,02		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.500.000		423.500.000		424.000.000		429.500.000		437.700.000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dengan Satuan: Persen) *(B49)	37,36	41,19	44,95		47,27		49,72		52,29		54,29		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**572.500.680**		**489.072.220**			**889.072.220**		**782.276.220**		**802.276.220**	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					218.039.680		164.344.000		164.344.000		164.344.000		164.344.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Dengan Satuan:Persen)	18,38	18,38	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					114.332.000		79.332.000		79.332.000		89.332.000		99.332.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					10.636.000		10.636.000		10.636.000		10.636.000		10.636.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Dengan Satuan:Persen)	18,36	18,36	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					6.805.000		6.805.000		6.805.000		10.805.000		10.805.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					170.973.000		176.240.220		376.240.220		205.444.220		205.444.220	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) (Dengan Satuan:Penghargaan)	Madya	Madya	Madya		Nindya		Nindya		Utama		Utama		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					51.715.000		51.715.000		251.715.000		301.715.000		311.715.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Cakupan Perlindungan Anak (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**25.393.733.015**		**26.616.746.330**		**27.680.283.145**		**29.097.015.374**		**30.157.683.131**		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.225.233.015		25.108.246.330		26.171.783.145		27.588.515.374		28.649.183.131	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,60	77,61	77,69		77,77		77,85		77,93		78,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	89,61	90,45	90,50		90,55		90,60		90,65		90,70		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					440.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000		840.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan: Persen)	89,50	89,50	89,76		90,29		90,81		91,34		91,86		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					472.000.000		472.000.000		472.000.000		472.000.000		472.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi (Dengan Satuan: Kkal/Perkapita/Hari)	3645,56	3650,56	3655,56		3660,56		3665,56		3670,56		3675,56		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					216.500.000		96.500.000		96.500.000		96.500.000		96.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (Dengan Satuan: Persen)	30,43	45,65	54,35		63,04		71,74		80,43		89,13		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman (Dengan Satuan: Persen)	92,75	92,94	93,53		94,12		94,71		95,29		95,88		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Meningkatnya Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan: Persen)	NA	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**59.281.606.994**		**43.559.644.107**		**33.937.240.062**		**35.607.156.276**		**36.492.470.626**		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.261.002.704		22.391.424.000		23.199.911.062		24.523.142.276		25.253.786.626	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	85,15	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	72,60	72,80	73,00		73,20		73,50		74,00		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					156.901.000		50.984.000		50.737.000		202.362.000		202.810.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					635.686.000		476.778.000		459.832.000		484.449.000		485.634.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik (Dengan Satuan: Persen)	16,00	24,00	32,00		40,00		48,00		56,00		64,00		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Udara yang Kualitasnya Baik (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					18.274.286.000		1.815.679.000		1.815.619.000		1.888.345.000		1.960.529.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten (Dengan Satuan:Ha)	33.369,031	33.369,031	33.369,111		33.369,191		33.369,271		33.369,351		33.369,431		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					27.200.000		27.200.000		27.068.000		26.623.000		26.623.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Tingkat Kabupaten	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3 (Dengan Satuan:Persen)	33,33	43,67	54,02		65,51		77,01		88,50		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					42.417.000		24.565.000		24.445.000		25.228.000		25.444.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	23,11	32,55	41,98		51,42		60,85		70,28		79,72		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.944.000		14.285.000		14.215.000		14.670.000		14.795.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	16,74	21,30	22,61		23,91		25,22		26,52		27,83		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					10.004.000		8.963.000		8.919.000		9.205.000		9.284.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Tercapainya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:Persen)	3,48	3,48	3,48		3,48		3,48		3,48		3,48		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					9.652.000		8.648.000		8.606.000		8.881.000		8.957.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					17.838.514.290		18.741.118.107		8.327.888.000		8.424.251.000		8.504.608.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah (Dengan Satuan:Persen)	5,17	10,25	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**8.454.115.651**		**8.661.202.101**		**8.915.226.709**		**9.275.316.245**		**9.508.708.533**		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.762.446.271		6.000.207.132		6.276.492.740		6.594.330.317		6.828.960.366	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	74,50	74,55	74,60		74,65		74,70		74,75		74,80		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipi
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	90,20	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipi
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.789.000.000		1.842.670.000		1.892.952.000		1.929.744.000		1.967.639.000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan. (Dengan Satuan:Persen)	80,65	80,80	81,83		82,85		83,88		84,90		85,93		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipi
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					95.500.000		98.365.000		101.316.000		104.357.000		107.489.000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipi
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil. (Dengan Satuan:Persen)	99,84	99,88	99,90		99,91		99,93		99,94		99,95		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipi

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					807.169.380		719.959.969		644.465.969		646.884.928		604.620.167	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan. (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipi
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**13.771.649.605**		**14.812.235.884**		**19.069.304.360**		**14.404.843.818**		**14.640.768.027**		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.494.942.605		5.619.832.884		5.845.328.360		6.084.646.818		6.246.771.027	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73,45	73,46	73,47		73,48		73,49		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	92,47	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA					25.750.000		22.750.000		25.750.000		25.750.000		25.750.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan: Persen)	NA	18,49	34,79		51,09		67,39		83,70		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					1.075.200.000		1.072.200.000		1.360.700.000		1.075.200.000		1.078.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama (misalnya jalan, pasar, atau irigasi) (Dengan Satuan: Persen)	NA	20,00	40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					6.101.757.000		6.936.453.000		6.043.026.000		6.138.247.000		6.201.247.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Desa dengan Layanan Administrasi baik	Persentase Desa dengan Layanan Administrasi baik (Dengan Satuan: Persen)	NA	73,75	75,00		76,25		77,50		78,75		79,25		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.074.000.000		1.161.000.000		5.794.500.000		1.081.000.000		1.089.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya legalitas kelembagaan, partisipasi dalam musyawarah desa dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik (Dengan Satuan: Persen)	NA	25,00	27,50		30,00		32,50		35,00		37,50		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**18.543.844.000**		**19.074.802.000**		**19.688.791.000**		**20.326.759.000**		**21.039.938.000**		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					894.100.000		921.863.000		977.790.000		1.037.498.000		1.151.273.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR 15-19) (Dengan Satuan:Angka)	15,70	14,50	14,25		14,00		13,75		13,56		13,23		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					10.332.256.000		10.632.121.000		10.974.250.000		11.328.753.000		11.696.168.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)* (Dengan Satuan: Persen)	67,11	67,20	67,30		67,35		67,40		67,45		67,50		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksanya Pembinaan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need)*	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need)* (Dengan Satuan: Persen)	11,80	10,50	10,20		10,00		9,50		8,50		8,50		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terlaksananya pembinaan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Dengan Satuan: Persen)	88,31	88,35	88,40		88,45		88,50		88,60		88,70		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.317.488.000		7.520.818.000		7.736.751.000		7.960.508.000		8.192.497.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Dengan Satuan: Persen)	59,87	61,00	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**31.671.920.489**		**32.013.532.125**		**32.962.768.507**		**34.534.106.129**		**35.288.345.834**		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.279.743.381		13.742.187.887		14.335.727.326		15.077.174.309		15.602.355.212	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67,54	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	75,08	78,40	84,65		85,36		86,03		86,72		87,40		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					18.392.177.108		18.271.344.238		18.627.041.181		19.456.931.820		19.685.990.622	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dengan Satuan: Persen)	75,30	79,78	88,31		89,04		89,77		90,50		91,25		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**9.882.505.605**		**10.150.743.823**		**10.443.356.161**		**10.876.449.221**		**11.159.175.762**		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.642.193.605		5.836.080.823		6.103.611.161		6.470.869.221		6.711.986.762	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	71,00	71,00	72,00		72,51		73,76		75,00		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	90,40	90,40	90,45		90,50		90,55		90,60		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.817.000.000		1.817.000.000		1.817.000.000		1.847.000.000		1.862.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Dengan Satuan: Kategori)	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif		Informatif		Informatif		Informatif		Informatif		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.423.312.000		2.497.663.000		2.522.745.000		2.558.580.000		2.585.189.000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**22.545.352.460**		**18.435.836.080**		**19.120.697.319**		**20.043.165.184**		**20.619.659.097**		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.249.880.460		16.791.305.080		17.423.197.319		18.284.165.184		18.812.659.097	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73,70	73,80	73,81		73,82		73,83		73,84		73,85		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	94,29	94,30	94,31		94,32		94,33		94,34		94,35		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					13.000.000		14.447.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (Dengan Satuan: Persen)	NA	0,74	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					30.000.000		40.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (Dengan Satuan: Persen)	0,82	3,54	6,27		13,49		18,71		24,11		31,38		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					285.000.000		120.000.000		145.000.000		165.000.000		210.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi (Dengan Satuan: Persen)	24,80	25,34	25,89		26,43		26,98		27,52		28,07		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					102.000.000		70.000.000		77.500.000		88.000.000		95.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (Dengan Satuan: Persen)	11,82	11,76	12,74		13,20		13,72		14,24		14,78		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.865.472.000		1.400.084.000		1.410.000.000		1.415.000.000		1.410.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro (Dengan Satuan: Persen)	NA	1,95	2,08		2,21		2,33		2,44		2,54		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.064.421.547**		**5.214.269.824**		**5.395.768.120**		**5.630.907.877**		**5.788.990.978**		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.670.677.547		4.816.069.824		4.995.336.120		5.220.957.877		5.375.883.978	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (Dengan Satuan: Nilai)	76,65	76,69	76,73		76,77		76,80		76,84		76,88		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai IKM perangkat daerah (Dengan Satuan: Indeks)	90,18	90,23	90,27		90,32		90,36		90,41		90,45		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					45.000.000		45.700.000		45.954.000		47.180.000		47.980.000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Tercapainya realisasi nilai investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi penanaman modal (Dengan Satuan: Milyar rupiah)	686,76	752,00	825,32		907,85		1.000,91		1.106,00		1.224,90		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					178.044.000		179.500.000		180.150.000		183.670.000		184.420.000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya calon pelaku usaha/penanam modal yang menginvestasikan modalnya di daerah	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal (Dengan Satuan: Persen)	10,00	10,00	18,18		23,08		25,00		25,00		28,00		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					100.700.000		101.700.000		102.257.000		105.062.000		105.847.000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Tercapainya Pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan (Dengan Satuan: Persen)	90,49	92,50	92,50		92,50		92,50		92,50		92,50		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					58.000.000		59.100.000		59.680.000		61.296.000		61.985.000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Terlaksananya Kegiatan Usaha yang telah terverifikasi dan dilakukan Pengendalian	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					12.000.000		12.200.000		12.391.000		12.742.000		12.875.000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Tersusunnya Dokumen hasil pengolahan dan pengkajian data penanaman modal yang mudah diakses	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**32.129.010.000**		**17.287.230.000**		**19.212.330.000**		**16.190.897.000**		**14.823.897.000**		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					472.925.000		890.683.000		1.008.442.000		1.126.200.000		1.243.958.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	34,42	34,42	69,77		72,09		74,42		76,74		76,74		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					31.295.631.000		16.018.928.000		17.809.105.000		14.652.749.000		13.167.991.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya Persentase prestasi Olahraga	Persentase prestasi Olahraga (Dengan Satuan: Persen)	31,10	32,17	34,21		36,10		38,34		40,11		42,13		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					360.454.000		377.619.000		394.783.000		411.948.000		411.948.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya Cakupan Prestasi Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan (Dengan Satuan: Persen)	66,67	66,67	66,67		66,67		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**34.000.000**		**34.000.000**		**34.000.000**		**54.000.000**		**60.000.000**		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					34.000.000		34.000.000		34.000.000		54.000.000		60.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Dengan Satuan: Predikat)	Baik	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Memuaskan		Memuaskan		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**86.000.000**		**86.000.000**		**86.000.000**		**106.000.000**		**116.000.000**		
2.21.02	ROGRAM ENYELENGGARAAN ERSANDIAN UNTUK ENGAMANAN INFORMASI					86.000.000		86.000.000		86.000.000		106.000.000		116.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI (Dengan Satuan: Kategori)	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**10.515.715.559**		**9.852.203.639**		**10.138.132.193**		**10.550.055.144**		**13.425.934.336**		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.728.205.559		9.014.203.639		9.299.632.193		9.672.055.144		9.925.934.336	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	72,35	74,20	74,25		74,30		74,35		74,40		74,45		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	88,38	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.607.510.000		674.000.000		674.500.000		702.000.000		800.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Dengan Satuan: Persen) *(B18)	84,78	85,43	86,09		86,74		87,39		88,04		89,13		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					180.000.000		164.000.000		164.000.000		176.000.000		2.700.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah (Dengan Satuan: Persen	1,34	1,51	1,59		1,70		1,81		2,14		2,16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**6.182.330.807**		**6.335.108.166**		**6.498.472.457**		**6.715.540.160**		**6.857.072.691**	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.860.930.807		5.000.794.166		5.164.158.457		5.361.440.160		5.496.172.691	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	90,30	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68,78	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.243.000.000		1.259.877.000		1.259.877.000		1.278.500.000		1.285.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Dengan Satuan: Nilai)	80,77	80,80	80,90		81,00		81,10		81,20		81,30		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					78.400.000		74.437.000		74.437.000		75.600.000		75.900.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**196.900.000**		**198.569.000**		**198.569.000**		**201.100.000**		**202.000.000**		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					166.900.000		168.569.000		168.569.000		170.100.000		171.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Pengelolaan pencipta Arsip yang menerapkan arsip baku	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	93,15	94,29	97,00		97,20		97,40		97,60		98,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					27.000.000		27.000.000		27.000.000		28.000.000		28.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip yang dilaksanakan (Dengan Satuan: Kegiatan)	0	0	5		5		5		5		5		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah regulasi akses izin penggunaan arsip tertutup (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**102.993.553.794**		**47.372.214.505**		**53.085.942.515**		**53.721.698.220**		**55.570.847.376**		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2.520.678.000**		**1.728.085.000**		**1.753.179.000**		**1.835.785.000**		**1.880.342.000**		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.054.641.000		767.355.000		763.844.000		788.080.000		794.486.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	239,74	246,93	254,34		261,97		269,83		277,92		286,26		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.196.231.000		741.380.000		771.050.000		822.429.000		858.651.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	153,84	146,38	150,77		155,30		159,96		164,76		169,70		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					38.869.000		12.426.000		12.365.000		12.761.000		12.871.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan: Persen)	7,61	8,04	8,48		8,91		9,35		9,78		10,22		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					230.937.000		206.924.000		205.920.000		212.515.000		214.334.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	32,81	39,49	41,47		43,54		45,72		48,01		50,41		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Garam (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	0,162	0,195	0,205		0,215		0,226		0,238		0,249		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan: Persen)	5,69	6,72	7,56		7,82		8,08		8,35		8,62		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**5.318.528.926**		**11.080.433.650**		**6.093.953.047**		**6.185.765.146**		**10.103.921.339**	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.868.528.926		8.615.433.650		3.618.953.047		3.680.765.146		7.528.921.339	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	9,38	11,72	14,84		17,19		19,53		21,09		27,34		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.200.000.000		2.205.000.000		2.210.000.000		2.225.000.000		2.250.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					250.000.000		260.000.000		265.000.000		280.000.000		325.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (Dengan Satuan: Persen)	11,17	12,01	12,85		13,97		15,64		16,76		17,60		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**26.033.596.868**		**24.129.285.855**		**34.832.397.468**		**35.165.208.074**		**26.493.767.037**		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.457.436.207		3.012.852.000		7.114.052.326		7.446.862.933		3.988.921.256	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	9,58	9,25	9,31		9,37		9,52		9,55		9,61		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					18.533.585.400		18.816.689.855		25.317.351.142		25.317.351.141		20.003.851.781	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersedian Prasarana Pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	28,94	29,14	29,16		29,21		29,27		29,33		29,39		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					515.937.000		714.801.000		714.801.000		714.801.000		714.801.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					345.406.519		371.406.000		472.656.000		472.656.000		572.656.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian (Dengan Satuan:Persen)	1,38	1,38	1,51		1,53		1,68		1,71		1,73		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					29.180.000		29.180.000		29.180.000		29.180.000		29.180.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.152.051.742		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000		1.184.357.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	72,50	73,75	75,00		77,50		80,00		82,50		85,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Meningkatnya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase potensi pemanfaatan EBT (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**23.088.750.000**		**9.393.410.000**		**9.343.913.000**		**9.411.940.000**		**15.941.317.000**		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					19.318.164.000		5.778.110.000		5.723.086.000		5.763.440.000		12.279.317.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (Dengan Satuan: Persen)	16,08	6,77	0,50		0,60		0,70		0,80		0,90		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					2.860.822.000		2.875.850.000		2.876.000.000		2.876.500.000		2.876.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga (Dengan Satuan: Persen) *(B45)	-9,77	±10	±10		±10		±10		±10		±10		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					30.000.000		60.000.000		62.500.000		67.500.000		70.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (Dengan Satuan: Persen)	NA	1,00	1,10		1,20		1,30		1,40		1,50		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					138.783.000		188.871.000		198.500.000		214.500.000		220.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan: Persen)	36,34	37,46	40,86		47,67		54,48		61,30		68,11		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					740.981.000		490.579.000		483.827.000		490.000.000		495.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk dalam Negeri (Dengan Satuan: Persen)	71,77	92,34	92,40		92,45		92,50		92,55		92,60		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**45.960.000.000**		**968.000.000**		**990.500.000**		**1.050.000.000**		**1.078.500.000**		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					45.835.000.000		812.000.000		823.000.000		860.000.000		866.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pencapian Sasaran Pembangunan Industri Daerah (Dengan Satuan: Persen)	37,80	38,64	39,28		39,92		40,56		41,20		41,84		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					75.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Dokumen yang terfasilitasi (Dengan Satuan: Persen)	69,23	70,51	76,00		82,00		88,00		94,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000		66.000.000		67.500.000		70.000.000		72.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**62.000.000**		**63.000.000**		**62.000.000**		**63.000.000**		**63.000.000**		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					62.000.000		63.000.000		62.000.000		63.000.000		63.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang berhasil/menetap (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**116.362.371.521**		**115.722.841.646**		**134.598.618.179**		**139.071.943.333**		**128.201.998.744**		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**54.600.885.052**		**51.027.284.297**		**66.830.299.885**		**68.084.872.394**		**53.843.329.382**		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.382.031.052		32.282.930.297		33.037.945.885		34.080.018.394		34.727.475.382	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	72,60	72,62	72,64		72,66		72,68		72,70		72,72		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	90,40	90,40	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					19.675.000.000		17.172.000.000		32.202.000.000		32.334.000.000		17.388.000.000	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Dengan atuan: Indeks)	67,84	70,00	70,00		73,00		73,00		75,00		75,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Dengan Satuan: Poin)	0,53	0,56	0,59		0,62		0,65		0,68		0,71		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.543.854.000		1.572.354.000		1.590.354.000		1.670.854.000		1.727.854.000	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Dengan Satuan: Indeks)	84,35	84,36	84,37		84,39		84,41		84,43		84,45		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**61.761.486.469**		**64.695.557.349**		**67.768.318.294**		**70.987.070.939**		**74.358.669.362**		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.891.340.454		42.114.807.780		42.373.139.247		42.809.229.148		42.924.162.826	Sekretariat Dprd
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	70,60	70,65	70,70		70,75		70,80		70,85		70,90		Sekretariat Dprd
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	90,50	90,55	90,60		90,65		90,70		90,75		90,80		Sekretariat Dprd
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					19.870.146.015		22.580.749.569		25.395.179.047		28.177.841.791		31.434.506.536	Sekretariat Dprd
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Dprd
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**779.865.672.912**		**807.916.691.551**		**811.840.471.282**		**812.910.781.982**		**815.015.249.455**		
5.01	**PERENCANAAN**				**9.408.851.018**		**9.674.542.328**		**9.933.947.431**		**11.336.564.737**		**11.166.752.097**		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.563.851.018		7.793.542.328		8.040.947.431		8.635.564.737		8.611.752.097	Perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	77,90	77,92	77,94		77,96		77,98		78,00		78,02		Perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	89,77	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Perencanaan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					935.000.000		953.000.000		959.000.000		1.465.000.000		1.579.000.000	Perencanaan
	Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					910.000.000		928.000.000		934.000.000		1.236.000.000		976.000.000	Perencanaan
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan
5.02	**KEUANGAN**				**757.591.777.809**		**761.506.033.766**		**763.127.930.446**		**765.508.719.166**		**765.838.371.520**		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.076.593.943		21.530.596.144		21.801.774.415		22.823.006.913		23.209.915.811	Keuangan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	76,60	76,65	76,70		76,75		76,80		76,85		76,90		Keuangan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	89,63	89,63	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Keuangan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					730.673.183.866		734.083.421.763		735.164.990.031		736.530.788.521		736.418.259.502	Keuangan
	Meningkatnya tata kelola Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	95,00	95,20	95,40		95,60		95,80		96,00		96,20		Keuangan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					992.000.000		981.240.000		1.201.952.000		1.037.178.928		1.057.122.507	Keuangan
	Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Keuangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.850.000.000		4.910.775.859		4.959.214.000		5.117.744.804		5.153.073.700	Keuangan
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapata	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	102,40	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Keuangan
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**8.857.844.085**		**32.692.115.457**		**34.727.593.405**		**31.372.498.079**		**33.875.032.838**		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.428.113.085		31.224.840.457		33.255.374.405		29.855.524.079		32.344.058.838	Kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	89,63	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	70,55	71,00	71,50		71,70		71,90		72,10		72,30		Kepegawaian
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.429.731.000		1.467.275.000		1.472.219.000		1.516.974.000		1.530.974.000	Kepegawaian
	Meningkatnya Kinerja ASN dengan predikat minimal baik	Persentase Kinerja ASN dengan predikat minimal baik (Dengan Satuan: Persen)	98,05	98,15	98,25		98,35		98,45		98,55		98,65		Kepegawaian
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.727.200.000**		**2.740.000.000**		**2.742.000.000**		**2.778.000.000**		**2.796.093.000**		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.727.200.000		2.740.000.000		2.742.000.000		2.778.000.000		2.796.093.000	Kepegawaian
	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dengan Satuan: Persen)	44,10	45,00	45,10		45,20		45,30		45,40		45,50		Kepegawaian
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.280.000.000**		**1.304.000.000**		**1.309.000.000**		**1.915.000.000**		**1.339.000.000**		
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.280.000.000		1.304.000.000		1.309.000.000		1.915.000.000		1.339.000.000	Penelitian Dan Pengembangan
	Meningkatnya Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Penelitian Dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**26.451.011.879**		**27.052.145.230**		**27.652.806.385**		**28.319.721.481**		**28.869.524.784**		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**26.451.011.879**		**27.052.145.230**		**27.652.806.385**		**28.319.721.481**		**28.869.524.784**		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.182.940.879		14.143.355.230		13.533.116.385		13.292.906.481		13.147.814.784	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	78,20	78,25	78,30		78,35		78,40		78,45		78,50		Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	85,85	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.708.071.000		8.238.790.000		9.039.690.000		9.836.815.000		10.421.710.000	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Dengan Satuan: Persen)	NA	84,85	85,50		86,00		86,50		87,00		87,50		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.560.000.000		4.670.000.000		5.080.000.000		5.190.000.000		5.300.000.000	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Penambahan Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK (Dengan Satuan: Unit Kerja)	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Inspektorat Daerah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**86.023.682.055**		**86.684.508.833**		**89.398.395.743**		**92.683.638.990**		**94.918.305.993**		
7.01	**KECAMATAN**				**86.023.682.055**		**86.684.508.833**		**89.398.395.743**		**92.683.638.990**		**94.918.305.993**		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.832.086.467		2.911.272.736		3.012.271.774		3.126.802.802		3.208.025.266	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan: Nilai)	71,45	71,50	71,60		71,70		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					14.967.000		14.967.000		14.967.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					32.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					118.620.000		128.620.000		128.769.000		132.750.000		132.750.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ayah) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.597.487.683		2.666.132.010		2.762.758.039		2.866.970.856		2.961.887.836	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan: Nilai)	72,45	72,50	72,55		72,56		72,57		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9.122.000		9.122.000		9.122.000		9.532.000		9.432.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.850.000		21.000.000		21.850.000		21.850.000		22.850.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.398.982		105.375.499		104.657.982		110.897.982		92.119.538	Kecamatan
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.262.108.702		2.328.279.282		2.412.841.164		2.505.146.720		2.568.862.176	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Nilai)	70,70	70,80	70,90		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					130.315.742		133.506.890		132.198.489		137.184.029		139.867.175	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.598.998.065		2.669.071.727		2.754.481.617		2.853.505.766		2.924.867.970	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan: Nilai)	66,95	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan: Persen)	95,05	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					100.500.000		107.000.000		114.000.000		121.000.000		124.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Petanahan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.264.652.222		2.312.554.190		2.386.332.036		2.482.072.076		2.545.912.627	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Klirong) (Dengan Satuan: Nilai)	69,60	70,00	71,00		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Klirong) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Klirong) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					114.000.000		126.000.000		133.000.000		135.000.000		137.500.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Klirong) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.202.553.487		2.267.951.719		2.352.277.112		2.447.545.953		2.507.601.680	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan: Nilai)	71,20	71,25	71,26		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					92.738.951		94.515.943		89.842.280		91.258.946		95.203.280	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buluspesantren) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.210.389.218		2.255.486.930		2.350.008.887		2.441.973.621		2.508.724.707	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Nilai)	71,20	71,23	71,25		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					137.941.000		160.691.000		148.942.000		152.942.000		152.942.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.311.606.356		2.379.655.505		2.464.360.827		2.558.872.624		2.621.895.076	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Nilai)	71,35	71,56	71,57		71,58		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Persen)	92,07	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					107.000.000		109.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Persen)	91,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.444.206.988		2.513.764.140		2.599.718.872		2.698.337.882		2.766.126.320	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan: Nilai)	70,55	71,10	71,60		72,00		72,51		73,76		75,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					16.295.000		16.295.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					77.250.000		82.910.000		81.996.000		83.420.000		83.720.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.440.927.384		2.516.062.423		2.618.057.896		2.730.269.413		2.809.375.800	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Nilai)	70,30	70,33	70,35		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					87.000.000		84.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Prembun) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.324.271.415		2.379.125.862		2.472.133.387		2.565.433.925		2.630.959.712	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Padureso) (Dengan Satuan: Nilai)	71,20	71,35	71,50		71,75		72,89		73,99		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Padureso) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Padureso) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000		112.000.000		103.000.000		108.000.000		111.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Padureso) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.257.540.291		2.300.697.976		2.386.910.784		2.472.689.882		2.534.513.818	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan: Nilai)	71,15	72,95	73,00		73,25		73,50		73,76		75,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.572.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					127.883.000		147.383.000		136.383.000		140.383.000		140.383.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kutowinangun) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.380.973.377		2.438.661.075		2.531.663.381		2.620.385.981		2.701.264.830	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Alian) (Dengan Satuan: Nilai)	70,60	70,70	71,00		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		11.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Alian) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					21.000.000		21.000.000		21.000.000		23.500.000		21.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Alian) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					99.500.000		114.500.000		108.500.000		117.000.000		109.500.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Presentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDES sesuai ketentuan (Kecamatan Alian) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.197.739.085		2.258.648.943		2.339.479.272		2.430.845.820		2.493.804.832	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan: Nilai)	62,60	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan: Indeks)	95,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					108.130.000		113.165.626		114.166.384		116.712.162		117.804.315	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.867.360.909		8.101.293.650		8.308.304.739		8.667.406.546		8.876.170.260	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer (Dengan Satuan: Indeks)	90,72	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Nilai)	70,05	70,75	71,05		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo (Dengan Satuan: Indeks)	90,72	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang (Dengan Satuan: Indeks)	92,00	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen (Dengan Satuan: Indeks)	92,00	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun (Dengan Satuan: Indeks)	92,00	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.376.837.357		3.316.207.910		3.404.411.736		3.441.798.627		3.484.365.950	Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Bumirejo (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Panjer) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarkatan Kelurahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Selang) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Tamanwinangun) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					154.250.000		171.750.000		156.800.000		158.300.000		159.300.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.510.033.493		2.579.230.400		2.678.601.944		2.779.153.877		2.846.931.452	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan: Nilai)	71,10	71,15	71,20		71,30		72,60		73,80		75,05		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000		7.040.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					14.388.000		14.388.000		14.388.000		20.000.000		23.132.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					90.657.000		97.657.000		90.657.000		90.657.000		93.587.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Pejagoan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.724.866.559		2.810.300.083		2.906.440.923		3.026.530.699		3.099.544.934	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan: Nilai)	71,20	71,22	71,25		71,30		72,60		73,76		75,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.200.000		14.200.000		14.200.000		14.200.000		21.200.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					88.519.000		91.789.760		96.819.000		90.819.000		90.819.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.489.574.122		2.557.902.085		2.649.386.407		2.748.649.588		2.821.484.194	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan: Nilai)	71,85	71,86	71,90		72,00		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					131.400.000		137.650.000		137.650.000		143.000.000		143.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.263.555.044		2.310.409.538		2.402.389.077		2.498.824.770		2.566.099.301	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan: Nilai)	69,85	70,51	70,52		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					106.854.000		124.500.000		117.000.000		119.000.000		120.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kuwarasan) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.347.474.743		2.408.439.931		2.497.400.605		2.596.949.239		2.665.165.456	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan: Nilai)	70,90	71,40	71,42		71,45		72,51		73,76		75,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.451.000		104.476.000		98.953.000		98.953.000		98.953.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.573.340.328		2.640.056.720		2.740.576.542		2.851.769.133		2.929.624.948	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Nilai)	71,85	72,00	72,50		72,75		73,50		74,25		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					13.100.000		13.300.000		13.500.000		13.700.000		13.900.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					115.100.000		126.000.000		123.000.000		126.700.000		128.600.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.327.977.423		4.460.907.259		4.614.046.506		4.798.825.471		4.925.482.283	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarat Kelurahan Wonokriyo (Dengan Satuan: Indeks)	90,30	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Gombong) (Dengan Satuan: Nilai)	71,70	72,00	71,50		73,00		73,50		73,76		75,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombong (Dengan Satuan: Indeks)	90,30	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Gombong) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.525.230.411		1.136.687.763		1.143.111.008		1.163.594.478		1.171.737.622	Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Wonokriyo) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Gombong) (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					11.885.000		11.885.000		11.885.000		11.885.000		12.885.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Gombong) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					102.800.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000		105.500.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Gombong) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.687.154.536		6.731.550.680		6.978.629.780		7.246.619.455		7.457.803.077	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan: Indeks)	89,00	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Nilai)	71,20	71,23	71,25		71,27		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan: Indeks)	89,00	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan: Indeks)	92,24	92,30	92,33		92,35		92,36		92,38		92,40		Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan: Indeks)	88,00	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.306.095.880		2.283.319.978		2.284.149.235		2.322.551.255		2.317.063.808	Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Panjatan) (Dengan atuan: Persen)	89,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Jatiluhur) (Dengan Satuan: Persen)	89,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelasanaan kegiatan (Kelurahan Plarangan) (Dengan Satuan: Persen)	92,24	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Karanganyar) (Dengan Satuan: Persen)	82,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					83.200.000		90.200.000		83.200.000		92.000.000		92.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.335.115.255		2.400.759.452		2.493.646.398		2.591.531.877		2.662.190.679	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Nilai)	72,30	72,35	72,40		72,45		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000		105.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.377.555.300		2.443.581.315		2.543.320.175		2.642.690.629		2.707.473.740	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan: Nilai)	73,65	73,66	73,68		73,70		73,72		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.320.000		100.850.000		87.500.000		89.200.000		94.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.481.417.280		2.549.463.629		2.641.513.485		2.733.514.617		2.799.089.253	Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Nilai)	70,90	71,45	71,45		71,46		72,51		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	Kecamatan
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentse Penaanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.079.289		22.811.424	Kecamatan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					90.000.000		97.510.204		90.000.000		94.000.000		94.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karangsambung) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**9.316.524.209**		**9.523.531.000**		**33.670.553.289**		**55.928.744.945**		**10.077.844.492**		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**9.316.524.209**		**9.523.531.000**		**33.670.553.289**		**55.928.744.945**		**10.077.844.492**		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.342.997.209		4.475.004.000		4.609.526.289		4.757.117.945		4.860.017.492	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)	89,51	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	71,40	72,75	72,90		73,00		73,20		73,76		75,00		Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					504.000.000		515.000.000		516.000.000		521.000.000		541.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan: Persen)	73,00	75,00	77,00		79,00		81,00		83,00		85,00		Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.780.480.000		3.786.480.000		27.790.480.000		49.835.480.000		3.800.480.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan: Persen)	73,00	75,00	77,00		79,00		81,00		83,00		85,00		Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					67.000.000		72.000.000		73.000.000		75.000.000		85.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan: Persen)	72,00	72,00	74,00		78,00		82,00		86,00		90,00		Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					207.047.000		171.047.000		172.547.000		178.547.000		193.547.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan: Persen)	73,00	75,00	77,00		79,00		81,00		83,00		85,00		Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					415.000.000		504.000.000		509.000.000		561.600.000		597.800.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesatuan Bangsa Dan Politik
				TOTAL:	**3.388.704.904.338**		**3.378.045.519.746**		**3.510.367.197.156**		**3.609.046.330.491**		**3.587.294.687.603**		

Keterkaitan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen menggambarkan integrasi perencanaan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terpadu. Tabel ini memuat hubungan antara program dan kegiatan dari seluruh OPD di Kabupaten Kebumen yang disinergikan berdasarkan prioritas pembangunan, sehingga setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung sesuai peran, tugas, dan fungsinya. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan mampu menciptakan keterpaduan pelaksanaan, menghindari tumpang tindih program, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel IV.2
Keterkaitan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	PERENCANAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Invensi dan Inovasi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	KEPEGAWAIAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Mutasi dan Promosi ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	KEUANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENATAAN DESA	
			Penyelenggaraan Penataan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHAN PANGAN MASYARAKAT	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pembangunan Prasarana Pertanian
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penataan Pendaftaran Penduduk
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Penyimpanan sementara Limbah B3
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Pengelolaan Sampah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
			Pendampingan dan Asistensi
UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Administrasi Tata Pemerintahan
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DPRD		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			Layanan Administrasi DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Peningkatan Kapasitas DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Pelayanan BLUD
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

BIDANG UNSUR	URUSAN/OPD	PROGRAM	KEGIATAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan RPJMD terbagi menjadi beberapa indikator kinerja, yakni Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Rincian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara makro/umum. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama periode pembangunan. Adapun target indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia *(A1)	Indeks	72,48	72,88	73,80	73,95	74,10	74,50	74,90
2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia *(B48)	Persen	20,76	20,80	20,85	20,89	20,94	20,98	21,02
3	Tingkat Kemiskinan *(A5)	Persen	15,71	14,71-13,90	14,30-13,40	13,27-12,41	12,24-11,42	11,20-10,43	10,50-9,73
4	Tingkat Pengangguran Terbuka *(B34)	Persen	5,07	4,77	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi *(A4)	Persen	5,30	5,40-6,30	5,80-6,30	6,50-7,00	6,90-7,30	7,40-8,00	7,80-8,30
6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota *(B29)	Juta Rupiah	27,29	31,67	36,05	40,44	44,82	49,20	54,16
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *(B53)	Indeks	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif *(A6)	Ton CO2Eq	151.888, 21	1.985.634,95	2.192.567,90	2.399.500,84	3.495.868,28	4.592.235,71	5.688.603,15
9	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,12	2,13	2,13	2,14	2,15	2,15	2,16

**huruf dan angka = merupakan kode Indikator Utama Pembangunan (IUP)*
Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

Tabel IV.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan RPJMD									
1	Indeks Pembangunan Manusia *(A1)	Indeks	72,48	72,88	73,80	73,95	74,10	74,50	74,90
2	Tingkat Kemiskinan *(A5)	Persen	15,71	14,71-13,90	14,30-13,40	13,27-12,41	12,24-11,42	11,20-10,43	10,50-9,73
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi *(A4)	Persen	5,30	5,40-6,30	5,80-6,30	6,50-7,00	6,90-7,30	7,40-8,00	7,80-8,30
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota *(B29)	Juta Rupiah	27,29	31,67	36,05	40,44	44,82	49,20	54,16
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	39,61	47,11	48,45	49,53	50,83	52,30	53,76
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif *(A6)	Ton CO2Eq	151.888,21	1.985.634,95	2.192.567,90	2.399.500,84	3.495.868,28	4.592.235,71	5.688.603,15
7	Indeks Reformasi Birokrasi *(A2)	Indeks	85,74	86,03	86,33	86,62	86,91	87,21	87,50
8	Indeks Kebudayaan	Indeks	11,50	12,26	14,72	17,18	19,65	22,11	22,48
9	Indeks Kesalehan Sosial *(B17)	Indeks	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Sasaran RPJMD									
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia *(B48)	Persen	20,76	20,80	20,85	20,89	20,94	20,98	21,02
2	Indeks Pendidikan	Indeks	63,43	64,80	65,45	66,11	66,76	67,41	68,06
3	Indeks Kesehatan	Indeks	84,95	85,41	85,70	86,33	86,79	87,25	87,70
4	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,59	2,72	2,86	3,00	3,15	3,31	3,47
5	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,12	2,13	2,13	2,14	2,15	2,15	2,16
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-3,71	-3,50	-3,00	-2,50	-2,00	-1,50	-1,00
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,00	6,30	6,62	6,95	7,29	7,66	8,04
8	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,35	10,87	11,47	12,07	12,67	13,27	13,87
9	Tingkat Pengangguran Terbuka *(B34)	Persen	5,07	4,77	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
10	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	1,73	5,75	6,95	8,30	9,87	11,78	14,24

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	68,53	86,03	86,83	87,67	88,45	89,24	90,02
12	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	48,56	49,54	51,56	52,62	54,17	55,89	57,02
13	Persentase Desa Mandiri *(B36)	Persen	NA	35,41	38,31	41,20	44,10	46,99	49,89
14	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	61,57	65,26	65,79	66,32	66,85	67,38	67,91
15	Indeks Risiko Bencana (IRB) *(B56)	Indeks	121,38	118,42-116,96	117,19-115,12	115,96-113,29	114,73-111,45	113,50-109,60	112,27-107,77
16	Nilai SAKIP	Nilai	67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00
17	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,30	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00
18	Indeks Pelayanan Publik *(B23)	Indeks	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan *(B13)	Persen	7,64	12,10	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47
20	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	NA	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
21	Indeks Ketertiban Umum	Indeks	98,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025
**huruf dan angka = merupakan kode Indikator Utama Pembangunan (IUP)*

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang dapat menggambarkan secara objektif dan terukur terhadap tingkat pencapaian pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Agar hasil evaluasi kinerja lebih akurat dan fokus, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan IKD serta diperlukan penetapan IKK yang mampu merepresentasikan pencapaian sasaran utama pembangunan secara menyeluruh dan strategis. IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Adapun penetapan IKK beserta target-target capaian yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) *(B51)	Indeks	81,21	81,79	81,85	81,92	81,98	82,02	82,94
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) *(B52)	Persen	9,20	9,15	8,92	8,35	7,95	7,57	7,55
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan *(B57)	Persen	16,27	17,00	21,50	26,00	30,50	34,99	35,00
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota *(B58)	Indeks	57,00	58,00	58,10	58,39	59,55	61,00	61,50
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *(B53)	Indeks	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman *(B54)	Persen	3,67	5,93	11,95	17,97	23,98	29,99	30,00
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah *(B55)	Persen	53,27	55,81	56,83	57,84	58,86	59,87	60,89
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif *(A6)	Ton CO_2Eq	151.888, 21	1.985.634,90	2.192.567,90	2.399.500,80	3.495.868,20	4.592.235,70	5.688.603,15
9	Indeks Risiko Bencana (IRB) *(B56)	Indeks	121,38	118,42-116,96	117,19-115,12	115,96-113,29	114,73-111,45	113,50-109,60	112,27-107,77
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,89	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
11	Rasio Penduduk	Persen	102,98	103,04	103,10	103,16	103,22	103,28	103,34
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km^2	1.129,35	1.138,69	1.142,55	1.152,00	1.161,52	1.171,12	1.180,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi *(A4)	Persen	5,30	5,40-6,30	5,80-6,30	6,50-7,00	6,90-7,30	7,40-8,00	7,80-8,30
2	Tingkat Kemiskinan *(A5)	Persen	15,71	14,71-13,90	14,30-13,40	13,27-12,41	12,24-11,42	11,20-10,43	10,50-9,73
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota *(B29)	Juta Rupiah	27,29	31,67	36,05	40,44	44,82	49,20	54,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka *(B34)	Persen	5,07	4,77	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
5	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia *(B48)	Persen	20,76	20,80	20,85	20,89	20,94	20,98	21,02
6	Indeks Pembangunan Manusia *(A1)	Indeks	72,48	72,88	73,80	73,95	74,10	74,50	74,90
7	Indeks Kesehatan	Indeks	84,95	85,41	85,70	86,33	86,79	87,25	87,70
8	Usia Harapan Hidup (UHH) *(B1)	Tahun	75,22	75,52	75,82	76,11	76,41	76,71	77,01
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu *(B2)	Kasus	15	14	14	14	13	13	12
10	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita *(B3)	Persen	9,17	9,10	9,08	9,05	9,03	9,00	8,98
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) *(B4)	Persen	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00	96,25
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate)* *(B5)	Persen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	92,25	92,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional *(B6)	Persen	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07
14	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	74,44	75,62	75,72	75,82	75,92	76,02	76,12
15	Jumlah Kasus Kematian Balita	Kasus	166	160	157	151	149	145	140
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	80,00
17	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Persentase Puskesmas yang Memiliki Kebijakan Operasional Aktifitas Fisik bagi Masyarakat	Persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
20	Indeks Pendidikan	Indeks	63,43	64,80	65,45	66,11	66,76	67,41	68,06
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun *(B7)	Tahun	7,87	7,89	7,94	7,99	8,04	8,09	8,14
22	Harapan Lama Sekolah *(B8)	Tahun	13,39	13,86	14,04	14,21	14,39	14,56	14,74
23	Literasi Membaca SD *(B9)	Persen	84,28	84,29	84,79	85,29	85,79	86,29	86,79
24	Literasi Membaca SMP *(B9)	Persen	87,29	87,30	87,80	88,30	88,80	89,30	89,80
25	Numerasi Membaca SD *(B9)	Persen	73,68	73,94	74,19	74,69	75,19	75,69	76,19

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Numerasi Membaca SMP *(B9)	Persen	82,34	82,35	82,85	83,35	83,85	84,35	84,85
27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi *(B10)	Persen	7,96	8,11	8,26	8,56	8,85	9,15	9,45
28	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *(B11)	Persen	77,84	85,85	86,53	87,22	87,90	88,58	89,26
29	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan *(B12)	Persen	0,27	0,28	0,57	0,87	1,16	1,45	1,74
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *(B49)	Persen	37,36	41,19	44,95	47,27	49,72	52,29	54,29
31	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif *(B50)	Persen	4,34	8,03	11,73	19,13	26,52	33,91	41,30
32	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan *(B13)	Persen	7,64	12,10	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47
33	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah *(B14)	Orang	53.000	53.800	54.654	55.583	56.589	57.800	59.090
34	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir *(B15)	Persen	17,32	22,63	23,04	23,46	23,88	24,30	24,72
35	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan *(B16)	Persen	64,07	64,31	64,55	65,04	65,52	66,00	66,48

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
36	Indeks Kesalehan Sosial *(B17)	Indeks	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29
37	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus *(B18)	Persen	84,78	85,43	86,09	86,74	87,39	88,04	89,13
38	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran *(B19)	Lembaga	NA	NA	238	300	362	424	486
39	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan *(B20)	Lembaga	NA	NA	129	160	191	220	251
40	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	NA	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
41	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) *(B22)	Indeks	63,90	64,67-64,68	65,44-65,45	66,21-66,23	66,98-67,01	67,75-67,78	68,52-68,56
43	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *(B21)	Indeks	0,328	0,327-0,318	0,324-0,307	0,321-0,297	0,319-0,287	0,316-0,277	0,313-0,266

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	Persen	46,88	46,90	46,95	47,00	47,05	47,10	47,15
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan *(B30)	Persen	22,69	22,97	23,23	23,46	23,67	23,86	24,04
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,00	6,30	6,62	6,95	7,29	7,66	8,04
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum *(B31)	Persen	2,85	3,00	3,18	3,36	3,54	3,72	3,90
5	LPE kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,35	10,87	11,47	12,07	12,67	13,27	13,87
6	Rasio Kewirausahaan Daerah *(B46)	Persen	1,18	3,00	3,14	3,23	3,45	3,53	3,64
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB *(B47)	Persen	1,55	1,83	1,87	1,89	1,93	2,01	2,04
8	*Return on Aset* (ROA) BUMD *(B32)	Persen	3,83	4,08	4,09	4,22	4,35	4,48	4,59
9	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,74	4,78	4,79	4,81	4,83	4,85	4,86
10	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara *(B33)	Orang	23	27	27	28	28	30	40
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,37	77,81	78,25	78,69	79,12	79,56	80,00
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan *(B35)	Persen	66,46	66,96	67,46	67,96	68,46	68,96	69,46
13	Kapabilitas Inovasi *(A3), (B28)	Nilai	2,92	2,97	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB) *(B44)	Persen	18,50	19,03	19,16	19,28	19,41	19,53	19,66

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-3,71	-3,50	-3,00	-2,50	-2,00	-1,50	-1,00
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak *(B39)	Persen	69,80	74,86	79,92	84,98	90,04	95,11	96,01
17	Persentase Desa Mandiri *(B36)	Persen	NA	35,41	38,31	41,20	44,10	46,99	49,89
18	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet *(B40)	Persen	89,41	89,52	89,63	89,74	89,85	89,96	90,07
19	Indeks Infrastruktur	Indeks	39,61	47,11	48,45	49,53	50,83	52,30	53,76
20	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	1,73	5,75	6,95	8,30	9,87	11,78	14,24
21	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	68,53	86,03	86,83	87,67	88,45	89,24	90,02
22	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	48,56	49,54	51,56	52,62	54,17	55,89	57,02
23	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *(B37)	Persen	73,48	74,36	75,94	78,37	80,68	82,52	84,36
24	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *(B38)	Persen	60,67	79,78	82,14	84,60	86,90	89,21	91,51
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB *(B41)	Persen	0,36	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
26	Disparitas Harga *(B45)	Persen	-9,77	±10	±10	±10	±10	±10	±10
27	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,59	2,72	2,86	3,00	3,15	3,31	3,47

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi *(A2)	Indeks	85,74	86,03	86,33	86,62	86,91	87,21	87,50
2	Indeks Reformasi Hukum *(B24)	Indeks	98,52	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(B26)	Indeks	4,07	4,09	4,10	4,11	4,13	4,20	4,22
4	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	NA	NA	2,00	2,07	2,14	2,22	2,30
5	Indeks Pelayanan Publik *(B23)	Indeks	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72
6	Indeks Integritas Nasional *(B25)	Indeks	75,00	79,81	80,36	81,44	81,45	83,07	83,07
7	Nilai SAKIP	Nilai	67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00
8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,30	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,77	3,81	3,85	3,89	3,92	3,96	4,00
10	Indeks Ketertiban Umum	Indeks	98,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Jumlah Kejadian Konflik SARA *(B27)	Kali	6	5	5	4	4	3	3
12	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *(B42)	Persen	1,53	1,60	1,61	1,61	1,62	1,62	1,63
13	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *(B43)	Persen	1,24	1,44	1,45	1,45	1,46	1,46	1,47

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *(B11)	Persen	77,84	85,85	86,53	87,22	87,90	88,58	89,26
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	99,68	99,73	99,79	99,84	99,89	99,95	100,00
3	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	Persen	11,52	11,64	11,75	11,87	11,99	12,11	12,23
4	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	67,46	69,96	72,46	74,96	77,46	79,96	82,46
5	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	57,51	60,41	63,31	66,21	69,11	72,01	74,91
6	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	79,93	81,03	82,13	83,23	84,33	85,43	86,53
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	68,05	69,55	71,05	72,55	74,05	75,55	77,05
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	86,93	88,02	88,62	89,42	90,41	91,61	92,81
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV	Persen	71,12	78,06	79,06	80,06	81,06	82,06	83,06
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	78,05	78,95	79,85	80,75	81,65	82,55	83,45
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	74,49	75,99	77,49	78,99	80,49	81,99	83,49

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	75,39	76,39	77,39	78,39	79,39	80,39	81,39
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	74,87	75,87	76,87	77,87	78,87	79,87	80,87
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	61,30	63,80	66,30	68,80	71,30	73,80	76,30
15	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63,74	66,14	68,54	70,94	73,34	75,74	78,14
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kasus Kematian Ibu *(B2)	Kasus	15	14	14	14	13	13	12
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita *(B3)	Persen	9,17	9,10	9,08	9,05	9,03	9,00	8,98
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota	Persen	9,66	11,79	14,23	16,68	17,66	18,64	19,45
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	Persen	78,75	79,54	80,33	81,14	81,95	82,77	83,59
3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi dan bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	Persen	96,22	96,85	97,48	98,11	98,74	99,37	100,00
5	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	99,42	99,52	99,61	99,71	99,81	99,90	100,00
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	73,48	74,57	75,65	76,74	77,83	78,91	80,00
7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/Teknisi/Analis	Persen	55,14	55,69	56,25	56,81	57,38	57,95	58,53

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase Pengawasan Penyelenggaran Jasa Konstruksi Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	55,08	55,63	56,19	56,75	57,32	57,89	58,47
9	Jumlah Hari Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Nonberusaha (Sesuai Kewenangan) yang Terbit/Dilayani Pemerintah Daerah	Hari	15	15	15	13	13	10	10
10	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	NA	41,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	0,00	1,21	2,42	3,63	4,84	6,05	7,26
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	3,46	10,29	11,47	12,96	14,89	17,50	21,21

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	25,00	19,46	23,90	28,26	32,60	36,96	41,30
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5	5	5	5	5	5	5
4	Presentase SOP yang Tersedia dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan sebagai Penunjang dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat Dasar	Persen	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	95,41	96,18	96,94	97,71	98,47	99,24	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
f. Sosial									
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Sasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Disediakan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan selama Satu Tahun	Persen	21.051 (Usulan 14.746 Penidaklayakan 6.305)	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	29.343.240,00	29.980.394,50	30.747.632,20	31.743.144,91	32.893.972,39	34.245.954,19	35.786.291,80
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	26,02	28,62	31,48	34,63	38,10	41,91	46,10

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,41	93,54	93,64	93,75	93,85	93,95	94,05
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *(B21)	Indeks	0,328	0,327-0,318	0,324-0,307	0,321-0,297	0,319-0,287	0,316-0,277	0,313-0,266
3	Persentase ARG Daerah	Persen	27,73	29,12	30,57	32,10	33,71	35,39	37,16
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	15,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pangan									
1	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	Persen	40,05	11,63	17,89	17,89	17,89	17,89	17,89
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	93,05	93,10	93,35	93,65	93,95	94,25	94,55
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	30,43	45,65	54,35	63,04	71,74	80,43	89,13
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	92,75	92,94	93,53	94,12	94,71	95,29	95,88

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
d. Pertanahan									
1	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	56,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah dalam Satu Desa atau Kelurahan Lengkap secara Berkualitas	Persen	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00
3	Ditetapkannya Hak atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
e. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *(B53)	Indeks	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	79,30	79,40	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persen	77,78	81,03	84,83	88,62	92,41	96,21	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persen	99,51	99,59	99,67	99,76	99,84	99,92	100,00
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	60,82	64,28	67,42	70,57	73,71	76,86	80,00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	11,41	13,68	15,94	18,21	20,47	22,74	25,00
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	NA	4,61	8,18	7,56	7,03	6,57	6,16
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR)	Angka	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,13
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	Persen	67,11	67,20	67,30	67,35	67,40	67,45	67,50
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	11,80	10,50	10,20	10,00	9,50	8,50	8,50
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	15,70	14,50	14,25	14,00	13,75	13,56	13,23
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) *(B22)	Indeks	63,90	64,67-64,68	65,44- 65,45	66,21-66,23	66,98-67,01	67,75-67,78	68,52-68,56
i. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *(B38)	Persen	60,67	79,78	82,14	84,60	86,90	89,21	91,51
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Persen	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	76,14	11,70	11,73	11,76	11,78	11,81	11,83
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	NA	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	NA	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
l. Penanaman Modal									
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	9,32	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	169,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
m. Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/*Training* dan Memperoleh Sertifikat	Persen	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32
2	Persentase Atlet yang Berasal dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi	Persen	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,69	2,70	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75
o. Persandian									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	78,13	79,17	80,21	81,25	82,30	83,34	84,38
p. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	76,15	80,13	84,10	88,08	92,05	96,03	100,00
2	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	Persen	12,10	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47	19,11
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Dibidang Kebudayaan	Persen	1,25	1,5	1,8	2,00	2,50	3,00	3,50

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
q. Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,77	80,80	80,90	81,00	81,10	81,20	81,30
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	16,91	17,05	17,19	17,33	17,47	17,61	17,75
r. Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	93,15	94,29	97,00	97,20	97,40	97,60	98,00
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	9.522.860,00	9.760.932,00	10.004.955,00	10.255.079,00	10.511.456,00	10.774.242,00	11.043.598,00
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Kg	3.590.480,00	3.680.242,00	3.772.248,00	3.866.554,00	3.963.218,00	4.062.299,00	4.163.856,00
b. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	-10,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Nonbintang)	Persen	109,09	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c. Pertanian									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	12,13	12,46	12,80	13,17	13,57	13,99	14,45
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	-8,59	9,45	9,71	9,99	10,29	10,62	10,96
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	9,35	9,60	9,87	10,15	10,46	10,79	11,13
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	-23,74	6,66	6,85	7,04	7,26	7,48	7,72
5	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	937,08**	555,00	605,00	615,00	675,00	685,00	695,00
6	Persentase Penyakit Hewan yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d. Kehutanan									
e. Energi dan Sumber Daya Mineral									
f. Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kabupaten/Kota	Persen	NA	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00
2	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	36,34	37,46	40,86	47,67	54,48	61,30	68,11

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
g. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	37,80	38,64	39,28	39,92	40,56	41,20	41,84
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Persen	42,07	42,49	42,92	43,34	43,78	44,22	44,66
3	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan Dibandingkan dengan Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Dilakukan Pengawasan.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik' Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Sudah Dilakukan Pembinaan.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h. Transmigrasi									
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	31,62	32,75	31,45	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,43	15,74	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	96,37	96,40	96,45	96,50	96,55	96,60	96,65
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	6,55	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,85
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	12,96	13,61	14,29	15,00	15,75	16,54	17,37
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	-12,92	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	79,01	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	71,43	73,00	75,50	78,00	80,50	83,00	85,50
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
e. Fungsi Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/ Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,30	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Level 3 (3,27)	Level 3 (3,34)	Level 3 (3,42)	Level 3 (3,49)	Level 3 (3,56)	Level 3 (3,64)	Level 3 (3,72)
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,03	3,11	3,18	3,25	3,32	3,38	3,45
5	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	95,19	95,99	96,79	97,60	98,40	99,20	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
f. Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	25,96	28,18	31,33	34,48	37,64	40,79	43,94
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	18,39	19,36	20,33	21,30	22,27	23,24	24,21
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	107,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h. Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,59	4,72	4,83	4,94	5,00	5,00	5,00

**huruf dan angka = merupakan kode Indikator Utama Pembangunan (IUP)*
***Perhitungan baseline 2024 masih menggunakan formula lama yang memperhitungkan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan tidak diperhitungkan lagi mulai tahun 2025*
Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

4.2.4 Indikator Utama Pembangunan (IUP)

IUP dalam RPJPD merupakan indikator makro yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Indikator ini menyelaraskan dengan Indikator Utama Pembangunan RPJPN dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Indikator utama tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang akan diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun pemetaan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel IV.6
Pemetaan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen

A.	Indikator Sasaran Visi RPJPD	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Tujuan 1 RPJMD
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Tujuan 4 RPJMD
3	Kapabilitas Inovasi (Angka)	Tujuan Renstra Urusan Penelitian dan Pengembangan
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Tujuan 2 RPJMD
5	Tingkat Kemiskinan (Persen)	Tujuan 1 RPJMD
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2eq)	Tujuan 3 RPJMD
B.	**Indikator Sasaran Pokok RPJPD**	**Keterangan**
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tujuan Renstra Urusan Kesehatan
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus)	Sasaran Renstra Urusan Kesehatan
3	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Balita (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Kesehatan
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Kesehatan
7	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	Tujuan Renstra Urusan Pendidikan
8	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tujuan Renstra Urusan Pendidikan
9	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang) (Persen): a) Literasi Membaca -SD -SMP b) Numerasi -SD -SMP	Sasaran Renstra Urusan Pendidikan

10	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Pendidikan
11	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
12	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Perpustakaan
13	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan (Persen)	Sasaran 5.1 RPJMD
14	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (Orang)	Indikator Kinerja Daerah
15	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir (Persen)	Indikator Kinerja Daerah
16	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan (Persen)	Indikator Kinerja Daerah
17	Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	Tujuan 5 RPJMD
18	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen)	Indikator Kinerja Daerah
19	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran (Lembaga)	Indikator Kinerja Daerah
20	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan (Lembaga)	Indikator Kinerja Daerah
21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indikator Kinerja Daerah
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	Tujuan Renstra Urusan PPKB
23	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Sasaran RPJMD 4.3
24	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	Sasaran Renstra Urusan Sekretariat Daerah
25	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	Tujuan Renstra Urusan Pengawasan
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	Tujuan Renstra Urusan Komunikasi dan Informatika
27	Jumlah Kejadian Konflik SARA (Kali)	Sasaran Renstra Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Kapabilitas Inovasi (Angka)	Tujuan Renstra Urusan Penelitian dan Pengembangan
29	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	Tujuan RPJMD 2
30	Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen)	Tujuan Renstra Urusan Perindustrian
31	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Persen)	Tujuan Renstra Urusan Pariwisata
32	*Return on Aset* (ROA) BUMD (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
33	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	Renstra Perangkat Daerah
34	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Sasaran RPJMD 2.5
35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Tenaga Kerja

36	Persentase Desa Mandiri (Persen)	Sasaran RPJMD 3.4
37	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Perhubungan
39	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Komunikasi dan Informatika
41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Keuangan
42	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
43	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
44	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB) (Persen)	Tujuan Renstra Urusan Penanaman Modal
45	Disparitas Harga (Persen)	Indikator Kinerja Daerah
46	Rasio Kewirausahaan Daerah (Persen)	Tujuan Renstra Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
48	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen)	Sasaran RPJMD 1.1.
49	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
50	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Tujuan Renstra Urusan Pangan
52	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Pangan
53	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	Tujuan Renstra Urusan Lingkungan Hidup
54	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)	Renstra Perangkat Daerah
55	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Lingkungan Hidup
56	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Sasaran RPJMD 3.6
57	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Persen)	Sasaran Renstra Urusan Sasaran Renstra Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
58	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Indeks)	Sasaran Renstra Urusan Sasaran Renstra Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Adapun dalam turunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen, dilakukan penetapan target pembangunan pada Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2030 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.7
Penetapan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,22	75,52	75,82	76,11	76,41	76,71	77,01
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	15	14	14	14	13	13	12
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,17	9,10	9,08	9,05	9,03	9,00	8,98
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	Persen	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00	96,25
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Success Rate)*	Persen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	92,25	92,81
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07
7	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,87	7,89	7,94	7,99	8,04	8,09	8,14
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,39	13,86	14,04	14,21	14,39	14,56	14,74
9	Literasi Membaca SD	Persen	84,28	84,29	84,79	85,29	85,79	86,29	86,79
10	Literasi Membaca SMP	Persen	87,29	87,30	87,80	88,30	88,80	89,30	89,80
11	Numerasi Membaca SD	Persen	73,68	73,94	74,19	74,69	75,19	75,69	76,19

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Numerasi Membaca SMP	Persen	82,34	82,35	82,85	83,35	83,85	84,35	84,85
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	7,96	8,11	8,26	8,56	8,85	9,15	9,45
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	77,84	85,85	86,53	87,22	87,90	88,58	89,26
15	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,27	0,28	0,57	0,87	1,16	1,45	1,74
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan	Persen	7,64	12,10	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	53.000	53.800	54.654	55.583	56.589	57.800	59.090
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Persen	17,32	22,63	23,04	23,46	23,88	24,30	24,72
19	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	64,07	64,31	64,55	65,04	65,52	66,00	66,48
20	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	84,78	85,43	86,09	86,74	87,39	88,04	89,13
22	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	Lembaga	NA	NA	238	300	362	424	486
23	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	Lembaga	NA	NA	129	160	191	220	251
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,328	0,327-0,318	0,324-0,307	0,321-0,297	0,319-0,287	0,316-0,277	0,313-0,266
25	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,90	64,67-64,68	65,44-65,45	66,21-66,23	66,98-67,01	67,75-67,78	68,52-68,56
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72
27	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,52	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58
28	Indeks Integritas Nasional	Indeks	75,00	79,81	80,36	81,44	81,45	83,07	83,07
29	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,07	4,09	4,10	4,11	4,13	4,20	4,22
30	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	6	5	5	4	4	3	3
31	Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,92	2,97	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	27,29	31,67	36,05	40,44	40,82	49,20	54,16
33	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	22,69	22,97	23,23	23,46	23,67	23,86	24,04
34	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,85	3,00	3,18	3,36	3,54	3,72	3,90
35	*Return on Aset* (ROA) BUMD	Persen	3,83	4,08	4,09	4,22	4,35	4,48	4,59
36	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	23	27	27	28	28	30	40
37	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,07	4,77	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	66,46	66,96	67,46	67,96	68,46	68,96	69,46
39	Persentase Desa Mandiri	Persen	NA	35,41	38,31	41,20	44,10	46,99	49,89
40	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	73,48	74,36	75,94	78,37	80,68	82,52	84,36
41	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	60,67	79,78	82,14	84,60	86,90	89,21	91,51
42	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	69,80	74,86	79,92	84,98	90,04	95,11	96,01

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
43	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89,41	89,52	89,63	89,74	89,85	89,96	90,07
44	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,36	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
45	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,53	1,60	1,61	1,61	1,62	1,62	1,63
46	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,24	1,44	1,45	1,45	1,46	1,46	1,47
47	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)	Persen	18,50	19,03	19,16	19,28	19,41	19,53	19,66
48	Disparitas Harga	Persen	-9,77	±10	±10	±10	±10	±10	±10
49	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	1,18	3,00	3,14	3,23	3,45	3,53	3,64
50	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,55	1,83	1,87	1,89	1,93	2,01	2,04
51	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,76	20,80	20,85	20,89	20,94	20,98	21,02
52	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	37,36	41,19	44,95	47,27	49,72	52,29	54,29
53	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	Persen	4,34	8,03	11,73	19,13	26,52	33,91	41,30
54	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,21	81,79	81,85	81,92	81,98	82,02	82,94

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
55	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Persen	9,20	9,15	8,92	8,35	7,95	7,57	7,55
56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
57	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	3,67	5,93	11,95	17,97	23,98	29,99	30,00
58	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	53,27	55,81	56,83	57,84	58,86	59,87	60,89
59	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	121,38	118,42-116,96	117,19-115,12	115,96-113,29	114,73-111,45	113,50-109,60	112,27-107,77
60	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	16,27	17,00	21,50	26,00	30,50	34,99	35,00
61	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	57,00	58,00	58,10	58,39	59,55	61,00	61,50

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman, dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kebumen lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu, dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kebumen serta kerja sama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bapperida.

5.1 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya

dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kebumen maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
3. RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bapperida sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan seperti:

1. Terjadi **perubahan mendasar** yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. Terjadi **bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial**, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. Adanya **perubahan kebijakan nasional atau provinsi** yang berdampak

langsung terhadap arah pembangunan daerah;

4. **Perubahan struktur organisasi perangkat daerah** yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. Hasil **pengendalian dan evaluasi** menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3 Pengarusutamaan Pembangunan

Pengarusutamaan ini menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah terintegrasi dengan agenda nasional dan global. Lima pengarusutamaan pembangunan yang dimaksud meliputi:

1. **Gender dan inklusi sosial**, untuk mendorong kesetaraan dan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam proses pembangunan.
2. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**, sebagai panduan pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
3. **Transformasi digital**, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan daya saing daerah di era teknologi.
4. **Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,** untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, adaptif, serta mampu mengurangi risiko perubahan iklim.
5. **Pengentasan kemiskinan,** sebagai upaya prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Pengarusutamaan ini diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program tidak hanya berdampak pada pencapaian target RPJMD, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional dan global.

5.4 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Kebumen dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD

ditetapkan, maka RPJMD dapat diubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Bapperida Kabupaten Kebumen melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bapperida Kab.paten Kebumen serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI KEBUMEN

ttd.

LILIS NURYANI

KEBUMEN BERDAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH